

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN WAJIB

1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1.1 DINAS PENDIDIKAN

a. Tujuan

- Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- Meningkatkan kompetensi dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015- 2016

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
1.	Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)	97,23	97,28	0.05
	1) Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)	97,23	97,28	0.05
2.	Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan pelayanan pendidikan Dasar yang berkualitas	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (APM DIKDAS)	94,76	95,07	0.33
	1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (APM DIKDAS)	94,76	95,07	0.33
3.	Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah (APK DIKMEN)	79,14	81,42	2.88
	1) Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah (APK DIKMEN)	79,14	81,42	2.88

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Nonformal	Angka Melek Huruf 15 - 59 th (AMH)	96,06	*96,06	0
	1) Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf 15 - 59 th (AMH)	96,06	96,06	0
5	Meningkatnya jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi	Presentase pendidik berkualifikasi minimal D4/S1	88,50	95,43	7,83
	1) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Presentase pendidik berkualifikasi minimal D4/S1	88,50	95,43	7,83
6	Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan pelayanan Pendidikan Tinggi	Terjalannya kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga penyelenggaraan Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun	28	28	0
	1) Program Pendidikan Tinggi	Terjalannya kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga penyelenggaraan Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun	28	28	0
7	Meningkatnya ketersediaan pelayanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus berkualitas di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)	38	38	0
	1) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)	38	38	0

*Keterangan: Data AMH sementara dari BPS

Sasaran 1 : yaitu eningkatkan ketersediaan, pemerataan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

➤ Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)

Selama dua tahun terakhir jumlah peserta didik pada jenjang PAUD yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan Paud Sejenis (SPS) turun dari 2.376.299

orang pada tahun 2015 menjadi 2.302.122 orang pada tahun 2016. Dan penurunan jumlah peserta didik tersebut berbanding lurus dengan jumlah penduduk usia 3-6 tahun. Jumlah penduduk usia dini yaitu usia 3 - 6 tahun di Provinsi Jawa Timur menunjukkan penurunan dari 2.444.069 orang pada 2015 menjadi 2.366.471 orang pada tahun 2016, seperti rincian tabel berikut:

Tabel 4.1
Perkembangan pendidikan pada jenjang PAUD
Tahun 2015- 2016

No.	Komponen	Satuan	2015	2016
1	Pend Usia 3-6 tahun	Orang	2.444.069	2.366.471
2	Siswa			
	- TK, RA/BA	Orang	1.419.256	1.419.402
	- TPA	Orang	20.189	8.287
	- KB	Orang	525.756	433.261
	- SPS	Orang	411.098	441.172
3	Guru			
	- TK, RA/BA	Orang	75.941	106.054
	- TPA	Orang	3.463	3.463
	- KB	Orang	41.859	41.859
	- SPS	Orang	40.218	40.218
4	Sekolah			
	- TK, RA/BA	Lembaga	20.908	28.484
	- TPA	Lembaga	737	737
	- KB	Lembaga	13.479	13.479
	- SPS	Lembaga	12.227	12.227

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2014 /2015–2015/2016 Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Meskipun mengalami penurunan pada jumlah penduduk usia 3-6 tahun dan jumlah siswa PAUD, akan tetapi Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) mengalami peningkatan dari 97.23% pada tahun 2015 menjadi 97,28% pada tahun 2016. Pencapaian APK PAUD pada tahun 2016 yang menggembirakan ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia 3 – 6 tahun yang terlayani oleh PAUD melalui jenjang formal (TK) maupun nonformal (KB, TPA, SPS). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Jawa Timur berhasil meningkatkan perluasan akses bagi anak usia 3-6 tahun yang memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan sekolah dasar melalui intensifikasi program PAUD.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan agar semua anak usia dini, laki laki maupun perempuan, terutama yang berasal dari keluarga miskin, memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangan atau tingkat usia mereka, sebagai persiapan mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Program ini dititikberatkan pada peningkatan akses dan pelayanan pendidikan melalui jalur formal, seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat; juga jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; serta informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Sasaran 2 : Yaitu Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan pelayanan pendidikan Dasar yang berkualitas, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

- Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2015 sebesar 94.76% dan pada tahun 2016 sebesar 95.07%.

Selama dua tahun terakhir, jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun di Jawa Timur menurun dari tahun 2015 sebanyak 3.722.820 orang menjadi 3.641.049 orang pada tahun 2016. Begitu pula dengan jumlah siswa SD/MI yang menurun dari 4.158.426 orang pada tahun 2015 menjadi 4.071.448 orang pada tahun 2016. Adapun jumlah siswa SD/MI usia 7 – 12 tahun pada tahun 2015 yang semula 3.632.103 menurun menjadi 3.560.149 pada tahun 2016.

Sebaliknya, kenaikan terjadi pada jumlah lulusan SD/MI yang semula sebanyak 634.646 pada tahun 2015 menjadi 640.284 orang pada tahun 2016. Jumlah guru SD/MI juga meningkat menjadi 318.657 orang pada tahun 2016 yang semula pada tahun 2015 sebesar 318.417 orang. Kenaikan juga terjadi pada sarana prasarana jenjang SD/MI yang meliputi jumlah lembaga sekolah yang berjumlah 26.706 pada tahun 2015 menjadi 26.902 pada tahun 2016 dan ruang kelas SD/MI yang semula 225.965 pada tahun 2015 menjadi 226.156 pada tahun 2016, sebagaimana dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Perkembangan pendidikan pada jenjang SD/MI
Tahun 2015 – 2016

No.	Komponen	Satuan	2015	2016
1	Pend Usia 7-12 tahun	Orang	3.722.820	3.641.049
2	Siswa	Orang	4.158.426	4.071.448
3	Siswa Usia 7-12 tahun	Orang	3.632.103	3.560.149
4	Lulusan	Orang	634.646	640.284
5	Guru	Orang	318.417	318.657
6	Sekolah	Lembaga	26.706	26.902
7	Ruang Kelas	R. Kelas	225.965	226.156

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2014/2015 - 2015/2016 Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Adapun jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun di Jawa Timur menurun dari tahun 2015 sebanyak 1.876.530 orang menjadi 1.833.464 orang pada tahun 2016. Begitu pula dengan jumlah siswa SMP/MTs yang menurun dari 1.863.326 orang pada tahun 2015 menjadi 1.826.041 orang pada tahun 2016. Adapun jumlah siswa SMP/MTs usia 13 - 15 tahun pada tahun 2015 yang semula 1.596.613 menurun menjadi 1.558.575 pada tahun 2016.

Sebaliknya, kenaikan terjadi pada jumlah lulusan SMP/MTs pada tahun 2015 sebanyak 676.295 menjadi 766.425 orang pada tahun 2016. Jumlah guru SMP/MTs juga meningkat menjadi 181.220 orang pada tahun 2016 yang semula pada tahun 2015 sebesar 178.527 orang. Kenaikan juga terjadi pada sarana prasarana jenjang SMP/MTs yang meliputi jumlah lembaga sekolah yang semula sebanyak 7.755 pada tahun 2015 menjadi 8.285 pada tahun 2016 dan ruang kelas SMP/MTs yang semula sebanyak 75.681 pada tahun 2015 menjadi 226.771 pada tahun 2016, seperti rincian tabel berikut:

Tabel 4.3
Perkembangan pendidikan pada jenjang SMP/MTs
Tahun 2015 – 2016

No.	Komponen	Satuan	2015	2016
1	Pend Usia 13 - 15 tahun	Orang	1.876.530	1.833.464
2	Siswa	Orang	1.863.326	1.828.041
3	Siswa Usia 7-12 tahun	Orang	1.596.613	1.558.575

No.	Komponen	Satuan	2015	2016
4	Lulusan	Orang	676.295	766.425
5	Guru	Orang	178.527	181.220
6	Sekolah	Lembaga	7.755	8.285
7	Ruang Kelas	R. Kelas	75.681	226.711

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2014/2015 - 2015/2016 Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Sementara itu, daya tampung siswa per kelas jenjang SD/MI pada tahun 2016 adalah 25 orang, dari semula 24 siswa per kelas pada tahun 2015. Adapun daya tampung siswa per kelas jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 adalah 27 orang, dari semula 30 siswa per kelas pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa daya tampung siswa per kelas sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Oleh karena itu, diharapkan kondisi tersebut dapat mengakibatkan proses belajar mengajar di kelas menjadi lebih kondusif.

Pada tahun 2016, partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anak usia 7 - 12 tahun ke jenjang SD/MI dan anak usia 13 - 15 tahun ke jenjang SMP/MTs cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (APM DIKDAS) yang mencapai 95.07% dan menunjukkan peningkatan dari 94.76% pada tahun 2015. Data tersebut menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Jawa Timur sangat efektif dan signifikan terhadap tingginya APM DIKDAS yang juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar bagi masa depan anaknya. Diharapkan pemerintah Jawa Timur tetap mengupayakan keberlanjutan program Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs disertai dengan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat dalam rangka menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program demi penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Peningkatan APM DIKDAS di Jawa Timur didukung oleh Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup SD termasuk MI dan Paket A serta SMP, MTs dan Paket B. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu sarana prasarana sebagai tempat pembelajaran yang kondusif bagi siswa dan guru. Program ini dimaksudkan untuk menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar SMP/MTs, termasuk Paket B. Program ini juga dititikberatkan untuk meningkatkan angka lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/Paket B, disertai upaya menurunkan angka putus sekolah dan mengulang kelas di kalangan peserta didik SMP/MTs/Paket B, sehingga seluruh penduduk usia 13-15 tahun dapat menyelesaikan, setidaknya, pendidikan pada jenjang menengah pertama.

Sasaran 3 : Yaitu meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Menengah, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

- Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2015 sebesar 79.14% dan pada tahun 2016 sebesar 81.42%.

Pada kurun waktu tahun 2015 - 2016, terjadi penurunan pada jumlah penduduk usia 16-18 tahun yakni sebesar 1.854.829 pada tahun 2016 dari semula 1.875.033 pada tahun 2015.

Di sisi lain, peningkatan terjadi pada jumlah siswa, yakni dari 1.429.843 orang pada tahun 2015 menjadi 1.477.622 orang pada tahun 2016. Jumlah lulusan SMA/SMK/MA juga meningkat dari 459.292 orang pada tahun 2015 menjadi 464.880 orang pada tahun 2016. Sementara itu, jumlah guru SMA/SMK/MA yang pada tahun 2015 sebanyak 155.830 orang, pada 2016 menjadi 159.419 orang. Data tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Perkembangan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA
Tahun 2015 – 2016

No.	Komponen	Satuan	2015	2016
1	Pend Usia 16 - 18 tahun	Orang	1.875.033	1.854.829
2	Siswa	Orang	1.429.843	1.477.622
3	Lulusan	Orang	459.292	464.880
4	Guru	Orang	155.830	159.419
5	Sekolah	Lembaga	4.771	5.059
6	Ruang Kelas	R. Kelas	40.453	46.842

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2014/2015 - 2015/2016 Dinas Pendidikan Jawa Timur.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan juga terjadi pada jumlah sekolah dan jumlah ruang kelas secara keseluruhan. Jumlah sekolah 4.771 pada tahun 2015 bertambah pada tahun 2016 menjadi 5.059 lembaga. Jumlah ruang kelas pada tahun 2015 sebanyak 40.453 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 46.842 ruang kelas. Hal ini disebabkan adanya program pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru serta rehabilitasi ruang kelas untuk memperluas daya tampung lembaga jenjang pendidikan menengah sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Selain itu, program pembangunan ini juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Dampaknya, peningkatan terjadi pada APK Pendidikan Menengah yang menunjukkan bahwa Program Pendidikan Menengah menunjukkan keberhasilan.

Program Pendidikan Menengah bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki – laki dan perempuan melalui jalur formal maupun nonformal, yang mencakup SMA, SMK, MA dan Paket C serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan pendidikan non formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk dunia kerja. Selain itu, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan mutu sarana prasarana sebagai tempat pembelajaran yang kondusif bagi siswa dan

guru. Sasaran program ini adalah lulusan sekolah menengah pertama yang meningkat secara signifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun.

Indikator keberhasilan program ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2016 APK sebesar 81,42%, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya sebesar 79,14%. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak orang tua yang memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anak – anak mereka yang berusia 16 – 18 tahun karena memahami bahwa manfaat sekolah lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan. Di samping itu, patut diapresiasi pula upaya Pemerintah Jawa Timur untuk mengupayakan keberlanjutan program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) pada jenjang SMA serta SMK disertai dengan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat dalam rangka menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyadari betapa pentingnya peranan pendidikan kejuruan dalam pembangunan daerah khususnya dalam rangka mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja terampil dan memperhatikan kemampuan serta kondisi ekonomi masyarakat, pengembangan pendidikan di Jawa Timur harus diimbangi dengan SMK yang berbasis keunggulan lokal. Karena itu, Provinsi Jawa Timur telah menetapkan bahwa salah satu dari tolok ukur utama keberhasilan pembangunan pendidikan di Jawa Timur adalah meningkatnya rasio jumlah siswa SMK dibanding siswa SMA. Upaya peningkatan rasio tersebut didukung dengan berbagai upaya-upaya inovatif (penyelenggaraan SMK Mini di Pondok Pesantren, penyelenggaraan kelas wirausaha, praktek industri luar negeri dsb). Jumlah SMK juga harus ditingkatkan. Namun demikian, dengan pertimbangan bahwa pendirian dan pembiayaan SMK lebih mahal daripada SMA, pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber dana untuk menopang SMK. Hal itu membutuhkan komitmen para Kepala Daerah dalam mengalokasikan sumber dana.

Peningkatan program pembangunan dan pembinaan SMK yang telah dilaksanakan di Jawa Timur akan terus dikembangkan dan lebih diintensifkan. Program peningkatan pembinaan SMK akan dilaksanakan secara sinergi dalam arti

bahwa program peningkatan rasio siswa SMK: SMA tidak hanya diatasi dengan penyediaan tempat belajar tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen, kualitas pembelajaran, pemenuhan kebutuhan guru, peralatan dan juga pembangunan citra atau pencitraan SMK yang mampu menghasilkan tamatan yang terampil, cerdas dan kompetitif.

Sasaran 4 : yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Nonformal, ditetapkan 1

Indikator Kinerja, yaitu:

- Angka Melek Huruf 15-59 th (AMH) pada tahun 2015 sebesar 96.06% dan pada tahun 2016 sebesar 96.06%.

Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional diselenggarakan untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara Latin dan Angka, Buta Bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar). Program Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional berkontribusi pada keberhasilan Jawa Timur dimana Angka Melek Huruf pada tahun 2016 sebesar 96.06% (data sementara dari BPS).Capaian tersebut didukung oleh Program Pendidikan Non Formal.

Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik laki – laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.Selain melalui jalur pendidikan sekolah, pelayanan pendidikan diselenggarakan pula melalui jalur pendidikan non formal dan informal.Penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan keterampilan berwiraswasta/kewirausahaan sebagai bekal dalam bekerja dan berusaha.

Sasaran program ini adalah penduduk buta huruf untuk mengikuti pendidikan keaksaraan serta lapisan masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan secara lebih luas dan bervariasi. Salah satunya adalah melalui Kejar Paket A, B, dan C.

Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C Setara SMA yangbertujuan untuk menampung siswa putus sekolah pada jenjang SD, SMP dan

SMA untuk melanjutkan pendidikan sehingga dapat menyelesaikan jenjang tersebut.

Tabel 4.5
Perkembangan Pendidikan Kemasyarakatan
Tahun 2015-2016

No.	Komponen	2015	2016
1	Kejar Paket A (Setara SD)		
	- Kelompok Belajar	378	412
	- Warga Belajar	5.821	6.339
2	Kejar Paket B (Setara SMP)		
	- Kelompok Belajar	825	1.001
	- Warga Belajar	19.316	23.436
3	Kejar Paket C (Setara SMA)		
	- Kelompok Belajar	779	862
	- Warga Belajar	27.895	30.875

Sumber : Data Pokok Pendidikan 2014/2015 – 2015/2016 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada semua jumlah kelompok belajar dan warga belajar di setiap paket. Pada tahun 2015, untuk Kejar Paket A (Setara SD), Kelompok Belajarnya berjumlah 378 dan Warga Belajar sebanyak 5.821 orang. Jumlah ini meningkat pada tahun 2016, yakni Kelompok Belajar berjumlah 412 dan Warga Belajar sebanyak 6.339 orang. Peningkatan juga terjadi di Kejar Paket B (Setara SMP). Jumlah Kelompok Belajar sebanyak 825 dan Warga Belajar sebanyak 19.316 orang pada tahun 2015 meningkat di tahun 2016, yakni Kelompok Belajar sebanyak 1.001 dan Warga Belajar sebanyak 23.436 orang.

Demikian pula dengan Kejar Paket C (Setara SMA) dimana Kelompok belajar mencapai 779 dan Warga Belajar sebanyak 27.895 di tahun 2015, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat hingga 862 untuk Kelompok Belajar dan 30.875 untuk warga Belajar.

Meningkatnya partisipasi masyarakat pada program pemberantasan buta huruf melalui Kejar Paket A, B, dan C berdampak pada menurunnya jumlah warga Jawa Timur yang buta aksara. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2016, bahwa jumlah penduduk buta huruf di Jawa Timur yang berusia antara 15 sampai dengan 59 tahun sebanyak 359.604 orang. Jumlah ini lebih kecil dari tahun 2015 dimana penduduk buta huruf di Jawa Timur yang berusia antara 15

sampai dengan 59 tahun masih sebanyak 462.154 orang. Tentunya bukan jumlah yang kecil untuk ukuran sebuah wilayah yang hampir tidak terkendala sarana transportasi dan komunikasi seperti Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, menjadi pemikiran dan tanggung jawab kita untuk bersama – sama bekerja keras dan berusaha agar target penuntasan penduduk buta huruf di Jawa Timur pada dapat tercapai.

Sasaran 5 : Meningkatnya jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi, ditetapkan 1

Indikator Kinerja, yaitu:

- Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1 pada tahun 2015 sebanyak 88.50% dan pada tahun 2016 sebanyak 95.43%.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Jawa Timur juga terlihat dari semakin banyaknya guru yang saat ini telah memenuhi standar kualifikasi minimal S1. Perkembangan selama 2 (dua) tahun terakhir meningkat sebagaimana tersaji dalam tabel. Pada tahun 2015, jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi minimal D4/S1 sebesar 609.720guru atau 88,50% dan meningkat menjadi 622.604guru atau 95.43% pada tahun 2016 dari jumlah keseluruhan 652.452guru di Jawa Timur. Untuk mengetahui lebih rinci tentang jumlah dan kualifikasi guru menurut ijazah di masing – masing jenjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Perkembangan Jumlah dan Kualifikasi Guru Menurut Ijazah

No.	LEMBAGA	2014/2015			2015/2016		
		≤ D3	≥ D4/S1	JML	≤ D3	≥ D4/S1	JML
1	SD NEGERI	33.696	194.163	227.859	18.108	197.571	215.679
2	SD SWASTA	3.471	20.394	23.865	729	21.170	21.899
3	MI NEGERI	265	3.690	3.955	141	3.733	3.874
4	MI SWASTA	23.360	66.084	89.444	5.033	67.727	72.760
5	SMP NEGERI	1.209	61.777	62.986	931	61.618	62.549
6	SMP SWASTA	3.173	45.380	48.553	903	46.702	47.605
7	MTS NEGERI	113	10.016	10.129	71	9.812	9.883
8	MTS SWASTA	8.380	53.192	61.572	1.705	55.369	57.074
9	SMA NEGERI	233	21.250	21.483	226	23.167	23.393
10	SMA SWASTA	772	20.127	20.899	314	21.638	21.952
11	SMK NEGERI	229	30.114	30.343	171	30.209	30.380
12	SMK SWASTA	1.285	42.137	43.422	746	42.220	42.966
13	MA NEGRI	209	5.919	6.128	121	5.969	6.090

No.	LEMBAGA	2014/2015			2015/2016		
		≤ D3	≥ D4/S1	JML	≤ D3	≥ D4/S1	JML
14	MA SWASTA	2.814	35.477	38.291	649	35.699	36.348
	JUMLAH	79.209	609.720	688.929	29.848	622.604	652.452
	%	11,50%	88,50%		4,57%	95,43%	

Sumber : Data Pokok dan Profil Pendidikan 2014/2015 – 2015/2016 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Capaian di atas didukung oleh program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik baik laki – laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri dan swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang berakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, menilai hasil pembelajaran dan melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta mempunyai komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu, program ini juga menseleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi untuk mengikuti kejuaraan di tingkat nasional. Adapun sasaran program ini adalah tenaga pendidik (guru/kepala sekolah) dan tenaga kependidikan di seluruh Jawa Timur.

Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan diwujudkan dengan peningkatan kualifikasi akademik guru yang belum S1 atau D4 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen melalui pemberian beasiswa S1 (770 guru setiap tahun) dan S2 (182 guru setiap tahun) bekerja sama dengan Filipina, Thailand, dan Cina.

Sasaran 6 : yaitu meningkatnya ketersediaan dan pemerataan pelayanan Pendidikan Tinggi, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

- Terjalannya kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga penyelenggaraan Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun pada tahun 2015 sebanyak 28 Kab/kota dan pada tahun 2016 sebanyak 28 Kab/kota.

Sebagai tindak lanjut Rintisan Wajib Belajar 15 Tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjalin kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga penyelenggaraan Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun di 28 kabupaten/kota.

Capaian di atas didukung oleh program Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi baik untuk penduduk laki – laki maupun perempuan yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, institut atau universitas yang bermutu tinggi dan relevan terhadap kebutuhan pasar kerja dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni sehingga dapat kontribusi secara optimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sasaran program ini adalah siswa lulusan jenjang pendidikan menengah agar dapat meningkatkan kualifikasi untuk mempersiapkan diri pada persaingan global.

Sasaran 7 : Yaitu meningkatnya ketersediaan pelayanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus berkualitas di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

- Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi) Kabupaten/Kota pada tahun 2015 sebanyak 38 kab/kota dan pada tahun 2016 sebanyak 38 kab/kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara pendidikan Inklusi.

Jawa Timur adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai Pergub tentang pendidikan inklusif. Sehingga bisa dikatakan Jawa Timur adalah provinsi yang paling peduli dengan pendidikan inklusif. Pelaksanaan Pergub No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur pada tahun 2016 telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Pada tahun 2016 terdapat 2.010 lembaga yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan jumlah siswa

sebanyak 10.205 siswa berkebutuhan khusus. Untuk mengetahui lebih rinci tentang jumlah lembaga dan siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan inklusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Perkembangan Pendidikan Inklusi
Tahun 2015-2016

No.	Komponen	2015	2016
1	Sekolah SD Inklusi		
	- Lembaga	740	1.750
	- Siswa	6.367	8.750
2	Sekolah SMP Inklusi		
	- Lembaga	118	175
	- Siswa	891	1.225
3	Sekolah SMA Inklusi		
	- Lembaga	33	55
	- Siswa	45	110
4	Sekolah SMK Inklusi		
	- Lembaga	20	30
	- Siswa	76	120

*Sumber : Data Pokok Pendidikan 2014/2015 – 2015/2016 Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur*

c. Program

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan anggaran Rp 8.928.683.900,- realisasi sebesar Rp. 8.507.387.595,- atau 95,28% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahundengan anggaran Rp. 27.974.356.500,- realisasi sebesar Rp. 24.774.384.331,- atau 88,56% untuk mendukung 8 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Pendidikan Menengah dengan anggaran Rp 51.278.201.000,- realisasi sebesar Rp 49.318.696.488,- atau 96,18% untuk mendukung 18 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

4. Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran Rp 8.256.860.100,- realisasi sebesar Rp 7.449.550.630,- atau 90,22% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan dengan anggaran Rp 66.110.899.700,- realisasi sebesar Rp 65.279.508.567,- atau 98,74% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
6. Program Pendidikan Tinggi dengan anggaran Rp 2.281.603.000,- realisasi sebesar Rp 2.223.238.500,- atau 97,44% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
7. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) dengan anggaran Rp. 2.659.477.000,- realisasi sebesar Rp 2.372.603.400,- atau 89,21% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan solusi

Permasalahan:

1) Program PAUD:

- Kurangnya fasilitas belajar yang ada di lembaga PAUD.
- Program pembinaan PAUD yang dilakukan oleh provinsi tidak sepenuhnya selaras dengan program pembinaan di Kabupaten/Kota.
- Terbatasnya waktu dan seringnya pergantian pejabat/petugas pelaksanaan di daerah, menimbulkan kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi dengan daerah, sehingga informasi kegiatan kadang-kadang dirasakan terlalu mendesak bagi daerah-daerah tertentu.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun:

- Program pembinaan SD dan SMP yang dilakukan oleh provinsi tidak sepenuhnya selaras dengan program pembinaan di Kabupaten/Kota.
- Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Multimedia pada sekolah-sekolah.
- Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah
- Paradigma pendidikan yang tidak sama antar daerah, berimbas pada heterogenitas pengambilan kebijakan dan pengalokasian anggaran pendidikan
- Perbedaan struktur organisasi yang ada di kabupaten dan kota dengan provinsi sehingga mempersulit koordinasi serta penyusunan program prioritas peningkatan mutu pendidikan.

3) Program Pendidikan Menengah:

- Program pembinaan SMA dan SMK yang dilakukan oleh provinsi tidak sepenuhnya selaras dengan program pembinaan di Kabupaten/Kota.
- Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah
- Kurangnya kegiatan Try Out / Uji tanding siswa SMANOR ke luar provinsi dan luar negeri.
- Budaya pemanfaatan TIK untuk kepentingan pembelajaran belum dipahami secara sadar dan optimal oleh guru, siswa dan masyarakat
- Pemanfaatan media audio dan video pembelajaran sebagai bahan ajar dengan system pendidikan jarak jauh, melalui Radio Streaming (Rappendik on Streaming) belum dimanfaatkan oleh guru dan siswa.
- Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan SMK. Pada umumnya SMK berada di perkotaan atau di daerah yang aksesnya memadai sementara animo/peminat ke SMK terdiri dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan

berada di pedesaan. Dengan kondisi tersebut maka masyarakat yang kurang mampu dan berada di pedesaan mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan di SMK

- Masih belum idealnya kondisi SMK yang ada sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan SMK masih belum mampu menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja/industri dan masyarakat.

4) Program Pendidikan Non Formal

- Koordinasi antar lintas sektoral terkadang kurang berjalan dengan baik.
- Kebijakan yang ada di Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkadang tidak sinkron.
- Tidak semua warga buta aksara terdata oleh petugas instansi setempat.
- Kurangnya tenaga tutor.

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- Belum semua Guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1)
- Sebaran Guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan
- Tingkat Kesejahteraan Guru belum memadai
- Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (kepala sekolah, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan perundang-undangan.
- Masih banyak tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

6) Program Pendidikan Tinggi

- Data lembaga perguruan tinggi kurang akurat dikarenakan kurang koordinasi antara kopertis dan perguruan tinggi negeri dengan Dinas Pendidikan.

7) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)

- Belum semua guru dari sekolah layanan inklusif mendapat kesempatan mengikuti pelatihan penanganan ABK.

- Belum semua sarana prasarana SLB/SDLB/SMPLB/SMALB memenuhi standar nasional.
- Sekolah Luar Biasa (SLB) masih tersebar di ibu kota Kecamatan, sehingga ABK khususnya dari masyarakat miskin di pedesaan terpencil tidak mendapatkan akses untuk bersekolah
- Di beberapa lembaga SLB masih kekurangan Guru, khususnya guru mata pelajaran untuk jenjang SMPLB dan SMALB
- Data penduduk penyandang ketunaan di Jawa Timur belum dapat diketahui secara detail dikarenakan belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama informasi dengan pihak – pihak yang berwenang terutama di daerah.

Solusi :

1) Program PAUD:

- Pemerintah dapat mendukung dan bekerjasama dengan pihak swasta baik tingkat pusat maupun daerah untuk membangun pendidikan anak usia dini berupa bantuan dana, supervisi, pembinaan guru dan sosialisasi acuan pembelajaran yang lebih intensif
- Menambah fasilitas belajar yang ada di lembaga PAUD.
- Perlu dilakukan perencanaan kegiatan yang matang agar komunikasi dan koordinasi dengan daerah dapat berjalan dengan baik.
- Perlu sinkronisasi antara program/kegiatan pembinaan PAUD antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun:

- Perlu sinkronisasi antara program/kegiatan pembinaan SD dan SMP antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota secara berkesinambungan agar bisa mendapatkan berbagai informasi yang ada di Kabupaten/Kota serta mempermudah penyusunan program prioritas peningkatan mutu pendidikan.

- Perlu koordinasi dalam menyusun RPJMD dan Renstra sehingga ada keselarasan program antara Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.
- Meningkatkan kompetensi SDM agar semakin menguasai TIK dan multimedia.
- Menyelenggarakan program pembelajaran secara praktis, efisien dan murah serta terjangkau kepada guru-guru SD maupun SMP dengan sistem pembelajaran PJJ/BJJ (Pendidikan jarak jauh/ Belajar jarak jauh)
- Perbaiki fisik dan infrastruktur SD dan SMP beserta penambahan sarana penunjang pembelajaran (Perpustakaan, laboratorium Bahasa dan Komputer/Multimedia, Ruang Usaha Kesehatan Sekolah, ruang Ekspresi/kreasi siswa dan lain-lain dalam rangka peningkatan mutu proses dan Output pembelajaran
- Meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah (SD dan SMP) dalam upaya penguatan akuntabilitas dan pencitraan public terhadap penyelenggaraan pendidikan
- Menyelenggarakan berbagai kompetisi bagi siswa dan Guru dalam upaya penguatan kompetensi penguasaan substansi pembelajaran (intra dan Ekstrakurikuler) di SD dan SMP guna mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter, berbudaya, dan berdaya saing.

3) Program Pendidikan Menengah:

- Perlu koordinasi dalam menyusun RPJMD dan Renstra sehingga ada keselarasan program antara Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.
- Perlu menambah sarana penunjang di sekolah-sekolah.
- Menunjang pengayaan pembelajaran melalui operasional dan pemanfaatan ICT dan E-Learning
- Menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk pembelajaran kepada guru secara berkesinambungan (TOT) dan terkoordinasi mulai dari Pusat, provinsi maupun Kab./Kota

- Menyelenggarakan program pembelajaran secara praktis, efisien dan murah serta terjangkau kepada guru-guru SMA/MA, maupun SMK dengan sistem pembelajaran PJJ/BJJ (Pendidikan jarak jauh/ Belajar jarak jauh)
 - Menambah kegiatan try out/uji tanding ke luar provinsi dan luar negeri.
 - Meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pengadaan bahan praktik, bahan ajar, dan alat bantu pembelajaran;
 - Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dengan memberikan BKSM sehingga mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan.
 - Memberikan beasiswa kepada siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
 - Membantu sekolah dalam bentuk pemberian hibah sebagai upaya pemenuhan/pencapaian standar nasional pendidikan, antara lain standar proses, standar isi, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan
 - Meningkatkan rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibanding Sekolah Menengah Umum (SMU) hingga mencapai perbandingan 70%:30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah.
 - Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pasar kerja lokal dan global, didukung kerjasama dengan dunia usaha dan industri
 - Meningkatkan daya tampung SMK dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan
 - Mengusahakan pemenuhan kebutuhan sekolah menengah kejuruan sesuai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan SMK Berkeunggulan Lokal.
 - Memfasilitasi terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi tamatan SMK.
- 4) Program Pendidikan Non Formal
- Koordinasi dengan lintas Sektoral lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya.

- Mengadakan Sosialisasi, Sinkronisasi dan Rapat Program PNFI akan lebih diinsentifkan di tahun berikutnya, sehingga antara Provinsi dengan Kab/Kota ada sinkronisasi dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan.
- Pendataan dilakukan per Kepala Keluarga mulai dari desa setempat sehingga datanya dapat terinci keseluruhan.
- Merekrut lebih banyak tenaga kependidikan (tutor) yang memenuhi kualifikasi.

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- Memberikan beasiswa kepada guru-guru yang belum berkualifikasi S1 untuk menempuh pendidikan sampai berkualifikasi S1
- Memberikan bantuan/ tunjangan/ insentif kepada guru-guru non PNS jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK sehingga kesejahteraan mereka meningkat.
- Melaksanakan diklat kepada pendidik dan tenaga kependidikan mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK sehingga kompetensi mereka menjadi meningkat.
- Mengupayakan keberlangsungan program sertifikasi guru.

6) Program Pendidikan Tinggi

- Meningkatkan koordinasi dengan kopertis wilayah VII dan perguruan tinggi negeri Jawa Timur.
- Meningkatkan koordinasi dengan Politeknik dan CC di Kabupaten/Kota.

7) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)

- Menambah jumlah pelatihan guru tentang penanganan ABK.
- Usulan bantuan sosial peningkatan sarana prasarana SLB dari pemerintah pusat melalui Kemendikbud.
- Upaya pengembangan jejaring informasi penduduk penyandang ketunaan antar instansi lebih ditingkatkan terutama dengan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur.

- Diupayakan dibentuk dan menyelenggarakan sekolah filial di beberapa desa yang berdekatan dengan SLB yang dibentuk dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat.
- Menyelenggarakan program pembelajaran secara praktis, efisien dan murah serta terjangkau kepada guru-guru SLB dengan sistem pembelajaran PJJ/BJJ (Pendidikan jarak jauh/ Belajar jarak jauh)
- Menindaklanjuti dan mensosialisasikan Permendiknas No. 70/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan dan desa serta Pergub Jawa Timur No. 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Jawa Timur secara merata ke semua jenjang dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan lembaga sekolah.
- Mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengangkatan Guru-guru untuk SLB.

e. Penghargaan nasional yang diterima

1. Juara Umum Tingkat Nasional
 - Lomba Budaya Mutu SD
2. Juara Tingkat Nasional
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD
 - Matematika 1 emas, 1 perak
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD
 - Bulu Tangkis Putra 1 emas
 - Renang Putra 3 emas
 - Tenis Meja Putra 1 emas
 - Catur Putri 1 perak
 - Lomba Budaya Mutu SD
 - Kategori Perpustakaan 1 emas
 - Kategori Keseluruhan 3 emas
 - Kategori Pembina 1 emas
 - Kategori Klub Olahraga 1 emas
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP
 - Matematika 1 emas

- IPA 2 emas
- IPS 1 emas
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP
 - Renang Putra 2 emas
 - Atletik 1 emas
- Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
 - Festival Musik Tradisional 1 emas
 - Desain Poster 1 perak
 - Cerita Berbahasa Inggris (story telling) 1 perak
- Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA
 - Matematika 1 emas
 - Kimia 2 emas
 - Komputer 1 emas
 - Geografi 1 emas
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP
 - Tennis meja 1 emas
- Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
 - Kriya 1 emas
- Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa PK-PLK
 - Bulu Tangkis SMPLB 1 emas
 - Kursi Roda SMPLB 1 emas
- Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa PK-PLK
 - Cipta Baca Pusi SMPLB 1 emas
- Juara Umum Apresiasi Lembaga Kursus Berprestasi tahun 2016
- Juara I Tingkat Nasional, Apresiasi Peserta Didik Kursus Bidang Tata Busana Tahun 2016
- Juara I Tingkat Nasional, Apresiasi SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Berprestasi Tahun 2016

- Juara II Tingkat Nasional, Lomba Keberaksaraan tahun 2016
- Juara I Tingkat Nasional Guru dan Tenaga kependidikan Berprestasi jenis Guru TK
- Juara I Tingkat Nasional Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi jenis SMA/SMK Inklusi
- Juara I Tingkat Nasional Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi jenis Tenaga Perpustakaan SMA
- Juara I Tingkat Nasional Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi jenis Tenaga Lab. SMA
- Juara I Tingkat Nasional Olimpiade Guru Nasional jenjang Matematika SMA/K
- Juara I Tingkat Nasional Olimpiade Guru Nasional jenjang Matematika SMP
- Juara I Tingkat Nasional Anugerah Konstitusi PKn SMP
- Juara I Cabor Atletik pada Kejurnas Remaja dan Yuniior 2016
- Juara I Cabor Atletik pada Kejurnas Antar PPLP 2016
- Juara I Cabor Atletik pada Kejuaraan Internasional Asean Schools Games 2016
- Juara I Cabor Gulat pada Kejuaraan Internasional The Gth Eeast Asion Junior & Cadet Wrestling Campionsip 2016
- Juara I Cabor Gulat pada Kejurnas Gulat Remaja
- Juara I Cabor Gulat pada Kejuaraan ANTAR PPLP / SKO/PPLPD
- Juara I Cabor Judo pada Kejuaraan Internasional Bali Open
- Juara I Cabor Judo pada Kejuaraan Kartika CUP
- Juara I Cabor Judo pada Kejurnas Antar PPLP
- Juara I Cabor Karate pada Kejurnas JKC CUP
- Juara I Cabor Karate pada Dasril Muchtar Championship
- Juara I Cabor Panjat Tebing pada Kejurnas OPEN Specta Climbing Competition
- Juara I Cabor Panjat Tebing pada Kejurnas Open Wanala Unair

- Juara I Cabor Panjat Tebing pada Kejurnas FPTI Kelompok Umur XI 2016
- Juara I Cabor Panjat Tebing pada NWCC se Jawa,Bali
- Juara I Cabor Renang pada PON XIX

2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

2.1. DINAS KESEHATAN

a. Tujuan

- Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
- Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat
- Melaksanakan upaya penanggulangan masalah gizi
- Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana
- Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat
- Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi, alkes, dan makan
- Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengembangan sumber daya kesehatan
- Optimalisasi tata kelola kesehatan untuk menunjang program kesehatan

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat	1. Persentase Desa Siaga aktif berstrata PURI	15	15,8	5,3
1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase rumah tangga sehat	50,62	52,77	4,2
	2. Persentase Posyandu Puri	67,58	70,66	4,6
	3. Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu	37,93	42,50	12
II. Meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat	1. Angka Kematian Ibu	89,60	91	1,6
	2. Angka Kematian Bayi	24	23,6	-1,7
	3. Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar	8,96	24,90	177,9

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	30	209	596,7
	2. Jumlah Puskesmas PONED yang aktif	125	113	-9,6
	3. Jumlah Puskesmas dengan pelayanan gawat darurat sesuai standar	40	97	142,5
	4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	40	29	-27,5
	5. Cakupan Peserta KB Aktif	65	69	6,2
	6. Cakupan Pelayanan Bayi	73,64	74	0,5
	7. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes	71,84	73	1,6
	8. Persentase Kasus pasung ditangani	0,70	0,60	-14,3
2. Program Upaya Kesehatan Perorangan	1. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Sesuai Standar (Rumah Sakit terakreditasi)	65	67	3,1
	2. Persentase RSUD menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai standar	50	92,72	85,4
	3. Persentase RS yang menyelenggarakan Pelayanan IGD level 1 sesuai standar	75	75	0
III. Meningkatnya Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal	1. Persentase Balita Gizi Buruk	1,8	0,80	-55,6
	2. Persentase Balita Stunting	27,10	26,10	-3,7
1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Persentase Balita Kurang Gizi	17,8	17,3	-2,8
	2. Persentase Balita Stunting	27,0	26,1	96,7
IV. Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana	1. Persentase Penanggulangan KLB Penyakit Menular Prioritas Lintas Kab/Ko kurang dari 48 jam	93	94	1,1

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
	2. Persentase skrining PTM bagi penduduk usia >15 tahun secara kumulasi	10	11	10
1. Program Pengendalian Penyakit	1. Persentase Penderita penyakit tidak menular tidak terjadi komplikasi	19,6	20,06	5,1
	2. Persentase KLB Pasca Bencana	0	0	0
	3. Persentase RFT Rate	91	88,70	-2,5
	4. Persentase ODHA dengan ARV	75,0	79	5,3
	5. Persentase penderita Malaria mendapatkan ACT	95	100	5,3
	6. Persentase penderita suspect pes yang tertangani	100	100	0
	7. Insiden rate DBD	51.1	60,54	18,5
	8. Persentase penyakit menular wabah dilakukan PE	100	100	0
	9. Persentase cakupan diare	60,46	65	7,5
	10. Persentase cakupan pneumonia	33.3	47,70	43,2
	11. Persentase penurunan KLB penyakit bersumber binatang	10	50	400
	12. Persentase keberhasilan pengobatan TB	88	75	-14,8
V. Meningkatnya akses pada lingkungan yang sehat	1. Persentase akses air minum berkualitas	82,32	83,87	1,8
	2. Persentase akses sanitasi dasar (jamban sehat)	78,01	83,08	6,5
1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sarana air minum layak/terlindung	82,32	83,87	1,9
	2. Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sanitasi dasar/jamban sehat	78,01	83,08	6,5
VI. Meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman	Meningkatnya Persentase produk sediaan farmasi, yang memenuhi syarat	65	69	6,2

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	1. Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin	95	97	2,1
	2. Persentase sediaan farmasi, yang memenuhi syarat	60	50	-16,7
VII. Terwujudnya sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal	Rasio tenaga kesehatan strategis terhadap jumlah penduduk meliputi:			
	SpOG/100.000 penduduk	341	441	22,8
	SpA/100.000 penduduk	247	409	65,6
	Dr Umum/100.000 penduduk	6.032	6.660	10,4
	Bidan/100.000 penduduk	16.652	22.113	32,8
	Perawat/100.000 penduduk	28.699	33.155	15,5
	Nutrisiionis/100.000 penduduk	1.766	1.886	6,4
1. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan	SpOG	341	441	22,8
	SpA	247	409	65,6
	Dr Umum	6.032	6.660	10,4
	Bidan	16.652	22.113	32,8
	Perawat	28.699	33.155	15,5
	Nutrisiionis	1.766	1.886	6,4
VIII. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi	Menurunnya Jumlah Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penggunaan Anggaran keuangan dan aset	85	87	2,4
1. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase termanfaatkannya dokumen kesehatan untuk bahan penentuan kebijakan	100	100	0

Berdasarkan Tabel diatas, pada tahun 2015-2016 kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : yaitu masyarakat yang mandiri dan hidup sehat

➤ Persentase Desa Siaga aktif berstrata PURI;

Persentase Desa Siaga aktif berstrata PURI pada Tahun 2015 adalah sebesar 15% dan pada tahun 2016 sebesar 15,8% mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena intensifnya kegiatan koordinasi Pokjanal Desa Siaga/Kelurahan Aktif, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota; melalui pertemuan - pertemuan rutin yang membahas permasalahan dan rencana tindak lanjutnya. Adanya Monitoring dan Evaluasi, serta Bimbingan Teknis Desa Siaga/Kelurahan Aktif, mampu meningkatkan kemampuan teknis pelaksana dan kader. Selain itu, diadakannya lomba Pelaksana Desa/kelurahan siaga aktif, sebagai bentuk penghargaan terhadap Kabupaten/kota, yang telah melakukan pembinaan dan pengembangan desa siaga aktif. Kegiatan ini memotivasi kabupaten/kota lainnya, untuk meningkatkan Desa Siaga/Kelurahan Aktif di wilayahnya. Promosi Desa Siaga/kelurahan siaga aktif di media massa mampu mendorong pergerakan masyarakat, dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi desa/kelurahan siaga

Sasaran 2 : Yaitu meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat

➤ Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2015 adalah sebesar 89,60 per 10.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 91. Faktor penyebab terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena pendarahan. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan diantaranya pendampingan dan sosialisasi kepada ibu hamil serta kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan, gerakan senam ibu hamil, dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat. Pemberian tablet penambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan diharapkan akan mengurangi angka kematian ibu.

Penanganan pada kasus kematian ibu, harus komprehensif dan bersinergi, antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan keluarga. Aspek sosial

ekonomi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, sosial budaya harus diupayakan meningkat, sehingga diharapkan akan menekan Angka Kematian Ibu (AKI).

➤ Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2015 adalah sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2016 sebesar 23,6 per 1000 kelahiran hidup, mengalami penurunan; hal ini salah satunya dikarenakan keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif antara *stakeholder* kesehatan serta hadirnya tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan

➤ Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar

Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar pada Tahun 2016 adalah sebesar 24,90%, mengalami peningkatan dibanding 2015 yang mencapai 8,96%. Hal tersebut dikarenakan upaya yang telah dilakukan oleh Puskesmas dalam memenuhi standar akreditasi dalam era SJSN (Sistem Jaminan Kesehatan Nasional). Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali.

Sasaran 3 : yaitu meningkatnya Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal

➤ Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase Balita Gizi Buruk pada Tahun 2015 adalah sebesar 1,8 dan pada tahun 2016 sebesar 0,80 mengalami penurunan. Penurunan ini menunjukkan bahwa intervensi dalam menekan kasus balita gizi buruk menunjukkan hasil yang efektif.

➤ Persentase Balita Stunting

Persentase Balita Stunting pada Tahun 2015 adalah sebesar 27,10 dan pada tahun 2016 sebesar 26,10 mengalami penurunan. Penurunan ini merupakan salah satu gambaran keberhasilan penurunan masalah kekurangan gizi dimana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu *leading sector* yang terlibat dalam penanganannya.

Masalah gizi sangat terkait dengan ketersediaan dan aksesibilitas pangan penduduk. Strategi yang dilakukan dalam menangani masalah gizi adalah (1)

Perbaikan gizi masyarakat, terutama pada ibu pra-hamil, ibu hamil, dan anak melalui peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan difokuskan pada intervensi gizi efektif pada ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi, dan anak baduta; (2) Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam melalui peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang difokuskan pada keluarga rawan pangan dan miskin; (3) Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui peningkatan pengawasan keamanan pangan yang difokuskan pada makanan jajanan yang memenuhi syarat dan produk industri rumah tangga (PIRT) tersertifikasi; (4) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peran pimpinan formal serta non formal, terutama dalam perubahan perilaku atau budaya konsumsi pangan yang difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, perilaku hidup bersih dan sehat, serta merevitalisasi posyandu; dan (5) Penguatan kelembagaan pangan dan gizi melalui penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dan kota yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi, termasuk sumber daya serta penelitian dan pengembangan.

Sasaran 4 : yaitu meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana

- Persentase Penanggulangan KLB Penyakit Menular Prioritas Lintas Kabupaten/Kota kurang dari 48 jam pada Tahun 2015 adalah sebesar 93% dan pada tahun 2016 sebesar 94% mengalami peningkatan hal dikarenakan kerjasama yang semakin baik antara semua stakeholder utamanya dalam hal upaya pencegahan melalui perbaikan faktor risiko yang menyebabkan timbulnya kerentanan dlm suatu populasi; upaya penanggulangan yang difokuskan kepada :
 - Kuman penyakit dr sumber penularan
 - Memutus mata rantai penularan
 - Memperkuat sistem pelayanan kesh
 - Memantapkan pelaksanaan sistem kewaspadaan dini KLB penyakit
 - Memantapkan keadaan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan tjd KLB

- Penyelidikan dan penanggulangan pd saat tjd KLB
- Persentase skrining PTM bagi penduduk usia >15 tahun secara kumulasi pada Tahun 2015 adalah sebesar 10% dan pada tahun 2016 sebesar mengalami peningkatan menjadi 11% hal ini dikarenakan perhatian terhadap penyakit tidak menular semakin meningkat seiring meningkatnya frekuensi kejadian penyakit di masyarakat. Di Indonesia terjadi perubahan pola penyakit, yaitu dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, yang dikenal sebagai transisi epidemiologi.

Sasaran 5 : Meningkatkan akses pada lingkungan yang sehat

- Persentase akses air minum berkualitas pada Tahun 2015 adalah sebesar 82,32 % dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 83,87%. Peningkatan ini disebabkan karena kerjasama yang terpadu dari lintas program, lintas sektor dan stakeholder kesehatan dalam menanamkan kesadaran kepada masyarakat agar mengkonsumsi air minum berkualitas, karena air juga merupakan komponen lingkungan yang berpotensi besar menjadi penyebab berbagai jenis penyakit.
- Persentase akses sanitasi dasar (jamban sehat) pada Tahun 2015 adalah sebesar 78,01 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 83,08%. Peningkatan ini terjadi sebagai hasil sinergisitas lintas program, lintas sektor juga stakeholder yang secara komprehensif melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kesehatan khususnya Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

Sasaran 6 : yaitu meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman

- Meningkatnya Persentase produk sediaan farmasi, yang memenuhi syarat pada Tahun 2015 adalah sebesar 65% dan pada tahun 2016 sebesar 69%; mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh komitmen yang tinggi dalam menunjang sediaan farmasi serta adanya kebijakan yang diatur dalam PP 72/1998; dimana dinyatakan bahwa bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan, dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak tepat serta yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Sasaran 7 : yaitu terwujudnya sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal

- Rasio tenaga kesehatan strategis terhadap jumlah penduduk.

Tenaga kesehatan strategis yang dimaksud meliputi:

- Dokter spesialis kebidanan pada tahun 2015 sebesar 341/100.000 penduduk dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 441/100.000 penduduk
- Dokter spesialis anak pada tahun 2015 sebesar 247/100.000 penduduk dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 409/100.000 penduduk
- Dokter umum pada tahun 2015 sebesar 6.032/100.000 penduduk dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 6.660/100.000 penduduk
- Bidan pada tahun 2015 sebesar 16.652/100.000 penduduk dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 22.113/100.000 penduduk
- Perawat pada tahun 2015 sebesar 28.699/100.000 penduduk dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 33.155/100.000 penduduk
- Nutrisonis pada tahun 2015 sebesar 1.766/100.000 penduduk dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 1.886/100.000 penduduk.
- Dari data tersebut diatas, rasio tenaga kesehatan strategis tahun 2016 sudah melampaui target yang diharapkan. Hal ini salah satunya disebabkan karena institusi pendidikan penghasil tenaga kesehatan strategis di Provinsi Jawa Timur mampu menghasilkan lulusan terbaiknya, sehingga rasio tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Timur bisa memenuhi target yang ditetapkan.

Sasaran 8 : yaitu mewujudkan tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi

- Menurunnya Jumlah Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penggunaan Anggaran keuangan dan aset; pada tahun 2015 jumlah temuan laporan menurun sebesar 85%; dan pada tahun 2016 jumlah temuan laporan menurun sebesar 87%. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam hal menurunnya jumlah temuan LHP; yang disebabkan kepatuhan para pengelola keuangan terhadap penatausahaan keuangan semakin meningkat

c. Program

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan anggaran Rp. 4.550.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 3.802.217.960,- atau 83,57% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri, dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp. 5.901.643.849,- Realisasi sebesar Rp. 5.100.440.805,- atau 86,42%; untuk mendukung 8 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri, dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Upaya Kesehatan Perorangan dengan anggaran Rp. 1.259.550.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.110.818.316,- atau 88,19%; untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri, dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan anggaran Rp. 2.100.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.922.216.950,- atau 91,53%; untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri, dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
5. Program Pengendalian Penyakit dengan anggaran Rp. 4.114.820.453,00,- Realisasi sebesar Rp. 3.707.966.188,- atau 90,11%; untuk mendukung 13 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri, dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan anggaran Rp. 1.080.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.066.885.241,- atau 98,79%; untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri, dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

7. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan dengan anggaran Rp. 4.755.412.967,- Realisasi sebesar Rp. 3.799.110.065,- atau 79,89%; untuk mendukung 10 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri, dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
8. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dengan anggaran Rp. 40.435.804.522,- Realisasi sebesar Rp. 35.402.984.677,- atau 87,55%; untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri, dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
9. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan anggaran Rp. 2.260.673.500,- Realisasi sebesar Rp. 1.904.296.620,- atau 84,24%; untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri, dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Angka Kematian Ibu mengalami peningkatan
- 2) Ancaman masalah kesehatan yang terjadi akibat penyakit menular dan tidak menular
- 3) Seluruh fasilitas kesehatan dasar dan rujukan harus mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan
- 4) Ancaman masalah kesehatan yang diakibatkan karena malnutrisi
- 5) Upaya pembebasan kasus jiwa yang dipasung
- 6) Penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata

Solusi:

- 1) Angka Kematian Ibu yang mengalami peningkatan diatasi dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui upaya sebagai berikut:
 - a. Kelembagaan forum Penakib di Provinsi
 - b. Pengembangan forum Penakib di Kab/Kota

- c. Pengembangan rumah tunggu lahiran
 - d. Penguatan jejaring sistem rujukan maternal dan neonatal di Kab/Kota
 - e. Surveillans kesehatan anak dan kematian ibu
 - f. Audit maternal perinatal
 - g. Penguatan keterlibatan masyarakat pada program KIA melalui P4K
 - h. Ketersediaan buku KIA, buku pintar KIA bagi Calon Pengantin
- 2) Ancaman masalah kesehatan yang terjadi akibat penyakit menular dan tidak diupayakan penanganannya sebagai berikut:

Penyakit Menular

- a. Untuk pengendalian HIV-Aids
 - Desentralisasi ARV ke Kab/kota dan implementasi layanan ARV di Puskesmas
 - Aktifasi layanan tes HIV di seluruh UPT RSU dan RSP/kusta
- b. Untuk pengendalian Tuberkulosis
 - Penyediaan logistik, penguatan keterlibatan UPT dalam program, peningkatan keterlibatan semua stakeholder, peningkatan mutu program dengan menjaga mutu Lab, penguatan jejaring lab dan pendampingan RS Sub Rujukan TB MDR
- c. Untuk pengendalian Kusta
 - Penguatan kapasitas petugas, deteksi dini melalui penemuan secara aktif berbasis keluarga melalui Gerakan Cinta Keluarga
 - Penguatan seluruh stakeholder untuk menghilangkan stigma dengan melibatkan orang yang pernah menderita kusta
 - Kegiatan inovasi untuk pencegahan dan pengobatan

Penyakit Tidak Menular

- a. Membentuk POSBINDU di masyarakat, sampai dengan saat ini sudah terbentuk 3884 posbindu
- b. Menyiapkan Puskesmas Bindu
- c. Menyiapkan RS Rujukan
- d. Bekerjasama dengan LS untuk membangun jejaring kemitraan

- 3) Seluruh fasilitas kesehatan dasar dan rujukan harus mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, upaya yang dilakukan adalah dengan memberlakukan kebijakan akreditasi terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- 4) Ancaman masalah kesehatan yang diakibatkan karena malnutrisi ditanggulangi dengan melakukan:
 - Upaya preventif dan promotif untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi dengan penyuluhan gizi, revitalisasi posyandu, pemberian suplementasi gizi dan pemberian MP Asi bagi balita gakin
 - Upaya kuratif dan rehabilitatif untuk pengobatan dan pemulihan pada balita gizi buruk meliputi penemuan aktif dan rujukan kasus gizi buruk, perawatan balita gizi buruk dan pendampingan balitas gizi buruk pasca perawatan
- 5) Upaya pembebasan kasus jiwa yang dipasung dengan melakukan:
 - Penanganan kasus pasung berbasis masyarakat; mengandalkan pelayanan rawat jalan dan dapat ditangani di semua pelayanan kesehatan terutama Puskesmas dan jaringannya dan pemberdayaan pasien pasca pasung
- 6) Penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata ditanggulagi dengan diterbitkannya Perda Provinsi Jawa Timur No 7 Tahun tentang tenaga kesehatan

e. Penghargaan Nasional Yang Diterima

- 1) Peraih penghargaan pencapaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) terbaik.
- 2) Peraih penghargaan provinsi peduli kesehatan jiwa masyarakat.
- 3) Peraih program pelayanan kefarmasian terbaik.

2.2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOETOMO

a. Tujuan

- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan mutu pendidikan /pelatihan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo.
- Meningkatkan mutu penelitian kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo.
- Meningkatkan tingkat kemandirian di RSUD Dr. Soetomo.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82%	82%	-
	Persentase nilai ideal pelayanan RS tersier yang sesuai standar :	60%	80%	-
	1. <i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR)	74.43%	80.31%	
	2. <i>Average Length of Stay</i> (ALOS)	7.76 hari	7.64%	
	3. <i>Bed Turn Over</i> (BTO)	36.45 x	34.73x	
	4. <i>Turn Over Interval</i> (TOI)	2.77 hari	2.08 hari	
	5. <i>Net Death Rate</i> (NDR)	38,9‰	24,2‰	
	Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi target	78,6%	83,2%	(4,6%)
	Persentase kesesuaian terhadap standar JCI	60,34%	65%	3%
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	82%	82%	-

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	79.87%	90%	10.13%
3. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82%	82%	-
Meningkatnya mutu pelatihan / pendidikan di Rumah Sakit	Persentase kelulusan peserta didik PPDS I yang dilatih dan lulus	100%	100%	-
	Persentase tenaga kesehatan yang difasilitasi di RSUD Dr. Soetomo untuk menjadi lebih terampil	94.93%	95.54%	0.61%
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82%	82%	-
Meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit	Prosentase penelitian uji klinik yang lulus kelaikan etik	100%	100%	-
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82%	82%	-
Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan	Cost Recovery Ratio (CRR)	102.58%	105,46%	2.88%
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD	Pemanfaatan Sarana Prasarana oleh Pelanggan	574.922 pasien	555.359 pasien	(19.563 Pasien)
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu	94%	100%	6%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
3. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	93.96%	100%	6.04%
4. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82%	82%	-

Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 kinerja RSUD Dr. Soetomo yang telah dicapai berdasarkan masing-masing Sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : yaitu meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit

➤ Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2015 adalah sebesar 82% dan pada tahun 2016 sebesar 82% (tetap). Hal tersebut karena Harapan/kebutuhan pelanggan mengenai ketepatan waktu memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat belum semuanya bisa dipenuhi karena keterbatasan personil, antrian yang panjang dan kendala kerusakan peralatan. serta belum dilakukan Kunjungan langsung ke pelanggan dalam rangka mendapatkan umpan balik pelanggan belum berjalan optimal

➤ Persentase nilai ideal pelayanan RS tersier yang sesuai standar

Persentase nilai ideal pelayanan RS tersier yang sesuai standar pada tahun 2015 adalah sebesar 100.% dan pada tahun 2016 sebesar 90% (mengalami penurunan). Nilai ideal pelayanan RS Tersier yang sesuai standard merupakan indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator-indikator tersebut bersumber dari sensus harian rawat inap Rumah Sakit.

- **Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi target**
Persentase Capaian Indikator SPM yang memenuhi target yang sesuai standar pada tahun 2015 adalah sebesar 100% dan pada tahun 2016 sebesar 90% (mengalami penurunan). Hal tersebut karena beberapa permasalahan yang timbul diantaranya adalah Pencatatan nilai pencapaian SPM belum menggunakan data yang sesuai atau tidak akurat; Banyak indikator SPM yang belum memenuhi target; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPM belum dilakukan secara berkala;
- **Persentase kesesuaian terhadap standar JCI**
Persentase kesesuaian terhadap standar JCI yang memenuhi target yang sesuai standar pada tahun 2015 adalah sebesar 62% dan pada tahun 2016 sebesar 65%. (mengalami peningkatan). Hal tersebut RSUD Dr. Soetomo melakukan beberapa kegiatan antara lain dengan melakukan telusur ke unit kerja, bimbingan champion mutu per unit kerja, pendampingan akreditasi JCI oleh Kemenkes RI dalam upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien sebagai persiapan pelaksanaan Mock Survey Akreditasi JCI 2017.

Sasaran 2 : yaitu meningkatnya mutu pelatihan / pendidikan di Rumah Sakit

- **Persentase kelulusan peserta didik PPDS I yang dilatih dan lulus**
Persentase kelulusan peserta didik PPDS I yang dilatih dan lulus yang sesuai standar pada tahun 2015 adalah sebesar 100.% dan pada tahun 2016 sebesar 100%. Artinya bahwa RSUD Dr. Soetomo mampu berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk melakukan bimbingan dan supervise kepada peserta didiknya (PPDS, mahasiswa S1 Fak. Kedokteran).
- **Persentase tenaga kesehatan yang difasilitasi di RSUD Dr. Soetomo untuk menjadi lebih terampil**
Persentase tenaga kesehatan yang difasilitasi di RSUD Dr. Soetomo untuk menjadi lebih terampil pada tahun 2015 adalah sebesar 94.93% dan pada tahun 2016 sebesar 95,54%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat, institusi , mahasiswa dan peserta didik kepada RSUD Dr. Soetomo

masih tinggi. RSUD Dr. Soetomo memiliki tenaga pendidik dan narasumber yang kompeten dan bersertifikat nasional dan internasional.

Sasaran 3 : yaitu meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit

- Prosentase penelitian uji klinik yang lulus kelaikan etik
Persentase penelitian uji klinik yang lulus kelaikan etik pada tahun 2015 adalah sebesar 100% dan pada tahun 2016 sebesar 100% (tetap). Hal tersebut mengingat persyaratan penelitian di RSUD Dr. Soetomo dengan penelitian yang bersubjek manusia yaitu harus lulus kelayakan etik dan dipertanggungjawabkan secara etik.

Sasaran 4 : yaitu meningkatnya tingkat kemandirian keuangan

- Cost Recovery Ratio (CRR)
Cost Recovery Ratio (CRR) pada tahun 2015 adalah sebesar 102.58% dan pada tahun 2016 sebesar 105,46% (mengalami peningkatan). Salah satu pengukur tingkat efektivitas dan efisiensi rumah sakit adalah *Cost Recovery Ratio (CRR)*. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasional (dikurangi Belanja Gaji PNS dan Belanja Modal) dari pendapatan fungsional rumah sakit. Capaian CRR dalam dua tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan dan ini berarti kemampuan rumah sakit untuk membiayai belanja operasional dari pendapatan fungsional cukup baik. Selain itu dapat diartikan bahwa hampir seluruh kebutuhan belanja operasional dapat dipenuhi dari pendapatan fungsional. Kondisi ini harus tetap dijaga agar pendapatan fungsional terus meningkat.

c. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 2.195.320.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1,839,594,509.00 atau 83.8% untuk mendukung 1 kegiatan yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi

anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan anggaran Rp. 12.649.180.700,- dan realisasi sebesar Rp. 12,472,585,226.00 atau 98,6% untuk mendukung 1 kegiatan yaitu penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 132.738.000,- dan realisasi sebesar Rp. 58,826,350.00,- atau 44,32 % untuk mendukung 1 kegiatan yaitu koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran Rp. 66.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 37,750,000.00,- atau 56,68% untuk mendukung 3 kegiatan yaitu Penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran, penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan informasi data yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD dengan anggaran Rp.178,653,887,300.00 dan realisasi sebesar Rp.162.976.051.344,- Atau 91,22% untuk mendukung 3 kegiatan yaitu Kegiatan yaitu : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) , Pengadaan Alat Kesehatan Lab/ RS/ RSK/ Balai/ Akper/ Latkesmas, Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT) yang secara rinci masing-masing

realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

6. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum daerah (BLUD) terdiri dari 1 kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4 dengan anggaran Rp. 1.180.250.103.867,- dan tercapai 1,207,194,592,246.36 atau 102.28% untuk mendukung 1 kegiatan yaitu kegiatan peningkatan pelayanan RS/RS Khusus/BP4 yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom

d. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat diambil berbagai permasalahan antara lain :

1. Indikator Kinerja Sasaran yaitu Persentase Capaian Indikator SPM (Standard Pelayanan Minimal) yang memenuhi target pada Tahun 2015 sebesar 100% namun mengalami penurunan pada Tahun 2016 sebesar 90%. Hal tersebut karena dalam melakukan evaluasi pemenuhan capaian indikator SPM RSUD, beberapa permasalahan yang timbul diantaranya adalah Pencatatan nilai pencapaian SPM belum menggunakan data yang sesuai atau tidak akurat; Banyak indikator SPM yang belum memenuhi target sehingga perlu melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPM secara berkala.
2. Indikator kinerja sasaran tentang Persentase nilai ideal pelayanan RS tersier yang sesuai standard yaitu efektifitas dan efisiensi pelayanan Rumah Sakit yang antara lain meliputi : Bed Turn Over (BTO) 40 kali dan tercapai 33,74 kali ; hasil tersebut tidak memenuhi standard yaitu < 40 kali. Indikator ini menggambarkan frekuensi pemakaian tempat tidur pasien. Pasien yang dirawat di RSUD Dr. Soetomo memerlukan perawatan khusus dan membutuhkan waktu penyembuhan yang lama sehingga pemakaian tempat tidur setiap pasien lebih lama dan frekuensi pemakaian menjadi lebih kecil.

3. Indikator kinerja program yaitu tentang pemanfaatan sarana prasarana oleh pelanggan pada Tahun 2015 terlayani 1.167.727 pasien dan Tahun 2016 mengalami penurunan dengan terlayani 843.173 pasien. Hal tersebut karena sebagian besar Pelayanan pasien di RSUD Dr. Soetomo dengan menggunakan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan pelayanan level 3 (Tersier) sehingga pasien yang masuk ke RSUD Dr. Soetomo benar-benar tersaring oleh sistem JKN pada level sebelumnya (Puskesmas dan RS type D, C dan B) .

e. Penghargaan Nasional yang diterima

1. Pemenang Terbaik Indonesia Hospital Management Award kategori Customer Service Marketing dan Public Relation 2016;
2. Pemenang Terbaik Indonesia Hospital Management Award kategori Customer Service Marketing dan Public Relation 2016;
3. Peringkat 8 PPID Terbaik SKPD Propinsi Jawa Timur 2016;
4. Resertifikasi Akreditasi RS Pendidikan Utama Tahun 2016.

2.3. RSUD Dr.SAIFUL ANWAR MALANG

a. Tujuan

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia.
- Meningkatkan kualitas manajemen RS yang profesional, akuntabel dan transparan.

b. Sasaran dan Program

1. Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat, dengan indikator :
 - a. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012.
 - b. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI.
 - c. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target.
 - d. Bed Occupancy Rate (BOR)
 - e. Average Length of Stay (ALOS)
 - f. Bed Turn Over (BTO)
 - g. Turn Over Interval (TOI)
 - h. Net Death Rate (NDR)
 - i. Gross Death Rate (GDR)
 - j. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Publikasi ilmiah Internasional, dengan indikator:
 - a. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan Pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS Pendidikan versi JCI 2013.
 - b. Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS.

- c. Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal/forum internasional.
3. Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional, dengan indikator :
 - a. Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang tepat waktu
 - b. Cost Recovery Ratio (CRR)
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - d. Persentase hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang baik.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat	1. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012	100%	100 %	-
	2. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI	81.39%	95 %	16.72%
	3. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	81.06%	86,76 %	7.03%
	4. Bed Occupancy Rate (BOR)	66,83%	67,51 %	1.06%
	5. Average Length of Stay (ALOS)	6,26 hari	6,29 hari	0.47%
	6. Turn Over Interval (TOI)	2,85 hari	2,79 hari	-2.1%
	7. Bed Turn Over (BTO)	42,49 kali	42,46 kali	-0.07%
	8. Net Death Rate (NDR)	8,67	6,94 %	-19.9%
	9. Gross Death Rate (GDR)	8,70	9,25 %	6.32%
	10. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,55	84,09	0.54%
Program Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Presentase Indikator Standar Pelayanan Minimal(SPM)	88.42%	86.76%	-1.87%
	2. Bed Occupancy Rate (BOR)	66.83%	67.51%	1.01%
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.5	84.09	0.48%
	4. Presentase penyelesaian pendidikan di RS	100%	100%	-
2. Meningkatnya Kualitas	1. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan Pendidikan yang	68.42%	98 %	43.26%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Penyelenggaraan Pendidikan dan Publikasi ilmiah Internasional	memenuhi standar Akreditasi RS Pendidikan versi JCI 2013			
	2. Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS	100%	100 %	-
	3. Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal/forum internasional	4 buah	4 buah	-
Program Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Presentase Indikator Standar Pelayanan Minimal(SPM)	88.42%	86.76%	-1.87%
	2. Bed Occupancy Rate (BOR)	66.83%	67.51%	1.01%
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.5	84.09	0.48%
	4. Presentase penyelesaian pendidikan di RS	100%	100%	-
3. Meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional	1. Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang tepat waktu	100%	100%	-
	2. Cost Recovery Ratio (CRR)	92.51%	75,75 %	18.1%
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.55	84,09	-0.54%
	4. Persentase hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang baik	100%	100%	100%
a. Program Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Presentase Indikator Standar Pelayanan Minimal(SPM)	88.42%	86.76%	-1.87%
	2. Bed Occupancy Rate (BOR)	66.83%	67.51%	1.01%
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.5	84.09	0.48%
	4. Presentase penyelesaian pendidikan di RS	100%	100%	-
b. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan	1. Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	100%	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan layanan umum Daerah (BLUD)	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana termasuk alat kedokteran RS	100%	100%	-

Pada tahun 2015-2016 kinerja RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : yaitu meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat, dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, antara lain:

- a. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 pada tahun 2015 adalah sebesar 100% dan pada tahun 2016 sebesar 100% sehingga persentase kemajuan sebesar 100%.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat lulus paripurna pada tanggal 28 Maret 2016. Upaya yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Mengadakan kick off untuk membangun komitmen bagi seluruh pokja dan jajaran manajemen
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien
3. Mengadakan bimbingan akreditasi yang langsung dipimpin oleh KARS
4. Mengadakan self assesment oleh surveyor internal
5. Mengadakan mock survey untuk melihat kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan sertifikasi ini antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan tim khusus yang berfungsi sbg evaluator dan motivator terhadap implementasi seluruh elemen akreditasi
 2. Membuat analisa capaian standar (self assessment) secara berkala dan RTL
- b. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI pada tahun 2015 adalah 81.39%, dan pada tahun 2016 sebesar 95% sehingga persentase kemajuan sebesar 16.72%.

Angka 81.39% pada tahun 2015 disebabkan karena nilai akreditasi versi KARS belum dikonversikan. Peningkatan sebesar 16.72% disebabkan karena pada saat reakreditasi hasil temuan para asesor tahun lalu langsung ditindaklanjuti, baik dengan upaya perbaikan, maupun peningkatan mutu. Pada reakreditasi ke 2 (dua) tahun 2016 di bulan Februari hasil temuan asesor RSUD Dr. Saiful Anwar

mengalami peningkatan yang pesat baik dari segi dokumen , maupun implementasi dilapangan.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi JCI, antara lain:

1. Mengoptimalkan kinerja Surveyor Internal sesuai dengan BAB di akreditasi untuk melakukan telusur ke seluruh area di RS
 2. Membentuk tim lima bintang yang bertugas memperbaiki hasil temuan baik surveyor internal maupun Asesor KARS di masing-masing satuan kerja tempatnya bekerja.
 3. Membentuk tim 5 (lima) K, yang meliputi Kebersihan, Ketertiban, Keamanan, Kenyamanan dan Keselamatan, baik petugas, pengunjung maupun pasien, yang penilaiannya akan dikait dengan reward remunerasi .
- c. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target, pada tahun 2015 sebesar 81.06%, dan pada tahun 2016 sebesar 86.76%, sehingga prosentase kemajuan dibanding tahun lalu sebesar 7.03%. Belum tercapai indikator tersebut karena ada beberapa indikator misalnya angka kematian < 48 jam (NDR) dan angka kematian kasar (GDR) yang belum tercapai 100%, karena RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan rumah sakit rujukan dimana pasien yang dirujuk ke RSUD Dr. Saiful Anwar golden periodnya telah hilang, sehingga sulit sekali untuk mencapai angka NDR dan GDR sesuai standart. Akan tetapi upaya peningkatan pelayanan tetap dilakukan, untuk meminimalisir angka NDR dan GDR. Sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian SPM antara lain:
1. Meningkatkan kualitas kinerja sumber daya manusia maupun pemenuhan sarana prasarana
 2. Melakukan monitoring dengan cara kunjungan rutin ke satuan kerja oleh tim penanggungjawab SPM
 3. Evaluasi secara berkala melalui umpan balik hasil laporan kepada satuan kerja terkait.

4. Rapat evaluasi kinerja antara struktural dan fungsional serta Dewan Pengawas RS
- d. Bed Occupancy Rate (BOR) atau rata-rata pemakaian tempat tidur, pada tahun 2015 sebesar 66.83% dan pada tahun 2016 sebesar 67.51%, prosentase pencapaian sebesar 93.7%, standar ideal sebesar 60-85%, sehingga pencapaian tersebut masih tergolong ideal. Tingkat kemajuan dibandingkan tahun lalu sebesar 1.06%.
 - e. Average Length of Stay (ALOS) atau rata-rata lama rawatan pasien, pada tahun 2015 sebesar 6.26 hari, dan pada tahun 2016 sebesar 6.29 hari sehingga prosentase capaian sebesar 89.8%. Pencapaian tersebut masih tergolong ideal karena standar idealnya 6-9 hari. Tingkat kemajuan dibandingkan tahun lalu sebesar 0.47%.
 - f. Bed Turn Over (BTO) atau rata-rata penggunaan tempat tidur dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yang tersedia, pada tahun 2015 sebesar 42.49 kali, dan pada tahun 2016 sebesar 42.46 kali sehingga prosentase capaian 101.1%. Pencapaian tersebut masih tergolong ideal karena standar idealnya 40-50 kali per tahun. Tingkat penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 0.07%.
 - g. Turn Over Interval (TOI) atau rata-rata hari tempat tidur ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya, pada tahun 2015 sebesar 2.85 hari, dan pada tahun 2016 sebesar 2.79 hari sehingga prosentase capaian sebesar 139.5%. Pencapaian tersebut masih tergolong ideal karena standar idealnya 1-3 hari. Tingkat penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 0.07%.
 - h. NDR yaitu tingkat kematian ≥ 48 jam, pada tahun 2015 sebesar 8.67%, dan pada tahun 2016 sebesar 6.94%. Tingkat kemajuan dibandingkan tahun lalu sebesar 19.9%.
 - i. Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum per 100 penderita keluar, pada tahun 2015 sebesar 8.70%, dan pada tahun 2016 sebesar 9.25%. Tingkat penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 6.32%.
 - j. Capaian NDR dan GDR pada tahun 2016 masih tinggi karena RSUD Dr. Saiful Anwar merupakan rumah sakit rujukan tersier atau Pemberi Pelayanan

Kesehatan Tingkat III (PPK III), sehingga pasien yang datang rata-rata hasil rujukan dari PPK I dan PPK II yang pada umumnya dalam kondisi sudah parah (critical ill).

RSUD Dr. Saiful anwar Malang dalam periode tahun 2016 sudah mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari capaian BOR, ALOS, TOI, BTO.

Upaya untuk meningkatkan capaian indikator tersebut antara lain:

1. Meningkatkan mutu pelayanan, melalui upaya peningkatan profesionalisme SDM dan pemenuhan sarana prasarana RS sesuai standar
 2. Melakukan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi
 3. Upaya evaluasi Standar Prosedur Operasional (SPO) di seluruh unit pelayanan
 4. Meningkatkan kerjasama dengan rumah sakit rujukan, untuk segera merujuk pasien yang tidak mampu ditangani
 5. Memberikan pelatihan kegawatdaruratan komprehensif
- k. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pada tahun 2015 sebesar 84.55 dan pada tahun 2016 sebesar 84.09 maka prosentase pencapaian sebesar 103.8%. Tingkat penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar -0.54%.

Upaya yang dilakukan RSUD Dr. Saiful Anwar dalam meningkatkan nilai IKM, antara lain:

1. Meningkatkan mutu pelayanan, melalui upaya peningkatan profesionalisme sdm dan pemenuhan sarana prasarana RS sesuai standar
2. Melakukan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi

Sasaran 2 : yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan publikasi ilmiah internasional, dengan 3 (tiga) indikator kinerja, antara lain:

- a. Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan Pendidikan yang memenuhi standar Akreditasi RS Pendidikan versi JCI 2013 pada tahun 2015 adalah sebesar 68.42%, dan pada tahun 2016 sebesar 98%. Prosentase kemajuan sebesar 43.26% disebabkan pada tahun lalu penilaian masih dalam proses konversi elemen-elemen dari standar KARS versi 2012 ke standar JCI. Saat ini sudah dilakukan penilaian Akreditasi Pelayanan Pendidikan dan hasilnya memuaskan.

- b. Persentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RS, pada tahun 2015 sebesar 100%, dan pada tahun 2016 adalah sebesar 100%. Prosentase kemajuan sebesar 100% hal ini disebabkan karena seluruh peserta didik dapat menyelesaikan semua stase yang ada dipendidikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.
- c. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut, dengan cara menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Instansi Pendidikan tempat peserta didik berasal.
- d. Jumlah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal/forum internasional dengan target 4 buah, terealisasi 4 buah. Prosentase peningkatannya dibandingkan tahun lalu sebesar 100% dibanding tahun lalu. RSSA mengikuti kompetisi baik dalam tingkat regional, nasional dan internasional. Hasil dari kompetisi tersebut dapat diimplementasikan di satuan kerja masing-masing, guna mempermudah, membantu meringankan pekerjaan yang ada.
- e. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut, dengan cara sosialisasi melalui nota dinas agar setiap satker mengirimkan proposal penelitian yang akan dibiayai RS, diadakan pekan mutu dengan salah satu agendanya lomba QCC di tingkat RS, dan pemenangnya akan diikuti sertakan pada ajang regional, nasional maupun internasional.

Sasaran 3 : yaitu meningkatnya kualitas tata kelola rumah sakit dan SDM yang profesional, dengan 4 (empat) indikator kinerja, antara lain:

- a. Persentase Kelengkapan Dokumen SAKIP yang tepat waktu dengan, pada tahun 2015 adalah sebesar 100%, dan pada tahun 2016 adalah sebesar 100%. Tingkat kemajuan dibandingkan tahun lalu sebesar 100%. RSUD Dr. Saiful Anwar capaian kinerja yang berupa kegiatan maupun keuangan sudah dapat terukur. Hal itu dapat dibuktikan melalui perjanjian kinerja yang dilakukan diawal tahun, kemudian setiap pengukuran kinerja disetiap tribulan, mulai dari pejabat eselon II sampai dengan staf. Dengan mengukur kinerja setiap tribulan maka progress setiap kegiatan dapat diketahui secara dini, sehingga langkah-langkah perbaikan bisa segera dapat diambil, untuk indicator yang tidak tercapai.

Upaya untuk mempertahankan capaian agar sesuai dengan target yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi dengan bidang terkait untuk indicator untuk membahas indicator yang tidak dapat tercapai. Laporan-laporan yang menjadi bahan kelengkapan SAKIP dilaksanakan tepat waktu.

- b. Cost Recovery Ratio (CRR) pada tahun 2015 adalah sebesar 92.51%, dan pada tahun 2016 adalah sebesar 75.75%. Tingkat penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 18,11%.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pada tahun 2015 sebesar 84.55 dan pada tahun 2016 sebesar 84.09 maka prosentase pencapaian sebesar 103.8%. Tingkat penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 0.54%.

Upaya yang dilakukan RSUD Dr. Saiful Anwar dalam meningkatkan nilai IKM, antara lain:

- 1. Meningkatkan mutu pelayanan, melalui upaya peningkatan profesionalisme sdm dan pemenuhan sarana prasarana RS sesuai standar
 - 2. Melakukan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi
- d. Persentase hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang baik pada tahun 2015 adalah sebesar 100%, dan pada tahun 2016 adalah sebesar 100%. Kemajuan dibanding tahun lalu tetap sebesar 100%. Penilaian pegawai dilaksanakan setiap akhir tahun. Hasil yang didapatkan tidak terdapat pegawai yang hasil penilaian kinerjanya buruk, sehingga capaiannya 100%. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian tersebut dengan meningkatkan kualitas SDM, memeberikan reward bagi pegawai yang berprestasi, adanya *punishment* melalui pemotongan poin remunerasi bagi pegawai yang *indiscipliner*.

c. Program

- 1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp 603,778,032,329.32, realisasi sebesar Rp 624,078,850,455.69 atau 103.36% untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp 1,185,000,000 realisasi sebesar Rp 1,146,360,000.00 atau 96.74% untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp 5,766,102,000 realisasi sebesar Rp 5,661,976,842.00 atau 98.19% untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran Rp 899,820,000 realisasi sebesar Rp 764,307,510.00 atau 84.94% untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
5. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp 150,000,000 realisasi sebesar Rp 146,888,532.00 atau 97.93% untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp Rp 185,450,000,000 realisasi sebesar Rp 180,427,636,652.00 atau 97.29% untuk mendukung dari 5 (lima) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
 - Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) dengan target sebesar Rp 72,565,000,000 terealisasi sebesar Rp 5,996,590,836.00 atau 8.26%. Pada triwulan IV tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 28/PMK.07/2016 Pasal 11 (1) b terjadi perubahan nomenklatur, yaitu dari peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT) menjadi penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi & penyakit lainnya, alokasi anggarannya dialihkan pada kegiatan tersebut akan tetapi tidak terjadi perubahan indikator kinerja. Pada kegiatan penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi & penyakit lainnya dengan target sebesar Rp 68,865,000,000 terealisasi sebesar Rp 67,236,735,813.00 atau 97.64%. Dengan target kinerja jumlah gedung yang dibangun sebesar 1 paket terealisasi sebesar 1 paket unit atau 100%. Jumlah gedung pelayanan yang dibangun dengan target 2 unit terealisasi sebesar 2 unit.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Program penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan terealisasi sebesar 84.94%. pada program tersebut ada 3 (tiga) kegiatan yang harus dilaksanakan, dua kegiatan yang telah terlaksana sebesar 100% akan tetapi pada penyerapan anggaran terjadi efisiensi. 1 (satu) kegiatan yang anggaran yang tidak terserap, sebesar Rp 25.000.000,00, yaitu kegiatan penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data (sistem pusat data SKPD) belum dilaksanakan karena jaringan internet belum terhubung dengan pusat data. Akan tetapi kegiatan pemenuhan data untuk pusat data telah terlaksana 100%

Solusi:

1. Koordinasi intens baik dengan bagian IT Pemerintah Provinsi dan Dinas Kominformasi maupun internal RS.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

NO	JENIS PENGHARGAAN	TINGKAT	TAHUN
1.	Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 “PERSALINAN LANCAR & NYAMAN DENGAN STIPUTS BRA (STIMULUS PUTING SUSU BRA)”	Nasional	2016
2.	Top 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016 “PERSALINAN LANCAR & NYAMAN DENGAN STIMULUS PUTING SUSU BRA”	Nasional	2016
3.	Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur 2016 “TERAPI GIZI SOTIKA”	Regional	2016
4.	Runner Up di Ajang Tingkat Nasional “PERSI AWARD” oleh QCC SIMPATIK	Nasional	2016
5.	Penghargaan Platinum di Ajang “TEMU KARYA MUTU PRODUKTIVITAS NASIONAL XX” oleh QCC TARANTULA dan QCC SEHATI	Nasional	2016
6.	Penghargaan dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan Predikat “ A “ Memuaskan	Regional	2016
7.	Penghargaan dalam Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Timur (KOVABLIK) masuk 12 Besar Kategori Terbaik dengan Inovasi SOTIKA	Regional	2016
8.	Penghargaan sebagai Nominator Website Ter-Informatif Badan Publik SKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – PPID Award	Regional	2016
9.	Penghargaan sebagai Nominator Meja Layanan Informasi Terbaik Badan Publik SKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – PPID Award	Regional	2016
10.	Penghargaan sebagai Badan Publik dengan Sistem Layanan Informasi Terbaik dengan “Kategori B” SKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – PPID Award	Regional	2016
11.	Top 59 Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur 2016 – Meja Rawat Luka IGD	Regional	2016

2.4. RSUD Dr. SOEDONO MADIUN

a. Tujuan

- Meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan bagi seluruh masyarakat
- Meningkatkan mutu rumah sakit pendidikan

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

NO	SASARAN/PROGRAM		INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
				2015	2016	
I	Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan bagi seluruh masyarakat					
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan	80,33	75,67	(-4,66)
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%	100%	Tetap
	3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100%	100%	Tetap
	4	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	Tetap
	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pemenuhan pengadaan peningkatan sarana prasarana	100%	100%	Tetap
II	Meningkatnya mutu Rumah Sakit Pendidikan					
	6	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal	74,42	79,42%	5%

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada Tahun 2015 – 2016 kinerja RSUD dr. Soedono Madiun yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pelayanan bagi seluruh masyarakat dengan indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan sebagai ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh RSUD dr. Soedono Madiun di 4 Instalasi : Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Laboratorium. IKM tahun 2015 nilai sebesar 80,33% kategori Sangat Baik sedangkan IKM tahun 2016 nilai sebesar 75,67 % kategori Sangat Baik meskipun nilainya menurun. Nilai menurun dan perlu diperbaiki adalah kenyamanan lingkungan (dalam rangka pembangunan fisik rumah sakit), kemudahan mendapatkan informasi dan kemudahan prosedur pelayanan.

Sasaran 2 : Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan

Tujuan meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar klinik dan praktek lapangan serta ketrampilan bagi tenaga kesehatan di rumah sakit.

Prosentase peserta didik yang menyelesaikan periode pendidikan tepat waktu di RSUD dr. Soedono Madiun selama tahun 2015 adalah 92,68 % kategori sangat baik dan pada tahun 2016 sebesar 95% kategori sangat baik.

c. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp.2.256.384.700,00 Realisasi sebesar Rp.1.926.981.456,00 atau 85,40% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp.6.827.768.190,00 Realsasi sebesar Rp.6.085.385.581,00 atau 89,13% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp.1.858.650.000,00 Realisasi sebesar Rp.1.728.559.304,00 atau 93% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah dengan anggaran Rp.200.185.000,00 Realisasi sebesar Rp.169.237.550,00 atau 84,54% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp. 137.932.992.664,00 Realisasi sebesar Rp.123.696.831.236,00 atau 89,68% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
6. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp.221.973.890.088,09 Realisasi sebesar Rp.197.464.296.214,00 atau 88,96% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi :

Permasalahan :

1. Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purcheshing barang sering terlambat datang tidak tepat waktu.

2. Pembangunan gedung arsip dan pengadaan AC belum bisa dilaksanakan karena gagal lelang yang disebabkan dalam lelang tidak sesuai speck dengan pagu anggaran dan keterbatasan waktu.
3. Pemeliharaan kalibrasi alat belum sesuai jadwal kebutuhan.

Solusi

1. Penataan pemaketan yang lebih teratur sesuai rencana.
2. Pembangunan gedung arsip dan pengadaan AC dianggarkan pada tahun berikutnya (tahun 2017).
3. Koordinasi dengan pihak BPFK .

2.5. RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

a. Tujuan

- Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan
- Mewujudkan kualitas pendidikan dan penelitian sesuai standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan
- Mewujudkan kualitas SDM sesuai standar kompetensi profesi
- Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan
- Mewujudkan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan transparan

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan & keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan 1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,011	84,12	102,57
		2. Persentase kepuasan pelayanan kesehatan Jamaah Haji	Ditetapkan sebagai indikator pada tahun 2016	85,33	-
		3. Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mencapai target	75,57	77,85	103,12
		4. Persentase tercapainya nilai standar (80%) pada setiap standar akreditasi versi 2012	100%	100%	100
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan & keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5. Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien	33,33%	33,33%	100
		6. BOR (Bed Occupancy Rate)	69,40%	64,79 %	93,36
		7. ALOS (Average Long Of Stay)	4,4 hari	4,7 hari	106,82
		8. TOI (Turn Over Interval)	1,94 hari	2,67 hari	137,63
		9. BTO (Bed Turn Over)	58,1 kali	48,6 kali	83,65
		10. NDR (Net Death Rate)	18,3% ₀	16,7% ₀	91,26
		11.GDR (Gross Death Rate)	31,1% ₀	31,4% ₀	100,96
	Meningkatnya kualitas	1. Persentase Kelulusan Dokter			

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
2.	pendidikan dan penelitian sesuai standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan	Muda tepat waktu di Rumah Sakit	90,36	93,67%	103,66
	1.Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2. Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelaikan etik	100%	100%	100
3.	Meningkatnya kualitas SDM sesuai Standar Kompetensi 1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi	80,5	90,55	112,48
4.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan 1.Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan BLUD	Persentase sarana dan prasarana Alat Kedokteran rumah sakit sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yang terkalibrasi	79,23	80%	100,97
5.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah Sakit 1.Program Penyusunan, ,dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	CRR (Cost Recovery Rate)	120,83	125,97	104,25

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja RSU Haji Surabaya yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan & keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan didukung oleh 2 program yaitu Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran serta didukung oleh 11 indikator kinerja yaitu :

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di RSUD Haji Surabaya pada tahun 2015 adalah sebesar 82,011 dan pada tahun 2016 sebesar 84,12. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai IKM dalam kurun waktu tahun 2015-2016 mengalami kenaikan, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Haji Surabaya semakin meningkat. Penanganan komplain dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti oleh pihak manajemen RS dan segera melakukan follow up serta upaya penyelesaiannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian rumah sakit untuk selalu berbenah dengan memberikan yang terbaik. Penanganan keluhan atau komplain yang baik memberikan peluang untuk mengubah pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas atau bahkan meningkat menjadi pelanggan loyal. Komplain pelayanan, *attitude* dan lain-lain mengalami penurunan, secara umum menunjukkan bahwa rumah sakit semakin baik dalam memenuhi tuntutan harapan dan keinginan pelanggan. Hal ini merupakan cermin keberhasilan pelayanan di RSUD Haji Surabaya yang telah dipersepsi baik oleh pelanggan dan harus dipertahankan bahkan secara terus menerus dan berkesinambungan ditingkatkan mutu maupun jenis layanannya sesuai dengan kebutuhan pasien/pelanggan dan kemajuan perkembangan IPTEKDOK serta pelayanan yang sesuai dengan standart RS yang telah terakreditasi secara paripurna.

➤ **Persentase kepuasan pelayanan kesehatan Jamaah Haji :**

Pelayanan kesehatan jamaah haji yang menjadi indikator kinerja RS baru ditetapkan pada tahun 2016. Target tahun 2016 adalah 82 % dengan realisasi sebesar 85,33%.

- **Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mencapai target :**
 Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang mencapai target pada tahun 2015 adalah sebesar 75,57% dan pada tahun 2016 sebesar 77,85%. Hal tersebut menunjukkan kenaikan dikarenakan semakin banyak unit yang bisa mencapai standar yang telah ditetapkan. Namun dalam hal ini unit akan berusaha untuk mencapai standar yang ditetapkan guna peningkatan pelayanan kepada pelanggan Rumah Sakit

- **Persentase tercapainya nilai standar (80%) pada setiap standar akreditasi versi 2012 :**
 Persentase tercapainya nilai standar (80%) pada setiap standar akreditasi versi 2012 capaian kinerja pada tahun 2015 adalah sebesar 100% dan pada tahun 2016 sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa RSUD Haji Surabaya mampu mempertahankan capaian nilai standart akreditasi versi 2012 dalam kurun waktu tahun 2015-2016 dan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standart. Predikat yang telah dicapai RSUD Haji Surabaya adalah lulus paripurna 100% berdasarkan sertifikat dari KARS nomor KARS-SERT/119/VI/2015. Namun dalam hal ini rumah sakit tetap menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh lembaga penilai akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.



Gambar 4.1 Penghargaan Akreditasi Rumah Sakit th 2012 lulus paripurna

➤ **Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien :**

Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 33,33% dan pada tahun 2016 sebesar 33,33%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran keselamatan pasien masih stagnan. Hal tersebut dikarenakan dari 6 indikator sasaran keselamatan pasien hanya 2 yang memenuhi standar pada tahun 2016. Perlu adanya upaya untuk menjadi daya ungkit meningkatkan nilai capaian indikator sasaran keselamatan pasien di tahun mendatang.

➤ **BOR (Bed Occupancy Rate) :**

Capaian kinerja BOR (Bed Occupancy Rate) pada tahun 2015 sebesar 69,40 dan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 64,79. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai capaian BOR RS mengalami penurunan. Nilai BOR RS masih berada dalam kisaran standar (Depkes RI, 2005) yaitu Antara 60 - 85 %. Angka pemanfaatan TT (BOR) masih perlu ditingkatkan sedikit lagi untuk mencapai standar. Penurunan nilai capaian BOR RS dalam kurun waktu tahun 2015-2016 dikarenakan sering terjadi kerusakan baik pada tempat tidur maupun ruangan sehingga tidak bisa digunakan secara optimal, adanya ketidaksesuaian antara tempat tidur dengan data yang ada di rekam medik yaitu pada saat pasien sudah keluar rumah sakit data di rekam medik masih menginformasikan ruangan penuh. Disamping itu karena adanya pengaturan lokasi pasien sesuai jenis kelamin (pria dan wanita) dan adanya ruangan khusus untuk kasus tertentu yaitu ruang isolasi dan ruang stroke, ruang yang keduanya hanya bisa ditempati sesuai kasusnya. Disamping adanya pemesanan TT dihari sabtu dan Minggu untuk persiapan pasien yang akan operasi dihari senin. Hal ini sangat berpengaruh langsung pada penggunaan tempat tidur (TT) yang ada.

➤ **ALOS (Average Long Of Stay):**

Capaian kinerja ALOS (Average Long Of Stay) pada tahun 2015 sebesar

4,4 dan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 4,7. Namun berdasarkan standart Depkes untuk nilai ALOS yang ideal yaitu antara 6-9 hari, hal tersebut menunjukkan bahwa nilai capaian ALOS RS belum memenuhi nilai ideal sesuai standart Depkes. Hal ini dikarenakan adanya perawatan *One Day Surgery* (ODS) atau pasien *One Day Care* (ODC) dan karena kurang ketatnya rumah sakit terhadap indikasi pasien masuk rawat inap. Indikator ini disamping memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. Perlu adanya upaya meningkatkan nilai capaian ALOS RS agar dapat memenuhi standart Depkes yaitu dengan meningkatkan mutu pelayanan pada pasien rawat inap di RSUD Haji Surabaya.

➤ **TOI (Turn Over Interval) :**

Capaian kinerja TOI (Turn Over Interval) pada tahun 2015 sebesar 1,94 dan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 2,67. Standar (Depkes, 2005) antara 1 – 3 hari. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa kinerja di Instalasi Rawat Inap RSUD Haji Surabaya pada kurun waktu tahun 2015-2016 adalah baik, karena realisasi/capaian TOI masih dalam kisaran standart Depkes. Penggunaan tempat tidur relatif efisien dan masih terdapat kesempatan bagi petugas untuk melaksanakan prosedur pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit. Disamping karena adanya perawatan *One Day Surgery* (ODS) atau pasien *One Day Care* (ODC), menyebabkan standar TOI lebih kecil dari standar yang ditetapkan rumah sakit. Namun demikian dengan melihat capaian tersebut masih dapat diupayakan lagi peningkatan penggunaan tempat tidurnya agar makin efisien.

➤ **BTO (Bed Turn Over) :**

Capaian kinerja BTO (Bed Turn Over) pada tahun 2015 sebesar 58,1 dan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 48,6. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai capaian BTO RS mengalami penurunan pada

kurun waktu 2015-2016. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali sehingga capaian BOR RS pada tahun 2016 masih dalam rentangan standart Depkes. Indikator ini memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur, dimana frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu dalam periode 1 tahun di RSUD Haji Surabaya adalah baik.

➤ **NDR (Net Death Rate) :**

Capaian kinerja NDR (Net Death Rate) pada tahun 2015 sebesar 18,3 dan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 16,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai capaian NDR RS mengalami penurunan. Nilai NDR yang menurun menunjukkan mutu pelayanan di RS semakin meningkat, karena indikator ini berarti angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar semakin menurun. Dalam hal ini Nilai NDR semakin menurun menunjukkan bahwa angka kematian pasien rawat inap > 48 jam yang dirawat semakin mampu ditekan. Nilai NDR dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar dihitung keseluruhan dan berdasarkan jenis kelamin.

➤ **GDR (Gross Death Rate) :**

Capaian kinerja GDR (Gross Death Rate) pada tahun 2015 sebesar 31,1 dan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 31,4. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai capaian GDR RS mengalami kenaikan. Namun nilai kenaikan GDR dari tahun 2015 ke tahun 2016 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas dan mutu pelayanan RS secara keseluruhan karena nilai GDR RS masih dalam batas standart Depkes yaitu tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar. Hal ini memberikan gambaran mutu pelayanan kesehatan yang ada sudah baik untuk pelayanan Rawat Inap maupun penanganan kegawatan.

Sasaran 2 : yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan dan penelitian sesuai standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan didukung oleh 1 program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah serta didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu :

- **Persentase Kelulusan Dokter Muda Tepat Waktu Di Rumah Sakit :**
- Presentase kelulusan dokter muda tepat waktu di RS capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 90,36% dan pada tahun 2016 sebesar 93,67%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan terhadap persentase kelulusan dokter muda tepat waktu di RSUD Haji Surabaya pada kurun waktu tahun 2015-2016. Tingkat Kelulusan DM FK UMM dan FK UHT mengalami kenaikan. Peningkatan kelulusan ini kemungkinan besar ditunjang oleh berbagai faktor antara lain oleh adanya SDM pendidik klinis yang berkualitas sesuai kompetensi maupun sarana prasarana pendukung pembelajaran (ruang kelas, sarana praktek dan lain-lain). Untuk mengukur Tingkat Kelulusan Dokter Muda termuat dalam Sasaran Mutu yang merupakan indikator perbaikan mutu dan kinerja pelayanan/pendidikan, sasaran mutu yang disusun meliputi indikator yang berasal dari Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Kepmenkes 129/Menkes/SK/2009. Pada tiap satu tahun sekali dilakukan evaluasi terhadap Tingkat Kelulusan Dokter Muda tersebut dengan menganalisis penyebab masalah dan rencana tindak lanjut apabila target yang ditetapkan belum memenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan kemampuan Dokter Muda yang berbeda-beda ada setiap siklus yang mengikuti proses kepaniteraan klinik di RSUD Haji Surabaya menyebabkan capaian Tingkat Kelulusan Dokter Muda berbeda nilainya pada tiap tahunnya. Bakordik sebagai unit yang melaksanakan tugas administrasi kepaniteraan klinik akan melakukan rencana tindak lanjut berupa :
1. Memotivasi DM untuk lebih giat belajar pada setiap Pembekalan DM pada awal masuk kepaniteraan klinik.

2. Meningkatkan fasilitasi Kegiatan Belajar DM di rumah sakit dengan meningkatkan sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar, Perpustakaan dan internet online maupun pemenuhan sarana manekin untuk praktek.
3. Memberikan Masukan ke SMF untuk lebih intensif dalam pembelajaran maupun dalam memberikan Referat.
4. Melaksanakan pelatihan AA Plus berjenjang bagi para pendidik klinis agar para pendidik makin berkualitas meningkatkan mutu pembelajaran/ pelaksanaan kepaniteraan klinik di rumah sakit.

➤ **Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelaikan etik :**

Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelaikan etik capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dan pada tahun 2016 sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan di tahun 2015 dan di tahun 2016 jumlah penelitian uji klinik yang diajukan dari pihak luar berhasil lolos dari tim penilai kelaikan etik sehingga pencapaian dalam kurun waktu tahun 2015-2016 adalah 100%. Persentase uji klinik dengan kelayakan etik, kegiatan ini dilakukan pada setiap penelitian yang intervensi penelitian tersebut menggunakan obyek berupa benda hidup, dalam hal ini adalah pasien. Khusus untuk mahasiswa fakultas kedokteran yang menjalin kerjasama dengan RSUD Haji Surabaya, baik data primer maupun sekunder harus melakukan uji kelayakan etik. Uji ini dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk RS yaitu tim komite kelayakan etik .

Sasaran 3 : yaitu meningkatnya kualitas SDM sesuai Standar Kompetensi didukung oleh 1 program yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu :

➤ **Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi :**

Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 80,5% dan pada tahun 2016 sebesar 90,55%. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan dikarenakan semakin banyaknya pelatihan, workshop, diklat, seminar maupun training yang diikuti oleh SDM RS sesuai dengan kompetensinya sehingga mampu

meningkatkan keahliannya dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pasien.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan didukung oleh 1 program yaitu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan BLUD serta didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu :

➤ **Persentase sarana dan prasarana Alat Kedokteran rumah sakit sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yang terkalibrasi :**

Persentase sarana dan prasarana Alat Kedokteran rumah sakit sesuai dengan standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yang terkalibrasi, capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 79,23% dan pada tahun 2016 sebesar 80%. Hal tersebut menunjukkan kenaikan dikarenakan pada tahun 2016 semakin banyak alat kedokteran rumah sakit yang sudah terkalibrasi dan anggaran yang dialokasikan untuk proses kalibrasi alat kedokteran di BPFK semakin besar sehingga mampu mengcover alat kedokteran yang tersedia di RS. Apabila alat kedokteran yang digunakan telah terkalibrasi, maka kelayakan alat dan fungsinya akan makin meningkat, hasil dari pengukuran yang didapatkan akan lebih akurat dan tingkat validitasnya semakin meningkat.

Sasaran 5: yaitu meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah Sakit didukung oleh 1 program yaitu Program Penyusunan, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan serta didukung oleh 1 indikator kinerja yaitu :

➤ **CRR (Cost Recovery Rate) :**

CRR (Cost Recovery Rate) capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 120,83% dan pada tahun 2016 sebesar 125,97%. Hal tersebut menunjukkan kenaikan pada tahun 2016 dikarenakan adanya pelampauan pendapatan fungsional RS sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diberlakukannya efisiensi terhadap belanja-belanja RS di akhir tahun anggaran 2016. Peningkatan *Cost Recovery Rate (CRR)* yang menunjukkan

seberapa besar kemampuan Rumah Sakit membiayai kebutuhan operasionalnya . Secara singkat CRR / tingkat pemulihan biaya RS adalah perbandingan antara seluruh pendapatan dengan seluruh belanja tanpa belanja modal.

c. Program

1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , dengan anggaran Rp.169.920.570.811,86,- Realisasi sebesar Rp. 162.226.895.348,- atau 95,47% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.2.077.851.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.773.866.636,- atau 85,37% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah , dengan anggaran Rp.1.228.255.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.216.376.425,- atau 99,03% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , dengan anggaran Rp.6.775.038.236,- Realisasi sebesar Rp. 6.521.175.964,- atau 96,25% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan BLUD , dengan anggaran Rp.44.863.796.000,- Realisasi sebesar Rp. 44.179.052.678,- atau 98,47% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

6. Program Penyusunan, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan anggaran Rp.1.390.204.875,- Realisasi sebesar Rp. 1.290.785.925,- atau 92,85% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Indikator kinerja RS yaitu ALOS masih dibawah standart yang ditentukan oleh Depkes, maka perlu adanya upaya perbaikan mutu pelayanan RS sehingga nilai ALOS dapat memenuhi standart Depkes.
2. Sistem Informasi terkait Akuntansi Keuangan, sebagai RS yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) salah satu amanah yang ada dalam peraturan perundang-undangan adalah pembuatan laporan kinerja BLUD, tetapi dalam proses pembuatan laporan tersebut banyak mengalami permasalahan karena SIM RS nya belum terintegrasi dengan baik, sehingga secara manual dan lama dalam penyelesaiannya.
3. Masih ada beberapa obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan belum tercantum dalam e-katalog, dan belum semua obat dalam e-katalog tersedia, sehingga kelancaran pelayanan terganggu
4. Alat canggih CT-Scan, MRI, dan angiografi adalah untuk memenuhi standarisasi RS B Pendidikan. Namun dengan adanya biaya paket INA CBGs tidak selalu setiap kasus membutuhkan pemeriksaan alat canggih, sehingga frekuensi pemeriksaan rendah.

Solusi :

1. Perlu meningkatkan mutu pelayanan dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana yang ada khususnya tempat tidur yang bisa digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga akan mampu berkontribusi terhadap nilai capaian ALOS Rumah Sakit.

2. Menata Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terkait dengan aplikasi Akuntansi Keuangan Rumah Sakit agar data kinerja layanan bisa terintegrasi dengan kinerja keuangan.
3. Melakukan pengadaan diluar e-katalog sesuai dengan Pedoman Umum dan Pelaksanaan Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan formularium RS.
4. Mengoptimalkan penggunaan alat canggih CT-Scan, MRI, dan angiografi dengan memperhatikan biaya paket INA CBGs.

e. Penghargaan Nasional Yang Diterima

1. Presenter terbaik forum PDCA TULTA dalam International Convention On Quality Control Circle 2016 tanggal 23-25 Agustus 2016 Kategori “QCC AL-GIZAI” dari ICQCC di Bangkok Thaliand
2. Sertifikat Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya oleh Kementrian Kesehatan RI tanggal 28 September 2016
3. Sertifikat Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya oleh Kementrian Kesehatan RI tanggal 28 September 2016
4. Sertifikat Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang oleh Kementrian Kesehatan RI tanggal 28 September 2016
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Kategori “A (Memuaskan)” dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur
6. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publk Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan Predikat “Baik” dengan judul “ Inovasi emergency Kit untuk keselamatan petugas dan pasien yang utama”
7. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publk Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan Predikat “Baik” dengan judul “e-Gizi : Peningkatan Efisiensi Pelayanan Makan Pasien di RSU Haji Surabaya
8. Partisipasi sebagai Presenter di forum Indonesia Quality Convention 2016 di Golden Flower Hotel Bandung, November 29-December 2 ,2016
9. Juara 1 Gold Medal dalam Indonesian Quality Convention Tahun 2016 Kategori “PDCA TULTA” dari IQMA di Bandung 29 November-2 Desember 2016 dengan Judul QCC Flash Imaging
10. Predikat untuk Customer Loyalty Award selama 5 tahun dari Indonesia Quality Convention 2016 di Bandung 30 November 2016

2.6. RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bagi seluruh lapisan masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kesehatan jiwa yang kompeten dan profesional.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa di Rumah Sakit yang efisien dan efektif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.	1. Bed Occupancy Rate (BOR).	78,51%	76,03%	(3,16)
	2. Average Length Of Stay (ALOS).	24 hr	28 hr	16,67
	3. Bed Turn Over (BTO).	10,93 kali	9,53 kali	(12,81)
	4. Turn Over Interval.	7,18	9,21	28,27
	5. Persentase Indikator SPM yang mencapai target.	71,95%	80%	11,19
	6. Cost Recovery Rate.	46,07%	46,22%	0,33
	7. Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap seluruh layanan RS.	78,97	79,06	0,11
	8. Persentase pasien jiwa yang kembali berfungsi sosial di masyarakat.	94,39%	93,28%	(1,18)
	9. Persentase elemen akreditasi RS Versi 2012	78,08%	95,62%	22,46
	10. Persentase pasien pasung terlayani.	100%	100%	-
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap seluruh layanan RS.	78,97	79,06	0,11
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	Persentase pasien pasung terlayani.	100%	100%	-
II. Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan.	1. Persentase karyawan RS yang lulus pendidikan/ pelatihan.	68,89%	79,17%	23,14
	2. Persentase mahasiswa institusi kesehatan yang lulus praktek tepat waktu.	99,24%	97,97%	(1,28)

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
	3. Lulus akreditasi RS pendidikan.	0	0	-
	4. Persentase kecukupan SDM sesuai standar.	70%	70,21%	0,30

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur yang dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa di Rumah Sakit yang efisien dan efektif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.

➤ **Bed Occupancy Rate (BOR);**

BOR tahun 2015 adalah sebesar 78,51% dan tahun 2016 sebesar 76,03%, mengalami penurunan sebesar 3,16% karena adanya penurunan jumlah pasien rawat inap yaitu tahun 2015 sebesar 2.726 orang dan tahun 2016 sebesar 2.573 orang.

➤ **Average Length Of Stay (ALOS);**

ALOS tahun 2015 sebesar 24 hari dan tahun 2016 sebesar 28 hari, mengalami peningkatan sebesar 16,67% karena masih adanya keluarga pasien yang tidak segera menjemput pasien yang sudah waktunya dipulangkan, sehingga angka dropping pasien meningkat, dan adanya pasien pasung dengan penyulit dan komorbiditas yang memerlukan hari perawatan lebih lama.

➤ **Bed Turn Over (BTO);**

BTO tahun 2015 sebesar 10,93 kali dan tahun 2016 sebesar 9,53 kali, mengalami penurunan 12,81% karena BTO yaitu berapa kali satu tempat tidur digunakan dalam satu tahun. BTO meningkat karena adanya peningkatan ALOS, sehingga pasien menempati satu tempat tidur lebih lama.

➤ **Turn Over Interval;**

TOI tahun 2015 sebesar 7,81 hari dan tahun 2016 sebesar 9,21 hari, mengalami kenaikan sebesar 28,27%. TOI meningkat bukan berarti semakin baik, karena TOI adalah rata – rata lama tempat tidur tidak dipakai dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. TOI meningkat karena adanya peningkatan BTO, yang disebabkan karena meningkatnya ALOS.

➤ **Persentase Indikator SPM yang mencapai target;**

Persen SPM mencapai target tahun 2015 sebesar 71,95% dan tahun 2016 sebesar 80%, mengalami peningkatan 11,19% karena dari adanya indikator capaian SPM yang meningkat di tahun 2016 yaitu Indikator layanan 1) Rawat Jalan, 2) Rawat Inap, 3) UPIP, 4) Radiologi & Elektromedik, 5) Laboratorium, 6) Farmasi, dan 7) Pengelolaan Limbah sedangkan 11 indikator layanan lainnya adalah tetap atau menurun.

➤ **Cost Recovery Rate;**

CRR tahun 2015 sebesar 46,07% dan tahun 2016 sebesar 46,22 mengalami peningkatan sebesar 0,33 karena adanya peningkatan pendapatan yaitu tahun 2015 sebesar Rp 30.328.550.502,78 dan tahun 2016 sebesar Rp 32.165.911.071,79%.

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (Konversi) terhadap seluruh layanan RS;**

IKM tahun 2015 sebesar 78,97 dan tahun 2016 sebesar 79,06, mengalami peningkatan sebesar 0,11% karena meningkatnya unsur penilaian yang dinilai baik/ meningkatnya pengunjung yang menyatakan puas terhadap pelayanan di RSJ Menur di tahun 2016 dibanding tahun 2015.

➤ **Persentase pasien jiwa yang kembali berfungsi sosial di masyarakat;**

Persentase pasien jiwa yang kembali berfungsi sosial di masyarakat tahun 2015 sebesar 94,39% dan tahun 2016 sebesar 93,28%, mengalami penurunan sebesar 1,18% karena meningkatnya pasien pulang atas permintaan keluarga (tahun 2015 sebesar 3,15% dan tahun 2016 sebesar 4,04%) dan meningkatnya pasien pulang karena dropping (tahun 2015 sebesar 0,95% dan tahun 2016 sebesar 1,52%).

➤ **Persentase elemen akreditasi RS Versi 2012;**

Persen Elemen Akreditasi tahun 2015 sebesar 78,08% dan tahun 2016 sebesar 95,62% mengalami peningkatan sebesar 22,46% karena adanya upaya RS untuk menindaklanjuti dan memperbaiki hasil rekom KARS di tahun 2015 sehingga elemen yang tadinya menjadi rekom di tahun 2015 sebanyak 260 elemen, menurun menjadi 52 elemen di tahun 2016.

➤ **Persentase pasien pasung terlayani.**

Persentase pasien pasung terlayani tahun 2015 sebesar 100% dan tahun 2016 sebesar 100%, capaian adalah tetap karena target adalah 100% artinya semua pasien pasung yang datang ke RS Jiwa Menur semua terlayani. Pasien pasung terlayani tahun 2015 sebesar 59 orang dan tahun 2016 sebesar 109 orang. Hal ini juga karena adanya kebijakan Gubernur, Jatim Bebas Pasung, dan adanya Program MLM pasung, sehingga terjadi peningkatan pasien dan rujukan pasung ke RSJ Menur.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan.

➤ **Persentase karyawan RS yang lulus pendidikan/ pelatihan;**

Persentase karyawan RS yang lulus pendidikan/ pelatihan tahun 2015 sebesar 68,89% dan tahun 2016 sebesar 79,17%, meningkat sebesar 23,14% karena adanya evaluasi TW III, masih ada 218 orang yang belum mengikuti pelatihan. Upaya/ kebijakan yang dilakukan di TW IV yaitu efisiensi pelatihan orientasi pegawai selama 2 hari untuk 60 orang karyawan menjadi untuk 120 orang karyawan. Pelatihan meliputi BLS, PMKP, K3 dan Disiplin Pegawai.

➤ **Persentase mahasiswi institusi kesehatan yang lulus praktek tepat waktu;**

Persentase mahasiswi institusi kesehatan yang lulus praktek tepat waktu tahun 2015 sebesar 99,24% dan tahun 2016 sebesar 97,97% menurun sebesar 1,28% karena adanya mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan kelulusan yang akan ditempuh pada periode / triwulan berikutnya.

➤ **Lulus akreditasi RS pendidikan;**

Lulus akreditasi RS pendidikan capaian tahun 2015 sebesar 0% dan tahun 2016 sebesar 0%, capaian tetap karena Adanya peraturan baru dalam Akreditasi RS Pendidikan, sehingga di tahun 2016 masih dalam proses pemantapan SDM, dan telah dilakukan proses penyusunan MoU Tri Parteid : 1) RSJ Menur, 2) Institusi Pendidikan (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya) dan 3) RS Pengampu (RSUD SDA). Akreditasi akan dilakukan di awal tahun 2017.

➤ **Persentase kecukupan SDM sesuai standar.**

Persentase kecukupan SDM tahun 2015 sebesar 70% dan meningkat tahun 2016 sebesar 70,21%, capaian meningkat sebesar 0,30%.

c. Program

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD dengan anggaran Rp. 5.841.700.000,- Realisasi sebesar Rp. 5.102.437.254,- atau 87,35% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan yang terdiri realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp. 24.350.000,- Realisasi sebesar Rp. 23.914.000,- atau 98,21% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan yang terdiri realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Meningkatnya ALOS dan menurunnya BTO karena adanya pasien pasung dengan penyulit dan komorbiditas dan masih kurangnya perhatian dari pihak keluarga pasien, sehingga hari perawatan lebih panjang dan mengurangi kunjungan dari pasien rawat inap.
2. Masih adanya fungsi layanan (SPM) yang meskipun mengalami peningkatan di tahun 2016 namun belum mencapai standar 100% antara lain di IGD, RJ, RI, UPIP, Radiologi, Laboratorium, Farmasi, RM, Admin, IPS dan PPI.

3. Belum tercapainya IKM meskipun tahun 2016 telah meningkat dibanding tahun 2015, karena masih adanya pengunjung yang menyatakan kurang puas/ menilai masih ada unsur yang dinilai kurang baik pada layanan RSJ Menur.
4. Belum tercapainya akreditasi RS Pendidikan karena adanya peraturan baru dalam Akreditasi RS Pendidikan, sehingga di Tahun 2016 masih dalam proses pemantapan SDM, Akreditasi akan dilakukan di awal 2017

Solusi :

1. Penyuluhan pada keluarga pasien untuk peningkatan kepedulian pada penderita, sehingga angka lama dirawat tidak terlalu panjang.
2. Pengusulan peningkatan kualitas SDM pemberi pelayanan khususnya di Ruang IGD, UPIP dan R. Inap untuk peningkatan standard layanan.
3. Penambahan SDM kesehatan untuk mempertahankan standard layanan (adanya tenaga purna tugas) yaitu Spesialis P. Dalam, Patologi Klinik, Sp.KJ dan Sp. JP.
4. Penambahan sarpras (baik alkes maupun IT), perbaikan alur layanan, perbaikan penjadwalan yang sifatnya dapat menambah kecepatan layanan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

1. Lulus Survelans ke I ISO Versi 9001 : 2008, tanggal 1 April 2016, oleh TUV Nord.
2. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional untuk program “MLM Pasung, Cara Cepat Jatim Bebas Pasung”, diterima tanggal 18 April 2016 di Jatim Expo Surabaya, disampaikan oleh Mentri PANRB RI, Yuddy Chrisnandy.
3. TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik Nasional untuk program “ MLM Pasung, Cara Cepat Jatim Bebas Pasung” diterima tanggal 26 Mei 2016 di Hotel Bidakara Jakarta, disampaikan oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla.
4. Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2016 dengan predikat Nilai Kategori A (Memuaskan), diterima tanggal 6 Desember 2016 di Gedung Negara Graha di Surabaya, disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
5. Lulus Survey Verifikasi I Akreditasi Versi 2012, tanggal 17 Desember 2016, oleh KARS.

2.7. RUMAH SAKIT KARSA HUSADA BATU

a. Tujuan

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berprinsip pada keselamatan pasien dengan standar akreditasi.
- Mewujudkan pelayanan unggulan respirasi paripurna rumah sakit.
- Mewujudkan rumah sakit yang memiliki kemampuan manajemen dan teknologi informasi yang memadai.
- Mewujudkan RSU Karsa Husada Batu sebagai RS kelas B pendidikan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan serta SDM di rumah sakit	a. BOR (%)	42,64	54,21	27,13
	b. ALOS (hari)	3,55	3,1	(12,67)
	c. TOI (hari)	4,80	2,88	(40)
	d. BTO (kali)	43,61	58,26	33,59
	e. NDR (permil)	22,92	22,65	(1,17)
	f. GDR (permil)	49,59	46,88	(5,78)
	g. Tingkat Kelulusan akreditasi versi 2012	-	60	60,00
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase cakupan kinerja pelayanan rumah sakit	65,00	91,00	40
II. Meningkatnya jenis layanan di bidang respirasi	Persentase pengembangan jenis pelayanan di bidang respirasi	50,00	50,00	-
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase angka keberhasilan MDGs	80,00	60,00	(25)
III. Meningkatnya jenis pelayanan kesehatan setara rumah sakit kelas B	Persentase jenis pelayanan kesehatan sesuai standar RSU Kelas B	72,20	81,48	12,85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	Prosentase sarana prasarana RS sesuai standar Kemenkes	65,00	79,00	21,53

Pada Tahun 2015 - 2016 kinerja UPT RSU Karsa Husada Batu yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan serta SDM di rumah sakit , ditetapkan 7 Indikator Kinerja, yaitu :

➤ **BOR;**

Bed Occupancy Rate (BOR) pada Tahun 2015 adalah sebesar 42,64% dan pada tahun 2016 sebesar 54,21% (mengalami peningkatan sebesar 27,13%). BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, hal ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Peningkatan BOR ini merupakan indikasi bahwa masyarakat semakin percaya dengan perawatan di RSU Karsa Husada Batu sehingga jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan yang *significant* dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin berkembangnya jenis layanan yang ada di RSU Karsa Husada Batu juga berdampak positif terhadap peningkatan BOR ini.

➤ **ALOS;**

Average Length of Stay (ALOS) pada Tahun 2015 adalah sebesar 3,55 hari dan pada tahun 2016 sebesar 3,1 hari (mengalami penurunan 12,67%). ALOS yaitu rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Semakin lama angka ALOS menunjukkan adanya pelayanan rumah sakit yang semakin menurun atau terjadi inefisiensi dalam pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit, sebaliknya semakin pendek periode ALOS berarti juga terjadi ketidaktepatan dalam pemberian layanan kesehatan. Dengan kata lain terjadi pula penurunan layanan kesehatan. Jangka waktu layanan yang ideal atau angka ALOS yang ideal antara tujuh sampai dengan sembilan

hari. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Semakin efisien rumah sakit memberikan pelayanannya, maka pasien semakin terpuaskan kebutuhannya akan jasa layanan kesehatan.

➤ **TOI;**

Turn Over Interval (TOI) pada Tahun 2015 adalah sebesar 4,80 hari dan pada tahun 2016 sebesar 2,88 hari (mengalami penurunan 40%). TOI rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Penggunaan tempat tidur relatif efisien dan masih terdapat kesempatan bagi petugas untuk melaksanakan prosedur pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit.

➤ **BTO;**

Bed Turn Over (BTO) pada Tahun 2015 adalah sebesar 43,61 kali dan pada tahun 2016 sebesar 58,26 kali (mengalami peningkatan 33,59%). BTO yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur atau dengan kata lain berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Capaian BTO ini sangat terkait dengan ALOS kita yang juga masih dibawah standar sehingga mempengaruhi tingginya frekuensi pemakaian tempat tidur.

➤ **NDR;**

Nett Death Rate (NDR) pada Tahun 2015 adalah sebesar 22,92 Permil dan pada tahun 2016 sebesar 22,65 permil (mengalami penurunan 1,17%). NDR adalah angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Penurunan angka kematian ini memperlihatkan adanya

keberhasilan upaya *patient safety* yang makin gencar dijalankan di sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasien/pelanggan dan akreditasi pelayanan versi 2012.

➤ **GDR;**

Gross Death Rate (GDR) pada Tahun 2015 adalah sebesar 49,59 Permil dan pada tahun 2016 sebesar 46,88 permil (mengalami penurunan 5,78%). GDR yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, ini juga memberikan gambaran mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Masih tingginya angka kematian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ; tingkat kegawatan pasien saat datang di RS serta adanya penyakit komplikasi.

➤ **Tingkat Kelulusan akreditasi versi 2012;**

Tingkat Kelulusan akreditasi versi 2012 pada Tahun 2015 adalah sebesar 0% dikarenakan RS belum melaksanakan penilaian akreditasi, masih dalam tahap persiapan survey dan pada tahun 2016 sebesar 60% dari persiapan menuju akreditasi paripurna (mengalami peningkatan 60%).

Sasaran 2 : Meningkatnya jenis layanan di bidang respirasi, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu :

➤ **Persentase pengembangan jenis pelayanan di bidang respirasi**

Persentase pengembangan jenis pelayanan di bidang respirasi pada Tahun 2015 adalah sebesar 50,00% dan pada tahun 2016 sebesar 50,00% (stabil). Upaya yang dilakukan RSU Karsa Husada untuk mengoptimalkan pelayanan paru khususnya TB adalah dengan membangun gedung baru untuk pelayanan umum sehingga ke depannya bangunan yang saat ini sudah tersedia bisa dimaksimalkan untuk pengembangan layanan paru. Beberapa jenis pelayanan paru yang direncanakan akan dikembangkan di RSU Karsa Husada Batu antara lain: Poli Asma, Poli TB DOTS, Poli

Paru, Poli Onkologi, Poli TB Imunologi dan Poli TB MDR. Sampai dengan tahun 2015, poliklinik yang sudah ada di RSUD Karsa Husada antara lain Poli Asma, Poli Paru dan Poli TB DOTS.

Sasaran 3 : Meningkatnya jenis pelayanan kesehatan setara rumah sakit kelas B, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu :

- **Persentase jenis pelayanan kesehatan sesuai standar RSUD Kelas B;**
 Persentase jenis pelayanan kesehatan sesuai standar RSUD Kelas B pada Tahun 2015 adalah sebesar 72,20 dan pada tahun 2016 sebesar 81,48% (mengalami peningkatan 12,85%). Dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yaitu: minimnya ruangan yang tersedia sehingga RS sulit untuk melakukan pengembangan baik poliklinik rawat jalan maupun penambahan tempat tidur ruang rawat inap. Sementara gedung baru masih dalam tahap pembangunan.

Tabel 4.8 Jenis pelayanan kesehatan sesuai standar RSUD Kelas B

NO.	PERSYARATAN	STANDAR RS UMUM KELAS B	KONDISI RSUD KARSAS HUSADA BATU TH 2016	KETERANGAN
I. Pelayanan				
A. Pelayanan Medik Umum				
1.	Pelayanan medik dasar	+	Ada	Memenuhi
2.	Pelayanan medik gigi mulut	+	Ada	Memenuhi
3.	Pelayanan KIA/KB	+	Ada	Memenuhi
B. Pelayanan Gawat Darurat				
1.	24 jam & 7 hari seminggu	+	Ada	Memenuhi
C. Pelayanan Medik Spesialis Dasar				
1.	Penyakit Dalam	+	Ada	Memenuhi
2.	Kesehatan Anak	+	Ada	Memenuhi
3.	Bedah	+	Ada	Memenuhi
4.	Obstetri & Ginekologi	+	Ada	Memenuhi
D. Pelayanan Spesialis Penunjang Medik				
1.	Anestesiologi	+	Ada	Memenuhi
2.	Radiologi	+	Ada	Memenuhi

NO.	PERSYARATAN	STANDAR RS UMUM KELAS B	KONDISI RSU KARSA HUSADA BATU TH 2016	KETERANGAN
3.	Patologi Klinik	+	Ada	Memenuhi
4.	Patologi Anatomi	+	Tidak Ada	Belum Memenuhi
5.	Rehabilitasi Klinik	+	Ada	Memenuhi
E.Pelayanan Medik Spesialis Lain				
1.	Mata	+	Ada	Memenuhi
2.	Telinga Hidung Tenggorokan	+	Ada	
3.	Syaraf	+	Ada	
4.	Jantung dan Pembuluh Darah	+	Ada	
5.	Kulit dan Kelamin	+	Ada	
6.	Kedokteran Jiwa	+	Belum Ada	
7.	Paru	+	Ada	
8.	Orthopedi	+	Ada	
9.	Urologi	+	Ada	
10.	Bedah Syaraf	+	Belum Ada	
11.	Bedah Plastik	+	Ada	
12.	Kedokteran Forensik	+	Belum Ada	
F.Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut				
1.	Bedah Mulut	+	Ada	Memenuhi
2.	Konservasi / endodontsi	+	Belum Ada	
3.	Orthodonti	+	Ada	
G.Pelayanan Medik Subspesialis				
1.	Bedah	+	Ada	Memenuhi
2.	Penyakit Dalam	+	Belum Ada	
3.	Kesehatan Anak	+	Belum Ada	
4.	Obstetri dan Ginekologi	+	Ada	
H.Pelayanan Kefarmasian				
1.	Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai	+	Ada	Memenuhi

NO.	PERSYARATAN	STANDAR RS UMUM KELAS B	KONDISI RSU KARSA HUSADA BATU TH 2016	KETERANGAN
2.	Farmasi klinik	+	Ada	Memenuhi
I. Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan				
1.	Asuhan keperawatan generalis dan spesialis	+	Ada	Memenuhi
2.	Asuhan kebidanan	+	Ada	Memenuhi
J. Pelayanan Penunjang Klinik				
1.	Pelayanan bank darah	+	Belum Ada	Belum Memenuhi
2.	Perawatan intensif	+	Ada	Memenuhi
3.	Gizi	+	Ada	Memenuhi
4.	Sterilisasi instrumen	+	Ada	Memenuhi
5.	Rekam medic	+	Ada	Memenuhi
K. Pelayanan Penunjang Non Klinik				
1.	Laundry/Linen	+	Ada	Memenuhi
2.	Jasa boga/dapur	+	Ada	Memenuhi
3.	Teknik dan pemeliharaan Fasilitas	+	Ada	Memenuhi
4.	Pengelolaan limbah	+	Ada	Memenuhi
5.	Gudang	+	Ada	Memenuhi
6.	Ambulans	+	Ada	Memenuhi
7.	Sistem informasi dan komunikasi	+	Ada	Memenuhi
8.	Pemulasaran jenazah	+	Belum Ada	Belum Memenuhi
9.	Sistem penanggulangan kebakaran	+	Ada	Memenuhi
10.	Pengelolaan gas medik	+	Ada	Memenuhi
11.	Pengelolaan air bersih	+	Ada	Memenuhi
L. Pelayanan Rawat Inap				
1.	Jumlah TTperawatan kelas III (RS Pemerintah)	30%	55%	Memenuhi

NO.	PERSYARATAN	STANDAR RS UMUM KELAS B	KONDISI RSU KARSA HUSADA BATU TH 2016	KETERANGAN
2.	Jumlah TT perawatan intensif (RS Pemerintah &Swasta)	5%	3,6%	Belum Memenuhi

c. Program

1. Program Upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran Rp 1.650.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.089.010.465,00 atau 66,00% (dari segi penyerapan anggaran) untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp 141.495.401.400,00 dengan realisasi sebesar 132.649.357.860,00 atau 93,75 % untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp 35.453.066.480,00 dengan realisasi sebesar Rp 39.785.777.748,00 atau 112,22% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Distribusi tempat tidur pasien yang kurang optimal, sehingga capaian BOR di beberapa ruang rawat inap belum optimal.
2. Pengukuran indikator Standar Pelayanan Minimal RS belum berjalan dengan tertib dan lengkap.
3. Kurangnya SDM dan fasilitas pendukung Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

4. Survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan rumah sakit belum bisa memberikan gambaran yang riil mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja RS.
5. Minimnya ruangan yang tersedia sehingga RS sulit untuk melakukan pengembangan baik poliklinik rawat jalan maupun penambahan tempat tidur ruang rawat inap.
6. Belum ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan

Solusi:

1. Review Renstra sesegera mungkin agar pembangunan RS menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.

2.8 RUMAH SAKIT PARU JEMBER

a. Tujuan

- Umum

Menjadi rumah sakit sistem respirasi dan sistem sirkulasi pembuluh darah berstandart internasional tipe A yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- Khusus

- 1) Memberikan pelayanan dan rujukan, preventif, promotif dan rehabilitatif penyakit paru dan sistem pernafasan yang memenuhi kaedah medis dan kepuasan pelanggan.
- 2) Melaksanakan konsep-konsep kendali mutu, patient centered, patient safety, health promotion, paperless hospital dan green hospital
- 3) Rekrutment sumber daya manusia sesuai perkembangan dan kebutuhan rumah sakit, memberikan pelatihan hard skill maupun soft skill.
- 4) Membangun dan memelihara (standarisasi) sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar internasional dan up to date.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan kualitas lingkungan lengkap dan penanganan limbah rumah sakit.
- 6) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna pelayanan kesehatan sistem respirasi dan sistem sirkulasi pembuluh darah.
- 7) Mengembangkan pusat informasi dan jejaring pelayanan kesehatan berbasis informasi dan teknologi.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Meningkatnya health promotion hospital sebagai pusat informasi, jejaring pelayanan kesehatan paru, bedah,	Kegiatan promosi kesehatan kepada pasien TB baru di rumah sakit	96,15	98,89	2,85

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
jantung dan penelitian pengembangan teknologi kesehatan tepat guna				
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan P2TB wilayah binaan di RS Paru Jember	100	75	(25)
2. Meningkatnya kuantitas dan pelayanan kesehatan paru, bedah, jantung dan penyakit lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara komprehensif dan paripurna berstandar internasional	1. BOR (%) 2. GDR (‰) 3. NDR (‰) 4. IKM (%) 5. Prosentase elemen akreditasi yang memenuhi standar internasional (lembaga yang diakui ASQUA) (%) 6. Angka kesembuhan pasien TB (%)	66,36 59,51 31,60 80,64 75 77	56,56 49,45 25,96 78,6 85 95	(14,76) (16,90) (17,85) (2,53) 13,33 23,37
➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase responden yang puas terhadap fasilitas/ sarana prasarana RS yang tersedia	74,44	79,96	7,41
➤ Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Tingkat kebutuhan kegiatan operasional Rumah Sakit (bln)	12	12	0

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 RS Paru Jember adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya health promotion hospital sebagai pusat informasi, jejaring pelayanan kesehatan paru, bedah, jantung dan penelitian pengembangan teknologi kesehatan tepat guna

- Kegiatan promosi kesehatan kepada pasien TB baru di rumah sakit pada tahun 2015 sebesar 96,15% dan pada tahun 2016 sebesar 98,89% (mengalami kenaikan sebesar 2,85% dari tahun sebelumnya). Hal ini dikarenakan RS Paru Jember semakin berinovasi untuk melaksanakan kegiatan TB baik

dalam hal pencarian kasus hingga pengobatan yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, tokoh masyarakat, maupun puskesmas-puskesmas yang ada dititik-titik sasaran promosi kesehatan kawasan Luberbondowangi.

Sasaran 2 : Meningkatkan kuantitas dan pelayanan kesehatan paru, bedah, jantung dan penyakit lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara komprehensif dan paripurna berstandar internasional

- BOR (Bed Occupancy Ratio) RS Paru Jember pada tahun 2015 sebesar 66,36% dan pada tahun 2016 sebesar 56,56% (mengalami penurunan sebesar 14,76% dari tahun sebelumnya). Hal ini dikarenakan rumus perhitungan BOR pada tahun 2015 menggunakan 55 TT, sedangkan pada tahun 2016 rumus perhitungan BOR menggunakan 69 (peningkatan jumlah TT RS) sehingga mempengaruhi hasil prosentase capain.
- GDR (Gross Death Rate) RS Paru Jember pada tahun 2015 sebesar 59,51 permil dan pada tahun 2016 sebesar 49,45 permil (mengalami penurunan sebesar 16,90 permil dari tahun sebelumnya). Penurunan dalam hal ini masuk dalam kriteria baik karena terkait dengan jumlah angka kematian yang terjadi di RS dalam kurun waktu 1 tahun.
- NDR (Nett Death Rate) Paru Jember pada tahun 2015 sebesar 31,60 permil dan pada tahun 2016 sebesar 25,96 permil (mengalami penurunan sebesar 17,85 permil dari tahun sebelumnya). Penurunan dalam hal ini masuk dalam kroteria baik karena terkait dengan jumlah angka kematian yang terjadi di RS saat dirawat di RS (kematian >48 jam)
- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di RS Paru Jember pada tahun 2015 sebesar 80,64% dan pada tahun 2016 sebesar 78,6% (mengalami penurunan sebesar 2,53% dari tahun

sebelumnya). Hal ini dikarenakan sarana prasarana RS yang pada saat itu sedang dalam pemeliharaan sehingga secara langsung mempengaruhi jalannya pemberian pelayanan di RS.

- Prosentase elemen akreditasi yang memenuhi standar internasional (lembaga yang diakui ASQUA) pada tahun 2015 sebesar 75% dan pada tahun 2016 sebesar 85% (mengalami peningkatan sebesar 13,33% dari tahun sebelumnya). Hal ini dikarenakan RS Paru Jember sudah mulai melengkapi kebutuhan baik secara dokumentasi maupun sarana prasarana dalam rangka akreditasi RS tipe B untuk tahun 2017.
- Angka kesembuhan pasien TB pada tahun 2015 sebesar 77% dan pada tahun 2016 sebesar 95% (mengalami peningkatan sebesar 23,37% dari tahun sebelumnya). Hal ini dikarenakan pelayanan yang dilaksanakan khususnya bagi pasien TB semakin baik. Didukung dengan para tenaga medis yang profesional dan mencukupi, peralatan medis yang tersedia juga semakin canggih, serta pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dalam upaya mencari masyarakat suspect TB.

c. Program

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp. 49.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.777.755,- atau 85,81% (dari segi penyerapan anggaran) untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp. 42.480.430.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.686.806.860,- atau 95,78% (dari segi penyerapan anggaran) untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

3. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp. 21.386.439.361,15 dengan realisasi Rp. 18.561.691.654,- atau 86,79% dari segi penyerapan anggaran) untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. tidak tercapainya target PAD (pendapatan) disebabkan adanya masa peralihan untuk penentuan tarif RS dari tipe C menjadi B serta masih kurangnya fasilitas sarana prasarana yang ada di ruang OK (instalasi bedah) sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan dari OK (instalasi bedah) tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan pengadaan yang ada di anggaran fungsional (pemenuhan kebutuhan operasional RS ada sedikit kendala).
2. masih adanya responden yang belum puas terhadap fasilitas/ sarana prasarana yang telah tersedia di rumah sakit.

Solusi :

1. pemenuhan usulan anggaran khususnya untuk kelengkapan sarana prasarana RS seperti peralatan kedokteran dan kesehatan lainnya, pemeliharaan sarana prasarana baik dalam bentuk gedung maupun peralatan medis RS, serta pembangunan gedung agar dipenuhi guna kelancaran dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
2. Rapat tindak lanjut dengan pihak manajemen.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

1. Juara I Call For Abstract Of Health Technology Assestment (HTA) – FK UGM
2. Hospital Service Excellent Award 2016
3. Juara III Kreasi Seni (ARSABAPI) di Semarang
4. Rekor Bisnis dan Profesional Indonesia “Rekor Penghargaan Indonesia”
5. Penghargaan untuk RS Paru Jember Kategori “Penyusunan SAKIP dengan Nilai BB (Sangat Baik)”

2.9. RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN

a. Tujuan

- Meningkatkan kepuasan konsumen
- Meningkatkan capaian upaya pengendalian penyakit TB

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Rumah Sakit	1. Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus	85%	86%	1,18%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RS	85%	85%	-
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1. Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus	85%	86%	1,18%
2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RS	85%	85%	-
II. Meningkatnya Capaian Upaya Pengendalian Penyakit TB	1. Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TB	75%	79%	5,33%
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TB	75%	79%	5,33%

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016:

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Rumah Sakit Paru Dungus yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Rumah Sakit

➤ **Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus.**

Persentase Capaian SPM Rumah Sakit Paru Dungus pada Tahun 2015 adalah sebesar 85% pada tahun 2016 sebesar 86%. Dengan hasil ini berarti dari indikator dalam SPM sebagian besar sudah mencapai target tahun 2016, yaitu sebesar 86%. Hal ini menggambarkan bahwa dari indikator yang ada di Rumah Sakit Paru Dungus sebanyak 72 indikator, tercapai sebanyak 63 indikator. Peningkatan capaian SPM sebesar 1,18 %, disebabkan adanya tambahan 2 indikator yang memenuhi target, yaitu di IGD dan unit radiologi. Adanya peningkatan capaian target tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaan dokter spesialis dan penambahan sarana penunjang pelayanan.

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RS;**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RS pada Tahun 2015 adalah sebesar 85% dan pada tahun 2016 sebesar 85%. Dengan hasil ini berarti rumah sakit telah dapat mempertahankan indeks kepuasan konsumen dalam kategori **BAIK**. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya kegiatan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam bentuk penambahan pengetahuan baik dalam bentuk inhouse traing maupun mengikutsertakan SDM RS dalam kursus dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh pihak ketiga diluar rumah sakit, serta pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur selaku SKPD dari UPT Rumah Sakit Paru Dungus.

Sasaran 2: Meningkatnya Capaian Upaya Pengendalian Penyakit TB, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu :

➤ **Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TB;**

Indikator kinerja Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan TB pada Tahun 2015 sebesar 75% pada tahun 2016 sebesar 79%. Hal ini

menggambarkan bahwa program pengendalian penyakit TBC di rumah sakit paru dungus cukup baik, walaupun masih perlu dioptimalkan untuk mencapai target nasional, yaitu sebesar 85%. Pasien TBC yang ditemukan selama tahun 2016 sebanyak 225 pasien, yang diobati di Rumah Sakit Paru Dungus sebanyak 238 pasien, sebanyak 44 pasien pengobatannya dilakukan di puskesmas. Dari 181 pasien yang ditemukan dan sisa pasien masa pengobatan tahun 2015 sebanyak 238 yang diobati, yang dinyatakan sembuh dan dengan pengobatan lengkap sebanyak 188 pasien, 40 pasien masih dalam masa pengobatan, pasien meninggal sebanyak 6 pasien, 4 pasien putus berobat. Peningkatan angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 5,33%, disebabkan adanya beberapa kegiatan yang proaktif yang dilaksanakan baik didalam rumah sakit maupun di masyarakat langsung, berupa penyuluhan rutin di rumah sakit, deteksi dini penyakit paru di masyarakat daerah resiko, pelacakan pasien mangkir berobat, pertemuan dan paguyuban pasien dan mantan pasien TB, serta monitoring program secara berkelanjutan.

c. Program

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran Rp 10.085.214.936,- Realisasi sebesar Rp 9.684.385.189,- atau 96,03% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan anggaran Rp 10.648.015.603,- Realisasi sebesar Rp 7.949.123.782,- atau 74,65% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran Rp 437.047.500,- Realisasi sebesar Rp 387.281.599,- atau 88,61% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Permasalahan yang masih dihadapi sampai triwulan keempat ini adalah pendapatan fungsional belum tercapai secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar pasien RS Paru Dungus adalah pasien BPJS. Sedangkan BPJS memiliki kebijakan rujukan berjenjang, akibatnya dari rujukan yang berjenjang tersebut kunjungan pasien di RS Paru Dungus menjadi menurun.

Solusi:

Untuk tahun 2017 RS Paru Dungus bertekad untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat, maka diperlukan peningkatan kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan dan promosi kesehatan secara langsung kepada masyarakat.

2.10. RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI

a. Tujuan

Meningkatkan derajat kesehatan secara optimal melalui penyelenggaraan kesehatan meliputi upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang didukung upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan serta sebagai pusat rujukan di wilayah Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan termasuk tenaga medis dan non medis secara merata	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang tersedia sesuai standar	83,5	86,18	3,2
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta	400 org	762 org	90,5
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,09	80,06	1,22
II. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Persentase upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat	65	70	7,6
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Bed Occupation Rate (BOR)	22,18	12,99	-41,4

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Rumah Sakit Kusta Kediri yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan termasuk tenaga medis dan non medis secara merata.

- Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang tersedia sesuai standar, pada tahun 2015 sebesar 83,5% dan tahun 2016 sebesar 86,18% mengalami peningkatan dengan tingkat kemajuan 3,2%. Hasil dari capaian program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator terlaksananya pemeriksaan evaluasi serologi di daerah endemis kusta dari tahun 2015 – 2016 dengan tingkat kemajuan 90,5% dari kegiatan pelayanan kusta keliling dan promkes di 18 kab/kota, dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan indikator IKM dari tahun 2015-2016 dengan tingkat kemajuan 1,22% hal ini dipengaruhi dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

- Persentase upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, pada tahun 2015 sebesar 65% dan tahun 2016 sebesar 70% mengalami peningkatan dengan tingkat kemajuan 7,6%. Hal ini dipengaruhi oleh program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan indikator Bed Occupation Rate (BOR) yang tidak dapat terpenuhi dengan tingkat kemajuan -41,4%, hal ini disebabkan jumlah pasien kusta yang berobat berkurang.

c. Program

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran Rp 396.560.000,- Realisasi sebesar Rp 340.596.323,- atau 85,89 % untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp 2.500.000.000,- Realisasi sebesar Rp 2.103.090.800,- atau 84,12 % untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp 8.844.569.082,06 Realisasi sebesar Rp 6.227.487.912,- atau 70,41 % untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Perubahan Nomenklatur Rumah Sakit Kusta menjadi Rumah Sakit Umum.
2. Penambahan Aset Lahan tanah milik PU Bina Marga.
3. Penambahan tenaga dokter spesialis definitif (4 spesialis dasar) .

Solusi :

1. Rumah Sakit Kusta Kediri saat ini sedang melakukan proses perubahan Nomenklatur Rumah Sakit sesuai dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor 445/8210/101.4/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Perubahan Nomenklatur Rumah Sakit Kusta Kediri.
2. Dengan penambahan sarana prasarana kesehatan yang memadai.
3. Dengan penambahan tenaga kesehatan yang profesional.

2.11. RUMAH SAKIT KUSTA SUMBERGLAGAH

a. Tujuan

Mewujudkan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah sebagai penyedia layanan kesehatan individu yang berkualitas dan paripurna bagi pengguna jasa dan penyedia jasa baik penderita kusta maupun non kusta.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Kegiatan evaluasi serologi terlaksana	49%	48%	-1%
	2. Pasien yang mendapatkan MDT dilakukan Charting dan POD di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah	100%	100%	100%
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta	146 anak	145 anak	-1 anak
II. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standarisasi Rumah Sakit.	Tingkat pemenuhan sarana rumah sakit type C	60%	65%	8,3 %
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan BLUD	60%	65%	8,3%
2. Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Sarana, prasarana dan kebutuhan operasional Rumah Sakit terpenuhi.	70%	75%	7,1 %

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Rumah Sakit Kusta Sumberglagah yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

➤ **Kegiatan evaluasi serologi terlaksana.**

Kegiatan serologi di Raas dan Nguling yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Kusta Sumberglagah pada Tahun 2015 adalah sebesar 49% pada tahun 2016 sebesar 48%.. Hal ini menggambarkan bahwa dari indikator yang ada mengalami penurunan dari jumlah anak yang diperiksa dari target 301 anak ke 146 anak tahun 2015 dan 145 anak tahun 2016 karena :

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terutama untuk penderita Sub Klinis Kusta yang dievaluasi belum optimal karena salah satunya :
 - Pada saat pemeriksaan ulang mereka banyak yang keluar dari lingkungan penelitian karena pindah domisili (Ikut suami) atau telah melanjutkan sekolah.
 - Saat dilakukan pemeriksaan mereka tidak hadir (Sakit/Ijin)

➤ **Pasien yang mendapatkan MDT dilakukan charting dan POD di Rumah sakit Kusta Sumberglagah.**

Pasien MDT pada tahun 2015 sebanyak 48 Orang dilakukan Charting dan POD dan Tahun 2016 sebanyak 50 orang dilakukan charting dan POD.Hal ini sangat mempegaruhi Pasien masa pengobatan sampai dinyatakan RFT.

Sasaran 2 : Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sesuai stardarisasi Rumah sakit, ditetapkan 1 Indikator Kinerja, yaitu :

➤ **Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan BLUD;**

Indikator kinerja pada Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan BLUD, Persentase realisasi pada Tahun 2015 sebesar 60% pada tahun 2016 sebesar 65%. Hal ini

menggambarkan bahwa tingkat pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit Kusta Sumberglagah cukup, walaupun masih dirasa perlu penambahan sarana dan prasarana atau dioptimalkan.

c. Program

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran Rp 265.610.000,- Realisasi sebesar Rp 141.491.304,- atau 53,27 % untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran Rp 2.500.000.000,- Realisasi sebesar Rp 2.035.070.822,- atau 81,40% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan anggaran Rp 28.462.433.722,- Realisasi sebesar Rp 25.894.837.330,- atau 90,98% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Kegiatan : Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kepada Masyarakat.

Dari hasil kegiatan pemeriksaan serology kusta subklinis yang dilakukan di Kepulauan RAAS dan Kecamatan Nguling ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- A. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal masih perlu adanya peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor baik yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi maupun yang ada di Kabupaten/Kota.

- B. Kegiatan pemeriksaan serologi yang dilaksanakan oleh pihak TDC membutuhkan waktu yang lama, hal ini mempengaruhi rencana waktu kegiatan intervensi di daerah.
2. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum daerah.

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan RS/RS Khusus/BP4

Permasalahan yang masih dihadapi sampai triwulan keempat ini pendapatan fungsional belum terealisasi sesuai target, salah satunya penyebabnya karena klaim BPJS bulan November dan Desember 2016 tidak bisa realisasi karena ada perubahan sistem aplikasi dari BPJS akibatnya pendapatan fungsional tidak mencapai target .

Solusi :

1. Solusi kegiatan pemeriksaan serology kusta subklinik yang dilakukan di Kepulauan RAAS dan Kecamatan Nguling dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :
 - a. Kegiatan Screening dan Monitoring Evaluasi di kabupaten/Kota:
 - b. Aktif melakukan program evaluasi ke daerah.
 - c. Melakukan koordinasi dengan TDC untuk ketepatan target waktu untuk kegiatan serologi.
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait agar bisa terealisasi klaim BPJS tersebut.

2.12 RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Mewujudkan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagai pemberi pelayanan kesehatan mata yang bermutu, efektif dan efisien secara paripurna (Promotif, Preventif, Kurative dan Rehabilitatif);
- Mewujudkan sistem manajemen Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang, transparan dan akuntabel;
- Mewujudkan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang mempunyai Jejaring kemitraan, koordinasi, pendidikan dan penelitian dengan lembaga institusi terkait dalam penanganan kesehatan mata seluruh Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan mata di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	1. Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan 3. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target 4. Persentase Operasi Katarak	52,58% 75,21% 62,30% 8,9%	74,23% 82,36% 79,80% 9,6%	41,2% 9,5% 28,1% 7,9%
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Terpenuhinya Sarana dan Prasaran Rumah Sakit (Pembangunan Gedung Bedah, Service Area, beserta kebutuhan Alkes dan Penunjangnya termasuk Mesin LASIK)	85%	85%	0%
II. Terlaksananya jejaring kemitraan dan koordinasi Kesehatan Mata di Jawa Timur	1. Persentase Kabupaten – Kota yang terbina dalam melaksanakan Program Kesehatan Mata Masyarakat 2. Screening Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK)	26,31 % 15 puskesmas	13,6% 50 puskesmas	-48,3% 233,3%

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur	18%	18%	0%

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

Pada Tahun 2015-2016 kinerja UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya mutu pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan mata di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

➤ **Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit**

Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar RS Mata Type B pada tahun 2015 adalah sebesar 52,58% dan pada tahun 2016 sebesar 74,23%. Adanya peningkatan sebesar 41,2% dari jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang tersedia didukung oleh adanya pertambahan subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan akreditasi rumah sakit oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan pada tahun 2015 adalah sebesar 75,21% dan pada tahun 2016 sebesar 82,36%. Adanya peningkatan indeks IKM sebesar 9,5% ini sejalan dengan adanya perbaikan mutu pelayanan rumah sakit.

➤ **Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target**

Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target pada tahun 2015 adalah sebesar 62,30% dan pada tahun 2016 sebesar 79,80%. Adanya peningkatan Indikator SPM yang mencapai target sebesar 28,1% ini sejalan dengan adanya perbaikan mutu pelayanan rumah sakit.

➤ **Persentase Operasi Katarak**

Persentase Operasi Katarak pada tahun 2015 sebesar 8,9% dan pada tahun 2016 sebesar 9,6%. Terdapat peningkatan sebesar 7,9% dikarenakan jumlah pasien operasi yang terus bertambah, sebanyak 3.461 orang pada tahun 2015 meningkat menjadi 3.729 orang pada tahun 2016. Persentase Operasi Katarak ini juga berperan untuk mengurangi jumlah backlog katarak di Jawa Timur.

Sasaran 2: Terlaksananya jejaring kemitraan dan koordinasi Kesehatan Mata di Jawa Timur

➤ **Persentase Kabupaten/Kota yang terbina dalam melaksanakan Program Kesehatan Mata Masyarakat**

Persentase Kabupaten/Kota yang terbina dalam melaksanakan Program Kesehatan Mata Masyarakat pada tahun 2015 adalah sebesar 26,31% dan pada tahun 2016 sebesar 13,6%. Terdapat penurunan sebesar 48,3%, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 Program Kesehatan Mata Masyarakat dilaksanakan berdasarkan kebijakan pelayanan era jaminan kesehatan nasional, yaitu rujukan berbasis wilayah khususnya pada Kota Surabaya.

➤ **Screening Penanggulangan Gangguan Pengelihatan dan Kebutaan (PGPK)**

Pelaksanaan Screening Penanggulangan Gangguan Pengelihatan dan Kebutaan (PGPK) pada tahun 2015 adalah sebesar 15 puskesmas dan tahun 2016 sebesar 50 puskesmas. Terdapat peningkatan sebesar 3,3%, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 Screening PGPK dilaksanakan berdasarkan kebijakan pelayanan era jaminan kesehatan nasional, yaitu rujukan berbasis wilayah khususnya pada Kota Surabaya.

c. Program

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp 33.000.000.000. Realisasi sebesar 30.926.950.793 atau 93.72%. Untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp 981.480.500. Realisasi sebesar Rp 846.608.370. atau 71%. Untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum terpenuhinya SDM, sarana dan prasarana sesuai klasifikasi RS Khusus Mata Kelas B dan standar akreditasi Rumah Sakit.
2. Billing system belum berjalan maksimal
3. Belum adanya Sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk Gedung Bedah, misalnya : paving jalan menuju Gedung Bedah, kursi tunggu, mebeler, dan sebagainya.
4. Belum bekerjasamanya OPTIK dengan BPJS sehingga pelayanan kepada pasien BPJS belum bisa paripurna.
5. Layanan RSMM belum dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat Surabaya
6. Kegiatan screening belum bisa maksimal.
7. Terbatasnya lahan parkir RSMM sehingga beberapa kendaraan pengunjung masih parkir di jalan warga.
8. Belum tersedianya Ruang Khusus layanan LASIK yang nantinya menjadi produk unggulan RSMM
9. Belum terpenuhinya ruang khusus dan alat kesehatan untuk poli sub spesialis dan IGD.
10. Belum adanya Ruangan dan srpras untuk Bengkel IPSRS yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelayanan kesehatan.

11. Sistem Antrian belum berjalan secara optimal.

Solusi :

1. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur agar bisa mendapatkan tambahan tenaga sesuai dengan bezetting yang diajukan.
2. Berkoordinasi dengan BPJS agar Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang merupakan satu-satunya institusi pelayanan kesehatan mata bisa menerima rujukan dari seluruh Jawa Timur
3. Berkoordinasi dengan BPJS agar OPTIK RSMM bisa melayani pasien BPJS.
4. Mengusulkan melalui APBD maupun APBN untuk pembelian alat-alat canggih, sarana dan prasarana pendukung yang memang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan mata masyarakat.
5. Advokasi dan koordinasi ke stakeholder dan lintas sector terkait
6. Melakukan promosi dengan menggandeng puskesmas yang ada di Kab/Kota di Jawa Timur.
7. Melakukan screening bekerjasama dengan kab/kota di Jawa Timur
8. Merenovasi ruang OK lama untuk memenuhi kebutuhan ruang poli spesialis, IGD dan ruang lainnya sesuai standart akreditasi RS.
9. Melakukan pembelian tanah yang berbatasan langsung dengan RSMM untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir dan ruang penunjang pelayanan lainnya.
10. Memenuhi ruang dan alkes LASIK juga kebutuhan bengkel IPSRS secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran.
11. Mengembangkan sistem antrian berbasis IT.

2.13. RUMAH SAKIT PARU SURABAYA

a. Tujuan

- Meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya penyakit paru yang berkualitas.
- Meningkatkan kualitas sumber daya rumah sakit.
- Meningkatkan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit paru dan pengembangan penyakit lainnya.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN /INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada khususnya penyakit paru yang berkualitas	Pencapaian SPM sesuai standard	75%	76%	1%
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum (BLUD)	Persentase capaian SPM sesuai standard	75%	76%	1%
II. Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standard	71%	85,70%	14,70%
1. Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standard	71%	85,70%	14,70%
III. Meningkatnya koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit paru dan pengembangan pelayanan penyakit lainnya	Angka keberhasilan pengobatan TB	62%	74,1%	12,1%
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka keberhasilan pengobatan TB (success rate)	62%	74,1%	12,1%
	2. Angka keberhasilan rujukan TB (succes reveral rate)	78,61%	81,6%	3,0%
	3. Indeks kepuasan Masyarakat	74,87%	93%	18,13%

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2016

Pada tahun 2015-2016 kinerja Rumah Sakit Paru Surabaya yang telah dicapai masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada khususnya penyakit paru yang berkualitas.

➤ **Capaian SPM sesuai standard**

Pada Tahun 2016 tingkat kemajuan capaian SPM sesuai standard = 1% dikarenakan adanya kenaikan sarana prasarana dan penambahan tenaga spesialis yaitu spesialis Bedah Torak dan Kardio Vaskuler (BTKV) dan spesialis Bedah Umum.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya rumah sakit.

➤ **Sarana dan prasarana sesuai standard**

Pada tahun 2016 tingkat kemajuan sarana dan prasarana sesuai standard = 14,70% dikarenakan bertambahnya beberapa alat kedokteran pada pengadaan tahun 2016 untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan rumah sakit.

Sasaran 3: Meningkatnya koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengobatan penyakit paru dan pengembangan pelayanan penyakit lainnya.

➤ **Angka keberhasilan pengobatan penyakit TB**

Pada tahun 2016 tingkat kemajuan angka keberhasilan pengobatan penyakit TB (success rate = 12,1%); tingkat kemajuan angka keberhasilan rujukan TB (success reveral rate) = 3% ; dikarenakan pada tahun 2016 koordinasi dengan kabupaten dan kota binaan telah berjalan dengan baik;

c. Program

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp. 1.805.959.500,- Realisasi sebesar Rp.1.089.706.075,- atau 60,34% untuk mendukung satu kegiatan yang secara rinci capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp.15.707.664.500,- Realisasi sebesar Rp.14.474.783.786,- atau 92,15 untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
3. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum (BLUD) dengan anggaran Rp.16.302.382.011,- Realisasi sebesar Rp.12.182.393.848,- atau 74,73% untuk mendukung satu kegiatan yang secara rinci capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Alokasi anggaran subsidi untuk memenuhi belanja operasional rutin kurang mencukupi kebutuhan belanja.
2. Beberapa belanja khususnya belanja modal tidak terlaksana karena target PAD hanya tercapai 81,02%.
3. Permasalahan kasus TB di RS Paru Surabaya adalah :
 - Kasus yang ditangani di RS Paru Surabaya adalah kasus-kasus TB sulit yaitu alergi OAT; efek samping obat meracuni hati
 - Banyak diderita oleh masyarakat tingkat ekonomi lemah
 - Pengobatan TB memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga bagi masyarakat yang kurang paham akan berhenti setelah kondisi badan merasa membaik padahal pengobatan belum tuntas. Hal ini akan mengakibatkan TB Multi Drug Resistant (MDR)

Solusi :

1. Kebutuhan operasional rutin dialokasikan pada anggaran fungsional.
2. Mengalokasikan anggaran belanja untuk belanja modal yang tidak terlaksana di tahun 2016 tersebut pada anggaran tahun 2017
3. Meningkatkan sosialisasi tentang penyakit TB ke masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi antar layanan dalam meningkatkan layanan TB

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Pada tahun 2016 Rumah Sakit Paru Surabaya memperoleh penghargaan tingkat nasional yaitu:

1. Sertifikat Keikutsertaan Program Nasional Pemantauan Mutu Eksternal Siklus I Tahun 2016 (Kimia Klinik, Hematologi, Urinalis) dengan nomor sertifikat No:UK.02.17/III/2830/2016 Tanggal 25 Oktober 2016;
2. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit No: KARS-SERT/260/XII/2016 Tanggal 9 Desember 2016 dengan Predikat Lulus Tingkat Perdana;
3. Sertifikat Keikutsertaan Program Nasional Pemantauan Mutu Eksternal Siklus 2 Tahun 2016 (Kimia Klinik, Hematologi, Urinalis) dengan nomor sertifikat No:UK.02.17/III/3656/2016 Tanggal 9 Desember 2016;
4. Sertifikat Keikutsertaan Program Nasional Pemantauan Mutu Eksternal Mikroskopis BTA Siklus 2 Tahun 2016 dengan nomor sertifikat No:UK.02.16/III/4074/2016 Tanggal 16 Desember 2016.

2.14. RUMAH SAKIT UMUM ASY-SYAAFI PAMEKASAN

a. Tujuan

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya dalam rangka keselamatan dan kepuasan pasien.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kemitraan, pendidikan, penelitian dan pengembangan RS di bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya.
- Meningkatkan kualitas manajemen RS yang akuntabel dan transparan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan pasien bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya	Persentase IKM atas pelayanan kesehatan	82	85	3.65
1. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan sarana prasarana RS	80	85	6.25
II. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kemitraan, pendidikan, penelitian dan pengembangan RS bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya	Persentase PPK yang telah menjalin kemitraan	100	100	0
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian evaluasi target P2TB	82	84	2.4

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada tahun 2015-2016 kinerja Rumah Sakit Umum Asy-Syaafi Pamekasan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan pasien bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya

➤ **Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);**

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan kesehatan pada tahun 2015 sebesar 82% dan pada tahun 2016 sebesar 85% sehingga mengalami peningkatan sebesar 3,65. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi tahunan indeks kepuasan pasien yang telah dianalisis, peningkatan indeks kepuasan pasien bisa disebabkan karena sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Asy-Syaafi Pamekasan semakin meningkat terbukti dengan adanya peningkatan capaian persentase pemenuhan sarana prasarana RS yang mencapai target dari tahun 2015 sebesar 80% dan pada tahun 2016 sebesar 85% sehingga mengalami peningkatan sebesar 6,25.

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kemitraan, pendidikan, penelitian dan pengembangan RS bidang penyakit paru pada khususnya dan penyakit umum lainnya.

➤ **Persentase PPK yang telah menjalin kemitraan;**

Persentase PPK yang telah menjalin kemitraan pada tahun 2015 sebesar 100% dan pada tahun 2016 sebesar 100% sehingga tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2015, jumlah PPK yang menjalin kemitraan sebesar 23 PPK yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan sedangkan pada tahun 2016 jumlah PPK yang menjalin kemitraan sebesar 53 PPK yang dilakukan di Kabupaten Sumenep sehingga ada peningkatan jumlah PPK yang menjalin kemitraan dengan Rumah Sakit Umum Asy-Syaafi Pamekasan. Hal ini dikarenakan ada kerja sama antar stakeholder dengan berbagai pihak bidang kesehatan.

c. Program

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp. 12.679.450.000,00 Realisasi sebesar Rp. 11.139.455.025,00 atau 87,85 % untuk mendukung 5 (lima) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 275.525.000,00 terealisasi sebesar 78,72% atau Rp. 216.882.750,00. Untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas maka berikut laporan hasil capaian kinerja program TB serta dokumentasinya.

Tabel 4.9 Capaian Kinerja P2TB Tahun 2016

No	Indikator Program P2TB	Standar Nasional	Tahun		
			2014	2015	2016
1	Jumlah suspek	Tidak punya wilayah kerja	1080	4395	3107
2	Ditemukan BTA (+)		586	462	100
3	Ditemukan BTA (-)		456	492	106
4	Dikirim ke PKM	>95%	95,7%	95,8%	96,3%
5	Diobati di RS	<5%	4,3%	4,2%	4,7%
6	Konversi	>80%	75%	57,1%	84,3%
7	Kesembuhan	>85%	100%	79,2%	88,5%
8	Succes Rate	>90%	100%	87,5%	88,5%
9	Default (DO)	<10%	0%	12,5%	16,2%
10	Monitoring Pasien TB	Tidak ditentukan	63	55	12
11	Jumlah kunjungan PKM / penyuluhan eksternal		8	2	5

Sumber : Laporan Tahunan P2TB Tahun 2016

Dari data diatas diketahui bahwa pada tahun 2016 8 (delapan) indikator program penanggulangan pasien TB memenuhi standar nasional baik dari nilai

angka diobati di puskesmas 96,3% (standard >95%) dan diobati di RS 4,7% (standard <5%), kesembuhan sebesar 88,5% (standar >85%), angka *success rate* 88,5% (standar >90%) dan sedangkan yang belum memenuhi standard DO 16,2% (standar <10%).

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Pada program/kegiatan yang bersumber dana subsidi pembangunan (DBHCHT) pada kode program/kegiatan 47.015 mengalami kendala dikarenakan proses 2 kali lelang karena ada sanggahan perencanaan pembangunan gedung OK sehingga target waktu pelaksanaan menjadi mundur dan mempengaruhi penyerapan anggaran belanja yang belum sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Anggaran Kas Belanja (AKB).

Solusi :

1. Kebijakan dalam pengelolaan anggaran sebaiknya agar linear dengan pelaksanaan sehingga dapat mempercepat pelaksanaan anggaran dan pencapaian target kinerja tahun 2016
2. Komunikasi dan koordinasi antara stake holder dan organisasi pengadaan dan pelaksanaan kegiatan agar berpedoman pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Anggaran Kas Belanja (AKB) sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditetapkan.

2.15. RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN

a. Tujuan

- Mewujudkan pelayanan kesehatan paru yang bermutu, efektif, efisien dan berkeadilan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)
- Mewujudkan sistem manajemen Rumah Sakit yang transparan dan akuntabel
- Mewujudkan jejaring kemitraan, koordinasi, dan penelitian dengan lembaga institusi terkait dalam penanganan kesehatan paru .

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efisien dan berkeadilan secara paripurna (Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif)	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	71%	77%	8,45%
	2. BOR	35%	36%	2,85%
	3. ALOS (Average Length of Stay)	5 hari	3 hari	40%
	4. TOI (Turn Over Interval)	10 hari	7 hari	30%
	5. BTO (Bed Turn Over)	24 kali	29 kali	20,84%
	6. Persentase Keberhasilan Program P2TB yang sesuai dengan indikator kinerja (Angka Konversi, Angka Kesembuhan, Angka Keberhasilan Pengobatan, Drop Out)	100 %	100%	100%
	7. CRR (Cost Recovery Rate)	42,75%	43.83%	2,53%
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1. Persentase pemenuhan peralatan dan perbekalan kesehatan sesuai SPM (5 th)	96%	93,12	3%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
II. Meningkatnya jejaring kemitraan, koordinasi, dan penelitian dengan daerah dampingan dan lembaga institusi terkait dalam penanganan kesehatan paru	1. Persentase lab intermediate yang mempunyai kinerja baik	100%	100%	100%
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB	1128 orang	60 orang	94,68%

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Rumah Sakit Paru Manguharjo (RSPM) Madiun yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efisien dan berkeadilan secara paripurna (Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif)

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015 adalah sebesar 71% dan pada tahun 2016 sebesar 77% (mengalami peningkatan). Hal ini dikarenakan di tahun 2016 Rumah Sakit Paru Manguharjo (RSPM) Madiun semakin meningkatkan pelayanannya, baik dalam sarana maupun prasarana dimana tersedianya alat-alat kedokteran yang semakin lengkap dan ruang VVIP.

➤ **BOR (Bed Occupancy Ratio)**

Bor adalah persentase pemakaian tempat tidur pada waktu tertentu yang didefinisikan sebagai rasio jumlah hari perawatan RS terhadap jumlah tempat tidur dikalikan dengan jumlah hari dalam satuan waktu. BOR pada tahun 2015 adalah

sebesar 35% dan pada tahun 2016 sebesar 36% (mengalami peningkatan). Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah tempat tidur dari 21 menjadi 30 dengan jumlah hari perawatan yang pendek sehingga mengakibatkan nilai untuk BOR belum mencapai standart.

➤ **ALOS (Average Length of Stay)**

ALOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Pada tahun 2015 adalah sebesar 5 hari dan pada tahun 2016 sebesar 3 hari (mengalami peningkatan). ALOS 3 hari sudah sesuai dengan standard an mengalami penurunan dari tahun kemarin dikarenakan di tahun ini jika plafond dari pasien habis maka pasien akan dipulangkan dengan batas maksimal lama dirawat 3 hari.

➤ **TOI (Turn Over Interval)**

TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. TOI pada tahun 2015 adalah sebesar 10 hari dan pada tahun 2016 sebesar 7 hari (mengalami peningkatan). TOI 7 hari kurang ideal dikarenakan dengan adanya penambahan jumlah tempat tidur namun belum diimbangi dengan peningkatan kunjungan pasien.

➤ **BTO (Bed Turn Over)**

BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. BTO pada tahun 2015 adalah sebesar 24 kali dan pada tahun 2016 sebesar 29 kali (mengalami penurunan). BTO dengan nilai 29 masih dirasa kurang dari ideal dikarenakan tersedianya jumlah tempat tidur yang banyak dengan jumlah kunjungan yang belum cukup walaupun

sebenarnya sudah terdapat peningkatan kunjungan dari tahun sebelumnya.

➤ **Persentase keberhasilan Program P2TB yang sesuai dengan Indikator Kinerja (Angka Konversi, Angka Kesembuhan, Angka Keberhasilan Pengobatan, Drop Out)**

Persentase keberhasilan Program P2TB yang sesuai dengan Indikator Kinerja (Angka Konversi, Angka Kesembuhan, Angka Keberhasilan Pengobatan, Drop Out) pada tahun 2015 adalah sebesar 100% dan pada tahun 2016 sebesar 100%. Dalam hal ini setiap tahunnya selalu dapat mencapai target.

➤ **CRR (Cost Recovery Rate)**

CRR (Cost Recovery Rate) pada tahun 2015 adalah sebesar 93,51% dan pada tahun 2016 sebesar 43,83 %.(mengalami peningkatan). Hal ini dikarenakan target PAD tahun 2016 mengalami peningkatan

Sasaran 2 : Meningkatnya jejaring kemitraan, koordinasi, dan penelitian dengan daerah dampingan dan lembaga institusi terkait dalam penanganan kesehatan paru

➤ **Persentase lab intermediate yang mempunyai kinerja baik**

Persentase lab intermediate yang mempunyai kinerja baik pada tahun 2015 adalah sebesar 100% dan pada tahun 2016 sebesar 100%. Progam Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan Progam Prioritas Gubernur Jawa Timur dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.174.334.100 terealisasi sebesar Rp 167.144.745 atau 95,88%. Progam ini digunakan untuk membiayai kegiatan Deteksi Dini Kasus TB di Kabupaten Pacitan dan Pertemuan Koordinasi Laboratorium Intermediate Provinsi Jawa Timur. Capaian Progam yang diharapkan adalah Jumlah Masyarakat yang mendapatkan edukasi Progam TB. Target 1954 orang dan tercapai sebanyak 1954 orang. Progam ini merupakan progam prioritas tetapi anggaran yang disediakan tidak mencukupi sehingga target yang direncanakan

tidak bisa di penuhi. Diharapkan tahun 2017 anggaran yang disediakan bisa mencukupi sehingga target yang direncanakan bisa tercapai mengingat masyarakat yang mempunyai masalah kesehatan paru masih cukup tinggi. Khususnya penderita TBC yang sekarang menjadi salah satu penyakit progam RPJMD yang harus diperhatikan. Masalah TBC semakin tinggi dengan adanya kasus TB MDR dan TB HIV. Apabila hal ini tidak segera diatasi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kasus Kejadian Luar Biasa atau KLB.

c. Program

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran Rp 17.000.000.000,- Realisasi sebesar Rp 15.946.828.215,- atau 93,80% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat , dengan anggaran Rp 174.334.100,- Realisasi sebesar Rp 167.144.745,- atau 95,88% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Adanya efisiensi anggaran sebesar 10 % dan adanya sisa lelang dari kegiatan, untuk ketersediaan barang e-catalog sering kosong.
2. Dilihat dari data cakupan indikator pelayanan di atas, maka dengan peningkatan jumlah pasien yang diikuti juga dengan penambahan tempat tidur mengakibatkan tingkat perhitungan BOR, ALOS, TOI belum bisa mencakup ke arah standar dikarenakan peningkatan jumlah pasien yang belum signifikan.

Solusi :

1. Koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait
2. RSPM semakin meningkatkan pelayanan kepada pasien

2.16 UPT AKADEMI KEPERAWATAN MADIUN

a. Tujuan

- Meningkatkan proses belajar mengajar yang sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- Meningkatkan tata kelola organisasi untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Meningkatkan kualitas kerjasama dan penelitian yang inovatif.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
1.	Meningkatnya status kelembagaan, mutu dosen dan kualitas lulusan melalui proses pembelajaran yang efektif dan profesional	1. Hasil Akreditasi Program Studi 2. Persentase lulusan dengan $IPK \geq 3.00$ 3. Rerata Masa Studi Mahasiswa 6 semester 4. Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1 : 25 5. Persentase Kelulusan Uji Kompetensi 6. Persentase Linearitas pendidikan dosen dengan mata kuliah yang diampu 7. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pekerti 8. Persentase mahasiswa yang memperoleh pembekalan kompetensi pra kerja	C 98% 98% 1:13 96,19% 86,2% 96,55% 100%	C 95,41% 88,62% 1:12 95,45% 86,2% 96,55% 100%	- -2,59% -9,38% -0,74% - - -
	1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase pelayanan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal	80%	85,15%	5,15
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi untuk mendukung	1. Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	90% 6,41%	90% 6,71%	- 0,30

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
	pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	2. Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa pada tiap-tiap unit minimal 3. Pelayanan administrasi akademik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	66,67	66,67	-
	1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	90,74	95,72	4,98
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparaturnya yang layak fungsi	88,18	86,52	-1,66
	3. Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	68,72	76,39	7,67
	4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase sarana prasarana untuk pelayanan sesuai standar	93,26	98,17	4,91
3	Meningkatnya kualitas kerjasama dan penelitian yang inovatif	1. Persentase MoU dengan mitra strategis $\geq 85\%$ 2. Persentase dosen yang melakukan penelitian = 100% 3. Persentase pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen 4. Persentase publikasi karya ilmiah dosen	75,76% 100% 100% 26,47%	75,76% 100% 100% 44,11%	- - - 17,63%
	1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	93,95	99,31	5,36

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
	2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase UKBM (Upaya Kesehatan bersumber masyarakat)	-	84,89	-

Evaluasi terhadap realisasi indikator kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 sebagai berikut :

Pada tahun 2015 – 2016 kinerja UPT Akademi Keperawatan Madiun yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya status kelembagaan, mutu dosen dan kualitas lulusan melalui proses pembelajaran yang efektif dan profesional

➤ **Hasil Akreditasi Program Studi**

Hasil akreditasi program studi pada tahun 2015 dan 2016 sama yaitu C, reakreditasi direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017

➤ **Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3.00**

Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3.00 pada tahun 2015 sebesar 98% dan tahun 2016 sebesar 95,41% mengalami penurunan sebesar 2,59% ini dikarenakan adanya peningkatan mutu dari kualitas soal ujian yang diterapkan kepada mahasiswa guna meningkatkan daya saing bagi para lulusan.

➤ **Rerata Masa Studi Mahasiswa 6 semester**

Rerata masa studi mahasiswa 6 semester pada tahun 2015 sebesar 98% dan pada tahun 2016 sebesar 88,62% mengalami penurunan sebesar 9,38% ini dikarenakan adanya peningkatan mutu dari kualitas soal ujian yang diterapkan kepada mahasiswa guna meningkatkan daya saing bagi para lulusan.

➤ **Rasio Dosen dengan Mahasiswa minimal 1 : 25**

Rasio dosen dengan mahasiswa pada tahun 2015 sudah mencapai 1:13 dan pada tahun 2016 rasio dosen dengan mahasiswa 1:12, ini sudah mengalami peningkatan dan sudah sesuai dengan SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi)

➤ **Persentase Kelulusan Uji Kompetensi**

Persentase kelulusan uji kompetensi pada tahun 2015 sebesar 96,19% dan pada tahun 2016 sebesar 95,45% mengalami penurunan 0,74% karena tingkat kesulitan dari soal Ujian Kompetensi dinaikan, mengingat tuntutan kinerja dari perawat.

➤ **Persentase Linearitas pendidikan dosen dengan mata kuliah yang diampu**

➤ **Persentase dosen yang memiliki sertifikat pekerti**

Persentase dosen yang memiliki sertifikat pekerti pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu sebesar 96,55%, ini dikarenakan kesempatan untuk mengikuti pelatihan belum ada.

➤ **Persentase mahasiswa yang memperoleh pembekalan kompetensi pra kerja**

Persentase mahasiswa yang memperoleh pembekalan kompetensi pra kerja pada tahun 2015 maupun tahun 2016 sudah 100% karena semua mahasiswa yang telah lulus mendapatkan pembekalan kompetensi pra kerja.

Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola organisasi untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

- Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar
- Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa pada tiap-tiap unit minimal
- Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa pada tiap-tiap semester pada tahun 2015 sebesar 6,41% dan tahun 2016

sebesar 6,71% terjadi kenaikan sebesar 0,30% hal ini disesuaikan dengan jumlah mahasiswa setiap tahunnya.

- Pelayanan administrasi akademik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kerjasama dan penelitian yang inovatif

- Persentase MoU dengan mitra strategis $\geq 85\%$
Persentase MoU dengan mitra strategis pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 sebesar 75,76% hal ini disesuaikan dengan jumlah lahan praktik dari mahasiswa.
- Persentase dosen yang melakukan penelitian = 100%
Persentase dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2015 dan tahun 2016 sudah mencapai 100%.
- Persentase pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen
Persentase pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen pada tahun 2015 dan tahun 2016 sudah mencapai 100%
- Persentase publikasi karya ilmiah dosen
Persentase publikasi karya ilmiah dosen pada tahun 2015 sebesar 26,47% dan pada tahun 2016 sebesar 44,11% mengalami kenaikan sebesar 17,63% ini dikarenakan dosen yang melakukan penelitian semakin meningkat jumlahnya.

c. Program

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat anggaran Rp.600.000.000,- dan realisasi Rp. 509.345.760,- atau 84,89%. Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp. 302.450.000,- realisasi Rp.296.920.200,- atau 98,17%. Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

3. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp.4.206.433.791,15 dan realisasi Rp.3.581.897.810,-. Program ini hanya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yang secara rinci realisasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kerangka landasan hukum ttg penyelenggaraan pendidikan keperawatan berdasar Perubahan kebijakan nasional tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya pendidikan keperawatan sebagai konsekuensi Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah belum mendukung / belum ada
2. Budaya riset masih lemah sehingga publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi nasional dan internasional belum ada dan Produk riset yang berhasil dipasarkan secara institusional belum ada.
3. Jaringan kerjasama institusi pendidikan dan sponsor dengan institusi pengguna lulusan belum dikembangkan secara optimal.
4. Banyak berdirinya Institusi kesehatan di Karisidenan Madiun.
5. Terbukanya tenaga perawat asing yg meningkatkan persaingan di dunia kerja.

Solusi :

1. Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemilik.
2. Memiliki kesadaran untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan ke depan menuju POLTEKES.
3. Secara bertahap bersedia melangkah menuju profesionalisme melalui bentuk-bentuk evaluasi diri.
4. Peningkatan kualitas pendidikan, sumberdaya dan kemahasiswaan dengan melakukan penelitian-penelitian kesehatan termasuk penelitian yang berorientasi pangsa pasar.
5. Meningkatkan kerjasama dg pihak pengguna jasa lulusan baik pemerintah dan non pemerintah.
6. Meningkatkan kapasitas sumberdaya.
7. Membekali calon lulusan dengan kompetensi PPGD dan bahasa asing.

2.17. UPT AKADEMI GIZI SURABAYA

a. Tujuan

- Meningkatkan proses belajar dan mengajar yang bermutu dan inovatif sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan.
- Meningkatkan tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- Meningkatkan Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk pendayagunaan lulusan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Prosentase dosen dalam penelitian pengabdian masyarakat dan kerjasama untuk pendayagunaan lulusan	-	60%	-
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase dosen dalam penelitian pengabdian masyarakat dan kerjasama untuk pendayagunaan lulusan	-	60%	-
II. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan BLUD	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan BLUD	80%	80%	100%
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan BLUD	80%	80%	100%
III. Meningkatnya pelayanan operasional BLUD bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	Prosentase pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan operasional BLUD bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	80%	80%	100%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Prosentase pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan operasional BLUD bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	80%	80%	100%

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran UPT Akademi Gizi Surabaya tahun 2016 disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan didukung oleh 1 program, yaitu :

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat didukung dengan anggaran sebesar Rp 191.000.000,00 Realisasi Rp 150.329.289,00 atau 78,71%. Dengan target indikator kinerja Prosentase dosen dalam penelitian pengabdian masyarakat dan kerjasama untuk pendayagunaan lulusan 60% dan telah terealisasi sebesar 60% atau 100 %

Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan BLUD didukung oleh 1 program, yaitu :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) didukung dengan anggaran sebesar Rp 409.000.000,00 Realisasi Rp 383.571.000,00 atau 93,78% . Dengan target indikator kinerja Prosentase penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan BLUD 80% dan telah terealisasi sebesar 80% atau 100 %

Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan operasional BLUD bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat didukung oleh 1 program, yaitu :

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) didukung dengan anggaran sebesar Rp 3.620.439.762.59 Realisasi Rp 3.426.923.779,00 atau 94,65%. Dengan target indikator kinerja Prosentase pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan operasional BLUD bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 80% dan telah terealisasi sebesar 80% atau 100 %.

c. Program

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat didukung dengan 1 kegiatan yaitu :
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dengan anggaran Rp. 191.000.000,00 Realisasi Rp 150.329.289,00 atau 78,71%. Dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 kegiatan dan terealisasi sebanyak 5 kegiatan atau 100%.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan badan layanan umum daerah (BLUD) dengan anggaran Rp. 409.000.000,00. Realisasi Rp. 383.571.000,00 atau 93,78%, terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
 - a) Rehabilitasi bangunan RS/ RSK/ Balai/ Akper/ Latkesmas dengan anggaran Rp. 90.000.000 Realisasi sebesar Rp. 89.194.000 atau 99,10%. Dengan target kinerja jumlah pembangunan rehabilitasi bangunan lab dan sarana penunjang pendidikan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau 100%.
 - b) Pengadaan perlengkapan rumah tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/ RSK/ Balai/ Akper/ Latkesmas dengan anggaran Rp. 196.550.000 Realisasi sebesar Rp. 194.720.000 atau 99,07%. Dengan target kinerja jumlah penyediaan perlengkapan rumah tangga untuk peningkatan BLUD sebanyak 3 paket dan terealisasi sebanyak 3 paket atau 100%.
 - c) Pengadaan alat kesehatan/ Lab RS/ RSK/ Balai/ Akper/ Latkesmas dengan anggaran Rp. 122.450.000 Realisasi sebesar Rp. 99.657.000 atau 81,39%. Dengan target kinerja jumlah penyediaan peralatan lab dan penunjang pendidikan sebanyak 3 paket dan terealisasi sebanyak 3 paket atau 100%.

3. Program peningkatan pelayanan badan layanan umum daerah (blud) terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

Peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan dengan anggaran Rp. 3.620.439.762,59 Realisasi sebesar Rp. 3.426.923.779,00 atau 94,65%. Dengan target kinerja jumlah kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau 100%.

d. Permasalahan dan Solusi

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD

Permasalahan:

- Meningkatnya masalah-masalah yang timbul akibat transisi epidemiologi di bidang gizi, pesatnya pertumbuhan industri pangan, jumlah dan tuntutan mutu institusi pelayanan gizi dan makanan disamping peningkatan prevalensi penyakit baik infeksi maupun degeneratif yang berakar pada kurang gizi sejak masa kehamilan, dan timbulnya masalah obesitas sejak usia dini meningkatkan beragam problematika gizi kini dan akan datang sehingga memerlukan penanganan yang profesional kurang dibarengi dengan jumlah anggaran yang cukup.
- Sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya (Laboratorium, dll) dibandingkan dengan standar BN PT sudah mencapai 80% dan belum dapat diberdayakan dengan baik melalui kerjasama dengan lintas sektor untuk kepentingan penelitian maupun pengabdian masyarakat.

Solusi:

- Akademi Gizi Surabaya dapat mengembangkan diri menjadi Penyelenggara Pelatihan dan Konseling Penanganan berbagai Masalah Gizi baik bagi praktisi di bidang kesehatan maupun masyarakat umum.

- Akademi Gizi Surabaya dapat melakukan pengembangan dengan menghasilkan berbagai produk gizi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- Sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya (Laboratorium, dll) dapat diberdayakan melalui kerjasama dengan lintas sektor untuk kepentingan penelitian maupun pengabdian masyarakat.
- SDM yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya dapat berperan dalam kerjasama dengan lintas sektor untuk berbagai kegiatan, antara lain : pelatihan, seminar, workshop, dll.
- Penyelenggaraan Pendidikan Diploma III Akademi Gizi Surabaya dapat dikembangkan menjadi Program Diploma IV Sarjana Gizi Terapan.

2) Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Permasalahan:

- Keberadaan Akademi Gizi Surabaya masih dikenal oleh kalangan tertentu saja, terutama hanya di lingkungan Instansi Kesehatan, karena kurangnya promosi untuk masyarakat luas.
- Terbatasnya lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- Keterbatasan ruangan yang tersedia untuk dapat memberikan pelayanan administrasi dan pendidikan.
- Kondisi nilai rata-rata kualitas input mahasiswa masih relative rendah.
- Kesulitan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD, disebabkan antara lain :
 - Adanya ketidaksesuaian antara realisasi kegiatan dengan Kode Rekening Mata Anggaran APBD.
 - Ketidaksesuaian Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kondisi riil Institusi Pendidikan serta ketidaksesuaian Kalender Pendidikan dengan Kalender Anggaran.

Solusi:

- Sudah diakreditasi dari BAN-PT dengan predikat B, sehingga perlu meningkatkan menata kualitas pelayanan sesuai standart.
- Membina dan mengembangkan jejaring dengan institusi lain untuk pemberdayaan lulusan.
- Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan sistem pelayanan yang mengacu pada pemenuhan Standart Pelayanan Minimal.
- Pengembangan pelayanan pendidikan, latihan dan kursus-kursus tentang Gizi dan Pangan dengan peningkatan cakupan, jenis dan kemampuan pelayanan yang di dukung pengembangan organisasi dan manajemen.

e. Penghargaan yang diperoleh

- Penilaian Akreditasi oleh LAM PTKes dengan Predikat B pada Tahun 2016
- Penilaian SAKIP Tahun 2016 dengan Predikat B

2.18. UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI LAWANG

a. Tujuan

- Meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung program kesehatan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelatihan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung program kesehatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2,98	3,25	9,06%
	2. Persentase rata-rata capaian utilitas	81%	90%	11,11%
	3. Persentase Pelatihan yang terakreditasi	100%	100%	-
	4. Persentase Pelatihan yang mendukung program pembangunan kesehatan di Jawa Timur	82%	100%	21,95%
1. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	1. Persentase capaian SPM sesuai target	86%	95%	10,46%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	86%	98%	13,9%
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BLUD	1. Persentase sarana prasarana dan peralatan sesuai dengan standar pelayanan	86%	86%	-
4.				
Meningkatnya jejaring kerja dengan mitra strategis	1. Persentase Kerjasama dengan mitra strategis	50%	52%	4%
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang terlaksana	100%	100%	-
Meningkatnya kualitas sistem manajemen UPT Latkesmas yang efektif dan efisien	1. Skor Akreditasi Institusi	4,37	4,37	-
	2. Cost Recovery Rate (CRR)	62%	66,57%	7,3%
	3. Persentase Standar pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai	86%	86%	-
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	75%	77%	2,67%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
2. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	100%	-
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1. Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	45%	55%	22,2%

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan pelatihan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung Program Kesehatan

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat;**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati pada Tahun 2015 adalah sebesar 2,98 dan pada tahun 2016 sebesar 3,25. Capaian IKM mengalami peningkatan dikarenakan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati pada Tahun 2016 melakukan pembenahan layanan dalam hal penerimaan keluhan pelanggan dan peningkatan kualitas sarana prasarana.

➤ **Persentase rata-rata capaian utilitas ideal.**

Persentase rata-rata capaian utilitas ideal pada Tahun 2015 adalah sebesar 81% pada tahun 2016 sebesar 90% capaian utilitas ideal mengalami peningkatan dikarenakan pada Tahun 2016 kegiatan yang diselenggarakan di UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati lebih banyak pelatihan daripada pertemuan sehingga pemanfaatannya telah sesuai dengan tupoksi.

➤ **Persentase pelatihan yang terakreditasi**

Persentase pelatihan yang terakreditasi pada Tahun 2015 adalah sebesar 100% pada tahun 2016 sebesar 100%. Ini merupakan capaian tertinggi karena semua Pelatihan yang diselenggarakan di UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati telah melalui proses pengajuan akreditasi sehingga peserta dapat memperoleh sertifikat pelatihan.

➤ **Persentase Pelatihan yang mendukung program pembangunan kesehatan di Jawa Timur**

Persentase Pelatihan yang mendukung program pembangunan kesehatan di Jawa Timur pada Tahun 2015 adalah sebesar 82% pada tahun 2016 sebesar 100%. Capaian persentase pelatihan sudah mendukung semua program kesehatan meskipun terdapat satu jenis pelatihan dengan frekuensi pelaksanaan yang tinggi, yaitu akreditasi puskesmas. Hal ini disebabkan tingginya permintaan pelatihan dengan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur maupun Provinsi lain. Jenis pelatihan yang mendukung program kesehatan seperti AKI, AKB, Kesehatan Lingkungan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Jiwa dilaksanakan oleh UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati dalam bentuk peningkatan kompetensi di Laboratorium Lapangan.

Sasaran 2 : Meningkatnya jejaring kerja dengan mitra strategis

Persentase Kerjasama dengan mitra strategis pada Tahun 2015 sebesar 50% dan pada tahun 2016 sebesar 52%. Capaian indikator ini mengalami peningkatan dikarenakan bertambahnya target mitra strategis yang menggunakan layanan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas sistem manajemen UPT Latkesmas yang efektif dan efisien, terdapat 3 indikator sebagai berikut :

➤ **Skor Akreditasi Institusi**

Skor Akreditasi UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati pada Tahun 2015 sebesar 4,37 pada tahun 2016 sebesar 4,37. Capaian skor akreditasi UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati tetap dikarenakan penilaian akreditasi institusi dilakukan pada akhir Tahun 2016 dan hasilnya baru akan diterima sekitar Bulan Januari Tahun 2017.

➤ **Cost Recovery Rate (CRR)**

Cost Recovery Rate (CRR) pada Tahun 2015 sebesar 62% pada tahun 2016 sebesar 66,57%. Mengalami peningkatan dikarenakan Efisiensi belanja dan Peningkatan pendapatan yang cukup signifikan.

➤ **Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai**

Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai pada Tahun 2015 sebesar 86% pada tahun 2016 sebesar 86%. Capaian SPM sama seperti tahun sebelumnya.

c. Program

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran, dengan anggaran Rp.571.392.400,- terserap sebesar Rp.557.403.011,- atau 97,55% untuk mendukung 1 kegiatan yang rincian realisasi kegiatannya terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.614.659.000,- terserap sebesar Rp.494.713.674,- atau 80,49% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp.204.760.000,- terserap sebesar Rp.204.105.167,- atau 99,68% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan anggaran Rp.17.385.000,- terserap sebesar Rp.10.739.500,- atau 61,77% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan anggaran Rp.1.000.000.000,- terserap sebesar Rp. 702.351.436,- atau 70,24% untuk mendukung 1 kegiatan yang rincian realisasi kegiatannya terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran Rp.10.220.000,- terserap sebesar Rp.9.006.800,- atau 88,13% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
7. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan anggaran Rp.11.219.584.519,33,- terserap sebesar Rp.10.073.187.097,00,- atau 89,78% untuk mendukung 1 kegiatan yang rincian realisasi kegiatannya terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Kegiatan dan anggaran Program Upaya Kesehatan Masyarakat telah direncanakan berdasarkan kemampuan sumber daya manusia yang ada akan tetapi diberi anggaran lebih dari yang dibutuhkan, sehingga tidak terserap secara maksimal
2. Surplus pendapatan BLUD 2015 tidak dapat dimanfaatkan mulai awal tahun anggaran 2016 karena mekanismenya harus melalui PAPBD, hal ini menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan dana tersebut.

Solusi :

1. Pemberian anggaran program Upaya Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disusun
2. Mekanisme pemanfaatan dana surplus dapat dilakukan mulai dari awal tahun anggaran.

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

3.1 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi.
- Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu:

Tujuan-1 : Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi.

Sasarannya adalah :

- a. Meningkatkan jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.
- b. Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat.

Tujuan-2 : Meningkatkan aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur.

Sasarannya adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN %
		2015	2016	
I. Meningkatkan jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.	I.1 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	89,43	88,87	(0,63)
1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	I.1.1 Panjang jalan dalam kondisi mantap (KM)	1.574,82	1.262,83	(19,81)

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN %
		2015	2016	
2. Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	I.1.2 Panjang jembatan dalam kondisi baik (M)	13.708,28	10.018,94	(26,91)
	I.2.1 Persentase Kantor dalam kondisi layak pakai dan memadai	80,00	81,42	1,78
	I.2.2 Persentase ketersediaan alat berat dalam kondisi layak pakai dan memadai	90,00	90,00	-
II. Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat	II.1 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer.	56,87	57,90	1,81
1. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.	II.1.1 Panjang jalan dalam kondisi mantap (KM)	1.574,82	1.262,83	(19,81)
	II.1.2 Panjang jembatan dalam kondisi baik (M)	13.679,66	10.018,94	(26,76)
III. Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan	III.1 Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan	44,50	47,36	6,43
	III.2 Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jembatan lintas selatan	43,69	43,50	(0,43)
	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	III.1.1 Panjang jalan yang terbangun	-	-
		III.1.2 Panjang jembatan yang terbangun	-	-
	2. Program Pembangunan Jalan Lintas Selatan	III.2.1 Persentase Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan	51,18	54,44
		III.2.2 Persentase Penyelesaian pembangunan jembatan lintas selatan	46,11	45,72
				(0,63)

Pada tahun 2015 – 2016 kinerja penyelenggaraan jalan yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan jalan provinsi yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.

➤ Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap

Kewenangan penyelenggaraan jalan di Jawa Timur mengalami perubahan sejak terbitnya SK Menteri PUPR no: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional tanggal 5 Mei 2015 dan SK Gubernur Jawa Timur No: 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan ruas – ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi tanggal 12 Februari 2016. Perubahan itu terkait adanya perubahan status beberapa ruas jalan di Jawa Timur yang berubah dari status jalan provinsi menjadi jalan nasional ataupun kabupaten/ kota dan status jalan kabupaten/ kota menjadi jalan provinsi atau jalan nasional. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Jalan provinsi di Jawa Timur sejak diterbitkannya SK tersebut menjadi 1.421 Km.

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2015 adalah sebesar 89,43% dan pada tahun 2016 adalah sebesar 88,87% mengalami penurunan kemantapan sebesar 0,56%. Penurunan kemantapan ini dikarenakan adanya perubahan panjang jalan provinsi yang mengalami perubahan fungsi dan status jalannya.

Sasaran 2: Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat.

➤ Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer.

Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer pada tahun 2015 adalah sebesar 56,87 % dan pada tahun 2016 adalah sebesar 57,90 % mengalami peningkatan sebesar 1,03 %. Peningkatan capaian sasaran 2 tersebut dikarenakan ada

peningkatan struktur dan kapasitas jalan sepanjang 27,49 km dengan lebar jalan minimal 7 meter.

Sasaran 3: Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan.

Panjang rencana Jalan Lintas Selatan pada tahun 2015 adalah 673,872 km karena mengalami perubahan trase jalan sehingga menjadi 676,815 km, demikian juga untuk panjang jembatan dari 7.742 m menjadi 8.404 m.

- Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan.

Tabel 4.10 Rencana Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Strategis dan Jalan Lintas Selatan

NO	URAIAN	JALAN (KM)
A	Jalan menuju kawasan potensial	
1.	Jalan Tembus Lawang Batu (Sukorejo – Malang – Batu)	33,907
2.	Panjang Jalan Akses PIMPA	3,300
3.	Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun	64,000
	Jumlah A	101,207
B	Jalan Lintas Selatan	
1.	Pacitan	87,435
2.	Trenggalek	81,475
3.	Tulungagung	51,180
4.	Blitar	64,200
5.	Malang	137,325
6.	Lumajang	65,600
7.	Jember	83,500
8.	Banyuwangi	106,100
	Jumlah B	676,815
	Total	778,022

Kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan 8 Pemerintah Kabupaten dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan sampai dengan akhir 2016 telah mencapai kemajuan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.11
Realisasi Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan s/d 2016

NO	URAIAN	JALAN (KM)*	KETERANGAN
A	Jalan menuju kawasan potensial		
1.	Jalan Tembus Lawang Batu	-	s/d 2016 masih dalam tahap pra

NO	URAIAN	JALAN (KM)*	KETERANGAN
	(Sukorejo – Malang – Batu)		konstruksi (DED). Direncanakan 2017 dimulai pembebasan lahan.
2.	Panjang Jalan Akses PIMPA	-	
3.	Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun	-	
	Jumlah A	-	
B	Jalan Lintas Selatan		
1.	Pacitan	83,785	Tahun 2016 didanai APBN
2.	Trenggalek	24,024	
3.	Tulungagung	9,430	
4.	Blitar	-	
5.	Malang	105,612	
6.	Lumajang	59,830	
7.	Jember	4,000	
8.	Banyuwangi	82,100	
	Jumlah B	368,481	
	Total	368,481	

Keterangan:

*) Jalan Aspal/ Beton

Tabel 4.12
Rekapitulasi Realisasi Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan s/d 2016

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI S/D 2016	
			KM	%
A	Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan			
1	Jalan (KM)	778,022	368,481	47,36

Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan pada tahun 2015 adalah sebesar 44,50 % dan pada tahun 2016 adalah sebesar 47,36 % mengalami peningkatan sebesar 2,86 %. Peningkatan capaian sasaran 3 tersebut dikarenakan ada pembangunan Jalan Lintas Selatan di ruas Bts. Kab. Lumajang – Mayangan (3,2 Km) dan ruas Mayangan – Puger (2,8 Km) yang didanai oleh APBN.

- Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan.

Tabel 4.13
Rencana Pembangunan Jembatan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan

NO	URAIAN	JEMBATAN (M)	
		PANJANG (M)	JUMLAH (BUAH)
A	Jembatan pada jalan menuju kawasan potensial		

NO	URAIAN	JEMBATAN (M)	
		PANJANG (M)	JUMLAH (BUAH)
1.	Jalan Tembus Lawang Batu (Sukorejo – Malang – Batu)	385	29
2.	Panjang Jalan Akses PIMPA	-	-
3.	Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun	45	1
	Jumlah A	430	30
B	Jembatan pada Jalan Lintas Selatan		
1.	Pacitan	1.837	12
2.	Trenggalek	559	10
3.	Tulungagung	828	23
4.	Blitar	1.122	22
5.	Malang	985	18
6.	Lumajang	796	19
7.	Jember	1.536	33
8.	Banyuwangi	741	16
	Jumlah B	8.404	153
	Total	8.834	183

Kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan 8 Pemerintah Kabupaten dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan sampai dengan akhir 2016 telah mencapai kemajuan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Realisasi Pembangunan Jembatan pada Jalan Menuju Kawasan Strategis dan Jalan Lintas Selatan s/d 2016

NO	URAIAN	JEMBATAN (M)		KETERANGAN
		PANJANG (M)	JUMLAH (BUAH)	
A	Jalan menuju kawasan potensial			
1.	Jalan Tembus Lawang Batu (Sukorejo – Malang – Batu)	-	-	
2.	Panjang Jalan Akses PIMPA	-	-	
3.	Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun	-	-	
	Jumlah A	-	-	
B	Jalan Lintas Selatan			
1.	Pacitan	860	10	2 buah jembatan (Grindulu dan Sirnobojo) sedang dalam proses pembangunan yang direncanakan akhir 2017 selesai. Tahun 2016 didanai oleh APBN.
2.	Trenggalek	399	8	
3.	Tulungagung	183	4	
4.	Blitar	302	6	
5.	Malang	605	12	
6.	Lumajang	796	19	
7.	Jember	521	17	
8.	Banyuwangi	176	7	
	Jumlah B	3.842	83	
	Total	3.842	83	

Tabel 4.15
Rekapitulasi Realisasi Pembangunan Jembatan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan s/d 2016

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI S/D 2016	
			M	%
A	Pembangunan Jembatan Menuju Kawasan Strategis dan Jalan Lintas Selatan			
1	Jembatan (M)	8.834	3.842	43,50

c. Program

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp 1.103.960.000 dan terealisasi sampai dengan TW IV tahun 2016 sebesar Rp 1.103.960.000 atau 100% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp 550.420.973.385,00 realisasi sampai dengan TW IV tahun 2016 Rp 535.963.792.804,00 atau 97,37 % untuk mendukung 70 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan anggaran sebesar Rp 56.313.847.000,00 realisasi Rp 54.132.124.408,00 atau 96,13% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.

3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

a. Tujuan

- Meningkatkan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air.
- Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- Mengurangi dampak kerugian akibat bencana banjir.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	1. Persentase ketersediaan dan kebutuhan air baku	87,61	87,78	0,19
	2. Persentase luas tanam di sawah yang terpenuhi kebutuhan airnya	97,93	98,04	0,11
	3. Debit air rata-rata pada Musim Tanam III (Musim Kemarau II) di Daerah Irigasi Utama (l/dt/ha)	0,67	0,68	1,49
	4. Persentase kinerja jaringan irigasi (%)	68,35	68,50	0,22
	5. Persentase penurunan luas genangan banjir	75,88	72,37	4,85
1. Program Konservasi Sumber Daya Air	Volume Resapan air (m ³)	11.781.429	36.005.542	205,6
2. Pendayagunaan sumber daya air	Ketersediaan air baku (m ³)	19.413.567.429	19.486.241.542	0,37
3. Pengendalian daya rusak air	Luas genangan pada daerah rawan banjir (Ha)	951,98	1.122,3	17,89

Pada Tahun 2015-2016 kinerja yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air; serta pengendalian daya rusak air.

- Persentase ketersediaan dan kebutuhan air baku pada Tahun 2015 adalah sebesar 87,61 dan pada Tahun 2016 sebesar 87,78 (mengalami peningkatan). Peningkatan tersebut karena adanya pembangunan embung geomembran (5.542 m³) dan sudah beroperasinya Waduk Nipah (6.000.000 m³) dan Waduk Bajulmati (30.000.000 m³). Selain pembangunan, juga dilakukan normalisasi tampungan air sehingga diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan penyediaan air baku untuk berbagai keperluan.
- Persentase luas tanam di sawah yang terpenuhi kebutuhan airnya pada Tahun 2015 adalah 97,93 dan pada Tahun 2016 sebesar 98,04 (mengalami peningkatan). Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas tanam di sawah yang terpenuhi airnya yang semula pada Tahun 2015 sebesar 2.560.153 ha menjadi pada Tahun 2016 sebesar 2.563.167 ha. Penambahan ini disebabkan karena musim penghujan berlangsung lebih lama dari musim kemarau sehingga dapat mengairi lahan berau dan juga melaksanakan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi secara rutin.
- Debit air rata-rata pada Musim Tanam III (Musim Kemarau II) di Daerah Irigasi Utama pada Tahun 2015 adalah 0,67 dan pada Tahun 2016 sebesar 0,68 (mengalami peningkatan). Peningkatan tersebut disebabkan musim penghujan berlangsung lebih lama daripada musim kemarau sehingga debit air rata-rata yang tersedia dapat melayani Daerah Irigasi Utama yang semula pada Tahun 2015 0,67 lt/dt menjadi pada Tahun 2016 sebesar 0,68 lt/dt.

- Persentase kinerja jaringan irigasi pada Tahun 2015 adalah 68,35 dan pada Tahun 2017 sebesar 68,50 (mengalami peningkatan). Peningkatan tersebut disebabkan karena dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mengembalikan fungsi layanan jaringan irigasi. Dengan kondisi saluran baik sepanjang 1.198,50 km dari 1.748 km total panjang saluran, dan kondisi bangunan baik sebanyak 3.605 unit dari 5.267 unit total jumlah bangunan.

Persentase penurunan luas genangan banjir pada Tahun 2015 adalah 71,42 dan pada Tahun 2016 sebesar 72,37 (mengalami peningkatan). Dengan melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai untuk mengurangi resiko banjir.

c. Program

1. Program konservasi sumber daya air dengan anggaran sebesar Rp. 6.323.988.150 dan realisasi sebesar Rp. 6.063.352.235, untuk mendukung 12 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program pendayagunaan sumber daya air dengan anggaran Rp. 130.158.722.711 dan realisasi sebesar Rp. 125.018.517.813, untuk mendukung 62 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program pengendalian daya rusak air dengan anggaran Rp. 9.004.094.725 dan realisasi sebesar Rp. 8.392.061.232, untuk mendukung 16 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Kebutuhan air domestik meningkat tajam, tidak seimbang dengan kemampuan menyediakan air baku.
2. Terdapat 541 desa rawan kekeringan domestik dan 26.095 ha rawan kekeringan pertanian.
3. Kebutuhan air industri meningkat dan berpotensi konflik antar pengguna.
4. Pencemaran sungai meningkat pada sungai yang melintasi kawasan industri dan pemukiman padat penduduk.
5. Kebutuhan air irigasi meningkat dalam rangka pencapaian target produksi 13,1 juta ton GKG pada tahun 2019.
6. Terdapat 890 desa rawan banjir yang terdiri dari daerah Permanen Banjir (DAS Bengawan Solo).
7. Daerah Laten Banjir antara lain Kali Kemuning (Sampang), Sungai Drainase(Sidoarjo) Kali Welang (Pasuruan), Kali Lobawang cs (Situbondo), Kali Tanggul (Panti-Jember), Kali Ngasinan cs (Trenggalek).

Solusi:

1. Pembangunan 27 Waduk dengan kapasitas total 114,57 juta m³ atau setara dengan 12.657 ha lahan irigasi baru.
2. Normalisasi tampungan air dengan kapasitas total 76,14 juta m³.
3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi guna mempertahankan Indeks Pertanaman (IP) 2,75 dan IP padi 1,55.
4. Rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi layanan jaringan irigasi.
5. Melakukan kegiatan Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi sungai untuk mengurangi resiko banjir.
6. Normalisasi Kali Kemuning dan pemasangan pompa untuk penanggulangan banjir.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

1. Pemenang Pertama dalam Penghargaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tingkat Nasional
2. Pemenang Ketiga dalam Penghargaan Daerah Irigasi (DI) Teladan Tingkat Nasional

3.3. DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

a. Tujuan :

Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih & sanitasi yang layak, antara lain :

- Meningkatkan kinerja aparatur dan administrasi perkantoran.
- Memenuhi pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana dinas.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah.
- Memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih / minum.
- Meningkatkan pelayanan air bersih.
- Mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan air bersih di wilayah-wilayah tertentu khususnya daerah rawan air.
- Memenuhi hak dasar masyarakat atas sanitasi yang layak.
- Meningkatkan pelayanan drainase dan persampahan.
- Mengetahui potensi, masalah dan kebutuhan sanitasi di wilayah-wilayah tertentu.
- Meningkatkan pelayanan air limbah.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih	Persentase KK yang dapat layanan air bersih yang layak	71,42%	72,06%	0,89%
1. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	Persentase tingkat pelayanan air bersih	71,42%	72,06%	0,89%
II. Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah	Persentase KK rumah tangga dengan layanan sanitasi yang aman	64,98%	65,31%	0,50%
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Persentase tingkat pelayanan air limbah	64,98%	65,31%	0,50%

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Pekerjaan Umum yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih, memiliki indikator sasaran :

- Persentase KK yang dapat layanan air bersih yang layak;
Persentase KK yang dapat layanan air bersih yang layak pada Tahun 2015 adalah sebesar 71,42% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 72,06% hal ini dikarenakan terpenuhinya pembangunan perpipaan air bersih sepanjang 68.181 meter.

Sasaran 2: Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah, memiliki indikator sasaran :

- Persentase KK rumah tangga dengan layanan sanitasi yang aman;
Indikator kinerja Persentase KK rumah tangga dengan layanan sanitasi yang aman pada Tahun 2015 sebesar 64,98% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 65,31% hal ini dikarenakan terpenuhinya sarana saluran drainase sepanjang 2.364 meter dan pembangunan MCK sebanyak 6 unit.

c. Program

1. Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum, dengan anggaran Rp. 32.485.581.400,- Realisasi sebesar Rp. 31.179.893.647,- atau 95,98% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi, dengan anggaran Rp. 4.218.424.600,- Realisasi sebesar Rp. 3.876.373.293,- atau 91,89% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air.

2. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan.
3. Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (system sewerage).
4. Belum optimalnya pengurangan genangan bajir di kawasan perkotaan.

Solusi :

1. Meningkatkan peran serta seluruh stake holder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah diperkotaan dan perdesaan.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air minum dan air limbah untuk masyarakat.
3. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (air baku).
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan.
5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan.

e. Penghargaan Nasional Yang Diterima

➤ **Lomba Pekerja Konstruksi Nasional 2016**

Diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tanggal 7 November 2016 di Jakarta dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum. Lomba Pekerja Konstruksi 2016 ini diikuti oleh 427 orang peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing Provinsi mengirimkan 15 orang perwakilannya yang akan mengikuti lomba pekerja konstruksi tingkat nasional.

Kategori yang dilombakan antara lain, kategori Bidang Pemasangan Batu, Bidang Pembesian, Bidang Pemasangan Ubin, Bidang Plumbing, Bidang Scaffolding, Bidang Juru Ukur, Bidang Juru Gambar, Bidang Operator Excavator, Bidang Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan dan Bidang Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Gedung.

Perwakilan Jawa Timur berhasil meraih Juara sbb :

1. Samdoko (Juara I Bidang Operator Exacavator)
2. Rudi Hartono (Juara II Bidang Pembesian)
3. Muchammad Muchsin (Juara Harapan I Bidang Pembesian)
4. Lulus Widodo (Juara Harapan I Bidang Instalasi Listrik)
5. Aydo Sokhikhul Cholis (Juara Harapan I Bidang Juru Ukur/Surveyor)

➤ **Pengawasan Teknis Penataan Ruang Tingkat Nasional Tahun 2016**

Jawa Timur berhasil meraih Juara 1 Pengawasan Teknis Penataan Ruang Tingkat Nasional Tahun 2016 yang diadakan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN)

BIDANG URUSAN PERUMAHAN

a. Tujuan :

Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain :

- Mengurangi backlog rumah.
- Meningkatkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR).
- Penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
- Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan / permukiman yang lebih baik.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni serta menghadapi perdagangan bebas (AFTA 2015) dibidang konstruksi.
- Menciptakan lingkungan permukiman yang ramah lingkungan melalui teknologi bidang perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah tertentu.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak	Persentase rusun terbangun	36,71%	39,76%	8,30%
1. Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rusun Terbangun	36,71%	39,76%	8,30%
	Jumlah PSU Perumahan Permukiman dan Dokumen Monev RTLH	22	10	(54,54%)

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Perumahan yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, memiliki indikator sasaran :

➤ Persentase rusun terbangun;

Persentase rusun terbangun pada Tahun 2015 adalah sebesar 36,71% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 39,76% hal ini dikarenakan terpenuhinya pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 1 TB yaitu Rusunawa Gunung Anyar.

c. Program

Program Pengembangan Perumahan, dengan anggaran Rp. 83.793.292.000,- Realisasi sebesar Rp. 78.627.680.293,- atau 93,84% untuk mendukung 12 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
2. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.
3. Terbatasnya pengembangan PSU RSH / RST dan kawasan permukiman perdesaan.

Solusi :

1. Merealisasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa, serta menyediakan prasarana dan sarana permukiman dengan melibatkan semua stake holder.
2. Meningkatkan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis pengelolaan / pembangunan gedung negara.
3. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pembangunan bidang perumahan permukiman.

BIDANG URUSAN TATA RUANG

a. Tujuan :

Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai Tata Ruang	41,71%	46,80%	12,20%
1. Program Perencanaan Tata Ruang	1. Persentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	53,85%	70,27%	30,49%
	2. Jumlah rencana rinci Tata Ruang Kab/Kota	16	15	(6,25%)
3. Program Pemanfaatan Ruang	Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	10%	63,63%	536,30%
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	100%	100%	0%

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Tata Ruang yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang, memiliki indikator sasaran :

- Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai Tata Ruang;
Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai Tata Ruang pada Tahun 2015 adalah sebesar 41,71% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 46,80% hal ini dikarenakan terpenuhinya total 26 RTR KSP hingga tahun 2016, sejumlah 15 persetujuan substansi (persub) RDTR dikeluarkan

ditahun 2016, 7 NSPK dalam bentuk Raperbup, dan terselesaikannya 1 kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di tahun 2016.

c. Program

1. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan anggaran Rp. 1.942.296.505,- Realisasi sebesar Rp. 1.850.859.039,- atau 95,29% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Pemanfaatan Ruang, dengan anggaran Rp. 1.929.502.500,- Realisasi sebesar Rp. 1.908.510.690,- atau 98,91% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan anggaran Rp. 428.200.995,- Realisasi sebesar Rp. 418.823.005,- atau 97,81% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum tersedianya rencana rinci tata ruang (kawasan strategis dan rencana detail tata ruang).
2. Belum optimalnya RTRW sebagai acuan pembangunan di daerah.
3. Belum optimalnya perwujudan NSPK bidang penataan ruang.
4. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

Solusi :

1. Fasilitasi kerjasama tata ruang lintas Kabupaten / Kota.
2. Perlu dilakukannya pelatihan – pelatihan dan bimbingan teknis terhadap aparat Kabupaten / Kota.
3. Perlu dilakukannya pemantauan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan ruang.

6. BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.1. BADAN PERENCANAAN DAERAH PROV. JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Meningkatkan kualitas SDM Perencana;
- Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, transparansi, partisipasi dan inovasi perencanaan;
- Meningkatkan kualitas data/informasi pendukung perencanaan dan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan daerah.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM		INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif		1. Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan	100 %	100 %	-
		2. Persentase usulan stakeholder yang terakomodir didalam dokumen perencanaan	46,50 %	42,00 %	(9,7%)
		3. Persentase ketaatan terhadap tata ruang	75,32 %	75%	(0,42%)
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	46,50 %	42,00 %	(9,7%)
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	46 %	55,3%	20,2%
3	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	32 %	32 %	-
4	Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	Persentase Proyeksi Kapasitas Keuangan Daerah terhadap Penetapan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Dokumen Perencanaan	95 %	99%	4,2%

SASARAN/PROGRAM		INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
5	Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pengembangan Regional yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	28 %	28 %	-
6	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan	Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	20 %	20 %	-
7	Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	13 Kegiatan	8 Kegiatan	(38,4%)
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu		Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	98,62 %	100 %	1,4%
		Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	87,50%	88,17%	0,77%
		Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan	100 %	100 %	-
		Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik	-	100%	100%
1	Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	persentase data dan informasi serta pelaporan perencanaan pembangunan	97,89 %	98 %	0,11%
		persentase program dan kegiatan RKPD dalam APBD	97,01 %	100 %	3,08%
		persentase SKPD Provinsi dan kabupaten/kota yang melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan secara tepat waktu	77,11 %	84,51 %	9,60%

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif,dan inovatif

➤ **Persentase dokumen perencanaan yang dipublikasikan**

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat beberapa dokumen yang menjadi bagian dari dokumen yang wajib dipublikasikan untuk masyarakat umum. Dalam pelaksanaan publikasi dokumen-dokumen tersebut, dibagi dua periode waktu pelaksanaan yaitu di Triwulan II dan Triwulan III dengan 11 dokumen yang ditargetkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) Bappeda Provinsi Jawa Timur sesuai UU 14/2008, yaitu:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
4. Renstra (Rencana Strategis)
5. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
6. RKPD-P (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan)
7. Renja (Rencana Kerja)
8. KUA (Kebijakan Umum Anggaran)
9. PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara)
10. KUA-P (Kebijakan Umum Anggaran Perubahan)
11. PPAS-P (Prioritas Plafon Anggaran Perubahan)

Pada triwulan II dokumen yang terpublikasi tercapai 64 % yang berarti dokumen yang terpublikasi sebanyak 7 (tujuh) dokumen yaitu RPJPD, RPJMD 2014-2019, RTRW, Renstra 2014-2019, RKPD 2017, RKPD-Perubahan 2016, dan Renja 2017 dan Triwulan III tercapai 34% atau sebanyak 4 dokumen yang dipublikasikan yaitu KUA 2017, PPAS 2017, KUA-P 2016, dan PPAS-P 2016 , sehingga di akhir tahun diakumulasi tercapai 100% sejumlah 11 dokumen.

➤ **Persentase usulan stakeholder yang terakomodir didalam dokumen perencanaan**

Target Persentase usulan stakeholder yang terakomodir didalam dokumen perencanaan tahun 2016 sebesar 30% dan tercapai

sebesar 42% atau sebesar 131.25%. Usulan kegiatan yang masuk dalam proses perencanaan pembangunan mulai proses Musrenbang dikabupaten/Kota sampai dengan proses Musrenbang Provinsi tahun 2016 sebanyak 3296 usulan dan telah terakomodir dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebanyak 1385 usulan. Pelampauan dari target yang telah ditetapkan dikarenakan Usulan yang diajukan oleh stage holder semakin membaik dan telah sesuai dengan program/kegiatan prioritas pembangunan yang diagendakan dalam RKPD tahun 2017;

➤ **Persentase ketaatan terhadap tata ruang;**

Target presentase ketaatan terhadap tata ruang pada tahun 2016 dalam hal ini terkait pengajuan Ijin Pemanfaatan Ruang tahun 2016 adalah sebesar 70%, dan pencapaian tahun 2016 mencapai 75% atau terealisasi sebesar 107,14% yang diwujudkan dengan telah diterbitkannya 27 Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dari 36 permohonan Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR).

Sasaran 2: Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yg berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu

➤ **Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan**

Target indikator *tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan* sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tahun 2016 sebesar 95% dan terealisasi sebesar 100%, hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang hanya sebesar 98,62%, maka terjadi peningkatan kinerja sebesar 1,4%. Tingkat konsistensi yang dimaksud adalah tingkat kesesuaian nomenklatur program

antara yang terdapat pada dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2016.

Dalam mencapai target indikator *tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan* didukung oleh 3 kegiatan pada Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan *Pembangunan* yaitu (1) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota, (2) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Provinsi, dan (3) Konsultasi Rancangan Akhir dan Klarifikasi Perda RPJPD/RPJMD Kab/Kota.

➤ **Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %**

Target indikator Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (*Outcome*) Minimal 75% sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tahun 2016 sebesar 85% dan terealisasi sebesar 88,17%, hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang hanya sebesar 87,50%, maka terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,77%. Indikator tersebut dihitung berdasarkan jumlah *outcome* program-program pembangunan yang mencapai di atas 75%.

➤ **Persentase data dan informasi perencanaan yang dibutuhkan**

Target indikator Persentase Data dan Informasi Perencanaan yang dibutuhkan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tahun 2016 sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100%, hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut telah dicapai bahkan melampaui target yang telah ditentukan. Indikator ini dihitung berdasarkan data yang tersedia dibandingkan dengan total data yang dibutuhkan sebagaimana lampiran I Permendagri 54 Tahun

2010 yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

➤ **Persentase SKPD dengan Renstra Berkualitas Baik**

Target indikator Persentase SKPD dengan Renstra berkualitas baik sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 pada tahun 2016 adalah sebesar 80% atau 57 SKPD dari 71 SKPD dilingkup Provinsi Jawa Timur dan memenuhi kriteria renstra berkualitas baik sebanyak 57 SKPD atau terealisasi sebesar 100%. Hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut telah dicapai. Sesuai dengan definisi operasional yang diuraikan di dalam Indikator Utama Kinerja Bappeda tahun 2016 bahwa penilaian indikator ini dihitung berdasarkan data dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tahun 2016. Penilaian Renstra SKPD merupakan bagian dari Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Timur.

c. Program

1. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan anggaran Rp. 4.537.887.000,- Realisasi sebesar Rp. 3.513.297.744,- atau 77,42% untuk mendukung 7 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**, dengan anggaran Rp. 5.765.575.550,- Realisasi sebesar Rp. 5.566.464.845,- atau 96,55% untuk mendukung 7 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. **Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan**, dengan anggaran Rp. 7.607.844.000,- Realisasi sebesar Rp. 7.073.035.317,- atau 92,97% untuk mendukung 10 kegiatan yang secara rinci masing-masing

realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

4. **Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan anggaran Rp. 5.472.247.450,- Realisasi sebesar Rp. 5.222.253.788,- atau 95,43% untuk mendukung 12 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
5. **Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah**, dengan anggaran Rp. 5.985.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 5.905.697.645,- atau 98,67% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
6. **Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan**, dengan anggaran Rp. 6.065.165.000,- Realisasi sebesar Rp. 5.860.751.088,- atau 96,63% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
7. **Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional**, dengan anggaran Rp. 8.882.219.900,- Realisasi sebesar Rp. 8.840.307.208,- atau 99,53% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
8. **Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan**, dengan anggaran Rp. 5.024.872.000,- Realisasi sebesar Rp. 4.642.749.368,- atau 92,40% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- Dalam pelaksanaan swakelola, pihak ketiga melaksanakan efektivitas waktu pengerjaan tanpa mengurangi kualitas dari dokumen perencanaan yang

disusun, sehingga terjadi silpa pada kegiatan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dan SDA-LH.

- Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum seluruhnya tepat waktu dalam menyampaikan laporannya, sehingga penyusunan dokumen evaluasi pelaporan Pelaksanaan Program Pembangunan dengan Sumber Dana APBN/APBD untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur mejadi terhambat.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
- Terhambatnya penyusunan laporan atau informasi baik berupa dokumen maupun audio visual dikarenakan oleh masih ada SKPD dalam penyampaian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan

Solusi:

- Dalam pelaksanaan penyusunan KAK, harus mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan kegiatan swakelola, sehingga tidak menghasilkan silpa.
- Koordinasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara periodik agar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai pemahaman yang sama sehingga SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- Koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu lebih ditingkatkan.

7. URUSAN PERHUBUNGAN

7.1 DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Peningkatan kualitas pelayanan sektor transportasi.
- Penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk mendukung kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong peranan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan bidang transportasi.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi SDM petugas sektor transportasi	• Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan	73,02	77,71	6,7
	• Prosentase peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi	2,09	2,58	23,71
	• Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan	82,64	96,98	17,36
	• Survey Kepuasan pengguna kendaraan umum AKDP	67,40	74,99	11,25
	• Kapasitas pelayanan kendaraan umum AKDP per 1000 jumlah penduduk	8,99	8,22	-8,47
	• Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih	62,28	76,95	23,55
- Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan LLAJ Provinsi Jawa Timur	73,02	77,71	6,7
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi	2,09	2,58	23,71
Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan penekanan pada	• Prosentase Jumlah Prasarana dan Fasilitas terpelihara dibandingkan Jumlah Prasarana dan Fasilitas yang dimiliki	50	50	-

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan Swasta	<ul style="list-style-type: none"> rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan 	34,20	42,33	23,75
	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penurunan jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan) 	4,66	-11,25	-341
	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api 	0	-50	0
	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur 	-6,62	-7,39	-11,63
	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan utama Jawa Timur 	4,89	0,79	-83,73
	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang 	7,97	27,09	239,98
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah Kabupaten / Kota Jawa Timur 	71,05	76,32	7,41
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase Jumlah Prasarana dan Fasilitas terpelihara dibandingkan Jumlah Prasarana dan Fasilitas yang dimiliki	50	50	0
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan	34,20	42,33	23,75
- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase penurunan jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan)	4,66	-11,25	-341
- Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api	0	-50	0
- Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan di Jawa Timur	-6,62	-7,39	-11,63
- Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut	Prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan utama di Jawa Timur	4,89	0,79	-83,73
- Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara	Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang	7,97	27,09	239,98

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
- Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi	Prosentase jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota	71,05	76,32	7,41

Evaluasi Terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 Dan Tahun 2016

Pada tahun 2015-2016 kinerja Dinas Perhubungan yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi SDM petugas sektor transportasi

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan pada tahun 2015 adalah sebesar 73,02 dan pada tahun 2016 sebesar 77,71 mengalami peningkatan sebesar 6,7%

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan 9 (sembilan) unsur variabel penilaian terdiri dari Persyaratan pelayanan (U1), Prosedur pelayanan (U2), Waktu pelayanan (U3), Biaya/Tarif pelayanan (U4), Produk Spesifikasi Jenis pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Maklumat Pelayanan (U8), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9). peningkatan hasil nilai SKM merupakan wujud dari meningkatnya kinerja aparatur pemerintah di Lingkungan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

➤ Prosentase peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi

Prosentase peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi pada tahun 2015 adalah sebesar 2,09% dan pada tahun 2016 sebesar 2,58%, mengalami peningkatan sebesar 23,71%

Indikator Kinerja persentase peserta mudik balik gratis terakomodasi, merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan pelayanan angkutan kepada masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu selama masa angkutan lebaran tahun 2016 dan meminimalisir tingkat penumpukan penumpang dan tingkat penumpang yang tidak mendapatkan akses layanan angkutan umum selama masa periode angkutan lebaran tahun 2016.

Adapun tujuan Penyelenggaraan Angkutan Mudik & Balik Gratis dimaksudkan untuk :

1. Memberikan bantuan pelayanan angkutan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk berhari raya di kampung halamannya.
2. Mengurangi kepadatan penumpang di terminal akibat lonjakan penumpang.
3. Mengurangi penggunaan sepeda motor untuk kegiatan mudik lebaran.

Tabel 4.16
Prosentase peserta Mudik Balik Gratis Terakomodasi

MODA TRANSPORTASI	2015		2016	
	PNP JATIM	GRATIS	PNP JATIM	GRATIS
BUS	5.095.282	37.803	4.766.289	38.720
KA	1.093.279	89.943	1.093.005	113.080
LAUT	211.609	5.985	193.232	4.653
JUMLAH PENUMPANG	6.400.170	133.731	6.052.526	156.453
%		2,09%		2,58%

Sumber: Dishub LLAJ Prov. jatim

➤ **Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan**

Prosentase Kesesuaian Waktu Tempuh Rata-Rata per 100 km Angkutan AKDP Pada Kartu Pengawasan (KPS) Terhadap Kondisi Lapangan pada tahun 2015 adalah sebesar 82,64% dan pada tahun 2016 sebesar 96,98%, mengalami peningkatan sebesar 17,36%.

Indikator Kinerja Prosentase kesesuaian waktu tempuh rata-rata per 100 km angkutan AKDP pada kartu pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam penentuan jam keberangkatan dan kedatangan angkutan umum sebagaimana tercantum pada Kartu Pengawasan (KPS).

Penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) kendaraan umum AKDP merupakan salah satu tupoksi Bidang Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam bidang penyelenggaraan perizinan atau rekomendasi angkutan jalan. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi menetapkan jam kedatangan dan keberangkatan angkutan AKDP di dalam penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) sebagai acuan bagi pengemudi dalam memberikan pelayanan tepat waktu terhadap masyarakat. Penetapan jam kedatangan dan keberangkatan angkutan umum AKDP mempertimbangkan beberapa hal diantaranya meliputi :

1. Rata-rata waktu tempuh
2. Waktu delay akibat menaikkan dan menurunkan penumpang, hambatan samping, waktu ngetem, serta kondisi kepadatan lalu lintas pada jam tertentu
3. Panjang lintasan jalan yang dilalui

hasil rata-rata waktu tempuh per 100 Km berdasarkan KPS adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.17
Rata-rata waktu tempuh

NO	KORIDOR UTAMA PELAYANAN ANGKUTAN UMUM AKDP	WAKTU TEMPUH SESUAI KPS	WAKTU TEMPUH PER 100 KM
1	Surabaya – Madura	2,58	2,25
2	Surabaya – Situbondo – Banyuwangi	2,42	2,55
4	Surabaya – Malang – Blitar	2,77	3,14
6	Surabaya – Madiun – Ponorogo – Pacitan	2,50	2,23
8	Surabaya – Lamongan – Tuban	2,57	3,08
	RATA - RATA	2,57	2,65

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

Berdasarkan hasil pelaksanaan survey, persentase kesesuaian waktu tempuh per 100 Km untuk kendaraan angkutan umum AKDP di Jawa Timur adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.18
Kesesuaian waktu tempuh

Rata-rata waktu tempuh berdasar KPS per 100 Km	Rata-rata waktu tempuh riil per 100 Km	% kesesuaian
2,57 jam	2,65 jam	96,91 %

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

➤ **Survey Kepuasan pengguna kendaraan umum AKDP**

Survey Kepuasan pengguna kendaraan umum AKDP pada tahun 2015 adalah sebesar 67,40 dan pada tahun 2016 sebesar 74,99, mengalami peningkatan sebesar 11,25%

Kegiatan ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran kepuasan masyarakat terhadap layanan bus AKDP di Jawa Timur terkait dengan kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh penyedia jasa transportasi angkutan umum/operator khususnya bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), pengukuran dilaksanakan pada koridor Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Jawa Timur. Variabel penelitian sebanyak 9 unsur variabel mengacu pada Permenpan No 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdiri dari Persyaratan (V1), Prosedur (V2), Waktu pelayanan (V3), Biaya/Tarif (V4), Produk spesifikasi jenis pelayanan (V5), Kompetensi Pelaksana (V6), Perilaku Pelaksana (V7), Maklumat Pelayanan (V8), Penanganan pengaduan, saran dan masukan (V9).

Tabel 4.19
Survey Kepuasan pengguna kendaraan umum AKDP

NO	KORIDOR AKDP	2015	2016
1	Surabaya-Ponorogo-Pacitan	68,56	78,62
2	Surabaya-Tulungagung-Kediri-Trenggalek	71,88	79,34
3	Surabaya-Madiun-Magetan	64,6	77,93
4	Surabaya-Lamongan-Bojonegoro	61,25	70,27
5	Surabaya-Sumenep	67,51	76,01
6	Surabaya-Situbondo-Banyuwangi	64,84	72,99
7	Surabaya-Malang-Blitar	72,43	76,82
8	Surabaya-Bondowoso	70,76	69,54
9	Surabaya-Lamongan-Tuban	69,42	72
10	Surabaya-Madiun	66,97	76,47
11	Surabaya-Jember-Banyuwangi	63,18	74,85
JUMLAH		741,40	824,84
RATA2 SKM		67,40	74,99

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

➤ **Kapasitas pelayanan kendaraan umum AKDP per 1000 jumlah penduduk**

Kapasitas pelayanan kendaraan umum AKDP per 1000 jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah sebesar 8,99 dan pada tahun 2016 sebesar 8,22, mengalami penurunan sebesar 8,47%

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengetahui ketersediaan jumlah *seat* (tempat duduk) pada kendaraan umum AKDP yang tersedia untuk melayani penduduk di Jawa Timur. Ketersediaan jumlah bus/kendaraan angkutan umum AKDP di Jawa Timur yang terdiri dari Bus AKDP reguler boemel, bus AKDP cadangan, bus reguler PATAS, bus kota PATAS dan bus pemadu moda dengan kapasitas seat masing-masing 55 (lima puluh lima) *seat* pada tahun 2015 sebanyak 6.017 unit ditambah dengan jumlah MPU/Mikrolet/Mikro bus dengan kapasitas *seat* masing-masing 12 (dua belas) *seat* pada tahun 2015 sebanyak 72.205 unit dengan total *seat* keseluruhan tersedia sebanyak 349.074 *seat* yang dipergunakan untuk melayani 38.847.561 penduduk Jawa Timur. Dengan data tersebut seat yang tersedia untuk melayani per 1000 jumlah penduduk jatim sebesar 8,22 seat.

Tabel 4.20
Kapasitas pelayanan kendaraan umum AKDP per 1000 jumlah penduduk

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN	
			2015	2016
1	Jumlah Bus AKDP reguler Boemel	Kendaraan	3.846	3.359
2	Jumlah Bus AKDP Cadangan	Kendaraan	488	487
3	Jumlah Bus Reguler PATAS	Kendaraan	642	579
4	Jumlah Bus Kota PATAS	Kendaraan	29	28
5	Jumlah Bus Pemadu Moda	Kendaraan	29	29
Jumlah			5.034	4.482
A. jumlah seat (55)			276.870	246.510
1.	Jumlah MPU/Mikrolet/Mikrobus	Kendaraan	6.017	6.082
B. jumlah seat (12)			72.204	72.984
Jumlah seat A + B			349.074	319.494
JUMLAH PENDUDUK JATIM (DATA BPS)		Orang	38.847.561	38.847.561
JUMLAH SEAT / JUMLAH PENDUDUK JATIM			0,0090	0,0082
(JUMLAH SEAT / JUMLAH PENDUDUK JATIM) x 1000			8,99	8,22

Sumber: Dishub LLAJ Prov. jatim

➤ **Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih**

Prosentase Kendaraan Tidak Melanggar Muatan Lebih pada tahun 2015 adalah sebesar 62,28% dan pada tahun 2016 sebesar 76,95%, mengalami peningkatan sebesar 23,55%

Indikator Kinerja persentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jawa Timur merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan kinerja Jembatan Timbang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang di Jawa Timur.

Dalam perhitungan persentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jawa Timur dilakukan dengan menggunakan data hasil penimbangan pada 19 Jembatan Timbang di Jawa Timur, dengan formulasi perbandingan antara jumlah kendaraan yang tidak melanggar pada tahun 2016 terhadap jumlah kendaraan total yang di timbang selama tahun 2016 tersebut.

Tabel 4.21
Data hasil penimbangan pada 19 Jembatan Timbang di Jawa Timur

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN		
			2014	2015	2016
1	Jumlah Kendaraan yang di timbang	Kendaraan	6.119.064	4.792.934	4.641.019
2	Jumlah Pelanggaran	Kendaraan	2.503.819	1.807.900	1.069.960
3	Jumlah Tidak Pelanggaran	Kendaraan	3.615.245	2.985.034	3.571.059
% kendaraan tidak melanggar (jumlah kendaraan tidak melanggar/Jumlah kendaraan ditimbang)		%	59,08%	62,28%	76,95%

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan Swasta

➤ **Prosentase Jumlah Prasarana dan Fasilitas terpelihara dibandingkan Jumlah Prasarana dan Fasilitas yang dimiliki**

Prosentase Jumlah Prasarana dan Fasilitas terpelihara dibandingkan Jumlah Prasarana dan Fasilitas yang dimiliki pada tahun 2015 adalah sebesar 50% dan pada tahun 2016 sebesar 50%.

Untuk melaksanakan operasional kedinasan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur mengelola 14 gedung perkantoran, 19 sarana prasarana penimbangan 1 bandara. Disamping itu, untuk meningkatkan

keselamatan ketertiban pengguna jalan, telah terpasang rambu, pagar pengamanan jalan, RPPJ, traffic light, patok tikungan, warning light dan Papan informasi elektronik (VMS). Dari prasarana yang dimiliki tersebut, untuk menjaga keberadaan dan fungsi prasarana agar tetap dapat dipergunakan untuk operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal maka dilakukan upaya pemeliharaan.

Tabel 4.22
Prosentase Jumlah Prasarana dan Fasilitas terpelihara

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rambu	920	920	100%
2	Pagar	460	460	100%
3	RPPJ	23	23	100%
4	Traffic light	10	10	100%
5	Patok tikungan	1080	1080	100%
6	Warning light	23	23	100%
7	Papan informasi elektronik (VMS)	6	6	100%
8	Sarana prasarana JT	379	379	100%
RATA - RATA				100%

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

➤ **Rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan**

Rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan pada tahun 2015 adalah sebesar 34,20% dan pada tahun 2016 sebesar 42,33%, mengalami peningkatan sebesar 23,75%.

Indikator Kinerja rata-rata persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan yang seharusnya tersedia sebagaimana kebutuhan.

Tabel 4.23
Rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang

NO	URAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN	TAHUN				
				2015		2016		
				Akumulasi	%	terpasang	Akumulasi	%
1	RPPJ	unit	711	388	54,57%	81	469	65,96%
2	Paku Marka	unit	80.000	10.585	13,23%	3.490	14.075	17,59%
3	Traffic Light	unit	242	107	44,21%	18	125	51,65%
4	warning Light	unit	1000	118	11,80%	24	142	14,20%
5	Marka Jalan	meter	2.503.039	563.470	22,51%	173.700	737.170	29,45%

NO	URAIAN	SATUAN	KEBUTUHAN	TAHUN				
				2015		2016		
				Akumulasi	%	terpasang	Akumulasi	%
		lari						
6	Pagar Pengaman Jalan/guardrail	meter lari	71.726	27.640	38,54%	4.524	32.164	44,84%
7	Rambu Lalu Lintas	unit	23.000	14.552	63,27%	3.202	17.754	77,19%
8	Papan Himbauan	unit	1.081	449	41,54%	94	543	50,23%
9	Patok Tikungan	unit	13.672	3.586	26,23%	1.695	5.281	38,63%
10	Lampu Penerangan Jalan Umum	unit	9.791	2.557	26,12%	723	3.280	33,50%
RATA-RATA					34,20%			42,33%

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

➤ **Prosentase penurunan jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan)**

Prosentase penurunan jumlah kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan) pada tahun 2015 adalah sebesar 4,66% dan pada tahun 2016 sebesar -11,25%, mengalami penurunan sebesar 341%.

Tabel 4.24
Jumlah kecelakaan akibat faktor sarana

NO	KENDARAAN TERLIBAT LAKA	SATUAN	TAHUN			
			2013	2014	2015	2016
1	Bus	Unit	526	494	471	524
% Penurunan Laka		%	3,84%	6,08%	4,66%	-11,25%

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

Indikator Kinerja persentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum, merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum di Jawa Timur.

masih tingginya angka kecelakaan yang melibatkan bus umum diakibatkan faktor kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih kurang. Untuk itu diperlukan Peningkatan kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum agar para pengemudi dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan mengedepankan pelayanan yang prima dan disiplin berlalu lintas.

➤ **Prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api**

Prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api pada tahun 2015 adalah sebesar 0% dan pada tahun 2016 sebesar -50%, mengalami penurunan sebesar 50%.

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api, merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi dampak pembangunan Alarm Early Warning System (AEWS) yang dibangun oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur pada perlintasan resmi antara jalan dan jalur kereta api yang belum memiliki fasilitas palang pintu perlintasan. Pemasangan AEWS ditujukan untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api dengan cara memperingatkan pengguna jalan saat melintas pada perlintasan sebidang kereta api.

Untuk menghitung prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dilakukan dengan mendata jumlah kecelakaan yang terjadi pada perlintasan sebidang yang tidak memiliki palang perlintasan. Dampak pemasangan AEWS dilihat pada penurunan kejadian kecelakaan pada perlintasan sebidang yang sebelumnya belum terpasang AEWS. Formulasi prosentase penurunan jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api berupa perbandingan selisih jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api tahun 2016 dengan tahun 2015.

Tabel 4.25
Jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	BERPALANG	kejadian	6	9	5	6	3
2	TIDAK BERPALANG TANPA EWS	Kejadian	12	7	3	10	15
3	TIDAK BERPALANG DENGAN EWS	Kejadian	4	3	4	4	6
JUMLAH LAKA		Kejadian	22	19	12	20	24
% PENURUNAN KECELAKAAN DI PERLINTASAN TIDAK BERPALANG DENGAN EWS		%		25%	-33%	0%	-50%

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

Faktor utama penyebab kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api adalah masyarakat tidak berhati - hati dalam melintas di perlintasan kereta api dan kendaraan macet saat melintas jalur kereta api. Dalam upaya menekan jumlah kejadian kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api maka Dinas Perhubungan dan LLAJ

disamping meningkatkan pemasangan prasarana pengamanan perjalanan kereta api dengan memasang AEWS dan rambu-rambu perkeretaapian pada perlintasan sebidang kereta api baik jalur tunggal maupun jalur ganda juga meningkatkan sosialisasi tentang keselamatan perkeretaapian kepada masyarakat melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Angkutan Kereta Api.

➤ **Prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur**

Prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur pada tahun 2015 adalah sebesar -6,62% dan pada tahun 2016 sebesar -7,39% mengalami penurunan sebesar 11,63%.

Indikator Kinerja Prosentase pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pelayanan pelabuhan penyeberangan terhadap masyarakat Jawa Timur. melalui pemantauan pada 3 lintasan penyeberangan utama di Jawa Timur yaitu lintas Jangkar – Kalianget; lintas Ketapang – Gilimanuk dan lintas Ujung – Kamal.

Tabel 4.26
Pertumbuhan penumpang pada lintas penyeberangan Jawa Timur

NO	LINTASAN	SAT	JUMLAH PENUMPANG			
			2013	2014	2015	2016
1	Jangkar - Kalianget	Orang	27.681	36.802	32.699	25.717
2	Ketapang - Gilimanuk	Orang	11.982.106	11.725.382	11.245.022	10.740.994
3	Ujung - Kamal	Orang	2.312.405	1.715.375	1.383.890	959.222
JUMLAH PENUMPANG		Orang	14.322.192	13.559.194	12.661.611	11.725.933
% PENINGKATAN		%	0,56%	-5,33%	-6,62%	-7,39%

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

➤ **Prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan utama Jawa Timur**

Prosentase pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan utama Jawa Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 4,89 dan pada tahun 2016 sebesar 0,79, mengalami penurunan sebesar 83,73%

Pelabuhan merupakan akses utama dalam keluar masuk komoditi sektor perdagangan yang keberadaannya memiliki pengaruh besar dalam mendukung sektor perekonomian Jawa Timur. Pada saat ini, arus bongkar muat masih tersentral di Pelabuhan Tanjung Perak. Sehingga Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan dan LLAJ

mengembangkan beberapa Lokasi Pelabuhan di Jawa Timur yang diharapkan dapat memperlancar proses distribusi barang dengan mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru (mengurangi disparitas wilayah), mengurangi kepadatan lalu lintas jalan dan mengurangi tingkat kerusakan jalan. Beberapa pelabuhan yang dikembangkan antara lain pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, Pelabuhan Brondong di Lamongan dan beberapa pelabuhan lain yang dapat melayani zona – zona pelayanan transportasi.

Tabel 4.27
Pertumbuhan bongkar muat barang pada pelabuhan utama Jawa Timur

No	Pelabuhan	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
DALAM NEGERI					
BONGKAR					
1.	Tanjung Perak	3.951.876	4.225.821	4.810.985	4.221.761
2.	Gresik	3.779.451	4.590.418	4.721.116	4.230.432
3.	Probolinggo	332.891	419.995	407.548	208.952
4.	Tanjungwangi	1.848.926	1.821.938	1.728.856	1.100.485
	JUMLAH	9.913.144	11.058.172	11.668.505	9.761.630
MUAT					
1.	Tanjung Perak	1.672.377	1.384.977	1.461.228	1.292.506
2.	Gresik	1.020.069	1.102.566	1.204.612	1.553.705
3.	Probolinggo	121.308	144.699	132.494	494.518
4.	Tanjungwangi	239.214	390.112	188.536	818.074
	JUMLAH	3.052.968	3.022.354	2.986.870	4.158.803
TOTAL DALAM NEGERI		12.966.112	14.080.526	14.655.375	13.920.433
LUAR NEGERI					
1.	Tanjung Perak				
	Export (ton)	494.230	726.708	393.177	499.687
	Import (ton)	7.831.688	7.171.253	7.930.292	8.192.205
2.	Gresik				
	Export (ton)	0	49.954	53.991	71.520
	Import (ton)	70.415	155.659	190.015	245.446
3.	Tg Wangi				
	Export (ton)	24.494	23.673	25.057	667.240
	Import (ton)	337.522	318.994	379.660	218.838
TOTAL LUAR NEGERI		8.758.349	8.446.241	8.972.192	9.894.936
TOTAL BONGKAR MUAT		21.724.461	22.526.767	23.627.567	23.815.369
PERTUMBUHAN		-2,61%	3,69%	4,89%	0.79%

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

➤ **Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang**

Prosentase pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang pada tahun 2015 adalah sebesar 7,97 dan pada tahun 2016 sebesar 27,09, mengalami peningkatan sebesar 239,98%.

Merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pelayanan Bandara Abdulrachman Saleh Malang terkait dengan program-program pembangunan dan pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

Bandara Abdulrachman Saleh Malang merupakan satu-satunya Bandar udara di Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang yang berada di bawah Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, Mengacu pada Kesepakatan bersama antara TNI AU, Direktorat Jendral Perhubungan Udara dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor 120.1/125/012/2013 tentang penggunaan bersama pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh Malang untuk Bandar Udara tanggal 18 Desember 2013, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan dan LLAJ berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memenuhi dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Bandar Udara selama digunakan untuk mendukung kegiatan penerbangan sipil. Diharapkan dengan terbangunnya sarana dan prasana secara optimal di bandara Abdulrachman Saleh akan mampu meningkatkan jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi dan secara umum akan meningkatkan jumlah masyarakat pengguna jasa layanan di Bandara Abdulrachman Saleh.

Data jumlah penumpang pada Bandara Abdulrachman Saleh Malang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.28
Pertumbuhan penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang

NO	JUMLAH PENUMPANG	SATUAN	TAHUN					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	ABD. SALEH	orang	463.225	509.495	526.036	626.638	676.574	859.878
	% PENINGKATAN	%	27,59%	9,99%	3,25%	19,12%	7,97%	27,09%

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

➤ **Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah Kabupaten / Kota Jawa Timur**

Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah Kabupaten / Kota Jawa Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 71,05% dan pada tahun 2016 sebesar 76,32%, mengalami peningkatan sebesar 7,41% Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagai perwujudan pembinaan pemerintah dalam menata transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan. Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. Disamping kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan.

Tabel 4.29
Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha

NO	JENIS PENGHARGAAN	SATUAN	TAHUN			
			2013	2014	2015	2016
1	Plakat Wahana Tata Nugraha	Kab/kota	5	1	8	2
2	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas	Kab/kota	11	21	18	17
3	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Angkutan	Kab/kota	-	2	-	1
4	Piala Wahana Tata Nugraha	Kab/kota	5	-	1	9
5	Piala Wahana Tata Nugraha Wira Karya	Kab/kota	-	-	-	-
JUMLAH KAB/KOTA BERPREDIKAT WTN		Kab/kota	21	24	27	29
JUMLAH KAB/KOTA DI JAWA TIMUR		Kab/kota	38	38	38	38
% KAB/KOTA BERPREDIKAT WTN DI JAWA TIMUR		Kab/kota	55%	63%	71%	76%

Sumber: Dishub LLAJ Prov. Jatim

c. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 7.852.132.000,- realisasi sebesar Rp. 6.540.323.724,- atau 83,29% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 11.326.117.100,- realisasi sebesar Rp. 10.215.647.443,- atau 90,20% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 4.303.191.000,- realisasi sebesar Rp. 3.646.433.478,- atau 84,74 % untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah dengan anggaran Rp. 1.127.380.000,- realisasi sebesar Rp. 1.041.435.483,- atau 92,38 % untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan anggaran Rp. 103.042.628.289,- realisasi sebesar Rp. 101.014.297.346,- atau 98,03 % untuk mendukung 7 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan anggaran Rp. 28.174.643.000,- realisasi sebesar Rp. 27.374.600.988,- atau 97,16% untuk mendukung 9 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkut dengan anggaran Rp. 21.516.621.044,- realisasi sebesar Rp. 21.135.108.167,- atau 98,23 % untuk mendukung 14 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan anggaran Rp. 83.663.604.000,- realisasi sebesar Rp. 82.938.156.017,- atau 99,13% untuk mendukung 16 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan anggaran Rp. 1.733.865.000,- realisasi sebesar Rp. 1.671.150.787,- atau 96,38 % untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
10. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian dengan anggaran Rp. 57.095.327.862,- realisasi sebesar Rp. 56.846.085.823,- atau 99,56 % untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
11. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberang dengan anggaran Rp. 39.647.408.755,- realisasi sebesar Rp. 39.246.191.427,- atau 98,99 % untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
12. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut dengan anggaran Rp. 125.493.583.900,- realisasi sebesar Rp. 124.237.729.794,- atau 99,00 % untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
13. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara dengan anggaran Rp. 39.819.039.000,- realisasi sebesar Rp. 39.096.428.044,- atau 98,19 % untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

14. Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi dengan anggaran Rp. 37.496.359.000,- realisasi sebesar Rp. 36.954.931.485,- atau 98,56% untuk mendukung 8 kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Sebagaimana data yang diperoleh dari Polda Jawa Timur, jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2016 meningkat sebesar 11,25% dari tahun 2015. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat *stakeholders* dibidang transportasi antara lain Kepolisian, PU Jasa Marga dan Jasa Raharja telah melakukan berbagai langkah mitigasi dalam upaya untuk mengurangi kejadian kecelakaan di provinsi Jawa Timur. Faktor utama penyebab kejadian kecelakaan masih didominasi oleh perilaku pengemudi kendaraan yang tidak tertib terhadap peraturan lalu lintas, lengah, lelah, mengantuk serta tidak memperhatikan batas kecepatan kendaraan.
2. Masih tingginya angka kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api tidak dijaga mengakibatkan belum tercapainya target penurunan kecelakaan. kecelakaan umumnya terjadi akibat masyarakat kurang berhati – hatinya dan kurangnya kesadaran masyarakat saat melintas jalur Kereta Api.
3. Secara umum capaian peningkatan jumlah penumpang pada pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur penurunan dari tahun 2015 jumlah penumpang pada lintas penyeberangan ujung – kamal yang terjadi secara terus menerus disetiap tahunnya, Jembatan Suramadu dinilai lebih efisien dalam kegiatan mobilitas masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pengguna angkutan penyeberangan ujung – kamal dan jumlah operator yang melayani penyeberangan. Pada lintas Jangkar – Kalianget penurunan penumpang lebih disebabkan oleh factor cuaca yang mengakibatkan tidak adanya pelayanan dalam lintas penyeberangan tersebut.

Solusi

1. Sebagai upaya untuk menurunkan jumlah kejadian kecelakaan di Jawa Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur meningkatkan pelaksanaan operasi keselamatan dan ketertiban dari 396 kali tahun 2016 menjadi 528 kali pada tahun 2017, menyelenggarakan kegiatan Pembinaan teknis petugas Penyidik PNS Bidang LLAJ dengan kabupaten / kota se Jawa Timur, Pembinaan Pengusaha Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor, Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur serta melaksanakan Evaluasi dan Manajemen Rekayasa LLAJ
2. Meningkatkan sosialisasi keselamatan perkeretaapian kepada masyarakat dan meningkatkan prasarana pengamanan perjalanan kereta api dengan memasang AEWS (Alarm Early Warning System) dan rambu-rambu perkeretaapian pada perlintasan sebidang kereta api serta melakukan peningkatan prasarana pengamanan pada perlintasan sebidang yang telah berjalur ganda
3. Mengembangkan rute pelayanan perintis untuk lebih mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan, melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ASDP serta secara berkesinambungan melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan ASDP di Jawa Timur

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Wahana Tata Nugraha Wiratama tahun 2016

Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama merupakan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi yang dinilai mempunyai komitmen yang kuat terhadap pembangunan dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah provinsi, serta konsisten memberikan pembinaan dan bantuan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Kabupaten/Kota.

8. BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

8.1 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Tujuan

- Melestarikan ketersediaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian, pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1 Meningkatkan luasan lahan kritis yang terehabilitasi	1 Jumlah lokasi lahan kritis terehabilitasi (lokasi)	5	6	20
1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1. Jumlah lokasi lahan kritis terehabilitasi (lokasi)	5	6	20
2 Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam berbasis peran serta masyarakat	1. Jumlah titik sumber mata air terkonservasi (titik)	5	6	20
	2. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)	100	100	0
	3. Jumlah Desa/Kelurahan Berseri (desa/kelurahan)	34	37	8,82
1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Cakupan wilayah sumber mata air yang terkonservasi (titik)	5	6	20
	2. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)	100	100	0
3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,69	*	0
	2. Kualitas air Sungai Parameter BOD (mg/ltr)	4,14	4,52	9,18
	3. Kualitas air Sungai	11,88	12,11	1,94

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
	Parameter COD (mg/ltr)			
	4. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien (%)	5	3,51	-29,80
	5. Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan yang diawasi (%)	69,56	74,21	6,68
	6. Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi (%)	100	100	0
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air (%)	4,35	39,29	803,21
	2. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien (%)	5	3,51	-29,8
	3. Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan perijinan lingkungan (%)	69,57	74,21	6,68
	4. Persentase penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi (%)	100	100	0
4. Meningkatnya upaya pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) melalui koordinasi lintas sektor	1. Jumlah penurunan emisi GRK (juta ton eq. CO ₂) dari sector terkait, energy, ndustri (IPPU), tansportasi, lahan (AFOLU)	4,48	4,289	-4,26
1. Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	1. Jumlah penurunan emisi GRK (juta ton eq. CO ₂)	4,48	4,289	-4,26

Keterangan: * hingga laporan ini disusun, nilai IKLH belum tuntas dilakukan perhitungan.

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pada tahun 2015-2016 kinerja Bidang Lingkungan Hidup telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan luasan lahan kritis yang terahabilitasi.

Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator sasaran, yaitu Jumlah lokasi lahan kritis terehabilitasi. Pada tahun 2015, jumlah lokasi lahan kritis

terehabilitasi sebanyak 5 (lima) titik/lokasi dan pada tahun 2016 sebanyak 6 (enam) titik/lokasi. Indikator sasaran ini mengalami kenaikan sebesar 20%. Jumlah lahan kritis yang ter rehabilitasi secara bertahap diupayakan untuk ditingkatkan. Peningkatan lahan kritis yang direhabilitasi ini diharapkan dapat menurunkan jumlah lahan kritis di Jawa Timur.

Sasaran 2: Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam berbasis peran serta masyarakat.

Sasaran ini memiliki 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu:

- **Jumlah titik sumber mata air terkonservasi.** Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi pada tahun 2015 sebanyak 5 (lima) titik/lokasi dan tahun 2016 sebanyak 6 (enam) titik/lokasi. Capaian ini meningkat sebanyak 20% apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan ini terjadi karena upaya yang telah dilakukan Dinas LH yaitu dengan melaksanakan action learning di 3 (tiga) kabupaten serta demplot pelestarian sumber mata air dengan vegetasi yang dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten.
- **Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.** Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah mencapai 100% di tahun 2016 dan 100% di tahun 2015. Tidak ada peningkatan untuk indikator ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015.
- **Jumlah Desa/Kelurahan Berseri (desa/kelurahan).** Jumlah desa/kelurahan bersih dan lestari (BERSERI) pada tahun 2016 sebanyak 37 desa/kelurahan dan 34 desa/kelurahan pada tahun 2015. Maka tingkat kemajuannya mencapai 8,8% atau meningkat sebanyak 3 desa/kelurahan. Kenaikan ini dikarenakan adanya upaya-upaya pembinaan desa/kelurahan berseri.

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran.

Sasaran ini memiliki 6 (enam) indikator antara lain:

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).** Nilai IKLH pada tahun 2015 adalah 68,69, namun tahun 2016 belum selesai dilakukan perhitungan.
- **Kualitas air sungai parameter BOD.** Nilai BOD kualitas air sungai tahun 2016 adalah 4,52 mg/L dan nilai BOD tahun 2015 adalah 4,14 mg/L. Terdapat penurunan kualitas air sungai dengan parameter BOD di tahun 2016 sebesar 9,18%. Penurunan ini disebabkan meningkatnya jumlah industri dan air limbah domestik yang belum tertangani.
- **Kualitas air sungai parameter COD.** Nilai COD kualitas air sungai tahun 2016 adalah 11,88 mg/L dan nilai COD tahun 2015 adalah 12,11 mg/L. Terdapat penurunan kualitas air sungai dengan parameter COD di tahun 2016 sebesar 1,94%. Penurunan ini disebabkan meningkatnya jumlah industri dan air limbah domestik yang belum tertangani.
- **Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien.** Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien di Jawa Timur tahun 2016 adalah 3,51% lebih sedikit dibanding persentase di tahun 2015 (5%). Penurunan persentase titik pantau ini dikarenakan tidak adanya upaya pengendalian yang signifikan seperti pengembangan zona hijau, pengetatan baku mutu emisi bagi kendaraan bermotor, maupun tindakan penataan terhadap industri/usaha yang melakukan pelanggaran pencemaran udara terutama terkait persyaratan cerobong.
- **Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan yang diawasi.** Pada tahun 2016 persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan yang diawasi

adalah 74,21% atau lebih besar 6,68% dibandingkan tahun 2015 (69,56%).

- **Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup dengan sanksi administratif.** Kasus lingkungan hidup yang muncul selama tahun 2016 sejumlah 2 kasus. Kedua kasus ini telah diselesaikan oleh Badan Lingkungan Hidup Prov. Jawa Timur seluruhnya (100%). Pada tahun 2015 kasus lingkungan juga terselesaikan 100%.

Sasaran 4: Meningkatnya upaya pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) melalui koordinasi lintas sektor.

Sasaran ini memiliki 1 indikator, yaitu jumlah penurunan emisi GRK dari sektor terkait energi, industri (IPPU), transportasi, lahan (AFOLU). Emisi GRK pada tahun 2016 yang berhasil diturunkan adalah sebesar 4,289 juta ton eq. CO₂ atau lebih sedikit 4,26% dibanding penurunan emisi GRK tahun 2015 (4,48 juta ton eq. CO₂).

c. Program

1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. Anggaran program ini Rp.1.395.650.000,- dan terealisasi Rp.1.381.776.700,- atau sebesar 99,01% untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi perkegiatan terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format 16 kolom. Indikator program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam ini adalah jumlah lokasi lahan kritis yang terehabilitasi. Jumlah lahan kritis terehabilitasi tahun 2015 adalah 5 titik, dan tahun 2016 adalah 6 titik. Sehingga tingkat kemajuan untuk indikator ini sebesar 20%. Bertambahnya jumlah lahan kritis terehabilitasi ini menambah pula luas tutupan vegetasi di tahun 2016 menjadi 1.756.166.913 Ha sehingga luas lahan kritis di Provinsi Jawa Timur telah berkurang 12 Ha menjadi 407.060 Ha.

Upaya penanganan lahan kritis telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya pembinaan Menuju Provinsi Hijau (MPH) dan pelaksanaan demplot rehabilitasi lahan di 6 lokasi dengan total luas lahan yang terehabilitasi sekitar 12 Ha. Jenis tanaman yang digunakan antara lain: durian montong,

kelengkeng dan jambu merah. Lokasi/titik demplot rehabilitasi lahan berbasis masyarakat yang dilaksanakan tahun 2016 diantaranya:

1. Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
 2. Desa Lembung, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;
 3. Desa Selok Awar-Awar, Kec. Pasirian, Kabupaten Lumajang;
 4. Desa Penanggungan, Kec. Trawas, Kabupaten Mojokerto;
 5. Desa Ngampungan, Kec. Bareng, Kabupaten Jombang;
 6. Desa Gunungsari, Kec. Bournno, Kabupaten Bojonegoro.
2. Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam. Anggaran Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam Rp.7.589.661.000,- dengan realisasi Rp. 7.430.049.862,- atau sebesar 97,90% untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi perkegiatan terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format 16 kolom. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ini memiliki 2 indikator, yaitu:
- a. Jumlah titik sumber mata air yang terkonsumsi terealisasi sebanyak 6 lokasi di tahun 2016 dan 5 lokasi di tahun 2015. Tingkat kemajuan bila tahun 2015 dibandingkan tahun 2016 adalah sebanyak 20%.
Upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:
 - ❖ Action learning perlindungan mata air (PERMATA) dengan vegetasi tahun 2016 dilaksanakan pada lokasi berikut:
 - Ds. Giriharjo, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi;
 - Ds. Ketandan, Kec. Dagangan, Kab. Madiun;
 - Ds. Trosono, Kec. Parang, Kab. Magetan.
 - ❖ Demplot pelestarian Sumber Mata Air dengan vegetasi tahun 2016 dilaksanakan di lokasi sebagai berikut:
 - Ds. Ngliman, Kec. Sawahan, Kab. Nganjuk
 - Ds. Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang
 - Ds. Balerejo, Kec. Wlingi, Kab. Blitar

- b. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebanyak 100 % dengan terealisasi sebanyak 100 %. Realisasi tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tahun 2015 juga mencapai 100% sehingga tingkat kemajuan target ini dibanding tahun 2015 0%. Pada tahun 2016 terdapat 47 pengaduan yang masuk, 2 diantaranya merupakan kewenangan pemerintah pusat, 21 kewenangan provinsi dan 24 sisanya merupakan kewenangan kabupaten/kota.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Rp. 27.409.743.585,- dengan realisasi Rp. 15.722.824.437,- atau sebesar 57,36% untuk mendukung 6 (enam) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi perkegiatan terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format 16 kolom.

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup memiliki 6 indikator kinerja, antara lain:

 - a. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air. Pada tahun 2016 persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air sebesar 39,29% lebih banyak dibanding tahun 2015 (4,35%). Tingkat kemajuannya mencapai 803,21%.
 - b. Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien. Pada tahun 2016, persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas udara ambien mencapai 3,51% atau lebih kecil 29,8% dibandingkan tahun 2015 (5%). Penurunan kualitas udara ambien ini disebabkan karena tidak adanya upaya pengendalian yang signifikan seperti pengembangan zona hijau, pengetatan baku mutu emisi bagi kendaraan bermotor, maupun tindakan penataan terhadap industri/atau usaha yang melakukan pelanggaran pencemaran udara terutama terkait persyaratan cerobong.
 - c. Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan perizinan lingkungan. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap

pelaksanaan perizinan lingkungan di tahun 2016 mencapai 74,21% dan di tahun 2015 mencapai 69,57%. Tingkat kemajuan untuk indikator ini adalah 6,68%. Pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 260 usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan terealisasi 159 usaha dan/atau kegiatan yang berhasil diawasi. Dari 159 usaha dan/atau kegiatan ini 118 diantaranya berstatus taat dan 41 usaha sisanya berstatus tidak taat.

Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan perizinan lingkungan adalah Program peringkat kinerja perusahaan (Proper). Pada tahun 2016 terdapat 188 perusahaan yang dinilai, dan hasil penilaiannya adalah sebagai berikut:

- 2 perusahaan memperoleh peringkat emas;
 - 21 perusahaan memperoleh peringkat hijau;
 - 143 perusahaan memperoleh peringkat biru;
 - 12 perusahaan memperoleh peringkat merah;
 - Tidak ada perusahaan memperoleh peringkat hitam; serta
 - 10 perusahaan yang tidak diumumkan.
- d. Persentase penyelesaian kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan Sanksi Administrasi. Pada tahun 2016 terdapat 4 (empat) kasus lingkungan yang ditangani dan sudah ada tindak lanjutnya berupa rekomendasi sanksi administratif yang disampaikan ke instansi yang berwenang. Kasus atau pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan sanksi administratif tahun 2016 telah terselesaikan 100% dan tahun 2015 juga terselesaikan 100%. Kedua kasus lingkungan yang telah diselesaikan ini dilakukan oleh:
- PT. Seng fong Moulding Perkasa (Kabupaten Jombang) dan rekomendasinya disampaikan ke Bupati Jombang;
 - CV. Logam Jaya Sakti (Kabupaten Mojokerto) dan rekomendasinya disampaikan ke Bupati Mojokerto;
 - PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Kabupaten Gresik) dan rekomendasinya disampaikan ke Bupati Gresik;
 - UD. Varia Indo Prima (Kabupaten Jombang), rekomendasinya disampaikan ke Bupati Jombang.

4. Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan, yaitu Pengembangan dan penerapan instrumen penurunan sumber pencemaran emisi gas rumah kaca (GRK) dengan anggaran Rp.1.116.537.000,- dan realisasi Rp. 1.083.440.504,- atau sebesar 97,04%. Realisasi kegiatan secara rinci yang terdiri atas realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format 16 kolom.

Indikator program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah jumlah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor terkait energi, industri (IPPU), transportasi, lahan (AFOLU). Jumlah penurunan emisi GRK tahun 2016 adalah sebanyak 4,289 juta ton eq. CO₂ dan pada tahun 2015 mencapai 4,48 juta ton eq. CO₂. Terdapat 4,26% penurunan emisi GRK dari tahun 2015 ke tahun 2016. Program ini didukung beberapa sub kegiatan, diantaranya:

- a. Program kampung iklim. Pada tahun 2016 terlaksana 4 (empat) kegiatan action learning Program Kampung Iklim (Proklim) yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Kegiatan Proklim di Jawa Timur telah menghasilkan adanya peningkatan kapasitas masyarakat terutama dalam pengelolaan dan pemilahan sampah, pemanfaatan lahan terbuka/pekarangan serta pembuatan pupuk kompos dari kotoran ternak serta pertanian organik. Selain itu juga terbentuknya embrio bank sampah di lokasi acation learning;
- b. Demplot biogas. Pada tahun 2016 telah dipasang 4 (empat) unit demplot bangunan biogas di Kabuapten Mojokerto dan Kabupaten Malang.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Aksi mitigasi telah banyak dilakukan di daerah tetapi tidak tercatat secara detail setiap aktivitas yang dilakukan karena minimnya jumlah data yang diperoleh menyebabkan banyak dilakukan asumsi dalam perhitungan emisi;
2. Lahan kritis yang akan direhabilitasi tidak berada pada satu lokasi dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam pemeliharaan tanah;
3. Minimnya data terbaru profiil sumber mata air akibat adanya tumpang tindih permasalahan antara pemangku kepentingan dan pemangku wilayah sumber mata air;

4. Semakin maraknya pengaduan masyarakat mengenai limbah B3 tanpa izin dan minimnya tanggapan KLHK dan Badan LH kab/kota dalam menindaklanjuti pengaduan yang dilimpahkan;
5. Berkurangnya anggaran dalam pemantauan kualitas lingkungan, pemantauan ketaatan usaha dan/atau kegiatan, serta pembinaan lingkungan.

Solusi:

1. Peningkatan kapasitas perhitungan emisi GRK (keg. Inventarisasi maupun PEP) sehingga meningkatkan jumlah dan kualitas data aktifitas yang diperlukan dalam perhitungan emisi GRK serta Melakukan asumsi dalam perhitungan dengan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan (metada data);
2. Peningkatan koordinasi dengan BPDAS dan Dinas Kehutanan dalam upaya merehabilitasi lahan kritis;
3. Peningkatan peran aktif daerah untuk memperbaharui data profil sumber mata air serta regulasi ditingkat nasional harus dapat melihat kepentingan di daerah terkait sinergitas antara pemangku kepentingan dan pemangku wilayah;
4. Peningkatan pengawasan terhadap industri, transporter dan pemanfaat limbah B3 serta Peningkatan koordinasi dengan KLHK dan Badan LH kab/kota dalam penanganan pengaduan;
5. Perlunya peningkatan anggaran dalam pemantauan kualitas lingkungan, pemantauan ketaatan usaha dan/atau kegiatan, serta pembinaan lingkungan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Pada tahun 2016 Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan Nirwasita Tantra Tingkat Provinsi. Penghargaan Nirwasita Tantra adalah penghargaan dari pemerintah terhadap Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) yang dinilai memiliki kepemimpinan yang mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja berbasis pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Penilaian penghargaan Nirwasita Tantra didasarkan atas dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Dokumen SLHD Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen terbaik pertama tingkat Nasional.

11. BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

11.1. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TIMUR

BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Tujuan

- Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki;
- Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai perlakuan yang salah, tindak kekerasan, eksploitasi, Perdagangan dan diskriminasi;
- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat terhadap Program keluarga Berencana yang responsive gender.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya peran serta perempuan agar dapat Menurunkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,07	91,77*	0,76
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,41	68,64*	0,33
	3. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	19,54%	25%	27,94
	4. Persentase Perempuan Kepala Keluarga, perempuan korban KDRT, Trafiking, keluarga TKW dan wanita binaan BPPKB yang sudah mandiri	9,24% (17 orang)	18,67% (14 orang)	102,05
1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Perundangan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA)	21%	50%	138,09

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
	2. Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja-PUG)	12,50%	11%	-12
2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1. Persentase partisipasi perempuan didalam lembaga pemerintah	26%	14%	-46,15
II. Meningkatnya Kualitas Penanganan berbagai Kasus Kekerasan dan Trafiking terhadap Perempuan dan Anak	1. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan trafiking yang diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Jatim	100% (jumlah korban yang ditangani sebanyak 625 orang)	100% (jumlah korban yang ditangani sebanyak 462 orang)	0
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	85,50	0,59
	3. Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim	-6,88%	26,08%	479,07
1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Persentase Penanganan korban KDRT, non KDRT dan Traffiking yang melapor dan dilayani oleh Pusat Pelayanan Terpadu	100%	100%	0
III. Meningkatnya Kab/ Kota Layak Anak	1. Persentase Kab/Kota Layak Anak	18,42% (7 Kab/Kota)	18,42% (7 Kab/Kota)	0
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diterbitkan Kab/Kota	5%	3%	-40

Catatan : Realisasi IPG dan IDG tahun 2016 * adalah Capaian estimasi dari rata-rata capaian periodik tahun 2011 s/d 2015

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya peran serta perempuan agar dapat Menurunkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

➤ Indeks Pembangunan Gender (IPG);

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2015 adalah sebesar 91,07 dan estimasi capaian pada tahun 2016 sebesar 91,77*. Mengalami peningkatan sebesar 0,76% dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan dari dimensi kesehatan untuk komponen Angka Harapan Hidup perempuan lebih besar dibanding dengan laki-laki yaitu 72,67 tahun pada perempuan dan 68,69 tahun pada laki-laki, dari dimensi pendidikan (komponen Harapan lama sekolah perempuan lebih rendah yaitu 12,60 tahun dibanding laki-laki yaitu 12,72 tahun dan Rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah yaitu 6,57 tahun dibanding laki-laki yaitu 7,75 tahun), dari dimensi ekonomi (komponen pengeluaran perkapita perempuan lebih rendah dibanding laki-laki yaitu 9,26 juta dibanding laki-laki yaitu 14,58 juta).

➤ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2015 adalah sebesar 68,41 dan estimasi pada tahun 2016 sebesar 68,64*. Mengalami peningkatan sebesar 0,33% dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh peranan perempuan dalam memberikan pendapatan kerja rata-rata sebesar 35,17.

➤ Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG);

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada tahun 2015 adalah sebesar 19,54% (Rp 1.624.873.984.110,00) dari Total APBD (belanja langsung) dan pada tahun 2016 sebesar 25% (Rp 3.332.319.414.612) dari total APBD (belanja langsung). Mengalami kenaikan 27,94% dibandingkan Tahun 2015. Hal ini

disebabkan oleh semakin meningkatnya pemahaman SKPD dalam menganalisis anggaran berbasis gender.

- Persentase Perempuan Kepala Keluarga, perempuan korban KDRT, Trafiking, keluarga TKW dan wanita binaan BPPKB yang sudah mandiri.

Persentase Perempuan Kepala Keluarga, perempuan korban KDRT, Trafiking, keluarga TKW dan wanita binaan BPPKB yang sudah mandiri pada tahun 2015 adalah sebesar 9,24% (17 orang) dan pada tahun 2016 sebesar 18,67% (14 orang). Mengalami peningkatan sebesar 102,05% dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan karena pada saat pelatihan bimbingan manajemen usaha diberikan materi pelatihan tentang peluang-peluang pasar atau pemasaran, selain itu juga diberikan pelatihan menciptakan kemasan yang menarik bagi konsumen dan cara-cara berpromosi yang sangat murah tetapi meluas secara nasional misalnya melalui media sosial.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penanganan berbagai Kasus Kekerasan dan Trafiking terhadap Perempuan dan Anak.

- Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan trafiking yang diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Jatim.

Persentase penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan trafiking yang diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov. Jatim pada tahun 2015 sebesar 100% (jumlah korban yang ditangani sebanyak 625 orang) dan pada tahun 2016 sebesar 100% (jumlah korban yang ditangani sebanyak 462 orang). Tidak mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan karena seluruh pengaduan tindak kekerasan dan trafficking ditangani dan diselesaikan oleh PPT Prov. Jatim.

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 85,00 dan pada tahun 2016 sebesar 85,50. Mengalami peningkatan sebesar 0,59% dari tahun 2015. Peningkatan IKM tersebut disebabkan adanya peningkatan pada Unsur Pelayanan No. 8, yaitu Keadilan mendapatkan pelayanan, yang pada Tahun 2015 Nilai Unsur Pelayanannya sebesar 3,29 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 3,49.

➤ **Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim.**

Persentase penurunan kasus tindak kekerasan dan trafiking di Jatim pada tahun 2015 sebesar -6,88 dan pada tahun 2016 sebesar 26,08. Mengalami peningkatan sebesar 479,07% dibandingkan Tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh penurunan kasus tindak kekerasan dan trafficking di Jawa Timur sebanyak 163 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penurunan kasus kekerasan disebabkan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil dalam upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan Trafficking melalui Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Trafficking di Kabupaten/Kota.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kab/Kota Layak Anak

- Persentase Kab/Kota Layak Anak tahun 2015 sebesar 18,42% (7 Kab/Kota) dan pada tahun 2016 sebesar 18,42% (7 Kab/Kota). Tidak mengalami kenaikan maupun penurunan disebabkan karena penilaian Kab/Kota dilakukan setiap 2 tahun sekali dan akan dilaksanakan pada tahun 2017.

c. Program

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan anggaran Rp 382.337.000,- Realisasi sebesar Rp 376.011.350,- atau 98,35% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan anggaran Rp 1.049.393.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.027.855.219,- atau 97,95% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan anggaran Rp 1.398.533.000,- Realisasi sebesar Rp 1.380.971.885,- atau 98,74% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan anggaran Rp 718.280.000,- Realisasi sebesar Rp 707.828.354,- atau 98,54% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kurangnya komitmen pimpinan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur dalam menyusun data gender dan anak karena pemegang kebijakan belum menempatkan data gender dan anak sebagai komponen penting untuk mendukung dalam mengambil kebijakan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan.
2. Kurangnya wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha.

3. Pengaruh IT pada Anak usia remaja yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar, sehingga berdampak buruk terjadinya kejahatan seksual, tindak kekerasan dan perdagangan orang, perilaku seks bebas, penggunaan narkoba dan kasus perkawinan usia muda.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di 38 Kab/Kota belum semuanya berfungsi secara optimal. Penyebabnya adalah : (1) Minimnya sarana dan prasarana pelayanan korban, (2) SDM pengelola PPT banyak yang belum dilatih, (3) Alokasi anggaran terhadap penanganan kasus kekerasan dan trafiking di Kabupaten/Kota masih minim.

Solusi :

1. Melakukan sosialisasi dan bintek penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak bagi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi bagi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai upaya tersedianya data gender dan anak.
2. Diadakan bimbingan manajemen bagi perempuan.
3. Bersama-sama dengan Swadaya Masyarakat melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, KDRT, TPPO dan Pornografi secara rutin kepada lingkungan sekolah baik di tingkat SMU dan SLTP dan juga melakukan advokasi/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan Trafiking.
4. Mengadakan Rapat Koordinasi penanganan korban kepada P2TP2A Kabupaten/Kota agar bisa tersinergi dalam layanan korban serta meningkatkan intensitas pertemuan antar P2TP2A dengan para Jejaring.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Pada tahun 2016 Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yaitu Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Mentor.

BIDANG URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

a. Tujuan

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat terhadap Program keluarga Berencana yang responsive gender.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya Jumlah Pasangan Usia Subur yang mengikuti program KB	1. Persentase Cakupan KB aktif	75,70%	76,83%	1,49
1. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Cakupan KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	75,70%	76,83%	1,49
2. Program Pelayanan Kontrasepsi	2. Jumlah Akseptor Baru	500 Akseptor	- (Pada tahun 2016 BPPKB tidak mengalokasikan Bantuan Keuangan pengadaan Alkon dikarenakan sesuai UU No 23 Tahun 2014 untuk pengadaan Alkon langsung ditangani Pusat)	-
3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	3. Jumlah Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tahap Tegar	100%	100%	0
4. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	4. Jumlah Kader Taman Posyandu yang dilatih tentang Perlindungan Anak	500 Kelompok	350 Kelompok	-30

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Pasangan Usia Subur yang mengikuti program KB.

➤ Persentase Cakupan KB aktif;

Persentase Cakupan KB aktif pada tahun 2015 adalah sebesar 75,70% dan pada tahun 2016 sebesar 76,83%. Mengalami peningkatan sebesar 1.49% disebabkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program KB.

c. Program

1. Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan anggaran Rp 85.970.000,- Realisasi sebesar Rp 84.055.960,- atau 97,77% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, dengan anggaran Rp 114.200.000,- Realisasi sebesar Rp 114.141.800,- atau 99,95% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU, dengan anggaran Rp 253.000.000,- Realisasi sebesar Rp 251.629.550,- atau 99,46% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
4. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan anggaran Rp 821.830.000,- Realisasi sebesar Rp 799.629.917,- atau 97,30% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Lemahnya koordinasi lintas program dalam mewujudkan KB yang responsive Gender.
2. Masih banyak usia remaja (sekolah) di Jawa Timur yang belum mendapatkan fasilitasi pengembangan kualitas diri melalui wadah/forum PIK R dan BKR.

Solusi :

1. Menggugah kesadaran dan komitmen stakedolder 38 Kab/Kota di Jawa Timur sebagai upaya revitalisasi program KB di Jawa Timur.
2. Perlunya pengembangan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas diri remaja di Jawa Timur melalui wadah (Forum) pembentukan PIK R dan BKR dengan melibatkan unsur pendidikan (sekolah formal/madarasah), lembaga Agama (pondok pesantren) dan kelompok masyarakat umum.

13. BIDANG URUSAN SOSIAL

13.1 DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Sasaran dan Program

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Presentase PMKS Keluarga Fakir Miskin penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat ke mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan mampu berfungsi sosial di masyarakat	0,03	0,02	-33,33
	2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat keberfungsian sosialnya	0,19	0,19	-
	3. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial penerima manfaat program Bantuan dan Perlindungan Sosial yang memperoleh perlindungan sosial, yang meningkat kemampuan dalam	1,26	1,60	21,25

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
	memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan fungsi sosialnya			
	4. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan keberfungsian sosialnya	2,90	2,90	-
	5. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial penerima manfaat program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya	0,54	0,54	-
a. Program Pemberdayaan Sosial	a. Jumlah Keluarga Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan keluarga Rentan yang mendapatkan bimbingan sosial dan Usaha Ekonomis produktif (UEP)	1.244	890	-28,46
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	891 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut Usia Terlantar, Eks Warga Binaan Pemasyarakatan, Gelandangan	1.062	1.062	-

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
	Pengemis, Tuna Susila dan Anak nakal/Korban Penyalahgunaan Napza) yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial serta mendapatkan bantuan stimulan UEP			
c. Program Batuan dan Perlindungan Sosial	892 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Korban tindak kekerasan dan perlakuan salah, Pekerja Migran Bermasalah, dan orang terlanjar yang mendapatkan perlindungan sosial, bimbingan sosial dan ketrampilan dan bantuan Usaha Ekonomis Produktif	0,97 / 1.330	0,97 / 1.330	-
d. Program Penanggulang an Bencana Berbasis Masyarakat	893 Jumlah Korban Bencana yang dapat menjalankan aktifitas sosialnya di masyarakat dan jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mampu menghadapi resiko bencana	0,63 / 860	0,63 / 860	-
e. Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	894 jumlah Eks Klien yang mendapatkan bimbingan Usaha, bantuan Usaha Ekonomis Produktif, terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	50 / 2,90	50 / 2,90	-
f. Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial	895 jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan Rehabilitasi sosial, bimbingan sosial dan bantuan Usaha Ekonomis Produktif, terpenuhi kebutuhan	4.845 / 0,54	4.845 / 0,54	-

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
	dasarnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya			
2. Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,39	15,39	-
a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatnya kemampuan PSKS dalam penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2.467	2.467	-

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk mencapai 2 sasaran yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), sejalan dengan hal tersebut Dinas Sosial sebagai institusi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Timur mengarahkan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial pada dua hal penting tersebut.

Memperhatikan table diatas dapat dijelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 ini dapat dilihat dari 2 (dua) sasaran yaitu : **Pertama**, meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), **Kedua**, Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya berdasarkan data pada table diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2015 – 2016 berdasarkan masing-masing sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditetapkan dengan 5 indikator yaitu

- Persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya.
PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya pada tahun 2015 dapat tercapai sebanyak 1.240 KK atau 0,03 % dan pada tahun 2016 menjangkau 940 KK miskin atau 0,02 % dari populasi penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 4. 789.120 jiwa. Capaian kinerja pada indikator ini mengalami penurunan, hal ini karena adanya kenaikan indeks bantuan Usaha Ekonomis Produktif yang diberikan pada penerima manfaat program sebagai modal kerja.
- Persentase PMKS penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya, pada tahun 2015 adalah sebesar 0,19 % dan pada tahun 2016 sebesar 1.062 jiwa atau 0,19 % dari populasi PMKS sebanyak 567.903 jiwa. Capaian ini tidak mengalami peningkatan / tetap, hal ini telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- Persentase PMKS penerima manfaat program Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya, pada tahun 2015 tercapai sebesar 1,26 % atau 1.720 orang dan tahun 2016 tercapai sebesar 1,60 % atau sebanyak 2.190 orang. Capaian tahun 2016 tersebut mengalami peningkatan hal ini disebabkan adanya peningkatan jangkauan pelayanan pada PMKS terutama penanganan terhadap Orang Terlantar.

- Persentase PMKS penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya, pada tahun 2015 tercapai sebesar 2,90 % dari jumlah eks klien UPT dan Bidang sebanyak 1.724 orang dan pada tahun 2016 tercapai sebesar 2,90 % atau tetap. Hal ini karena dukungan anggaran yang tersedia pada program tersebut bukan hanya diperuntukan bagi penanganan PMKS tetapi juga untuk penyuluhan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.
- Persentase PMKS penerima manfaat program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya, pada tahun 2015 tercapai sebesar 0,54 % dan tahun 2016 tidak mengalami peningkatan yakni sebanyak 4.845 jiwa atau 0,54 % dari total populasi PMKS sebanyak 905.208 jiwa. Hal ini terjadi karena terbatasnya daya tampung Unit Pelaksana Teknis (UPT) penyelenggara pelayanan PMKS dalam Panti.

Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditetapkan dengan 1 (satu) indikator yaitu

- Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pada tahun 2015 tercapai sebesar 15,39 % (2.467 PSKS) dari populasi PSKS sebanyak 16.033 (PSM, TKSK, TAGANA, Karang Taruna, WKSBM, LKS, dan CSR), dan pencapaian tahun 2016 tidak mengalami kenaikan (tetap) yakni sebesar 15,39 %. Hal ini karena ketersediaan anggaran pendukung program tersebut baru dapat mencukupi untuk pembinaan bagi 2.467 PSKS.

c. Program

Adapun program penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 4.202.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 3.528.094.525,- atau 83,96 % untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 5.116.900.000,- Realisasi sebesar Rp. 5.092.859.030,- atau 99,53 % untuk mendukung 7 (tujuh) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program Bantuan dan Perlindungan sosial dengan anggaran Rp. 1.665.000.000,-. Realisasi sebesar Rp. 1.556.980.064,- atau 93,51 % untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
4. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dengan anggaran Rp. 3.270.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 3.260.389.430,- atau 99,71 % untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
5. Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp. 2.357.500.000,- Realisasi sebesar Rp. 2.331.674.585,- atau 98,90 % untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
6. Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial dengan anggaran Rp. 56.280.368.317,- Realisasi sebesar Rp. 55.089.647.685,- atau 97,88 % untuk mendukung 43 (empat puluh tiga) kegiatan yang secara rinci

masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp. 1.540.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.453.703.725,- atau 94,40 % untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 4.813.907.183,- Realisasi sebesar Rp. 4.519.085.442,- atau 93,88 % untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 8.954.965.500,- Realisasi sebesar Rp. 8.428.242.906,- atau 94,12 % untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
10. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 2.479.282.500,- Realisasi sebesar Rp. 2.264.638.575,- atau 91,34 % untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
11. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.391.245.500,- Realisasi sebesar Rp. 1.271.000.825,- atau 91,36 % untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih rendahnya komitmen daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Prioritas Gubernur (Penanganan PMKS jalanan)
2. Minimnya tempat penampungan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) / Gelandangan Psikotik yang tersedia di Kabupaten/Kota (Sesuai UU nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, bahwa Kabupaten /Kota harus menyediakan /membuat tempat penampungan.
3. Masih terjadinya ketidak sesuaian kriteria calon penerima manfaat khususnya untuk penanganan Keluarga Fakir Miskin
4. Menejemen pengelolaan usaha produktif keluarga miskin oleh pendamping masih kurang optimal.
5. Kurang optimalnya sharing dana PKH di Kabupaten / Kota
6. Adanya kecenderungan penurunan semangat dan jiwa relawan sosial dalam penanganan masalah sosial di daerahnya
7. Pemahaman pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait dengan penerbitan STP/STPU dan akreditasi LKS perlu ditingkatkan.
8. Kesiambungan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program oleh Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan.

Solusi:

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten /Kota untuk meningkatkan komitmen terhadap penanganan PMKS prioritas.
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten / Kota untuk menyediakan tempat penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)/ Gelandangan Psikotik sesuai yang diamanatkan UU nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.
3. Mendorong petugas Dinas Sosial Kabupaten / Kota dan pendaakir Miskin dalam pemanfaatan Data dari BDT (Basis Data Terpadu).
4. Mengadakan Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Fakir Miskin bagi pendamping khususnya tentang pemanfaatan stimulasi (cash money)

5. Dialokasikan dukungan dana untuk Bimbingan Lanjut seperti: tambahan modal, tambahan insentif pendamping, pembinaan dari instansi terkait.
6. Meningkatkan motivasi pengabdian relawan sosial dalam penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS) di daerahnya.
7. Melakukan pembinaan intensif bagi pengelola LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) dan petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota terkait dengan penerbitan STP/STPU dan akreditasi LKS
8. Mendorong Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan anggaran monitoring dan evaluasi lanjutan terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial di daerah.

e. Penghargaan Nasional Yang diterima

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Presiden RI : Bintang Kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial Tahun 2016
2. Kementerian Sosial RI : Kepedulian dan Pengabdian dalam upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tahun 2016.
3. Kovablik tahun 2016 : ATM Pasung

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN, KEPENDUDUKAN DAN KETRANSMIGRASIAN

14.1. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

BIDANG URUSAN KETENAGAKERJAAN

a. Tujuan

- Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri.
- Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri.
- Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.

b. Sasaran dan Program

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja	1. % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	90,81%	94,90%	4,50 %
	2. % peningkatan tenaga kerja yang dimagang-kerjakan :			
	1. % peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri.	7,27%	0%	(-100)
	2. % tenaga kerja magang ke luar negeri.	27,81%	24,58%	(- 11,61%)
	3. % pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas	43,24%	63,85%	47,66 %
II. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	1. % pencari kerja yang ditempatkan	62,50%	67,23%	7,57 %
	2. % peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu)	83,33%	84,09%	0,91 %

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
	3. % Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal	32,83%	30,88%	(-5,94%)
	4. Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal	1 : 5	1 : 6	20 %
III. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	1. % kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	46,94%	50,37%	7.30 %
	2. % upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak (KHL)	114,98% (dengan KHL)	8,25% (tanpa KHL)	
IV. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh	1. % pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani	74,75%	80,00%	7,02 %
	2. % penurunan kasus kecelakaan kerja	7,65%	7,70%	0,65 %

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada tahun 2015-2016 kinerja Bidang Ketenagakerjaan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja

➤ Prosentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan / kompetensi ;

Prosentase lulusan pelatihan yang memiliki ketrampilan / kompetensi pada Tahun 2015 adalah sebesar 90,81 persen dan pada tahun 2016 sebesar 94,9 persen (mengalami peningkatan sebesar 4,50 %). Peningkatan tersebut diperoleh dari jumlah lulusan pelatihan yang mengikuti sertifikasi kompetensi sebanyak 2629 orang untuk tahun 2016 lebih banyak dari tahun 2015 yang hanya sebesar 1.324, sedangkan yang lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi untuk tahun 2016 sebanyak 2.770 orang. Adapun sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) atau BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

- Prosentase peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri ;

Prosentase peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri pada tahun 2015 sebesar 7,27 persen. Sedangkan Tahun 2016 dengan jumlah calon tenaga kerja yang dimagangkerjakan didalam negeri sebesar 950 orang, (baik program magang yang dibiayai Pemerintah maupun magang mandiri). Jumlah ini sama dengan jumlah peserta pada tahun 2015 sebesar 950 orang. Sehingga tidak terdapat peningkatan peserta magang dalam negeri.

- Prosentase tenaga kerja magang keluar negeri ;

Prosentase tenaga kerja magang keluar negeri pada tahun 2015 sebesar 27,81 persen, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 24,58 persen (mengalami penurunan). Hal ini dikarenakan jadwal magang ke Jepang yang ditentukan oleh Direktorat Pemagangan kementrian Ketenagakerjaan RI tidak sesuai dengan yang direncanakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Sehingga persiapan peserta untuk menghadapi seleksi sangat minim , yang pada akhirnya berdampak pada minimnya jumlah peserta yang lulus seleksi.

- Prosentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas ;

Prosentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas pada tahun 2015 sebesar 43,24 persen sedangkan untuk tahun 2016 sebesar 63,85 persen (mengalami kenaikan sebesar 47,66 %). Untuk tahun 2016, Produktivitas tenaga kerja sebelum bimbingan sebesar 36 (omset penjualan Rp.303.670.000) dan sesudah bimbingan konsultasi sebesar 61 (omset penjualan Rp.497.552.000). Kenaikan tersebut dikarenakan peserta yang telah mampu melakukan efisiensi terhadap proses kerja dilakukan.

Sasaran 2 : Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal.

- Prosentase pencari kerja yang ditempatkan ;

Prosentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2015 sebesar 62 % sedangkan pada tahun 2016 sebesar 67,23 persen (mengalami kenaikan

sebesar 7,57 %). Hal ini disebabkan antara lain karena Komitmen Stakeholder Kab/Kota/Prov untuk memberikan pelayanan secara optimal di Bidang Ketenagakerjaan serta adanya icon program/kegiatan unggulan yang mendorong penempatan dan penyerapan tenaga kerja.

- Prosentase peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan anggota yang aktif menginformasikan lowongan kerja di PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu);

Prosentase Peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan anggota yang aktif menginformasikan lowongan kerja di PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu) pada tahun 2015 sebesar 82 persen, sedangkan untuk tahun 2016 sebesar 84,09 (mengalami kenaikan 0,91 %). Hal ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan, menggunakan dan mengikuti kegiatan Bursa Kerja yang dilaksanakan Disnaker Kab/Kota/Provinsi. Pusat Layanan Karir Terpadu merupakan lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja (Public Employment Service) yang memfasilitasi pencari kerja, perusahaan pemberi kerja/pengguna tenaga kerja, maupun kalangan pendidikan dan mitra kerja lainnya. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan hubungan antara dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja dengan pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan, terutama dari angkatan kerja muda terdidik yang mencari pekerjaan di sektor formal.

- Prosentase Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal ;

Prosentase Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal pada tahun 2015 sebesar 32,83 persen, sedangkan pada tahun 2016 tercapai sebesar 30,88 persen (tingkat mengalami penurunan). Berdasarkan data yang tercatat, dari 33.820 orang TKI yang terdata melalui UPT P3TKI Surabaya, baru 10.444 orang TKI yang ditempatkan pada jabatan formal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jabatan yang tersedia untuk Negara penempatan khususnya wilayah Asia Pasific (Taiwan, Hongkong) masih didominasi sektor informal. Taiwan dan Hongkong merupakan negara dengan

jumlah penempatan TKI terbesar. Sedangkan jabatan untuk sektor formal selama ini banyak berasal dari Negara Malaysia (Konstruksi dan Industri). Jabatan untuk sektor Formal di Malaysia terbanyak di sektor perkebunan kelapa sawit dimana 80 % pekerjaanya berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan untuk sektor industri banyak diisi dari lulusan SMK.

➤ Rasio Penyerapan Tenaga Kerja dari Binaan di Sektor Informal ;

Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal, pada tahun 2015 adalah 1 : 5(dari 2.292 binaan, terserap tenaga kerja 11.843 orang) sedangkan untuk tahun 2016 sebesar 1 : 6 (mengalami kenaikan sebesar 20 %). Setelah dilakukan pembinaan, dari 1 orang peserta binaan usaha di sektor informal dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 6 orang. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan bagi peserta mulai dari pelatihan, pasca pelatihan dan terobosan kemitraan dengan SKPD / Institusi lainnya, serta adanya tenaga kerja sarjana (TKS) sebagai pendamping untuk membantu pengembangan disektor informal.

Sasaran 3 : Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja.

➤ Prosentase pencari kerja yang ditempatkan ;

Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama sebesar 46 persen sedangkan pada tahun 2016 sebesar 50,37 persen (mengalami kenaikan). Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha / gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Perbandingan target(50%) dan realisasi kinerja(50.37%) untuk tahun 2016 didapatkan capaian kinerja sebesar 100,74% (kategori”**baik**”).

- Prosentase upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak (KHL) ;

Prosentase upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2015 sebesar 106 persen. Sedangkan untuk tahun 2016 prosentase peningkatan upah minimum sebesar 8,25 %. Rata-rata UMK Jawa Timur tahun 2016 sebesar Rp. 1.729.157 atau naik Rp. 181.825,- dibandingkan tahun sebelumnya. Prosentase peningkatan upah minimum mengalami penurunan dari target 11,75% terealisasi 8,25% dikarenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan di Pasal 44 ayat 2 :

“Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : $Umn + Umt + \{Umt \times (\text{inflasi} + \%APBDt)\}$

Dimana penetapan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditetapkan BPS pada tahun 2015 sebesar 11,5 % terdiri dari inflasi sebesar 6,83% sedangkan untuk tahun 2016 sebesar 8,25 % dengan inflasi 3,07 % dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18%

Sasaran 4 : Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh.

- Prosentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani

Prosentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani dengan capaian tahun 2015 sebesar 74,75 persen sedangkan untuk tahun 2016 sebesar 80 persen (mengalami kenaikan sebesar 7,02 %). Jumlah pengaduan atas pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan sebanyak 120 kasus, dan yang ditangani hingga tuntas sebanyak 96 kasus. Tidak semua kasus dapat diselesaikan secara tuntas pada tahun 2016 antara lain karena sangat tergantung kepada masing-masing perusahaan untuk memenuhi hak pekerja dan menyelesaikan kasus yang ada secepat mungkin.

➤ Prosentase Penurunan Kasus kecelakaan kerja ;

Untuk penurunan kasus kecelakaan kerja, tahun 2015 sebesar 7,65 persen. Sedangkan untuk tahun 2016 tercapai 7,70 persen (mengalami kenaikan sebesar 0,65 %). Jumlah kasus kecelakaan kerja tahun sebelumnya sebanyak 6.146 kasus, dan berkurang sebanyak 474 kasus di tahun ini sehingga jumlahnya menjadi 5.672 kasus. Upaya penurunan kecelakaan kerja dilakukan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten oleh perusahaan maupun oleh tenaga kerja sehingga meminimalisir terjadinya *unsafe action* maupun *unsafe condition* yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.

c. Program

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan anggaran Rp. 132.909.210.000,- realisasi sebesar Rp. 127.116.190.724,- atau 95 % untuk mendukung 63 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

2. Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja

Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, dengan anggaran Rp. 12.474.465.000,- realisasi sebesar Rp. 11.335.400.815,- atau 90,87 % untuk mendukung 7 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, dengan anggaran Rp. 2.500.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.475.710.087,- atau 99,03 % untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan tenaga kerja

Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan tenaga kerja, dengan anggaran Rp. 9.662.650.000,- realisasi sebesar Rp. 8.712.016.797,- atau (90,16) % untuk mendukung 8 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Kondisi sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan di 16 (enam belas) UPT Pelatihan Kerja (BLK) belum sepenuhnya memadai sehingga masih harus terus dilakukan revitalisasi.
2. Alokasi sertifikasi kompetensi yang belum memadai dibandingkan jumlah siswa yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi. Idealnya, lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi diikuti dengan uji kompetensi untuk menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar kompeten.
3. Peran dan fungsi kabupaten/kota terhadap pembinaan pemagangan di wilayahnya belum optimal dan data pemagangan mandiri tidak terdata dengan baik di Kab./Kota.
4. Turunnya kontribusi penempatan dari LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta), karena diberlakukannya Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan Peraturan Daerah Prov. Jawa Timur No. 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. LPTKS dihadapkan pada pilihan untuk tetap menempatkan tenaga bersifat kontrak atau menempatkan tenaga yang bersifat tetap.
5. Masih minimnya penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) melalui LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta), karena adanya disparitas Upah Minimum antar Propinsi. Tingkat upah di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan provinsi lain sehingga calon tenaga kerja enggan untuk bekerja di luar Jawa Timur.

6. Turunnya kontribusi penempatan tenaga kerja AKAN (Antar Kerja Antar Negara) akibat masih diberlakukannya moratorium di beberapa Negara tujuan penempatan, dan pengetatan seleksi calon TKI khususnya untuk kemampuan bahasa dan budaya Negara tujuan.
7. Berkurangnya kontribusi penempatan dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) akibat berkurangnya jumlah LPKS (terkait ijin operasional).
8. Sulitnya menelusuri alumni Bursa Kerja Khusus (BKK) terutama dari perguruan tinggi pasca kelulusan;
9. Kebijakan pengetatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Timur ke luar negeri, khususnya pada jabatan informal seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) sebagai upaya perlindungan TKI, sehingga angka penempatan TKI melalui program AKAN (Antar Kerja Antar Negara) berkurang.
10. Belum optimalnya pendataan penyerapan tenaga kerja baru dari kegiatan perluasan kesempatan kerja di sektor informal di kabupaten/kota.
11. Naiknya Upah Minimum Kab./Kota (UMK) di Jawa Timur secara signifikan berimbas pada sulitnya kondisi dunia usaha di Jawa Timur, berpotensi menyebabkan tingginya angka PHK yang berkontribusi signifikan terhadap kenaikan kasus perselisihan hubungan industrial.
12. Masyarakat makin sadar hukum sehingga makin banyak kasus perselisihan hubungan industrial yang seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Perjanjian Bersama, berpotensi diajukan melalui jalur hukum.
13. Keterbatasan jumlah tenaga fungsional Mediator Hubungan Industrial di Jawa Timur.
14. Kendala komunikasi/koordinasi dengan instansi terkait, akibat penerapan Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan Provinsi.
15. Kecepatan penyelesaian kasus tidak hanya tergantung pada kemampuan penanganan oleh Pengawas Ketenagakerjaan akan tetapi sangat tergantung pula pada masing-masing Perusahaan untuk memenuhi hak pekerja dan menyelesaikan kasus yang ada secepat mungkin.
16. Kebanyakan kasus ketenagakerjaan yang terjadi, posisi pekerja masih proses pemutusan hubungan kerja / tidak bekerja di Perusahaan sehingga Perusahaan

bersikukuh untuk penyelesaian kasus tersebut menunggu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

17. Ketidakmerataan jumlah Pengawas Ketenagakerjaan terutama di Kabupaten/Kota sehingga semakin tidak optimalnya fungsi pengawasan, selain itu juga banyaknya Pengawas Ketenagakerjaan yang mendapat mutasi keluar dari OPD Ketenagakerjaan.
18. Kondisi pada tahun 2016 dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota masih dibawah kendali Kepala Daerah yaitu Bupati / Walikota sesuai UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga mengganggu independensi Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan pemeriksaan dan pembinaan terutama dalam menangani kasus ketenagakerjaan.
19. Jumlah kasus kecelakaan kerja turun, namun tetap banyak pelaporan kasus kecelakaan kerja ringan. Kasus-kasus ini tidak sampai menghilangkan waktu kerja sehingga kasus kecelakaan kerja menjadi banyak secara kuantitas, tetapi secara kualitas bersifat ringan. Kasus kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga sulit untuk diperkirakan kejadiannya.

Solusi :

Alternatif solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan target revitalisasi sarana-prasarana dan fasilitas pelatihan di 16 UPT PK pada saat bersamaan secara bertahap. Dengan makin memadainya sarana-prasarana pelatihan, maka *output* pelatihan berupa tenaga kerja dengan *skill*/kompetensi memadai akan meningkat secara kualitas maupun kuantitas.
2. Pembangunan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di UPT-UPT Pelatihan Kerja, untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelaksanaan uji/sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mendorong peningkatan jumlah sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
4. Mengintensifkan fungsi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) untuk mencetak tenaga kerja yang terampil/kompeten.

5. Peningkatan koordinasi dan membangun mitra kerja melalui Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) di setiap Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemagangan mandiri, dengan melibatkan unsur asosiasi perusahaan, industri, lembaga pelatihan kerja, dinas yang menangani ketenagakerjaan
6. Mendorong Komitmen dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dan perusahaan untuk mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja sebagai layanan wajib kepada masyarakat.
7. Peningkatan layanan publik melalui inovasi pelayanan penempatan “Ayo Kerja Jatim” yang dilakukan baik secara konvensional melalui pelayanan langsung, maupun melalui website infokerja-jatim.com. Yang terbaru, dilakukan terobosan pelayanan informasi lowongan kerja melalui smartphone (berbasis android) untuk memperluas cakupan pelayanan informasi lowongan kerja di seluruh strata masyarakat.
8. Memperluas jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri, asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) sehingga info peluang kerja di sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses pencari kerja.
9. Meningkatkan pembinaan kepada Kab./Kota untuk lebih mengefektifkan pelayanan dan pendataan penempatan tenaga kerja dari pencari kerja umum maupun alumni dari dunia pendidikan/alumni pelatihan.
10. Bursa Kerja Bulanan, Pekan Pasar Kerja di bulan September (2 bulan pasca kelulusan), serta Bursa Kerja Bersama dengan Provinsi lain.
11. Menggerakkan dan mendorong sektor-sektor lapangan usaha dan keterlibatan SKPD lainnya untuk berkontribusi dalam penciptaan dan perluasan lapangan kerja di Jawa Timur.
12. Koordinasi dan peningkatan kemampuan SDM petugas antar kerja di Kab./Kota untuk memperkuat upaya penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal.
13. Pembinaan dan optimalisasi fungsi Tenaga Kerja Sarjana sebagai pendamping dan motivator masyarakat dalam pengembangan kesempatan kerja di sektor informal.

14. Untuk memperluas kesempatan kerja di sektor informal, dilakukan program bimbingan usaha, bantuan stimulan sarana usaha, serta dampingan teknis pengembangan usaha di lapangan.
15. Calon peserta usaha mandiri di sektor informal wajib memiliki embrio usaha untuk menjamin agar usahanya semakin berkembang dan tidak berhenti beroperasi di tengah jalan.
16. Pembinaan lebih intensif kepada unsur pekerja dan pengusaha secara langsung ataupun melalui forum komunikasi dan konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis yang melibatkan 3 unsur hubungan industrial (pengusaha, pekerja, pemerintah).
17. Mendorong Kab./Kota untuk berperan lebih aktif dalam proses penetapan UMK.
18. Mengusulkan pegawai di bidang Hubungan Industrial Provinsi maupun Kab./Kota untuk mengikuti Diklat Mediator Hubungan Industrial, dalam rangka menambah tenaga Mediator Hubungan Industrial.
19. Mengoptimalkan komunikasi/koordinasi dengan instansi terkait, serta pembinaan yang lebih intensif ke Kab./Kota berkenaan dengan permasalahan Hubungan Industrial.
20. Pembinaan dan pemeriksaan perusahaan secara berkala untuk mengurangi kasus ketenagakerjaan.
21. Peningkatan efektivitas dan fungsi HRD Perusahaan untuk mengikuti Diklat Kader Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan sehingga norma-norma ketenagakerjaan dapat dipahami dan diaplikasikan di Perusahaan yang akan mengurangi terjadinya kasus ketenagakerjaan.
22. Penyusunan Prosedur Operasional Standart pembinaan dan pemeriksaan Ketenagakerjaan yang berlaku secara nasional dikarenakan :
 - › Masing-masing daerah Kabupaten / Kota memiliki regulasi dan kebijakan tersendiri dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan.
 - › Ketidakseragaman bentuk nota pemeriksaan.
23. Peningkatan efektifitas P2K3 sebagai wadahkerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
24. Peningkatan pembinaan dan pengawasan K3 oleh Pengawas Ketenagakerjaan

BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN

a. Tujuan

Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya akurasi data penduduk.	persentase data penduduk yang akurat.	98,05%	98,68%	0,6 %

Prosentase data penduduk yang akurat untuk tahun 2015 sebesar 98,05 persen, sedangkan untuk tahun 2016 sebesar 98,68 persen (mengalami kenaikan). Capaian tersebut didasarkan pada perkembangan data sebagai berikut : jumlah penduduk Jawa Timur hasil registrasi manual Kabupaten/Kota yang belum dibersihkan (dokumen ganda, meninggal belum dilaporkan, lahir belum dicatatkan, pindah tidak melapor) sebanyak 39.991.349 orang. Sedangkan jumlah penduduk Jawa Timur yang sudah dibersihkan dan masuk di data center Kementerian Dalam Negeri, sehingga sudah tercatat ke dalam database kependudukan sebanyak 39.455.872 orang. Data penduduk dalam database selalu ada perkembangan melalui hasil konsolidasi data tiap semester. Data penduduk yang dikonsolidasikan dalam perkembangannya selalu ada penyusutan dikarenakan data anomali dan ada penambahan pendaftaran penduduk baru. Data penduduk dalam database selalu ada perkembangan, karena verifikasi data terhadap anomali data / data ganda sehingga dilakukan penghapusan dengan data center/pusat, sedangkan untuk data penduduk hasil registrasi juga selalu ada perkembangan yang berdampak pada realisasi.

c. Program

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan anggaran Rp. 2.250.000.000 realisasi sebesar Rp. 2.229.639.448,- atau 99,10 % untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Data penduduk dalam database selalu berkembang melalui hasil konsolidasi data, namun berdasarkan hasil registrasi manual masih selalu ada anomali data ganda (dokumen ganda, meninggal belum dilaporkan, lahir belum dicatatkan, pindah tidak melapor).
2. Terkait konsolidasi data center setiap semester, provinsi tidak melakukan verifikasi data penduduk ganda. Verifikasi anomali data ganda merupakan kewenangan pusat dan kabupaten/kota.
3. Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal.

Solusi:

1. Meningkatkan kemampuan pengelola SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) melalui bimtek dan koordinasi lebih intensif dengan instansi, lembaga/organisasi dan masyarakat.
2. Sosialisasi tentang pemanfaatan data kependudukan untuk semua kebutuhan, seperti perencanaan pembangunan, pemilu/pilkada, pelayanan publik, pencegahan hukum dan kriminalitas.
3. Kerjasama dengan instansi terkait/lembaga/masyarakat untuk memanfaatkan data penduduk.

BIDANG URUSAN KETRANSMIGRASIAN

a. Tujuan

Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran 1. Program Ketransmigrasian	1. % penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan (kepala keluarga)	53,67 %	98,51%	83,55 %
	2. % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (kepala keluarga)	82,00%	81,63%	(-0,45%)

Sasaran 1 : Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran.

- Prosentase penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan (Kepala Keluarga) ;

Prosentase penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan pada tahun 2015 sebesar 53,67 persen dan pada tahun 2016 sebesar 98,51 persen (mengalami peningkatan). Hal ini dikarenakan adanya kesadaran yang cukup tinggi, adanya pembekalan pelatihan pada transmigran secara baik dan benar. Transmigran yang ditempatkan berjumlah 404 KK (kepala keluarga), dan dari jumlah tersebut transmigran yang telah dilatih sebanyak 398 KK. Hal ini dikarenakan ada sebagian calon transmigran yang telah mengikuti pelatihan kemudian mengundurkan diri dan membatalkan keberangkatan dengan berbagai alasan. Kendala lainnya menyangkut sempitnya waktu antara turunnya Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) dan dengan jadwal keberangkatan kapal ke lokasi tujuan. Pelatihan Dasar Umum (PDU) untuk calon transmigran

dilaksanakan setelah turunnya Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) selama 7 hari.

- Prosentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya
Prosentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya sebesar 82 persen untuk tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 81,67 persen (mengalami penurunan). Perbandingan tahun 2015 dan 2016 cenderung hampir sama hanya terpaut 0,33 %. Pada tahun 2016 Jumlah Transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya sebanyak 120 KK dengan jumlah pendapatan Rp. 5.000.000/KK/bulan. Sedangkan jumlah transmigran yang ditempatkan pada lokasi tersebut sebanyak 147 KK.

c. Program

1. Program Ketransmigrasian

Program Ketransmigrasian, dengan anggaran Rp. 6.878.474.808,- dan realisasi Rp. 6.499.824.065,- (94,50 persen) untuk mendukung 5 kegiatan. yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Alokasi penempatan bagi peserta program transmigrasi belum memadai dibandingkan jumlah masyarakat yang berminat terhadap program transmigrasi.
2. Ketersediaan / adanya dukungan anggaran yang cukup memadai, meskipun masih terdapat transmigran yang belum diberangkatkan karena menunggu jadwal keberangkatan kapal.
3. Kuota penempatan transmigran asal Jawa Timur yang diberikan oleh Pemerintah Pusat relatif terbatas karena keterbatasan lokasi penempatan transmigrasi yang telah siap. Hal ini dikarenakan prioritas program Pusat diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di

daerah penempatan, antara lain permasalahan lahan yang tidak kunjung tuntas.

4. Semangat dan kerja keras para transmigran, ditunjang dengan adanya lingkungan masyarakat dan kondisi alam yang mendukung berakibat pada keberhasilan para transmigran dalam bercocok taman / berkebun. Hal ini menjadikan para transmigran memiliki kemampuan daya beli yang cukup.

Solusi :

1. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada calon transmigran yang masih memiliki kemauan untuk diberangkatkan mengikuti program transmigrasi.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak angkutan kapal terkait dengan jadual keberangkatan para transmigran.
3. Dilakukan terobosan pelatihan calon transmigran ke depan, dimana tidak hanya Pelatihan Dasar Umum (PDU), namun juga dilakukan pelatihan berbasis kemasyarakatan sehingga bukan hanya calon transmigran terdaftar/terseleksi yang dilatih tetapi juga animo calon transmigran bisa mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan daerah tujuan, sehingga diperoleh calon transmigran yang lebih berkualitas dan mandiri.
4. Pasca penempatan transmigran, dilakukan monitoring dan pembinaan terpadu dari provinsi daerah penempatan, provinsi daerah asal dan pemerintah pusat. Monitoring dan pembinaan dilakukan bersama-sama dengan melibatkan dinas/instansi terkait di lokasi penempatan, misalnya untuk menambah ketrampilan para transmigran sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya.

15. BIDANG URUSAN KOPERASI DAN UMKM

15.1. DINAS KOPERASI DAN UMKM

a. Tujuan

- Meningkatkan profesionalitas pengelola koperasi;
- Meningkatkan produktivitas koperasi.;
- Meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDRB;
- Menumbuhkan jumlah wirausaha baru dan omset UMKM di sentra;
- Meningkatkan produk UMKM terstandarisasi;
- Meningkatkan Peran Koperasi Simpan Pinjam/USP/KJKS/UJKS-Koperasi sebagai lembaga keuangan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur	54,98%	54,98%	-
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif				
Meningkatnya standarisasi UMKM dan produk UMKM	1. Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terstandar	1,5%	4,02%	168%
	2. Jumlah Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terstandar	1.000 UMKM	1.270 UMKM	27%
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam	1. Pertumbuhan KSP/USP/KJKS/UJKS Koperasi Sehat	3,4%	2,95%	-13,24%
	2. Perputaran Modal Koperasi Wanita (Kopwan)	2,1 kali	2,23 kali	6,19%
1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				
Meningkatnya Profesionalitas Pengelola Koperasi	1. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi	1,3%	2,71%	108,46%
	2. Persentase Koperasi Aktif (%) (OPTIMIS)	88,1%	88,11%	0,01%
	3. Jumlah Koperasi Terstandar ISO	1 unit	2 unit	100%
	4. Jumlah Koperasi Beranking Dunia	1 unit	1 unit	-
1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan omset UMKM di sentra	1. Pertumbuhan wirausaha baru	10%	11%	10%
	2. Pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra	23%	7,56%	-67,13%
1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro				
Meningkatnya produktivitas koperasi	1. Pertumbuhan volume usaha koperasi	2,5%	3,2%	28%
	2. Return SHU terhadap volume usaha koperasi	13%	14,2%	9,23%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi				

Evaluasi Terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 Dan Tahun 2016 :

Pada tahun 2015-2016 kinerja bidang akuntansi yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB

➤ **Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur**

Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB, didukung oleh Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. Target yang ditetapkan pada indikator Persentase Kontribusi PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur sebanyak 54,85-54,93% dan telah terealisasi sebanyak 54,98%^(*angka BPS).

Sasaran 2 : Meningkatnya standarisasi UMKM dan produk UMKM

➤ **Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terstandar**

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terstandar untuk tahun 2016 ditarget sebanyak 4% dan telah terealisasi sebesar 4,02%. Sedangkan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 1,5%. Sehingga secara capaian pada tahun 2016 naik sebesar 168% jika dibandingkan realisasi tahun 2015.

➤ **Jumlah Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terstandar**

Selanjutnya indikator Jumlah Produk UMKM yang terstandar dengan target untuk tahun 2016 sebanyak 1.050 UMKM, terealisasi sebanyak 1.270 unit. Jika dibandingkan dengan

tahun 2015 yang terealisasi sebanyak 1.000 unit, maka capaian pada tahun 2016 ini naik sebesar 27 persen jika dibandingkan tahun 2015.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam

➤ **Pertumbuhan KSP/USP-KJKS/UJKS-Koperasi yang sehat**

Indikator pada program ini salah satunya yaitu Pertumbuhan KSP/USP-KJKS/UJKS-Koperasi yang sehat dan ditarget untuk tahun 2016 ini sebanyak 2,5 persen dan telah terealisasi sebanyak 2,95 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan pertumbuhan KSP/USP-KJKS/UJKS-Koperasi yang sehat mencapai 3,4 persen maka pertumbuhan pada tahun 2016 mengalami perlambatan. Namun secara angka absolut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun 2015.

➤ **Perputaran Modal Koperasi Wanita (Kopwan)**

Perputaran Modal Koperasi Wanita (Kopwan) dengan target untuk tahun 2016 sebesar 2,2 kali perputaran, terealisasi sebanyak 2,23 kali. Jika angka tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang mencapai perputaran sebesar 2,1 kali, maka capaian pada tahun 2016 ini menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 6,19 persen jika dibandingkan tahun 2015.

Sasaran 4 : Meningkatkan Profesionalitas Pengelola Koperasi

➤ **Pertumbuhan jumlah anggota koperasi**

Target yang ditetapkan pada indikator Pertumbuhan jumlah anggota Koperasi untuk tahun 2016 ini sebanyak 2,7 persen dan telah terealisasi sebanyak 2,71 persen. Jika angka tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 1,3 persen, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 108,46 persen dibandingkan dengan tahun 2015.

➤ **Persentase koperasi aktif**

Target yang ditetapkan pada indikator Persentase Koperasi Aktif untuk tahun 2016 ini sebanyak 88,4 persen dan telah terealisasi sebanyak 88,11 persen. Jika angka tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 88,1 persen, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 0,01 persen.

➤ **Jumlah koperasi terstandar ISO**

Target yang ditetapkan pada indikator Jumlah Koperasi Terstandar ISO untuk tahun 2016 ini sebanyak 2 unit dan telah terealisasi sebanyak 2 unit. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 1 unit, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 100% persen.

➤ **Jumlah koperasi beranking dunia**

Target yang ditetapkan pada indikator Jumlah Koperasi Beranking Dunia untuk tahun 2016 ini sebanyak 1 unit dan telah terealisasi sebanyak 1 unit. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 1 unit, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 0% persen.

Sasaran 5 : Meningkatnya jumlah wirausaha baru dan omset UMKM di sentra

➤ **Pertumbuhan wirausaha baru**

Target yang ditetapkan pada indikator Pertumbuhan Wirausaha Baru untuk tahun 2016 ini sebanyak 9 persen dan telah terealisasi sebanyak 11 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 10 persen, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 10% persen.

➤ **Pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra**

Target yang ditetapkan pada indikator Pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra untuk tahun 2016 ini sebanyak 4 persen dan telah terealisasi sebanyak 4,02 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 23 persen, maka pertumbuhan omset usaha mikro yang ada di sentra tahun 2016 mengalami perlambatan. Namun secara angka absolut, indikator tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015.

Sasaran 6 : Meningkatkan produktivitas koperasi

➤ **Pertumbuhan volume usaha koperasi**

Target yang ditetapkan pada indikator Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi tahun 2016 sebanyak 3 persen dan telah terealisasi sebanyak 3,2 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 2,5 persen, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 3,2 persen.

➤ **Return SHU terhadap volume usaha koperasi**

Target yang ditetapkan pada indikator Return SHU terhadap Volume Usaha Koperasi tahun 2016 sebanyak 13 persen dan telah terealisasi sebanyak 14,2 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 13 persen, maka capaian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 1,2 persen.

c. Program

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, dengan anggaran Rp. 3.575.270.575,00. Realisasi sebesar Rp. 3.544.050.709,00, atau 99,13%. Untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan anggaran Rp. 17.328.029.840,00. Realisasi sebesar Rp. 16.070.230.835,00, atau 92,74%. Untuk mendukung 9 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan anggaran Rp. 26.675.736.495,00. Realisasi sebesar Rp. 25.370.411.51,00, atau 95,11%. Untuk mendukung 10 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan anggaran Rp. 18.183.767.000,00. Realisasi sebesar Rp. 17.853.228.566,00, atau 98,18%. Untuk mendukung 14 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
5. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dengan anggaran Rp. 4.837.612.814,00. Realisasi sebesar Rp. 4.769.239.765,00, atau 98,59%. Untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
6. Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi, dengan anggaran Rp. 9.756.672.276,00. Realisasi sebesar Rp. 9.591.386.017,00, atau 98,31%. Untuk mendukung 10 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta praktik bisnis dan persaingan usaha yang semakin ketat dan terkadang mengarah pada persaingan yang tidak sehat;
2. Kemampuan Koperasi dan UMKM untuk dapat mengoptimalkan sumber dayanya masih rendah;
3. Masih banyak KSP/USP-Koperasi yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip perkoperasian dalam penerapan kegiatan operasional;
4. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi;
5. Akses terhadap sumberdaya produktif terutama permodalan.

Solusi :

1. Lemahnya Peningkatan kualitas pelayanan kepada Koperasi dan UMKM dengan mengembangkan pola pelayanan publik satu atap;
2. Peningkatan kemampuan SDM bagi Koperasi dan UMKM untuk dapat mengidentifikasi serta mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan/pendampingan untuk meningkatkan kapasitas KUMKM;
3. Mengoptimalkan Komisi Pengendalian KSP (KPKS) di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang Koperasi Simpan Pinjam;
4. Penguatan nilai-nilai dalam kelembagaan Koperasi melalui pembinaan dan pendampingan bagi para pengurus/pengelola Koperasi dan anggotanya, agar Koperasi mampu menerapkan prinsip good governance;
5. Usaha skala mikro maupun Koperasi perlu difasilitasi melalui bantuan permodalan, baik hibah maupun dana bergulir dan Kredit Usaha Rakyat, serta mengembangkan linkage program antara Koperasi dan UMKM dengan pihak perbankan.

16. BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL

16.1. BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat ;
- Mewujudkan peningkatan minat dan realisasi penanaman modal.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Prima	a. IKM atas Pelayanan Perizinan	83,36	84,17	0,97%
	b. IKM atas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	83	83,37	0,45%
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Persentase Pelayanan Perizinan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	100%	100%	-
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	2. Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Diselesaikan	112,62%	76,48%	-32,09%
II. Meningkatnya Minat Penanam Modal Berdasarkan Izin Prinsip	a. Persentase Peningkatan Kepeminatan untuk Kerjasama	27%	10%	-62,96%
	b. Persentase Peningkatan Nilai Izin Prinsip PMA dan PMDN	8,23%	2,71%	-67,07%
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Jumlah Minat Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Izin Prinsip	Rp.172,57 T	Rp. 61,43 T	-64,40%

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
2. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	2. Jumlah Potensi Dan Peluang Investasi yang Disusun	4 Project Prospectus	2 Project Prospectus	-50%
III. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal yang Inklusif melalui Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal	81,82%	100%	22,22%
	b. Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN	2,11%	1,68%	-20,38%
1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan LKPM	Rp. 67,91 T	Rp. 72,90 T	7,35%

Evaluasi Terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Penanaman Modal yang telah dicapai oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Prima

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan pada Tahun 2015 sebesar 83,36 dan pada Tahun 2016 sebesar 84,17 dengan kategori memuaskan mengalami kemajuan/peningkatan dibanding dengan tahun 2015 sebesar 0,97%, nilai tersebut menggambarkan adanya peningkatan dalam pelayanan perizinan yaitu dari unsur :

- Kesesuaian produk pelayanan;
- Kemampuan petugas pelayanan;
- Tanggungjawab petugas.

Jika dibanding dengan target capaian IKM Tahun 2016 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 85 dengan tingkat kemajuan hanya mencapai sebesar 99,02%, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan kinerja pelayanannya untuk menambah tingkat kepuasan masyarakat, adalah unsur :

- Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan;
 - Kemudahan prosedur pelayanan;
 - Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan;
 - Kecepatan pelayanan;
 - Kejelasan dan kepastian petugas pelayanan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Tahun 2015 sebesar 83 dan pada Tahun 2016 adalah sebesar 83,37 dengan kategori memuaskan, mengalami peningkatan sebesar 0,45% .

Nilai IKM tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 85 dan tingkat kemajuan sebesar 98,08%, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan kualitas kinerja pelayanannya sesuai dengan harapan masyarakat dan harus melakukan inovasi pelayanan karena persepsi masyarakat terus berubah.

Adapun unsur pelayanan yang meliputi 12 unsur yang masih harus ditingkatkan adalah :

- Unsur Persyaratan proses usulan paket;
- Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan;
- Unsur Kecepatan Pelayanan;
- Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan;
- Unsur Produk layanan;
- Unsur Kemampuan Pokja;

- Unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas;
- Unsur Kesanggupan Melaksanakan Maklumat Pelayanan;
- Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan;
- Unsur Kenyamanan Lingkungan;
- Unsur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Unsur Kemudahan mengakses informasi usulan paket.

Sasaran 2 : Meningkatnya Minat Penanam Modal Berdasarkan Izin Prinsip

➤ Persentase Peningkatan Kepeminatan untuk Kerjasama

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Kepeminatan untuk Kerjasama pada Tahun 2015 sebesar 27% dan pada Tahun 2016 sebesar 10% mengalami penurunan sebesar - 62,96% yang disebabkan oleh pelaksanaan kerjasama antar daerah dan antar wilayah yang dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota guna meningkatkan investasi sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak disebutkan secara tegas tentang kewenangan daerah melaksanakan kerjasama antar daerah atau antar wilayah guna meningkatkan investasi daerah.

Namun kinerja dimaksud mencapai target yang ditetapkan sebesar 10% dengan 11 kepeminatan dan 4 MoU (kerjasama kemitraan antara UKM dengan Perusahaan PMA/PMDN), yaitu :

- CV. LAA ISMA FIIH dengan CV. SAQIENYA INCORP tentang kebutuhan bahan baku sepatu dari kulit ikan;
- CV. CONSTITY KARYA RAHAYU dengan CV. BAROKAH MANDIRI tentang kerjasama di bidang garmen;
- PT. VIVITAMA INTI MULIA dengan CV. ALAM MANDIRI tentang pengemasan Produk;

- PT. BINA MITRA SEPADAN dengan CV. CONSTITY KARYA RAHAYU tentang kerjasama bahan baku tekstil.

Sedangkan 11 kepemilikan kerjasama terjalin antara PT. CHARON POKHAN (PMDN) dengan 8 pengusaha kecil yang bergerak dibidang pertanian jagung dan PT. WONOKOYO dengan 3 pengusaha kecil di bidang pertanian jagung.

➤ **Persentase Peningkatan Nilai Izin Prinsip PMA dan PMDN.**

Persentase Peningkatan Nilai Izin Prinsip PMA dan PMDN capaian kinerja pada Tahun 2015 sebesar 8,23% dan pada Tahun 2016 sebesar 2,71% tingkat kemajuan mengalami penurunan sebesar -67,07%, hal ini disebabkan karena intensitas promosi penanaman modal yang berkurang, terbatasnya lahan sehingga belum seluruhnya di Kabupaten/Kota mempersiapkan kawasan industri dalam mengantisipasi masuknya perusahaan PMA/PMDN diluar kawasan, situasi politik (wait and see) dan penanaman modal lebih diarahkan keluar pulau jawa untuk mengurangi disparitas wilayah penanaman modal.

Capaian minat Penanaman Modal di Jawa Timur berdasarkan Izin Prinsip pada Tahun 2016 mencapai sebesar Rp. 61,43 Trilyun, terdiri dari PMA sebesar Rp. 24,09 Trilyun dan PMDN sebesar Rp. 37,34 Trilyun tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 110,12 Trilyun, PMA sebesar Rp. 60,73 Trilyun dan PMDN Rp. 49,39 Trilyun.

Sasaran 3 : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal yang Inklusif melalui Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

➤ **Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal**

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Tahun 2015 sebesar 81,82% dan Pada

Tahun 2016 capaian indikator kinerja tersebut sebesar 100%, mengalami peningkatan sebesar 22,22%. Dari permasalahan Penanaman Modal Perusahaan PMA dan PMDN yang difasilitasi oleh Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 Permasalahan dan yang sudah ditindaklanjuti sampai selesai, yaitu :

- PT. WONGSOREDJO, Pengadaan jalan sebagai akses jalan masuk ke dalam Kawasan Industri PT.;
- PT. KARYADIBYA MAHARDIKA, Proses pengajuan Izin Usaha Perluasan jenis produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) untuk proyek yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan diharuskan untuk mengajukan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian terlebih dahulu sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NO.64/M-IND/PER/7/2014;p
- PT. CHIKEN SHINWOO GLOBAL, Izin Lingkungan yang belum bisa di proses di Kabupaten Jember dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember masih belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pertamina, Alokasi Lahan untuk rencana pembangunan Kilang Minyak dan Pelabuhan Umum di Kabupaten Tuban;
- PT. HANJAYA PERKASA, PT. Hanjaya Perkasa menghendaki lahan PT. Jakamitra Indonesia yang sudah mempunyai Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi;
- PT. ADIPRIMA SURAPRINTA, Keberatan atas kenaikan retribusi Izin Gangguan (HO);
- PT. SANYO CERAMICS AND DEVELOPMENT, Kesulitan dalam mendapatkan Izin Lokasi;

- PT. TRIWAHANA UNIVERSAL, Permohonan penyesuaian harga khusus dari Pemerintah atas Pasokan minyak mentah dari PT. PERTAMINA;
 - PT. CENTRAL MOTORL WHEEL INDONESIA (PT.CMWI), Kepastian Hukum terkait dengan Perpajakan (PPn) transaksi jual beli bahan baku Reusable Raw Material (RRM) dengan PT. Indonesia Smelting Technology;
 - PT. PERDANA STEEL BAR, PT. Perdana Steel Bar dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (Area Surabaya) terkait pembebanan kurang tagih.
- Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN Tahun 2015 sebesar 2,11% dan Pada Tahun 2016 sebesar 1,68%, tingkat kemajuan mengalami penurunan sebesar -1,12%, disebabkan karena :

- Masih banyaknya izin-izin lanjutan yang harus dipenuhi oleh penanam modal;
- Belum optimalnya pelayanan perizinan dan prosedur perizinan sesuai SOP di Kabupaten/Kota (izin lokasi, izin mendirikan bangunan, HO, izin pemanfaatan ruang);
- Belum optimalnya realisasi terkait izin prinsip yang diterbitkan oleh BKPM RI, Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Tingginya UMK/UMSK pada ring I sedang produksinya masih dibawah target;
- Banyak perusahaan yang melakukan relokasi untuk menghindari UMK/UMSK yang tinggi;

- Masih banyaknya dokumen/lampiran dalam bentuk hard copy yang diperlukan untuk persyaratan mengurus izin lanjutan.

Capaian kinerja pada Tahun 2016 sebesar Rp. 72,90 Trilyun terdiri dari PMA sebesar Rp. 26,37 Trilyun dan PMDN sebesar Rp. 46,33 Trilyun. Kinerja tersebut tidak mencapai target sebesar Rp. 79,96 Trilyun (PMA sebesar Rp. 39,26 Trilyun dan PMDN sebesar Rp. 40,7 Trilyun).

c. Program

1. Program Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan anggaran Rp.7.909.318.980,- Realisasi sebesar Rp. 7.704.816.998,- atau 97,41% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masingmasing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom;
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, dengan anggaran Rp.9.435.981.024,- Realisasi sebesar Rp. 9.160.460.470,- atau 97,08% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masingmasing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom;
3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan anggaran Rp.5.478.340.653,- Realisasi sebesar Rp. 5.255.578.370,- atau 95,93% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masingmasing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom;
4. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dengan anggaran Rp.1.064.410.000,- Realisasi sebesar Rp. 973.004.258,- atau 91,41% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara

rinci masingmasing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom;

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan anggaran Rp.4.639.975.860,- Realisasi sebesar Rp. 4.412.271.071,- atau 95,09% untuk mendukung 7 kegiatan yang secara rinci masingmasing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom;

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih banyaknya izin-izin lanjutan yang harus dipenuhi oleh Penanam Modal;
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan prosedur perizinan sesuai SOP di Kabupaten/Kota (izin lokasi, Izin mendirikan bangunan, HO, izin pemanfaatan ruang);
3. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang tidak pro bisnis dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Terbatasnya lahan sehingga belum seluruhnya di Kabupaten/Kota mempersiapkan kawasan industri dalam mengantisipasi masuknya perusahaan PMA/PMDN diluar kawasan dan perusahaan baru;
5. Masih adanya disparitas terhadap penyebaran pelaksanaan Penanaman Modal di daerah (Kabupaten/Kota);
6. Belum optimalnya realisasi terkait izin prinsip yang diterbitkan oleh BKPM RI, Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Tingginya UMK/UMSK pada ring I sedang realisasi produksinya masih dibawah target;
8. Kurang memadainya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dan banyaknya tuntutan yang kurang normatif;

9. Banyak perusahaan yang melakukan relokasi untuk menghindari UMK/UMSK yang tinggi;
10. Masih banyaknya dokumen/lampiran dalam bentuk hardcopy yang diperlukan untuk persyaratan mengurus izin lanjutan.

Solusi :

1. Mendorong Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan lahan pembangunan di sektor Kawasan Industri;
2. Meningkatkan daya saing Daerah dalam rangka menarik Penanaman Modal ke Daerah;
3. Meningkatkan pelayanan dan konsultasi penyelesaian permasalahan – permasalahan di Bidang Penanaman Modal melalui helpdesk;
4. Meningkatkan pemahaman bagi Penanam Modal akan kewajibannya setelah mendapatkan Perizinan;
5. Melakukan Koordinasi dan Pembinaan yang lebih intensif dengan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Memberikan masukan kepada Kementrian terkait;
7. Meningkatkan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota guna mendapatkan data yang dapat mendukung project profile;
8. Peningkatan infrastruktur melalui penciptaan peluang investasi serta koordinasi dengan Instansi Sektorat Penyedia Infrastruktur dan mendorong Instansi Sektorat terkait untuk mempercepat pengembangan/pembangunan pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk Lamong, Bandara Juanda, Double Track KA dan jalan tol trans Jawa;
9. Mendorong kemitraan PMA dan PMDN serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA;
10. Memperbaiki iklim investasi yang berdaya saing melalui peningkatan pelayanan dan mempromosikan peluang investasi unggulan;

11. Meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi melalui sistem pelaporan LKPM secara online;
12. Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur secara pro aktif memberikan informasi dan peringatan kepada penanam modal yang belum atau terlambat menyampaikan LKPM;
13. Mendorong pemerataan lokasi investasi di semua wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
14. Memacu para penanam modal yang telah memiliki Izin Prinsip untuk segera merealisasikan investasinya melalui pemberian fasilitasi kemudahan perizinan, pengadaan lahan usaha dan lainnya serta mediasi penyelesaian masalah yang mungkin timbul;
15. Melakukan koordinasi serta pembinaan sinergitas pelayanan perizinan dengan Instansi BPM dan P2T Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Mengusulkan pemberian insentif daerah kepada Kabupaten/ Kota dan kemudahan investasi kepada Pemerintah bersama Kabupaten/Kota;
17. Menambah SDM yang kompeten di bidang penanaman modal dan mengikutsertakan SDM yang ada untuk mengikuti Diklat dan Workshop yang terkait dengan penanaman modal untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM yang ada di bidang penanaman modal.

17. URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

17.1. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN

a. Tujuan

Mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran, dan berakhlak mulia.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya	1 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur	77%	80%	3,90
	2 Jumlah penghargaan karya kreativitas seni di tingkat nasional	14 penghargaan / kategori	24 penghargaan / kategori	71,43
1 Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pelaku budaya dan lembaga peduli seni yang mendapatkan penghargaan	515 orang / 3 lembaga	515 orang / 3 lembaga	-
2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	202 kali	212 kali	4,95
II Meningkatnya pemeliharaan/pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur	1 Jumlah cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara / dilestarikan	254	256	0,79
	2 Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum Provinsi	80%	81,50%	1,88
1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda, cagar budaya / situs yang dipelihara dan naskah kuno yang dikelola oleh Museum	1.774 benda	1.776 benda	0,12

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 dengan contoh sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang kebudayaan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya

- Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur;

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur pada Tahun 2015 adalah sebesar 77% dan pada Tahun 2016 sebesar 80% (mengalami peningkatan sebesar 3,90%) hal tersebut karena meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

- Jumlah penghargaan karya kreativitas seni di tingkat nasional;
Jumlah penghargaan karya kreativitas seni di tingkat nasional pada Tahun 2015 adalah sebanyak 14 penghargaan / kategori dan pada Tahun 2016 sebanyak 24 penghargaan / kategori (mengalami peningkatan sebesar 71,43%) hal tersebut karena meningkatnya kreatifitas seniman melalui pembinaan serta alokasi anggaran yang memadai.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemeliharaan / pelestarian Cagar Budaya di Jawa Timur

- Jumlah cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara / dilestarikan;

Jumlah cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara / dilestarikan pada Tahun 2015 adalah sebesar 254 buah dan Tahun 2016 sebesar 256 buah (mengalami peningkatan sebesar 0,79%) hal tersebut merupakan target yang telah ditetapkan dalam penemuan benda, struktur, situs, kawasan.

- Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum Provinsi;

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengunjung Museum Provinsi pada Tahun 2015 adalah sebesar 80% dan Tahun 2016 sebesar 81,50% (mengalami peningkatan sebesar 1,88%) hal tersebut karena meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Museum Mpu Tantular sebagai sarana edukasi serta rekreasi yang mendidik.

c. Program

1. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan anggaran Rp. 2.129.096.500,- Realisasi sebesar Rp. 2.121.615.462,- atau 99,65% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan anggaran Rp. 31.769.921.703,- Realisasi sebesar Rp. 31.539.192.211,- atau 99,27% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan anggaran Rp.9.135.604.200,- Realisasi sebesar Rp. 9.057.284.442,- atau 99,14% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih belum optimalnya kegiatan dokumentasi dan inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal sebagai bahan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal.
2. Belum optimalnya aktualisasi kesenian tradisional dan adat budaya lokal.
3. Apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya masih belum berkembang.

Solusi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan dewan kesenian Kab/Kota dan Instansi terkait dalam pendokumentasian dan pedataan seni tradisi dan budaya lokal.
2. Meningkatkan fasilitasi terhadap aktualisasi kesenian tradisional dan budaya lokal dengan menjalin kerja sama dengan pelaku/usaha pariwisata.
3. Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang melibat masyarakat sekitar dan generasi muda secara berkesinambungan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

1. Festival Nasional Teater di Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta, Materi Kesenian dari Kab. Sidoarjo :
 - a) Penyaji Seni : SMPN II Sukodono dan SMAN I Taman Sidoarjo (Teater Sang Gendang dan Play Ground Teater)
 - b) Judul Sajian : Markamah Sang Kembang Klaras
 - c) Sutradara : Achmad Pujilaksana
 - d) Penata Musik : Ikhwan Ubaidillah
 - e) Penata Artistik : Sutri Winuratidengan hasil capaian terpilihnya Jawa Timur sebagai pemenang 4 kategori sebagai berikut :

NO	PENGHARGAAN	NAMA/GRUP
1	5 Penata Musik Terbaik	Ikhwan Ubaidillah
2	5 Penata Artistik Terbaik	Sutri Winuarti
3	5 Sutradara Terbaik	Achmad Pujilaksana
4	5 Grup Penyaji Terbaik	Teater Sang Gendang & Playground Theater



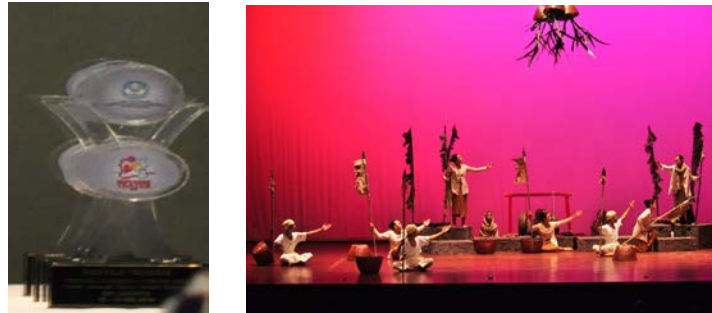
Penata Musik Terbaik



Penata Artistik Terbaik



Sutradara Terbaik



Grup Penyaji Terbaik

Gambar 4.2 Festival Nasional Teater di Gedung Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta, Materi Kesenian dari Kab. Sidoarjo

2. Kolaborasi Seni Tingkat Nasional/Internasional

- a. Festival Musik Tradisi Tingkat Nasional di Parigi Moutong Sulawesi Tengah diikuti 12 siswa siswi SD Kab. Blitar. Materi kesenian dari Kab. Blitar :

- Penyaji Seni : gabungan pelajar SD Kab. Blitar
- Judul Sajian : Ilir-Ilir
- Penata Musik : Luhur Sejati, M.Pd dan Drs. Sudarwiyanto
- Pengarah Artistik : Sabar, M.Sn dan Joko Susilo, M.Sn

dengan hasil capaian meraih prestasi Penata Musik Terbaik;



Gambar 4.3 Penata Musik Terbaik

- b. Parade Teater Daerah di TMII Jakarta diikuti 25 orang terdiri dari siswa siswi SMP 24 Kota Malang dan SMA 10 Kota Malang. Adapun materi kesenian :

- Penyaji Seni : SMPN 24 dengan SMAN 10 Kota Malang berkolaborasi dengan STKW
- Judul Sajian : Darah Seni
- Penulis Naskah : Agung Yuni Sasmito (STKW)

- Sutradara : Tri Suhariyadi
- Penata Artistik : Luhur Kayungga
- Pengarah Lakon : Rakhmad Giriadi

dengan hasil capaian meraih prestasi Penyaji Terbaik dan Sutradara Terbaik;



Gambar 4.4 Penyaji Terbaik dan Sutradara Terbaik

3. Lawatan Sejarah Tingkat Nasional

NO	PERINGKAT	NAMA SISWA	ASAL SEKOLAH
1	Terbaik 3	Kamila Tasarina M	SMAN 1 Nganjuk
2	Terbaik 4	Dedi Lugita Hadiwijaya	SMAN 1 Gondang Nganjuk
3	Terbaik 5	Angelita Kristanti	SMAN 1 Bagor Nganjuk
4	Terbaik 7	Errin Fitri A	SMAN 1 Sukomoro Nganjuk
5	Terbaik 8	Anggun Puspitaning A	SMA Insan Cendekia Nganjuk
6	Terbaik 9	Anisa Alya	SMAN 1 Nganjuk

4. Parade Tari Nusantara di TMII Jakarta oleh Tim Kesenian dari **Kab. Lumajang** dengan menampilkan **Tari Mahameru** dengan rincian personil :

NO	PENGHARGAAN	NAMA
1	Penata Tari	Linda Apriliyanti
2	Penata Musik	Yuniawan Tri R dan Suwandi Widyanto
3	Penata Rias & Busana	Nemplik Sepyu
4	Penari (10 org)	Ririn, Putri Widya, Putri Jania, Fitrotus, Nabita, Kerin Tri Utari, Denok Putri RMW, Putri Lestari, Yuniar
5	Pemusik	Ita Elya Sari, Nodia Indra S, Moch. Maskur, Catur Fredy, Yusuf Setyawan, Eko Putera Pribadi, Adlin Mustika, Bayu, Randi, Yudistira Sugma, M. Taufiq, Antoni, Yudan Fijar, Yuniawan

dengan hasil capaian meraih prestasi Penyaji Unggulan dan Penata Musik

5. Festival Dalang Muda di Taman Fatahilah Jakarta

No	Nama	Kab/Kota	Jenis Wayang (Gaya Pakeliran)	Lakon	Penghargaan
1	Pringgo Jati Rahmanu	Sidoarjo	Wayang Kulit Purwa Gaya Jawa Timuran	Gondomono Luweng	Penyaji Lakon Terbaik
2	Aditya Kresna	Madiun	Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta	Babad Wanamarta	Penyaji Sabet Terbaik



Gambar 4.5 Festival Dalang Muda di Taman Fatahilah Jakarta

6. Festival Dalang Bocah di Taman Fatahilah Jakarta

No	Nama	Kab/Kota	Jenis Wayang (Gaya Pakeliran)	Lakon	Penghargaan
1	Anugrah Hamdani		Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta	Anoman Duta	Penyaji Lakon Terbaik
2	Megan Yasa Pratama	Kediri	Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta	Gatutkaca Lair	Penyaji Lakon Terbaik
3	Gandang Gondo Waskitho	Pacitan	Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta	Anoman Duta	Penyaji Catur Terbaik
4	Joko Wicaksono	Mojokerto	Wayang Kulit Purwa Gaya Jawa Timuran	Gatutkaca Lair	Penyaji Catur Terbaik
5	Gilang Pandu Permana	Ngawi	Wayang Kulit Purwa Gaya Surakarta	Anoman Duta	Penyaji Sabet Terbaik

7. **Karnaval Keprajuritan Nusantara 2016** di TMII pada tanggal 13 Nopember 2016 dengan hasil capaian 5 (lima) Penyaji Unggulan dan 1 (satu) Penyaji Tata Rias dan Busana Terbaik

BIDANG URUSAN PARIWISATA

a. Tujuan

Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Timur yang berdaya saing global, karena dengan meningkatnya daya saing, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan; meningkatkan perolehan devisa dari wisatawan mancanegara; meningkatkan pengeluaran wisatawan nusantara, meningkatkan kontribusi PDRB pariwisata; meningkatkan persentase kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

b. Sasaran

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur	1 Jumlah wisatawan mancanegara	612.412 orang	618.536 orang	1
	2 Jumlah wisatawan nusantara	51.466.969 orang	54.565.006 orang	6,02
	3 Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara	US\$ 417,21 juta	US\$ 513.84 juta	23,16
	4 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	Rp. 20,24 trilyun	Rp. 22,68 trilyun	12,05
1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	612.412 orang	618.536 orang	1
II Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur	1 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur	5,48% (seri 2010)	5,73% (seri 2010)	4,56
1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara	US\$ 417,21 juta	US\$ 513.84 juta	23,16
	Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB Jatim	5,48%	5,73%	4,56
III Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata	1 Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata	207.889 orang	237.402 orang	14,20
	2 Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi	500 orang	100 orang	-80

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1 Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata	Jumlah tenaga kerja yang sudah dilatih di sektor formal dan non formal kepariwisataan	1.371 orang	1.791 orang	30,63

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 dengan contoh sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Pariwisata yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisa dan pengeluaran wisatawan di Jawa Timur

➤ **Jumlah wisatawan mancanegara;**

Jumlah wisatawan mancanegara pada Tahun 2015 adalah sebesar 612.412 orang dan pada Tahun 2016 sebesar 618.536 orang (mengalami kenaikan sebesar 1%) hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah bebas visa kunjungan terhadap 90 negara dan gencarnya promosi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

➤ **Jumlah wisatawan nusantara;**

Jumlah wisatawan nusantara pada Tahun 2015 adalah sebesar 51.466.969 orang dan pada Tahun 2016 sebesar 54.565.006 orang (mengalami kenaikan sebesar 6,02%) hal tersebut dikarenakan bertambahnya DTW utamanya wisata buatan dan gencarnya promosi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

➤ **Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara;**

Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara pada Tahun 2015 sebesar US\$ 417,21 juta dan pada Tahun 2016 sebesar US\$ 513.84 juta (mengalami

kenaikan 23,16%) hal tersebut merupakan dampak dari meningkatnya kunjungan wisman serta lama tinggal.

➤ **Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara;**

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara pada Tahun 2015 sebesar Rp. 20,24 trilyun dan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 22,68 trilyun (mengalami kenaikan sebesar 12,05%) hal tersebut merupakan dampak dari meningkatnya kunjungan wisnus serta lama tinggal.

Sasaran 2 : Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur

➤ **Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur;**

Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur pada Tahun 2015 adalah sebesar 5,48% seri 2010 dan pada Tahun 2016 sebesar 5,73% seri 2010 (mengalami kenaikan 4,56%) hal tersebut dikarenakan meningkatnya perekonomian di Jawa Timur.

Sasaran 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata

➤ **Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata;**

Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata pada Tahun 2015 adalah sebesar 207.889 orang dan pada Tahun 2016 sebesar 237.402 orang (mengalami kenaikan sebesar 14,20%) hal tersebut dikarenakan tumbuhnya industri pariwisata di Jawa Timur.

➤ **Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi;**

Jumlah tenaga kerja yang telah tersertifikasi profesi pada Tahun 2015 adalah sebesar 500 orang dan pada Tahun 2016 sebesar 100 orang (mengalami penurunan sebesar 80%) hal tersebut dikarenakan kegiatan diarahkan secara optimal pada sasaran yang lebih prioritas.

c. Program

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan anggaran Rp. 5.547.817.500,- Realisasi sebesar Rp. 5.539.009.824,- atau 99,84% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan anggaran Rp. 9.512.971.394,- Realisasi sebesar Rp. 9.459.531.025,- atau 99,44% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan, dengan anggaran Rp. 4.635.821.900,- Realisasi sebesar Rp. 4.565.972.760,- atau 98,49% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Tingkat Kunjungan wisman dan wisnus ke Jawa Timur perlu dipertahankan bila perlu ditingkatkan dan pasar wisman wisnus perlu dijaga.
2. Kualitas layanan usaha pariwisata perlu ditingkatkan.
3. Kualitas layanan pelaku pariwisata perlu ditingkatkan.
4. Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi profesi masih kurang.

Solusi :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi dan pengembangan destinasi pariwisata sangat penting mengingat strategi tersebut mampu secara efektif menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan tanpa batas.

2. Peningkatkan advokasi terhadap pelaku usaha pariwisata menuju standarisasi usaha.
3. Meningkatkan fasilitasi uji kompetensi melalui sertifikasi profesi bidang pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
4. Mendorong pelaku usaha pariwisata menuju sertifikasi profesi.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

1. Anugerah Pesona Indonesia 2016 di Gedung Sapta Pesona Jakarta



Gambar 4. 6 Anugerah Pesona Indonesia 2016

- A. Kategori Tujuan Wisata Terpopuler Kebersihannya (Most Popular Cleanliness)
- Juara III : Pantai Papuma – Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur



- B. Kategori Tempat Berselancar Terpopuler (Most Popular Surfing Spot)
- Juara III : Pantai Plengkung – Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur



- C. Kategori Festival Budaya Terpopuler (Most Popular Cultural Festival)

- Juara II : Jember Fashion Carnival – Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur



2. **Duta Wisata Indonesia 2016** di Papua pada tanggal 11 Desember 2016 sebagai Runner Up 1



Gambar 4.7 Duta Wisata Indonesia 2016

18. BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

18.1 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

1. Meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan.
2. Meningkatkan prestasi olahragawan melalui pembibitan dan pembinaan atlet serta pembudayaan olahraga dimasyarakat.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Meningkatnya Pemuda yang berprestasi Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	Persentase Pemuda berprestasi yang dibina	22.45	29.02	29.26
2. Meningkatnya Atlet yang berprestasi Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase atlet pelajar berprestasi yang dibina	8.25	13.95	69.09

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Pemuda yang berprestasi

- Presentase pemuda berprestasi yang dibina;

Presentase pemuda berprestasi yang dibina pada Tahun 2015 adalah sebesar 22.45% dan pada Tahun 2016 sebesar 29.02%.

Pada Tahun 2016 didukung oleh satu program, yaitu Peningkatan

peran serta Kepemudaan. Capaian kinerja pada Sasaran 1 Tahun 2015-2016 terdapat peningkatan kemajuan sebesar 29.26 %, hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2016 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan telah berhasil meningkatkan jumlah Pemuda berprestasi yang dibina di Jawa Timur melalui kegiatan pelayanan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dibidang Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan. Capaian kinerja Tahun 2016 pada sasaran ini sebesar 139,9% karena terjadi peningkatan realisasi jumlah pemuda yang dibina sebesar 1.164 orang dari target yang ditetapkan sebesar 832 orang pemuda di Jawa Timur.

Sasaran 2: Meningkatnya Atlet yang berprestasi.

- Persentase atlet pelajar berprestasi yang dibina;
Persentase atlet pelajar berprestasi yang dibina pada Tahun 2015 adalah sebesar 8.25% dan pada Tahun 2016 sebesar 13.95%. Pada Tahun 2016 didukung oleh satu program, yaitu Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Capaian kinerja pada Sasaran 2 Tahun 2015-2016 terdapat peningkatan kemajuan sebesar 69.09%, hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2016 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan pembinaan Atlet pelajar berprestasi melalui berbagai program pembibitan atlet pelajar yang terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Capaian kinerja Tahun 2016 pada sasaran ini sebesar 101%, karena terjadi peningkatan realisasi jumlah atlet yang dibina sebesar dengan 8.275 orang dengan target yang ditetapkan sebesar 8.225 orang.

c. Program

1. Program peningkatan peran serta Kepemudaan, dengan anggaran Rp. 8.716.478.870,-, realisasi sebesar Rp. 8.328.926.859,- atau 95,55% untuk mendukung 6 (enam) kegiatan yang secara rinci untuk masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dengan anggaran Rp.15.401.512.000,-, realisasi sebesar Rp. 14.387.891.111,- atau 93,42% untuk mendukung 6 (enam) kegiatan yang secara rinci untuk masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Bidang Kepemudaan:

- Banyaknya pemuda terjebak dalam dekadensi moral, kriminalitas dan Narkoba.
- Terbatasnya pemuda yg bergerak di bidang Kewirausahaan.
- Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan masih rendah
- Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda masih terbatas. Tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda antara lain disebabkan belum optimalnya peran organisasi kepemudaan.
- Banyak OKP belum patuh terhadap Undang-Undang Kepemudaan.
- Munculnya orientasi yang berlebihan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan kepeloporan dibidang pendidikan, kewirausahaan, ekonomi kreatif serta olahraga.

Permasalahan Bidang Keolahragaan:

- Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya diimplementasikan dalam bina prestasi olahraga.
- Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (PPLPD) dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

- Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian Jawa Timur.
- Belum terkoneksinya antara olahraga rekreasi, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi dalam pembinaan olahraga di Jawa Timur.

Solusi Permasalahan Kepemudaan dan Keolahragaan:

- Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, melalui:
 - bela negara;
 - kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - pendampingan pemuda;
 - perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
 - pengembangan pendidikan kepramukaan.
- Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui:
 - perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
 - peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
 - perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, melalui:

- peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa;
 - pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga layanan khusus;
 - pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga; dan
 - peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa.
- Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional, melalui:
- pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
 - penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan;
 - pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan;
 - pemberian penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan berprestasi;
 - pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan;
 - peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
 - peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan;
 - peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi;

- peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga; dan
 - Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
- Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan melalui;
- terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan Pengembangan kepemudaan;
 - terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan;
 - terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- Juara Umum Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) Tahun 2016.
- Peringkat III Pekan Olahraga Seni dan Pondok Pesantren (POSPENAS) ke VII Tahun 2016 di Banten.
- Terbaik II Pemuda Pelopor Nasional bidang Sosial Budaya Pariwisata dan Bela negara, Terbaik III Pemuda Pelopor Nasional bidang Inovasi Teknologi, Harapan I Pemuda Pelopor Nasional bidang Pengelolaan sumberdaya alam dan Lingkungan.

19. BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

19.1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. Tujuan

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jatim Kondusif

b. Sasaran dan Program

- 1) Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol.
- 2) Meningkatnya penghormatan HAM.
- 3) Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat.

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol.	1. Persentase peningkatan Ormas/LSM yang terdaftar	0,68%	1,35%	98,53
	2. Persentase terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	68,42%	76,32	11,54
1. Program Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan	1. Jumlah Ormas / LSM yang terdaftar	889	901	1,35
	2. Verifikasi bantuan keuangan parpol	8	10	25,00
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Jumlah terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	26	29	11,54
II. Meningkatnya penghormatan HAM.	1. Persentase penurunan kejadian terkait Politik	15,87%	66,04%	316,13
	2. Persentase penurunan kejadian terkait HAM	(26,83%)	7,69%	128,66
1. Program Perbaikan Proses Politik	1. Jumlah kejadian terkait Politik	53	18	66,04
2. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	1. Jumlah kejadian terkait HAM	52	48	7,69

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM		REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
III. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat.	1. Persentase penurunan kejadian terkait Poleksosbud dan Tibmas		(212,26%)	19,03%	108,97
	2. Persentase terbentuknya FKDM	Kab/Kota	89,47%	92,11%	2,94
		Kec.	38,86%	39,16%	0,78
		Desa/Kel	27,53%	43,82%	59,17
	3. Persentase penurunan Kejadian terkait Keagamaan		34,62%	(5,88%)	(116,98)
1. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Jumlah kejadian terkait Poleksosbud dan Tibmas		331	268	19,03
	2. Jumlah terbentuknya FKDM	Kec.	258	260	0,78
		Desa/Kel	2126	3384	59,17
2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	1. Jumlah kab/kota yang menindaklanjuti kegiatan pemberdayaan masyarakat		34	35	2,94
3. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	1. Jumlah kejadian terkait keagamaan		17	18	(5,88)

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Parpol, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu :

- Persentase Peningkatan Ormas / LSM yang Terdaftar
Persentase peningkatan Ormas/LSM yang terdaftar pada tahun 2015 sebesar 0,68%, dan pada tahun 2016 sebesar 1,35%. Persentase Ormas/LSM yang terdaftar mengalami peningkatan. Perihal Ormas/LSM yang terdaftar tersebut berkaitan dengan adanya putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pada akhir Desember 2014, mengakibatkan peraturan Ormas

mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan hasil putusan MK atas uji materi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas nomor 82/PUU-XI/2013/2013 tanggal 23 Desember 2014. Menindaklanjuti hal tersebut Dirjen Kesbangpol Kemendagri mengeluarkan surat tanggal 16 Januari 2015 Nomor 220/0109/Kesbangpol perihal penjelasan Putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang intinya menyebutkan bahwa :

1. Pada intinya Ormas tidak berbadan hukum dapat terdaftar atau tidak terdaftar pada pemerintah.
2. Pendaftaran cukup dilakukan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan domisili sekretariat.

Pada perkembangan selanjutnya, pada Mei 2015 Dirjen Kesbangpol kembali menerbitkan surat tanggal 13 Mei 2015 Nomor 220/0904/Kesbangpol perihal Tambahan Penjelasan Putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa ormas tidak berbadan hukum dapat mendaftarkan kepengurusannya pada 2 (dua) atau lebih pada Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang berbeda, hanya nama struktur kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang didaftarkan tersebut harus berbeda. Apabila semua pengurus Ormas di tingkat pusat cukup mendaftarkan sesuai domisili Sekretariatnya di Kabupaten/Kota, maka sekarang Pengurus Ormas Cabang baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota boleh mendaftarkan kepengurusannya di Bakesbangpol setempat. Hal tersebut mengakibatkan sepanjang Mei 2015 s/d Tahun 2016 Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur kembali mensosialisasikan aturan diatas baik melalui kegiatan ataupun ketika diundang menjadi Narasumber di berbagai kegiatan bahwa ormas yang memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi Jawa Timur dapat mendaftar di Bakesbangpol Provinsi

Jawa Timur serta dapat mendaftar di Kabupaten/Kota lain apabila memiliki cabang kepengurusan di tempat tersebut.

Ormas badan hukum berupa perkumpulan atau yayasan yang pendaftarannya dilakukan pada Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak perlu Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sedangkan Ormas tidak berbadan hukum pendaftarannya dilakukan oleh Kemendagri, juga dapat dilakukan pada Bakesbangpol Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

- **Persentase Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)**
Persentase terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten/Kota pada tahun 2015 adalah sebesar 68,42%, dan pada tahun 2016 FPK Kabupaten/Kota terbentuk sebanyak 76,32%. Terbentuknya FPK Kabupaten/Kota mengalami peningkatan, dalam hal ini tidak lepas peranserta dan dorongan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur) dalam membentuk FPK, karena pembentukan FPK merupakan tindaklanjut dari Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, yang pada Pasal 8 Ayat 1 menyatakan FPK dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Sasaran 2 : Meningkatnya penghormatan HAM, ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu:

- **Persentase Penurunan Kejadian terkait Politik :**
Persentase Penurunan Kejadian terkait Politik pada tahun 2015 adalah sebesar 15,87%, dan pada tahun 2016 sebesar 66,04%. Persentase kejadian terkait politik mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman masyarakat akan proses politik serta kesetaraan hak-hak politik untuk membangun etika dan budaya politik yang santun, melalui sosialisasi yang

melibatkan semua elemen masyarakat dari Ormas, LSM, Parpol maupun generasi muda

➤ **Persentase Penurunan Kejadian terkait HAM :**

Persentase Penurunan Kejadian terkait HAM pada tahun 2015 adalah sebesar (26,83%), dan pada tahun 2016 sebesar 7,69%. Persentase kejadian terkait HAM tersebut mengalami penurunan. Hal ini karena melalui RANHAM telah terjadi harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakat, ada peningkatan pemahaman kesadaran mengenai penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM, sehingga ada efektivitas penyelenggaraan diskusi dan sosialisasi tentang HAM, dan perlunya konsistensi dalam komunikasi dan koordinasi rutin antar elemen pemerintah dan elemen masyarakat.

Sasaran 3 : Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat, ditetapkan 3 indikator kinerja yaitu:

➤ **Persentase Penurunan Kejadian terkait Poleksosbud dan Tibmas :**

Persentase penurunan kejadian terkait Poleksosbud dan Tibmas pada tahun 2015 sebesar (212,26%), dan pada tahun 2016 sebesar 19,03%. Persentase kejadian terkait Poleksosbud dan Tibmas mengalami penurunan di tahun 2016. Secara umum jumlah kejadian bergantung eskalasi situasi Poleksosbud dan Tibmas pada saat itu. Penurunan kejadian terkait Poleksosbud dan Tibmas tahun 2016, karena adanya peningkatan koordinasi sinergitas antara aparat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota dan lembaga/instansi/SKPD terkait dalam pemantauan perkembangan situasi kondisi kamtibmas di wilayah Jawa Timur sebagai upaya kewaspadaan terhadap aksi terorisme/radikalisme, gangguan kamtibmas dan potensi konflik sosial di daerah melalui deteksi dini, cegah dini dan penanganan

secara terpadu. Peran dan efektifitas pemantauan perkembangan situasi terkait Poleksosbud dan Tibmas melalui jaringan informasi menjadi bagian penting dalam upaya mengantisipasi terjadinya konflik, untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat dilaksanakan secara terpadu dan intensif dengan instansi lintas sektoral seperti BIN Daerah, KODAM, POLDA, KEJATI, ARMATIM, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kementerian Agama, dan Kementerian lainnya.

➤ **Persentase Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) :**

Persentase terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tahun 2015 pada tingkat Kabupaten/Kota sebesar 89,47%, tingkat Kecamatan sebesar 38,86%, dan tingkat Desa/Kelurahan sebesar 27,53%. Sampai dengan tahun 2016 persentase terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tingkat Kabupaten/Kota sebesar 92,11%, tingkat Kecamatan sebesar 39,16%, dan tingkat Desa/Kelurahan sebesar 43,82%. Terbentuknya FKDM di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan mengalami peningkatan di tahun 2016. Pembentukan FKDM di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sangat bergantung pada komitmen masing-masing kepala daerah. Untuk itu Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah-langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil capaian lebih maksimal.

➤ **Persentase Penurunan Kejadian Terkait Keagamaan :**

Persentase Penurunan Kejadian terkait Keagamaan pada tahun 2015 adalah sebesar 34,62% dan pada tahun 2016 sebesar (5,88%). Kejadian terkait Keagamaan mengalami peningkatan, hal

ini disebabkan karena meningkatnya suhu politik/Pilkada dan semakin maraknya berita informasi adu domba dan berita bohong melalui medsos/hoax yang dapat menimbulkan intoleransi.

c. Program

1. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 242.210.435,- atau 96,88%, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 156.277.100,- dan terealisasi sebesar : Rp. 153.636.380,- atau 98,31%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
3. Program Perbaikan Proses Politik, dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 84.249.235,- atau 93,61%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
4. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 154.812.285,- atau 96,76%, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
5. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan anggaran Program ini sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 226.420.945,- atau 90,57%, untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga ketertiban dan Keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.711.408.750,- dan terealisasi

sebesar Rp. 1.473.236.880,- atau 86,08%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

7. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan anggaran sebesar : Rp. 82.314.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 81.612.665,- atau 99,15%, untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Permasalahan :

- Lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila akibat ketidakmampuan mengelola tantangan eksternal berupa arus globalisasi dan pertarungan antar ideologi melalui media masa dan tantangan internal yang bersumber dari keragaman budaya, suku, agama dan ras.
- Belum optimalnya pemahaman masyarakat terkait keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), masalah pembauran menjadi penting mengingat latar belakang bangsa Indonesia yang sangat pluralistik terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnik, bahasa dan kebudayaan daerah. Bahwa salah satu sasaran strategis dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah melalui proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Solusi :

- Dalam setiap kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol (Bidang Integrasi Bangsa) selalu disosialisasikan tentang pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan bagi masyarakat, baik kepada Aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota maupun elemen masyarakat lainnya dan mendorong Kabupaten/Kota segera membentuk FPK.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Gubernur) secara berkala mengkomunikasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

(Bupati/Walikota) terkait pasal (8) PERMENDAGRI No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah agar segera membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan jenjang/tingkatannya.

- Untuk mewujudkan harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari, maka telah dilakukan berbagai kegiatan seperti pengembangan wawasan kebangsaan dengan peserta unsur generasi muda, penguatan nilai-nilai aktualisasi pancasila, rasa cinta tanah air, kesadaran bela negara dan berkonstitusi.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Permasalahan :

- Koordinasi dengan Instansi/lembaga/SKPD terkait yang belum maksimal.
- Kondisi masyarakat saat ini cenderung sensitif dan emosional (irrasional).
- Pembentukan FKDM di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sangat bergantung pada komitmen masing-masing kepala daerah.

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi/lembaga/SKPD terkait.
- Meningkatkan penggalangan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.
- Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum membentuk FKDM hingga tahun 2016 untuk membentuk hingga ke tingkat desa/kelurahan di tahun 2017.

3. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia

Permasalahan :

- Masih lemahnya koordinasi antar berbagai pihak terkait, serta belum maksimalnya implementasi Hak Asasi Manusia.

- Belum optimalnya peran institusi-institusi demokrasi, peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM.
- Belum sepenuhnya memahami mapping/fokus pelaksanaan Rencana Aksi HAM
- Lemahnya penegakan supremasi hukum.
- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
- Kurangnya perhatian bagi penyandang disabilitas terhadap kelompok masyarakat yang rentan dan pelanggaran KDRT.

Solusi :

- Optimalisasi sinkronisasi kegiatan RANHAM dengan SKPD sesuai Tupoksinya agar lebih berperan dan membantu peningkatan wawasan sadar hukum dan HAM kepada Aparatur dan masyarakat secara menyeluruh, serta mampu menciptakan harmonisasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan RANHAM dan peduli HAM dengan tujuan meningkatkan wawasan serta mendorong kesadaran hukum, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pelaku sosial di masyarakat.

4. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Permasalahan :

- Ada sebagian Ormas/LSM yang diundang tidak hadir dikarenakan ormas tersebut telah pindah alamat dan tidak memberitahukan keberadaannya ke Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.
- Belum semua Ormas/LSM yang terdaftar melakukan her-regerestrasi ulang sehingga perubahan kepengurusan belum diketahui dan dicatat oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.
- Aktifitas Ormas/LSM belum semua melaporkan kepada Bakesbangpol Jawa Timur.

Solusi :

- Perlu melakukan sosialisasi/pemberitahuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait organisasi kemasyarakatan agar diketahui khalayak sehingga terwujud penataan ormas/LSM yang baik sesuai dengan ketentuan.
- Dilakukan identifikasi dan inventarisasi data terhadap keberadaan Ormas/LSM.
- Meningkatkan fasilitasi kepada Ormas/LSM.
- Meningkatkan monitoring kegiatan Ormas/LSM.
- Terbitnya Keputusan MK atas uji materi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas nomor 82/PUU-XI/2013/2013 tanggal 23 Desember 2014, khususnya terkait dengan teknis pendaftaran Ormas, yang belum dibarengi dengan Juklak/Juknisnya.

5. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Permasalahan :

- Masih adanya ego sektoral aparat intelijen di lembaga/instansi dalam kerjasama dalam pertukaran informasi potensi konflik dan gangguan keamanan/ketertiban masyarakat di Jawa Timur.
- Kurangnya pemahaman dan keterpaduan antara lembaga/instansi/SKPD dalam pelaporan aksi terpadu penanganan konflik sosial di Jawa Timur.

Solusi :

- Mengadakan koordinasi dan sinergi melalui berbagai kegiatan sebagai wadah pertukaran informasi antar aparat pemerintah lembaga/instansi/SKPD serta pembentukan forum terpadu guna memperkuat jaringan informasi terkait potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Terus mendorong dan memberikan penjelasan kepada instansi/lembaga/SKPD terkait pemahaman dan kerjasama dalam penanganan konflik sosial yang sesuai Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat.

6. Program Perbaikan Proses Politik

Permasalahan :

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti proses politik (berdemokrasi).
- Pemahaman dalam proses politik masih relatif kurang.
- Kurangnya kesadaran akan pentingnya etika dan budaya politik yang santun pada aparatur maupun elemen masyarakat.
- Masih ada kabupaten/kota yang belum memiliki program/kegiatan terkait etika politik.

Solusi :

- Mengadakan sosialisasi, diseminasi, seminar tentang budaya politik yang demokratis, santun dan beretika melalui forum-forum dan harmonisasi sosial politik bagi aparatur dan elemen masyarakat.
- Mendorong kabupaten/kota melaksanakan kegiatan yang terkait etika politik.

7. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Permasalahan :

- Kualitas pemahaman dan pengamalan terhadap agamanya masih belum optimal.
- Masyarakat Jawa Timur sangat pluralistik sehingga mudah terjadi gesekan.
- Belum maksimalnya komunikasi untuk menyatukan pemahaman guna mewujudkan kerukunan umat beragama menuju kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.
- Tantangan eksternal berupa arus globalisasi dan pertarungan antar ideologi melalui media masa, serta tantangan internal yang bersumber dari keragaman budaya, suku, agama, dan Ras.
- Radikalisme, baik liberal (pemikiran dan sikap hidup bebas dan individual) maupun sektarian (beragama yang tidak toleran).

Solusi :

- Peningkatan efektifitas lembaga forum komunikasi kerukunan hidup umat beragama serta Rakor dewan penasehat forum kerukunan umat beragama.
- Meningkatkan forum silaturahmi dan komunikasi pimpinan majelis agama
- Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi antar dan inter umat beragama.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan berbangsa pada masyarakat Jawa Timur.
- Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya masing-masing agar tidak mudah terjebak pada eksklusivisme negatif dalam beragama.
- Meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi Suku, Agama, Ras dan antar golongan.

e. Penghargaan Nasional yang Diterima

Nama Penghargaan :

Peringkat Sembilan Peningkatan Capaian Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur dari 70,36 pada Tahun 2014 menjadi 76,90 pada Tahun 2015.

Gambar 4.8
Penghargaan Peningkatan Capaian Nilai Indeks Demokrasi Indonesia



19.2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dalam Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang aman, tertib, tentram dan kondusif.
- Meningkatkan potensi dan peran Satlinmas.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
I.	Meningkatkan kondisi Masyarakat Jawa Timur yang aman, tertib, tenram dan kondusif	Persentase penanganan kasus penyelenggaraan Tibumtranmas yang telah diselesaikan	90 %	43,29%	89 %
	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	92,9%	76,32 %	91,9%
II.	Meningkatkan supremasi hukum peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya	Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya	83 %	71 %	82%
	1. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Persentase Penegakan Perda yang ditangani	85 %	76,32 %	84%
III.	Meningkatkan peran Satlinmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa (community policing) dan tanggap darurat bencana	Persentase Pertumbuhan anggota Satlinmas yang terlatih atau bersertifikat	90 %	60 %	89 %
	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1. Persentase Anggota Satlinmas dan Masyarakat yang bersertitikat	100%	100%	100%

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan kondisi Masyarakat Jawa Timur yang aman, tertib, tenram dan kondusif

- Persentase pelanggaran Tibumtranmas yang telah diselesaikan
Penanganan penyelenggaraan ketertibanan umum dan ketentraman masyarakat pada tahun 2016 mencapai 43,3 % dengan target 246 kegiatan tercapai 102 kegiatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 mencapai 90 % hal ini disebabkan efisiensi sarana prasarana tidak memadai.

Sasaran 2 : Meningkatkan supremasi hukum peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya

- Persentase penurunan kasus pelanggaran;
Penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya tahun 2016 sebesar 71%. dibandingkan tahun 2015 83 % hal ini perda yang ditangani tahun 2016 sebanyak 7 perda dengan 11 kegiatan di 21 titik lokasi dengan ditemukan pelanggaran sebanyak 67 pelanggar, ditangani 54 pelanggar, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2015 sebanyak 5 Perda 18 kali kegiatan dengan ditemukan pelanggaran sebanyak 249 Pelanggaran dan terselesaikan 166 pelanggaran dengan diselesaikan cara ditertibkan, penyitaan barang bukti serta pemusnahan barang bukti pada lokasi penertiban.

Sasaran 3 : Meningkatkan peran Satlinmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa (community policing) dan tanggap darurat bencana

- Persentase Pertumbuhan anggota Satlinmas yang terlatih atau bersertifikat;

Pelaksanaan simulasi Pertumbuhan anggota Satlinmas yang terlatih atau bersertifikat tahun 2016 sebanyak 200 dengan target 300 orang dengan capaian 60% serta Jumlah peserta simulasi PAM Swakarsa dan Pelatihan Satlinmas dan masyarakat Tahun 2015 sebanyak 480 orang dengan target 500 orang dengan mencapai 90 %

c. Program

1. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan anggaran sebesar Rp. 688.150.000, realisasi sebesar Rp. 656.240.207 atau 95,36 % untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan terdiri dari dengan anggaran sebesar Rp. 751.850.000, realisasi sebesar Rp. 744.210.450 atau 98,98% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000, realisasi sebesar Rp. 350.668.500 atau 97,40% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum maksimalnya operasional dan patroli ketertiban umum, ketentraman masyarakat dalam Penegakan Perda serta perlindungan masyarakat;
2. Masih rendahnya sarana prasarana dan APBD guna mendukung operasional tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Belum tersusunnya secara baik sebuah mekanisme operasional penertiban yang terkoordinasi dan terintegrasi antar instansi terkait, baik yang menyangkut perencanaan program dan pelaksanaannya belum terwujud dalam satu kesatuan sistem;
4. Disiplin moril, motivasi, kreativitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja lembaga secara keseluruhan.

Solusi :

1. Perlu adanya sosialisasi dan koordinasi terhadap berbagai pihak terkait permasalahan tersebut terutama instansi pemangku Perda;
2. Mengusulkan tambahan sarana prasarana dan anggaran untuk menunjang kegiatan operasional;
3. Perlu dialokasikan dan didistribusikan dukungan-dukungan sumber daya yang cukup bagi keperluan tercapainya shared value tersebut melalui pelaksanaan program;
4. Penerapan reward and punishment system dalam organisasi secara obyektif dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kreativitas staf.

19.3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

a. Tujuan

- Pengurangan Resiko Bencana;
- Penanganan Bencana yang Responsif;
- Mendorong Pemulihan Kawasan Terdampak Pasca Bencana.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Menurunnya Resiko Bencana di Jawa Timur	Prosentase pengembangan desa tangguh rawan bencana	130 %	171 %	36
	Persentase Early Warning System (EWS) / Alat peringatan dini di daerah rawan bencana	100%	100%	-
1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah desa tangguh bencana di kawasan rawan bencana	52 desa	71 desa	36
	Jumlah sistem peringatan dini (EWS) yang berfungsi	72 EWS	76 EWS	5,56
II. Meningkatnya Responsifitas dalam menangani bencana pada saat Pra, Tanggap dan Transisi Bencana di Jawa Timur	Prosentase korban terdampak bencana yang ditangani	100 %	100 %	-
	Prosentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	100 %	100 %	-
2. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah korban terdampak bencana yang ditangani	88.507 jiwa	71.406 jiwa	23,95
	Jumlah kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap	454 kejadian	350 kejadian	29,71
III. Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur	Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan (10 Kabupaten)	100%	100%	-
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	jumlah rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	10	10	-

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pada Tahun 2015 – 2016 kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Menurunnya Resiko Bencana di Jawa Timur

- Pembentukan / pengembangan desa tangguh, pada Tahun 2015 Terbentuk 54 Desa dan Tahun 2016 71 Desa. Mengalami peningkatan karena partisipasi aktif masyarakat dan bantuan NGO (Non Government Organization).
- Persentase Early Warning System (EWS) / Alat peringatan dini di daerah rawan bencana, pada Tahun 2015 2 unit Alat Peringatan Dini dan Tahun 2016 2 unit Alat Peringatan Dini. Memiliki target dan realisasi yang sama antara Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Sasaran 2 : Meningkatnya Responsifitas dalam menangani bencana pada saat Pra, Tanggap dan Transisi Bencana di Jawa Timur

- Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Optimalisasi Manajemen Logistik, pada Tahun 2015 45 Orang dan Tahun 2016 45 Orang. Memiliki target dan realisasi yang sama antara Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan Peralatan Penanggulangan Bencana BPBD Kab / Kota se Jawa Timur, pada Tahun 2015 45 Orang dan Tahun 2016 45 Orang. Memiliki target dan realisasi yang sama antara Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemulihan pasca bencana di Jawa Timur

- Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan, pada Tahun 2015 10 Kabupaten dan Tahun 2016 10 Kabupaten. Memiliki target dan realisasi yang sama antara Tahun 2015 dan Tahun 2016.

c. Program

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.727.365.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 1.705.676.375,00 atau 98,74% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.017.750.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 1.011.289.238,00 atau 99,37% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.190.215.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 1.175.786.429,00 atau 98,79% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih ada Kabupaten / Kota yang belum membentuk kelembagaan BPBD;
 - Pembentukan desa tangguh belum menjadi sebuah kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
 - Untuk penanganan korban bencana yang terjadi di daerah terpencil yang sulit di jangkau mobilitas kendaraan; (contoh untuk keperluan evakuasi)
 - Pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana yang di usulkan melalui BNPB tidak terpenuhi secara keseluruhan.

Solusi :

- Pendampingan dalam pembentukan BPBD di Kabupaten / Kota yang belum terbentuk;

- Pemberian pembekalan dan pencerahan kepada aparat dan tokoh masyarakat akan arti penting pembentukan desa tangguh, utamanya dikaitkan dengan kewajiban aparat dan tokoh melindungi masyarakatnya;
- Koordinasi lintas sektoral di intensifkan antara BPBD, SAR, TNI / POLRI dan lembaga teknis lain untuk penanganan bencana;
- Pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana diusulkan kembali baik melalui dana APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten / Kota disesuaikan dengan tingkat kerusakan.

e. Penghargaan Nasional Yang Diterima

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 mendapatkan Penghargaan :

- Piagam Penghargaan Tangguh Award Tahun 2016, Penghargaan Pengelola Data Bencana dan PUSDALOPS BPBD Tingkat Provinsi;
- Piagam Penghargaan Tangguh Award Tahun 2016, Penghargaan Website Terbaik BPBD Tingkat Provinsi;
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Nilai A (Memuaskan) Tahun 2016;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Website Paling Informatif Tahun 2016.

20. BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20.1. BIRO ADMISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

a. Tujuan

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum, daerah dan desa.
- Mewujudkan pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota/pimpinan DPRD yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya kinerja instansi pemer	1. Prosentase Aspek dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian kinerja dengan predikat Tinggi	100	95,10 %	-4,90
	2. Prosentase Kabupaten/Kota se-Jatim yang yang memiliki capaian kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan pre	100	95,10 %	-4,90
	3. Prosentase penyelesaian masalah tanah kas desa	100	99.19	-0,81
	4. Prosentase peningkatan kualitas aparatur desa/ kelurahan	100 %	94.57	-5,43
	5. Prosentase penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Kab/kota yang terfasilitasi	100 %	93.24	6,76
1. Program Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Prosentase tersedianya dokumen tata kelola pemerintahan yang baik	100	95.01	-4,99

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
II. Mewujudkan pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota/pimpinan DPRD yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Prosentase pilkada yang terfasilitasi	100	99.21	-0,79
	2. Prosentase Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Jawa Timur yang terfasilitasi	100	98.22	-1,78
	3. Prosentase Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100	98.22	-1,78
1. Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi	1. Jumlah fasilitasi pilkada dan wakil kepala daerah di provinsi jawa timur	100	98,80	-1,2

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 dengan contoh sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja instansi pemerintahan

- Indikator kinerja prosentase aspek dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) pada Tahun 2015 dengan melakukan fasilitasi dalam validasi dan verifikasi di instansi pemerintah provinsi jawa timur dan pada tahun 2016 juga dilakukan fasilitasi dengan validasi dan verifikasi LPPD pemerintah provinsi jawa timur.
- Indikator kinerja prosentase aspek dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) pada Tahun 2015 dengan melakukan fasilitasi dengan validasi dan verifikasi dengan 38 kab/kota dan pada tahun 2016 juga 38 kab/kota untuk 38 LPPD .
- Indikator kinerja prosentase aspek penyelesaian masalah tanah kas desa
- Tahun 2015 sebanyak 2 tanah kas desa namun belum ada penyelesaiannya sedangkan tahun 2016 sebanyak 7 tanah kas desa. Penyelesaian tanah kas desa dilakukan pada kegiatan fasilitasi,

koordinasi dan konsultasi serta pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dengan 1 kali rapat pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebanyak 4 kali rapat.

- Indikator kinerja Prosentase peningkatan kualitas aparatur desa/kelurahan Tahun 2015 melalui fasilitasi sebanyak 2 kali rapat sedangkan tahun 2016 sebanyak 2 kali rapat.
- Indikator Prosentase penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Kab/kota yang terfasilitasi pada tahun 2015 dilakukan melalui fasilitasi sebanyak 2 kali rapat sedangkan tahun 2016 dilakukan pembinaan dan monitoring di 38 kabupaten/kota.

Sasaran 2 : Mewujudkan pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota/pimpinan DPRD yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.:

- Prosentase pilkada yang terfasilitasi dengan indikator kinerja tahun 2015 sebanyak 19 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah dengan melakukan fasilitasi pemilihan kepala daerah melalui rapat dengan 19 kabupaten/kota sebanyak 1 kali rapat, dan pada tahun 2016 dilakukan fasilitasi pelantikan kepala daerah serentak 17 kepala daerah dan wakil kepala daerah secara definitif dan 1 penjabat bupati pacitan pada bulan januari, pelantikan 1 kepala daerah secara definitif yaitu kabupaten pacitan bulan april dan 1 orang untuk kabupaten tuban bulan juni 2016 , sehingga total 19 orang.
- Prosentase Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Jawa Timur yang terfasilitasi
- Prosentase pergantian antar waktu yang terfasilitasi dengan indikator kinerja tahun 2015 telah diterbitkan 4 SK Mendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD provinsi jawa timur dan 43 SK Gubernur Jawa Timur tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kab/kota dan 3 SK Gubernur Jawa Timur tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD

kab/kota. Tahun 2016 telah diterbitkan 27 SK pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kab/kota, 4 SK Gubernur Jawa Timur tentang pemberhentian sementara anggota DPRD kab/kota dan 6 SK Gubernur Jawa Timur tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD kab/kota dan 2 SK Mendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD provinsi Jawa Timur.

c. Program

1. Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan anggaran Rp 5.803.724.361,- Realisasi sebesar Rp 5.514.012.677,- atau 95,01 % untuk mendukung 18 (delapan belas) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi , dengan anggaran Rp 462.431.321,- Realisasi sebesar Rp. 456.872.350,- atau 98,80 % untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Adanya mutasi kepada pegawai yang mengerjakan LPPD di beberapa kabupaten/kota menjadikan laporan yang harus dikirim tepat waktu menjadi terhambat.
- 2) Penyusunan LPPD masih dilakukan manual dan belum terintegrasi dalam sistem informasi database.
- 3) Permasalahan tanah kas desa :
 - Dalam penyelesaian tanah kas desa mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengganti tanah kas desa.
 - Permendagri nomer 1 tahun 2016 pada pasal 32 ayat 2 b tentang pengelolaan aset di desa masih sulit dilaksanakan di daerah.
 - Sering terjadi sengketa di daerah terkait penggantian tanah kas desa.

- 4) Belum ada persamaan pemahaman dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD, serta kurangnya informasi terkait data-data peningkatan kapasitas kepala desa :
- 5) Terkait dengan data kependudukan yang berasal dari kabupaten/kota masih belum valid karena data yang digunakan hanya dari kementerian dalam negeri, sedangkan data dari kabupaten/kota atau dari desa tidak bisa digunakan. Hal ini terjadi karena data dari desa sampai kabupaten/kota itu merupakan data registrasi secara manual dan real time.
- 6) Untuk pengajuan ijin ke luar negeri dengan alasan penting bagi bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui gubernur seringkali mendekati tanggal keberangkatan. Padahal sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 2003, pasal 4 huruf d menegaskan bahwa permohonan ijin disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI selambat-lambatnya 14 hari sebelum keberangkatan.
- 7) Usulan PAW anggota DPRD kabupaten/kota di Jawa Timur terkadang terdapat permasalahan bila usulan dari kabupaten/kota belum melengkapi berkas persyaratannya.
- 8) Pengajuan ijin ke luar negeri dengan alasan penting yang di laksanakan oleh anggota/pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Jawa Timur seringkali mendekati tanggal keberangkatan. Dan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 116 tahun 2003 pasal 4 huruf d ditegaskan 14 hari sebelum keberangkatan.

Solusi:

- 1) Perlu membuat sistem informasi LPPD yang terintegrasi dan tidak dilakukan mutasi untuk pegawai yang menyusun LPPD;
- 2) Terkait penyelesaian tanah kas desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pada pasal 32 ayat 2 b ditegaskan bahwa penyelesaian tanah kas desa bisa dilakukan melalui tanah pengganti dan pasal 33 ayat 2 e ditegaskan bahwa penggantian tanah pengganti tanah kas desa bisa berupa uang dan dilakukan sesuai peruntukannya;

- 3) Masih perlu adanya persamaan pemahaman aparaturnya pemerintahan desa dalam meningkatkan kapasitas kepala desa dan BPD. Dan perlu adanya informasi dan data guna meningkatkan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD;
- 4) Perlu ada siak desa dalam melakukan registrasi data kependudukan sehingga data di desa sampai kabupaten / kota langsung terintegrasi, sehingga datanya up date secara real time;
- 5) Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu berkoordinasi dengan kabupaten/kota dengan menekankan bahwa izin ke luar negeri dengan alasan penting harus mengantisipasi waktu 14 hari dalam pengajuan permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur.
- 6) Persyaratan yang kurang dalam pengajuan permohonan PAW yang diajukan kepada Gubernur Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menekankan dalam tata tertib peraturan DPRD.
- 7) Begitu juga izin ke luar negeri dengan alasan penting bagi anggota /pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Jawa Timur harus memperhatikan waktu 14 hari tersebut.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Penghargaan yang diterima secara nasional hanya LPPD yang berturut-turut selama 5 kali yaitu untuk evaluasi LPPD tahun 2011, 2012,2013, 2014 dan saat ini evaluasi tahun 2015.

20.2. BIRO ADMINISTRASI KERJASAMA

a. Tujuan

Mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang antara Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga di Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi/Negara Bagian, Lembaga Internasional.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya Kerjasama Daerah dan Luar Negeri 1. Program Peningkatan Kerjasama	1. Persentase kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dalam negeri yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama.	87,5 %	90,5 %	3 %
	2. Persentase kesepakatan kerjasama antar daerah luar negeri yang ditindaklanjuti	66,67 %	68,67 %	2%
	3. Persentase kesepakatan kerjasama dengan lembaga yang ditindaklanjuti	62,5 %	65 %	3,5 %
	4. Presentase Efektifitas kerjasama	84,85 %	91,5 %	6 %

Evaluasi terhadap Target dan Realiasi Indikator Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kerjasama Daerah dan Luar Negeri

- Persentase kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dalam negeri yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama.

Persentase Kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dalam negeri yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama pada Tahun 2015 adalah sebesar 87,5 % dan pada tahun 2016 sebesar 90,5 % sehingga mengalami kenaikan sebesar 3,0 % dari tahun sebelumnya.

- Persentase kesepakatan kerjasama antar daerah luar negeri yang ditindaklanjuti.

Persentase kesepakatan kerjasama antar daerah luar negeri yang ditindaklanjuti pada Tahun 2015 adalah sebesar 66,67 % dan pada tahun 2016 sebesar 68,67 % hasil kinerja mengalami kenaikan 2,0 % dari tahun sebelumnya.

- Persentase kesepakatan kerjasama dengan lembaga yang ditindaklanjuti.

Persentase kesepakatan kerjasama dengan Lembaga yang ditindaklanjuti pada Tahun 2015 adalah sebesar 62,5 % dan pada tahun 2016 sebesar 3,5% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

- Presentase Efektifitas kerjasama.

Persentase efektifitas kerjasama pada Tahun 2015 adalah sebesar 84,85 % dan pada tahun 2016 sebesar 6,0% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

c. Program

1. Program Peningkatan Kerjasama, dengan anggaran Rp. 12.718.169.750,00 Realisasi sebesar Rp. 12.397.195.189,00 atau 97,48% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masingmasing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Kerjasama antar kabupaten/kota, antar provinsi dengan kabupaten/kota, dan antar provinsi dengan provinsi lain, antara lain :
 - Kabupaten/Kota sebagai subyek kerjasama kewilayahan terkait, tidak memberikan prioritas terhadap pelaksanaan kerjasama dimaksud dikarenakan memiliki anggapan bahwa kerjasama tersebut nantinya akan diinisiasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sekaligus dengan pendanaannya;
 - Untuk mengembangkan potensi pariwisata maka harus diawali dengan penataan infrastruktur terutama jalan sebagai penghubung antar obyek wisata;
 - Kuota yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut masih juga belum dapat mencukupi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat miskin di Jawa Timur.
2. Kerjasama Antar Daerah Dengan Luar Negeri, antara lain:
 - Beberapa Negara memiliki sistem kalender keuangan yang berbeda, Provinsi Jawa Timur periode Januari-Desember tahun berjalan, sedangkan mitra periode April-Maret tahun berikutnya;
 - Perbedaan sistem pemerintahan antara Indonesia dengan negara mitra kerjasama, yang mempengaruhi pada kecepatan pengambilan keputusan negara mitra;
 - Perbedaan sistem pengadministrasian keuangan dan penganggaran;
 - Pelaksanaan program Kerjasama Luar Negeri tergantung pada situasi dan kondisi mitra di Luar Negeri : Politik, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain sebagainya, serta kondisi lingkungan seperti bencana alam, wabah penyakit, dll;
 - Kerjasama Luar Negeri hanya sampai Lol. Belum optimalnya tindaklanjut dari hasil kunjungan ke negara–negara sahabat yang melibatkan SKPD terkait atau lembaga sosial lainnya.

3. Kerjasama Dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, antara lain :

- Para pihak masih melakukan pengidentifikasian kegiatan yang dikerjasamakan;
- Ada pihak yang tidak hadir pada saat penanda tangan;
- Peluang Kerjasama dengan Lembaga Internasional belum banyak dimanfaatkan secara merata oleh Kabupaten / Kota;
- Kurangnya pemahaman tentang arti penting Kerjasama dengan Lembaga Internasional;
- Daerah kurang memahami tentang tata naskah perjanjian, sehingga banyak daerah yang telah membuat naskah perjanjian dengan Lembaga Internasional dengan banyak kekurangan, baik dalam substansi maupun pasal-pasal wajib seperti hak dan kewajiban, Unit Pelaksana, Working Group, perselisihan, dll;
- Pemerintah Pusat masih beranggapan bahwa Pemerintah Daerah harus selalu menyetujui tentang daerah yang ditunjuk/dijadikan sebagai locus implementasi program Lembaga Internasional;
- Dengan dasar otonomi daerah, masih ada Kabupaten/Kota yang menjalin kerjasama dengan lembaga internasional tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

4. Di Bidang Administrasi Kerjasama, antara lain :

- Adanya sikap sebagian Kepala Daerah maupun aparaturnya yang masih egosentris dan tidak peka terhadap permasalahan dan kebutuhan bersama. Kondisi ini dibuktikan dengan masih sangat terbatasnya daerah baik provinsi maupun Kabupaten / Kota yang mempunyai lembaga yang secara khusus membidangi masalah kerja sama, sehingga perhatian terhadap pentingnya kerjasama menjadi sangat rendah. Adapun daerah Kabupaten / Kota yang telah memiliki lembaga yang membidangkan kerja sama, antara lain : Kota Surabaya, Kabupaten

Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pacitan ;

- Belum dipetakkannya data potensi kerjasama pada masing-masing daerah Kabupaten / Kota di Jawa Timur, sehingga kurang berdampak pada peningkatan daya saing dan nilai jual daerah ;
- Minimnya alokasi anggaran APBD Kabupaten / Kota untuk menunjang kegiatan yang mendorong kerjasama daerah ;
- Masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan atau perundang-perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan kerjasama, sehingga timbul penafsiran yang beragam tentang kerja sama ;
- Pada saat Kesepakatan Bersama (KSB) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) ditandatangani, belum dilengkapi dengan exchange program / Action plan, sehingga kondisi ini dapat mengakibatkan suatu kerja sama tidak ditindaklanjuti ;
- Masih lemahnya daya dukung sumberdaya manusia yang menangani kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas.
- Adanya gangguan keamanan internasional ;
- Terdapat lembaga internasional yang melaksanakan program di Jawa Timur, namun belum melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Daerah kurang memahami tentang tata naskah perjanjian. Hal ini menyebabkan banyak kekurangan dalam penyusunan naskah perjanjian;
- Minimnya dukungan dari mitra atau SKPD yang terkait dengan program-program lembaga internasional;
- Minimnya aktivitas SKPD dalam menyelesaikan naskah Perjanjian Kerjasama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerjasama;
- Minimnya pemahaman SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun mitra kerjasama terhadap tindak lanjut dari suatu kesepakatan bersama ;

- Adanya anggapan SKPD dan mitra kerjasama bahwa kesepakatan bersama tidak memerlukan tindak lanjut berupa perjanjian kerjasama;
- Masih ada calon mitra kerjasama (pihak ketiga) yang belum mencantumkan substansi teknis obyek yang akan dikerjasamakan dan tidak berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait sebagai pelaksana kerjasama. Hal ini membuat akselerasi proses realisasi kerjasama menjadi rendah karena masih memerlukan pertemuan dengan SKPD teknis terkait;
- Masih rendahnya koordinasi antara SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan KADIN Jawa Timur dalam upaya Pengembangan Ekonomi di Jawa Timur;
- Masih terbatasnya dana yang di anggarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kerjasama peningkatan kualitas guru.

Solusi :

1. Kerjasama antar kabupaten/kota, antar provinsi dengan kabupaten/kota, dan antar provinsi dengan provinsi lain, antara lain :
 - Terus dilakukan sosialisasi bahwa dalam kerjasama kewilayahan tersebut, subyek utamanya adalah kabupaten/kota terkait, sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator dan penopang dana maupun program;
 - Terus didorong peran dari sekretariat bersama untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan jalan dari semua kabupaten terlibat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya memberikan fasilitasi dan pembinaan;
 - Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap akan memberikan layanan kesehatan kepada pasien rujukan dengan catatan biaya yang dikeluarkan untuk pemberian layanan kesehatan tersebut akan ditagihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2. Kerjasama antar Daerah dengan Luar Negeri, antara lain :
 - Komunikasi yang lebih intensif dengan mitra di luar negeri;

- Mendorong mitra luar negeri untuk dinaikan menjadi MoU;
 - Monitoring dan evaluasi atas kunjungan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD terkait atau lembaga sosial lainnya, baik dilakukan melalui rapat koordinasi maupun kunjungan lapangan, untuk melihat penerapan dari hasil kunjungan luar negeri.
3. Kerjasama Dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, antara lain :
- Melakukan koordinasi intens baik kepada SKPD terkait maupun dengan mitra kerjasama;
 - Membuat surat Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama.
 - Pembahasan Perjanjian Kerjasama dijadwalkan 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - Sosialisasi profil dan program Lembaga Internasional, penyusunan naskah kerjasama (*Technical Arrangement*) ke SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan tujuan :
 - Menginformasikan bahwa beberapa program dari Lembaga Internasional mampu mendukung program pembangunan daerah, dengan pembiayaan pembangunan diluar APBD;
 - Daerah memahami tata cara penyusunan *Technical Arrangement* dengan pihak Lembaga Internasional, dengan demikian pasal-pasal yang mungkin bisa merugikan daerah dapat dihindari.
 - Sosialisasi tentang kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan kerjasama yang dilakukan antara daerah dengan Lembaga Internasional;
 - Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Pemerintah Pusat (Bappenas, Kemenlu, Kemendagri dan Kementerian terkait), bahwa tempat implementasi program Lembaga Internasional ada di daerah, maka dalam menentukan tempat implementasi program, daerah harus diikutsertakan dalam penentuan program dan *locus*-nya.

4. Di Bidang Administrasi Kerjasama, antara lain :

- Perlu dilakukan sosialisasi mengenai peranan kerja sama bagi suatu daerah untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya dan menyelesaikan berbagai permasalahan baik dengan daerah yang berbatasan (kewilayahan) maupun non kewilayahan dan internasional terutama kepada penentu kebijakan melalui TKKSD;
- Perlu dilakukan pemetaan terhadap data potensi daerah yang dapat dikerjasamakan agar dapat berinformasi pihak lain yang membutuhkan, baik didalam maupun diluar negeri;
- Perlu dilakukan sosialisasi mengenai prosedur dan tatacara kerjasama, baik bagi aparat pelaksana kerja sama maupun seluruh SKPD;
- Perlu adanya peningkatan kualitas bagi aparat dalam bidang penyusunan naskah, kemampuan bahasa maupun berbagai kompetensi lain yang mendukung pelaksanaan kerja sama;
- Perlunya dukungan pemerintah daerah terhadap rencana kegiatan kerja sama maupun kerja sama yang telah dilaksanakan;
- Perlunya database mitra kerja sama baik dalam maupun luar negeri.

20.3. BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan.

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) serta profesionalisme pelayanan publik :
- Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan Hak Azasi Manusia (HAM) yang berkeadilan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum dan HAM./	- Jumlah prosentase penanganan setiap gugatan perkara baik Perdata maupun Tata Usaha Negara.	400%	143%	-64,25
	- Jumlah tersusunnya pelaporan RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota.	100%	100%	0
	- Prosentase terlaksananya bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.	230%	200%	-13,04
	- Prosentase ketepatan waktu pembentukan produk hukum Jawa Timur	90,87%	132,47%	45,77
1. Program Pembentukan Produk Hukum				
2. Program Profesionalisme Bagi Aparat Hukum	Prosentase ketepatan waktu penanganan perkara	66,47%	267,30%	302,1
3. Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum	Prosentase ketepatan waktu upload produk hukum melalui website	97,14%	88,17%	-9,23

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Biro Hukum yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum dan HAM.

- Jumlah prosentase penanganan setiap gugatan perkara baik Perdata maupun Tata Usaha Negara pada Tahun 2015 adalah sebesar 400%, pada Tahun 2016 sebesar 143%, mengalami penurunan banyaknya perkara di tingkat kasasi yang selama ini menggantung tidak diterbitkan putusannya, sedangkan jumlah perkara terkait gugatan pergantian antar waktu anggota DPRD kab/kota pada tingkat pertama tidak sebanyak tahun lalu.
- Jumlah tersusunnya pelaporan RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Tahun 2015 adalah sebesar 100%, pada Tahun 2016 sebesar 100%.
- Prosentase terlaksananya bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu pada Tahun 2015 sebesar 230%, pada Tahun 2016 sebesar 200% mengalami penurunan karena adanya upaya-upaya bersifat preventif untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum melalui koordinasi intensif dengan instansi terkait yang berwenang.

c. Program

1. Program Pembentukan Produk Hukum dengan anggaran Rp.3.985.603.250,00 Realisasi sebesar Rp.4.050.722.940,00 atau 132,37% untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.
2. Program Profesionalisme Bagi Aparat Hukum dengan anggaran Rp.2.270.000.000,00 Realisasi sebesar Rp.2.022.621.220,00 atau 267,30% untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.

3. Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum dengan anggaran Rp.1.724.000.000,00 Realisasi sebesar Rp.1.520.056.450,00 atau 88,17%% untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.

d. Permasalahan dan solusi.

Permasalahan :

- Tidak tercapainya target yang telah ditentukan dikarenakan rancangan yang memerlukan pendalaman materi sehingga menyita banyak waktu dan tenaga dan ketidaksiapan SKPD pengusul baik dari segi anggaran biaya maupun penyusunan naskah akademiknya.
- Masih banyak rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD dalam Prolegda masih berupa judul saja sehingga waktu akan dibahas oleh Komisi Pembahas DPRD, pengusul dari DPRD tidak siap dalam menyusun naskah akademik maupun konsep rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- Tidak tercapainya target fasilitasi berupa kegiatan evaluasi dan fasilitasi dikarenakan terkendala anggaran hanya sampai pada akhir bulan Nopember 2016, sehingga kegiatan evaluasi dan fasilitasi diberhentikan.
- Kabupaten/Kota menyampaikan Raperda/Perda pada bulan Desember 2016 yang menyebabkan tidak dapat dilakukan penjadwalan pada bulan Desember 2016 sehingga penjadwalan baru bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu setelah pencairan anggaran Tahun 2017.
- Terkait kegiatan siaran sosialisasi melalui TVRI/RRi berbeda dengan tahun lalu karena Tahun 2016 mulai diberlakukan pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Solusi :

- SKPD pengusul dalam mengusulkan rancangan Peraturan Daerah didalam Prolegda harus disertai juga dengan rancangan penganggarnya didalam APBD, karena sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD Provinsi.

- Anggota DPRD, Komisi DPRD maupun anggota Balegda yang mengusulkan rancangan Peraturan Daerah di dalam Prolegda seharusnya disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda berupa latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan. Jadi tidak hanya mengajukan judul rancangan Peraturan Daerah saja sehingga dapat dinilai kesiapan dari pengusul untuk tahap penyusunan naskah akademik dan draft rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- Diperlukan penambahan anggaran untuk dianggarkan sampai akhir bulan Desember pada tahun berkenaan serta diperlukan penambahan volume pekerjaan yang sebelumnya sehari hanya 2 produk hukum, tetapi meningkat menjadi 3 atau 4 produk hukum perhari.
- Biro Hukum hanya dapat menyarankan agar Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Raperda/Perda pada akhir Tahun Anggaran, namun hal tersebut sulit dilaksanakan dikarenakan dalam penyusunan produk hukum yang berupa Peraturan Daerah diperlukan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan Eksekutif tidak dapat intervensi DPRD.
- Untuk siaran yang dilaksanakan di TVRI/RRi agar diadakan kerjasama/MOU antara Pemerintah Provinsi dengan TVRI/RRi terkait pembebasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

20.4. BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

a. Tujuan

Tersusunnya rumusan kebijakan bidang perekonomian di Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Jumlah Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM	3	9	200
	Jumlah Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	4	3	-25
	Jumlah Kebijakan Bidang Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi	5	4	-20
	Jumlah Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah	3	2	-33,33
1. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian	15	18	20

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pada tahun 2015 kinerja Biro Administrasi perekonomian sudah sangat baik dengan realisasi kinerja 15 kebijakan dari target 6 kebijakan sehingga capaiannya sebesar 250% sedangkan tahun 2016 realisasi kinerja sebanyak 18 kebijakan dari target 7 kebijakan sehingga capaiannya sebesar 257,14% sehingga dilihat dari kinerja Biro Administrasi Perekonomian baik pada tahun 2015 maupun 2016 telah melampaui target yang ditentukan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur. Kinerja Biro Administrasi Perekonomian pada tahun 2016 yang telah menghasilkan 18 kebijakan juga meningkat sebesar 20 % terhadap kinerja tahun 2015 sebanyak 15 kebijakan.

Selama kurun waktu 2015-2016 kinerja Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian

➤ **Jumlah Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM**

Pada tahun 2015 Jumlah Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM yang telah dibuat sebanyak 3 kebijakan dari target 2 kebijakan dengan capaiannya 150% dan pada tahun 2016 telah menghasilkan kebijakan sebanyak 9 kebijakan dari target 2 kebijakan dengan capaiannya 450% sehingga baik pada tahun 2015 maupun 2016 telah mencapai target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian. Kinerja Biro Administrasi Perekonomian tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 tingkat kemajuannya meningkat sebesar 200%. Peningkatan jumlah kebijakan ini untuk mendukung atau mempercepat perekonomian di Jawa Timur. Berikut kebijakan bidang koperasi dan UMKM yang dibuat pada tahun 2016 :

- Surat Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota se Jawa Timur tahun 2016;
- Peraturan Gubernur Jatim No. 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/234/KPTS/013/2016 Tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Penerapan Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir e-Financing (SIPDe) Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun Anggaran 2016;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/549/KPTS/013/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/600/KPTS/013/2016 tentang Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Timur.

➤ **Jumlah Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

Pada tahun 2015 Jumlah Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang telah dibuat sebanyak 4 kebijakan dari target 1 kebijakan dengan capaiannya 400% dan pada tahun 2016 telah menghasilkan kebijakan sebanyak 3 kebijakan dari target 2 kebijakan dengan capaiannya 150% sehingga baik pada tahun 2015 maupun 2016 telah mencapai target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian. Sedangkan tingkat kemajuan kinerja Biro Administrasi Perekonomian tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 25% namun

demikian pada dasarnya jika dibandingkan dengan target masing-masing tahun baik tahun 2015 maupun tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kinerja Biro Administrasi Perekonomian mengalami penurunan pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Target rencana kebijakan di tahun 2016 telah tercapai pada tahun 2015 sehingga capaian untuk tahun 2016 lebih sedikit dari tahun 2015;
- Adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga terdapat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Berikut kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan yang dibuat pada tahun 2016:

- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/10/KPTS/013/2016 tentang Senior Business Officer East Java Global Economic Services Tahun 2016;
- Keputusan Gubernur No. 188/11/KPTS/013/2016 tentang Penasehat Senior (Senior Advisor) Bidang Promosi, Perdagangan dan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Jepang Tahun 2016;
- Keputusan Gubernur Nomor 188/122/KPTS/013/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/11/Kpts/013/2016 Tentang Penasehat Senior (Senior Advisor) Bidang Promosi, Perdagangan Dan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jepang Tahun 2016.

➤ Jumlah Kebijakan Bidang Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi

Pada tahun 2015 Jumlah Kebijakan Bidang Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi yang telah dibuat sebanyak 5 kebijakan dari target 1 kebijakan dengan capaiannya 500% dan pada tahun 2016 telah menghasilkan

kebijakan sebanyak 4 kebijakan dari target 1 kebijakan dengan capaiannya 400% sehingga baik pada tahun 2015 maupun 2016 telah mencapai target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian. Sedangkan tingkat kemajuan kinerja Biro Administrasi Perekonomian tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 20% namun demikian pada dasarnya jika dibandingkan dengan target masing-masing tahun baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kinerja Biro Administrasi Perekonomian mengalami penurunan pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Target rencana kebijakan di tahun 2016 telah tercapai pada tahun 2015 sehingga capaian untuk tahun 2016 lebih sedikit dari tahun 2015;
- Adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga terdapat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Berikut kebijakan bidang sarana perekonomian dan pengembangan teknologi yang dibuat pada tahun 2016 :

- Surat Edaran Pemberitahuan untuk berpartisipasi mengikuti seleksi “108 Inovasi Prospektif 2016”;
- Surat Himbuan Untuk Mewujudkan Pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif se Jawa Timur;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/588/KPTS/013/2016 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2016;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/739/KPTS/013/2016 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2016.

➤ Jumlah Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah

Pada tahun 2015 Jumlah Kebijakan Bidang Badan Usaha Milik Daerah yang telah dibuat sebanyak 3 kebijakan dari target 2 kebijakan dengan capaiannya 150% dan pada tahun 2016 telah menghasilkan kebijakan sebanyak 2 kebijakan dari target 2 kebijakan dengan capaiannya 100% sehingga baik pada tahun 2015 maupun 2016 telah mencapai target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian. Sedangkan tingkat kemajuan kinerja Biro Administrasi Perekonomian tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 33,33% namun demikian pada dasarnya jika dibandingkan dengan target masing-masing tahun baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kinerja Biro Administrasi Perekonomian mengalami penurunan pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Target rencana kebijakan di tahun 2016 telah tercapai pada tahun 2016 sehingga capaian untuk tahun 2016 lebih sedikit dari tahun 2015
- Adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga terdapat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Berikut kebijakan bidang Badan Usaha Milik Daerah yang dibuat pada tahun 2016 :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan

Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur

c. Program

1. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian, pagu anggaran Rp 21.277.656.600,00 sampai dengan triwulan IV tahun 2016 dapat direalisasikan sebesar Rp 20.175.853.715,73 atau 94,82% untuk mendukung 27 kegiatan yang secara rinci masing-masing realiasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga program dan kegiatan tidak berjalan optimal yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2016 dan realisasi kinerja per kegiatan ada yang tidak mencapai target yang telah ditentukan di awal tahun;
2. Program/kegiatan di kab/kota yang seringkali tidak mendukung program/kegiatan di provinsi karena kurangnya dukungan dari instansi terkait di daerah tersebut, kurangnya koordinasi antar instansi, tidak tersedianya anggaran di daerah sehingga membuat program yang seharusnya dilakukan berjalan lambat;
3. Hasil rapat koordinasi belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara langsung mengingat masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Solusi :

1. Diperlukan tim perencanaan dan evaluasi kegiatan sehingga perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan berjalan dengan baik;
2. Perlunya meningkatkan sinkronisasi dan konsultasi program dan kegiatan baik dengan pemerintah pusat, antar provinsi dan Kabupaten / Kota.

20.5. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

Mewujudkan sistem administrasi pembangunan yang terintegrasi sebagai bentuk peningkatan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya tertib administrasi pembangunan	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan	100%	100%	-
	2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100.0%	-
Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat pelayanan administrasi pembangunan	100%	100%	-

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 dengan contoh sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi pembangunan

- Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pada Tahun 2015 adalah sebesar 100 dan pada tahun 2016 sebesar 100, (tidak mengalami kenaikan maupun penurunan) hal ini karena indikator tersebut yang berupa Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur baik yang rutin dikerjakan setiap tahun maupun yang baru selalu terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti pada Tahun 2015 adalah sebesar 100 dan pada tahun 2016 sebesar 100, (tidak

mengalami kenaikan maupun penurunan), indikator ini adalah berupa surat peringatan dari Gubernur kepada Kepala SKPD terkait dengan penyerpan anggaran yang rendah pada setiap triwulan. Setelah adanya surat peringatan tersebut, pada triwulan selanjutnya SKPD yang mendapatkan peringatan akan berupaya untuk melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya dalam meningkatkan penyerpan anggaran masing-masing SKPD yang dinilai sangat positif dan direspon dengan baik oleh SKPD.

c. Program

1. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan dengan anggaran Rp. 14.015.725.675,- Realisasi sebesar Rp. 12.317.493.020,- atau 87,88 % untuk mendukung 10 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum semua peserta ujian sertifikasi memiliki kesadaran dan kemauan untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti ujian sertifikasi.
2. Belum meratanya personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pada setiap SKPD.
3. Kemampuan SDM baik pengguna maupun penyedia barang dan jasa dalam proses pelelangan kurang memadai.
4. Terlambatnya pengajuan pencairan dana dari pihak penyedia barang/jasa pada kegiatan yang didanai dari APBD.
5. Masih belum sinerginya perencanaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur
6. Kendala pembebasan lahan, karena adanya beberapa pemilik lahan yang belum sepakat nilai ganti kerugian tanah, sehingga berakibat molornya pelaksanaan pembangunan fisik

7. Proses pelepasan Tanah Kas Desa sulit mencari tanah pengganti dalam satu desa
8. Lamanya pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan oleh instansi yang memerlukan tanah yang sesuai dengan amanah Perpres 71 Tahun 2012.
9. Lamanya pemenuhan Peta Lokasi oleh Instansi yang memerlukan tanah.
10. Belum pahamnya instansi pemohon dalam penganggaran seluruh rangkaian kegiatan Tahap Persiapan Pengadaan Tanah sehingga banyak kegiatan tidak dianggarkan

Solusi :

1. Memberikan motivasi dan penghargaan kepada peserta yang berhasil lulus ujian sertifikasi serta memberdayakannya.
2. Selalu mengadakan bintek dan ujian secara rutin dan berkesinambungan terhadap SKPD yang belum memiliki personil bersertifikat.
3. Dilaksanakan pelatihan-pelatihan khusus proses pengadaan barang dan jasa bagi pengguna maupun penyedia jasa.
4. Lebih diintensifkan dalam koordinasi dengan Kementerian agar Petunjuk Operasional bisa segera diterbitkan.
5. Menghimbau kepada penyedia jasa agar supaya kalau pekerjaan telah selesai segera mencairkan dana.
6. Selalu melakukan koordinasi dalam mengalokasikan anggaran dalam perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Setda Provinsi Jawa Timur.
7. Mediasi dan fasilitasi dengan mengundang warga yang keberatan terhadap kesepakatan warga untuk dilakukan pendekatan agar ditemukan kesepakatan harga.
8. Dicarikan lahan pengganti desa lain tetapi harus dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

9. Dilaksanakan ekspose dokumen perencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada sekretariat tim persiapan, untuk dapat diperbaiki sebagaimana amanah perpres 71 tahun 2012.
10. Diarahkan agar lebih mencermati permendagri nomor 72 tahun 2012 permenkeu nomor 13 pmk 02 tahun 2013 dalam penganggaran biaya operasional dan biaya pendukung.

20.6 BIRO ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

a. Tujuan

Pembangunan bidang sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan sumber daya alam melalui rumusan kebijakan dengan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dengan Instansi Terkait di Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal	Jumlah Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam	0 kebijakan	2 kebijakan	200 %
Program : Koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan evaluasi bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan (Dokumen)	5 dokumen	7 dokumen	40%

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 dengan sebagai berikut :

Pada tahun 2015-2016 kinerja bidang sumber daya alam yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal

- Jumlah Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam pada Tahun 2015 adalah sebanyak 0 kebijakan dan pada tahun 2016 sebanyak 2 kebijakan mengalami peningkatan sebesar 200 % dikarenakan pada tahun 2015 masih belum ada rumusan kebijakan yang menjadi sebuah kebijakan, sifatnya masih dalam tahap surat edaran dan bahan rumusan. Baru pada tahun 2016 rumusan kebijakan di tahun 2015 bisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan antara lain :

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2016 tentang Cetak Biru (*blue print*) Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 131 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019.

c. Program

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi bidang Sumber Daya Alam tahun 2016 dengan anggaran Rp. 4.367.965.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.255.955.964,00 atau 97,44 untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran biro belum maksimal dikarenakan terbatasnya *instrument* pelayanan administrasi bidang sumber daya alam ;
2. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Alam perangkat database guna mendukung ketersediaan data sebagai bahan penyusunan rumusan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam di Jawa Timur ;
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang terkait bidang pengelolaan sumber daya alam.

Solusi :

1. Perlunya revitalisasi database pengelolaan sumber daya alam yang handal.
2. Perlunya meningkatkan sinkronisasi dan konsultasi program dan kegiatan pembangunan sumber daya alam baik dengan pemerintah pusat, antar provinsi dan Kabupaten / Kota.
3. Diharapkan adanya peningkatan sumber daya manusia dan adanya pendampingan tenaga ahli dalam perumusan kebijakan bidang sumber daya alam.

20.7 BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas Pelayanan di bidang Administrasi untuk mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN
		2015	2016	
Meningkatnya Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat/	Presentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan	100 %	100 %	100 %
	Presentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	100 %
Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Presentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Sosial	90 %	90 %	90 %
	Presentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat yang di tindaklanjuti	95 %	95 %	95 %

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada Tahun 2015 – 2016 kinerja bidang Administrasi untuk mewujudkan Kesejahteraan Rakyat yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

- Prosentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan

Prosentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang di terbitkan dapat terlihat tingkat kemajuan pada Tahun 2015 adalah sebesar 100% dan pada Tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Perluasan lapangan kerja untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan mutu yang makin meningkat, merupakan sebuah keniscayaan untuk menyerap angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahun. Perluasan lapangan kerja di berbagai sektor, terutama di sektor pertanian, industri dan jasa, serta perlindungan tenaga kerja, diharapkan mampu mengurangi jumlah penganggur maupun setengah penganggur, dan kesenjangan produktivitas antar-sektor,

- Prosentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat

Prosentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat yang di terbitkan dapat terlihat tingkat kemajuan pada Tahun 2015 adalah sebesar 100 % dan pada Tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Tingkat kesehatan juga dipengaruhi tingkat pendapatan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi, dan tingkat konsumsi berkaitan dengan kesehatan. Mereka yang berpendapatan tinggi akan memiliki kemampuan memperbaiki tingkat konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf gizi penduduk, dan taraf kesehatan, serta menurunkan tingkat kematian penduduk. Karena itu, peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas menjadi sangat relevan bagi masyarakat miskin, Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan,

- Prosentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Sosial

Prosentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan di bidang Sosial yang di terbitkan dapat terlihat tingkat kemajuan pada Tahun 2015 adalah sebesar 90 % dan pada Tahun 2016 adalah sebesar 90%.

Penanggulangan kemiskinan yang tidak memberdayakan penduduk miskin membuat mereka semakin terpuruk dalam kebudayaan kemiskinan. Kebudayaan kemiskinan merupakan perwujudan dari adaptasi mereka terhadap lingkungan dan situasi kemiskinan yang mereka hadapi, agar mereka dapat tetap melangsungkan kehidupan yang serba kekurangan. Kebudayaan kemiskinan jauh lebih sulit dihilangkan dibandingkan kemiskinan itu sendiri, sebab sekali kebudayaan tersebut tumbuh, maka ia cenderung melanggengkan diri dari generasi ke generasi, dan mematikan motivasi berusaha, sehingga mereka tak mampu memanfaatkan kondisi-kondisi perubahan untuk memajukan taraf hidup. Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengentas masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumah tangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dari yang bersifat rescue (penyelamatan) --yakni upaya jangka pendek untuk menyelamatkan rumah tangga miskin agar tidak semakin terpuruk akibat kenaikan harga BBM-- sampai dengan upaya recovery (pemulihan) --yaitu upaya jangka panjang untuk pengurangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia,

- Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat yang di tindaklanjuti

Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat yang di tindaklanjuti pada Tahun 2015 adalah sebesar 95% dan pada tahun 2016 hampir mencapai target yang di tetapkan dengan realisasi sebesar 95%. Capaian ini dapat terlihat dari hasil koordinasi kegiatan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur dapat disampaikan bahwa indikator kinerja yang keempat adalah persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat.

c. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp.613.570.000,-Realisasi sebesar Rp.583.731.805, atau 95,14 % untuk mendukung 1 Kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp.381.873.140,- Realisasi sebesar Rp. 358.728.204, atau 93.93% untuk mendukung 1 Kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp.535.844.560,- Realisasi sebesar Rp.524.827.676,- atau 97.94% untuk mendukung 1 Kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp.80.905.000,- Realisasi sebesar Rp.76.470.000,- atau 94.51% untuk mendukung 1 Kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

5. Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran Rp. 7.102.690.000,- Realisasi sebesar Rp.6.731.925.798,- atau 94.77% untuk mendukung 9 Kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Dalam menangani Permasalahan Sosial, Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penanganan secara konkrit dan terukur, berkoordinasi dengan Kabupaten / Kota se Jawa Timur dengan harapan untuk merealisasikan visi misi Bapak Gubernur.
2. Dalam menangani masalah ketenagakerjaan terdapat berbagai permasalahan antara lain :
 - Sengketa lahan transmigrasi dengan penduduk lokal
 - Lahan, lokasi dan kultur daerah penempatan tidak sesuai dgn masyarakat yang
 - Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengolahan lahan
 - Masih kurang terfasilitasinya anggota LKS Tripartit, sehingga belum dapat efektif dalam menjalankan program kerjanya
 - Informasi Pasar Kerja belum menjangkau ke Daerah-daerah kantong Calon TKI
 - Banyak perusahaan yang belum melaksanakan UMK sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - Belum dilakukan survey kemampuan permasalahan
 - Kurang sadarnya APINDO dan SP/SB terhadap arti kesepakatan.
 - Masih banyak pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan oleh pengusaha
 - Sulit mencapai kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang merupakan substansi penetapan UMSK.

- Bupati/Walikota kurang tegas dalam mengambil sikap dalam menetapkan rekomendasi nilai UMK kepada Gubernur.
 - Masih kurang terfasilitasinya anggota DPP, sehingga belum dapat efektif dalam menjalankan program kerjanya sehingga diperlukan dukungan anggaran.
3. Dalam menangani masalah Sosial terdapat berbagai permasalahan antara lain :
- Rendahnya respon kabupaten/kota.
 - Kurangnya pemahaman tentang masalah kesehatan jiwa.
 - Pandangan yang salah, sikap negative seperti stigma dan diskriminasi.
 - Belum optimalnya pemberian bantuan untuk RTSM di Jawa Timur walaupun sudah membantu Penurunan angka kemiskinan.
 - Kurang Harmoni dan sinerginya antara Kelompok Disabilitas baik yang jenis kecacatannya sama maupun Kelompok yang jenis kecacatannya lain.
 - Peningkatan IPM Penduduk tidak sama atau belum merata di Indonesia.
 - Tumpang tindih dan kesenjangan koordinasi penanggulangan dan penanganan kedaruratan bencana.
4. Dalam menangani masalah Sosial terdapat berbagai permasalahan antara lain :
- Belum ada Gugus Tugas Tingkat Kab/Kota tentang Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan
 - Kurangnya sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan program JKN melalui BPJS Kesehatan di Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
 - Kinerja BPJS Kesehatan baik di pusat maupun di daerah belum optimal sehingga karena pemahaman tentang program JKN melalui BPJS Kesehatan kurang mengakibatkan kepesertaan terhadap pelayanan kesehatan terkesan rumit.

Solusi :

- Untuk mendukung tercapainya program tersebut melaksanakan kegiatan koordinasi dan penanganan PMKS di Jawa Timur serta Koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana. Persentase Penanganan Wanita Tuna Susila (WTS) serta Presentase Penanganan kejadian bencana didukung kegiatan rapat koordinasi dan penanganan PMKS di Jawa Timur, rapat koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana.
- Dilaksanakan kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Penanganan Pengangguran dan Pemberdayaan UMSI, Koordinasi, Sosialisasi dan pembinaan TKI, PPTKIS dan LSM Bidang Ketenagakerjaan, Koordinasi, pembinaan, Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Penanganan Transmigrasi. Sinkronisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dan Penanganan Transmigrasi, didukung kegiatan Rapat sinkronisasi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan dan penanganan Transmigrasi dalam rangka Koordinasi Penanganan Hubungan di Jawa Timur,
- Untuk mendukung tercapainya program tersebut melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan. Fasilitasi Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan di dukung kegiatan Fasilitasi Koordinasi JAMKESDA serta Koordinasi dan Konsultasi JAMKESDA.

20.8 BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

a. Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana.

b. Sasaran dan Program

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kemasyarakatan di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase dukungan layanan lingkup administrasi kemasyarakatan (Rumusan kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan) di Bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	93,85 %	94,05 %	0,20 %
1. Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	Persentase Dukungan Layanan Lingkup Administrasi Kemasyarakatan	93,85 %	94,05 %	0,20 %

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan 2016 :

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kemasyarakatan di Bidang Agama, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata.

- Persentase dukungan layanan lingkup administrasi kemasyarakatan (Rumusan kebijakan yg ditindaklanjuti menjadi kebijakan) di Bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan

pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun 2015 dengan pengukuran kinerja sebesar 99,12 % dan pada tahun 2016 dengan pengukuran kinerja sebesar 99,19 % terjadi peningkatan sebesar 0,07 % hal ini disebabkan jumlah kegiatan pada tahun 2016 lebih banyak dibanding tahun 2015.

c. Program

1. Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 23.541.329.405,00 dengan realisasi sebesar Rp 22.124.230.746,00 atau 93,98 % untuk mendukung 8 (delapan) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi anggaran dan capaian kinerja per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Guru Madin
 - Sebagian Perguruan Tinggi Agama belum terakreditasi dan Perguruan Tinggi tersebut tidak bergerak untuk mengurus proses akreditasi, sehingga berakibat terhadap tidak diakuinya lulusan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - Kurangnya Kompetensi Guru Madrasah dalam pelaksanaan pembelajaran baik kompetensi kepribadian; akademik; pedagogik maupun sosial.
 - Banyaknya Guru-guru Madrasah Diniyah di lingkungan Pondok Pesantren yang masih belum mencapai jenjang pendidikan Strata satu (S1).
 - Sebagai upaya memberantas angka buta huruf di Jawa Timur .
2. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan
 - Belum optimalnya pengelolaan potensi zakat di Jawa Timur.
 - Belum optimalnya Lembaga Sosial Keagamaan dalam meredam tumbuhnya paham-paham keagamaan yang berpotensi menimbulkan konflik .
3. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan

- Masih terbatasnya jumlah lembaga Pendidikan Inklusi di Kab/Kota di Jawa Timur .
 - Masih kurangnya tenaga pengajar pada lembaga pendidikan PAUD dan sebagian besar belum memperoleh pelatihan sesuai dengan peraturan dan kurikulum pendidikan PAUD.
 - Belum semua lembaga pendidikan menerapkan/memberikan kurikulum/mata pelajaran tentang Pendidikan Karakter.
4. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga
- Belum adanya rumusan kesepahaman tentang ruang lingkup kebijakan kepemudaan dalam konstelasi Pembangunan Daerah Jawa Timur
 - Belum adanya pemetaan pembinaan dan pelaksanaan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
5. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Diskriminasi gender yang berakar pada nilai-nilai agamis dan kultur budaya belum disadari masyarakat sebagai permasalahan;
 - Masyarakat belum memahami tentang regulasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
 - SKPD Provinsi masih belum sepenuhnya memahami teknis penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - Masih kurangnya koordinasi antara SKPD PPPA Kab/Kota dengan SKPD Provinsi.
6. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kebudayaan
- Kurangnya minat masyarakat terhadap seni tradisional dikalangan remaja
 - Belum optimalnya potensi seniman dan budaya lokal yang ada di Jawa Timur untuk mengekspresikan karya seni
 - Kurang koordinasi kinerja antara pelaku seni dan jajaran birokrasi ditingkat Kab/Kota dengan Provinsi Jawa Timur.
 - Perlu ada kejelasan apakah Undang Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman masih berlaku/tidak dengan ditetapkan Undang Undang No. 23 ttg Pemerintahan Daerah

- Perlu adanya sinergitas antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dengan DKJT terkait dengan Penyelenggaraan Festival Film Daerah, sehingga Penyelenggaraan Festival Film daerah lebih optimal
- Masuknya budaya dan bahasa asing serta kemajuan teknologi akibat globalisasi merusak generasi muda yang seharusnya melestarikan dan mengembangkan bahasa dan sastra Jawa agar tetap eksis.
- Kongres Bahasa Jawa (KBJ) yang disepakati oleh 3 (tiga) Provinsi Jawa (Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur) telah diselenggarakan sebanyak 5 kali dan tahun 2016 yang ke VI, namun tingkat keberhasilan implementasi hasil Keputusan Kongres masih banyak kendala, salah satunya kualitas dan kuantitas guru bahasa Jawa masih kurang.

7. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata

- Pengembangan destinasi Wisata dan daya Tarik wisata Belum Optimal.
- Daerah belum mempunyai RIPPDA.
- Belum optimalnya diversifikasi atau keragaman daya Tarik wisata dalam berbagai tema.
- Belum optimalnya sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata di Madura.
- Belum adanya visi yang sama antara stakeholder terkait dengan pariwisata (Pelaku usaha pariwisata, Pemerintah Daerah, BPWS dan Ulama).
- Daya saing Kompetensi Tenaga Kerja antar negara khususnya di sektor Pariwisata .
- Sebagian Besar Tenaga Kerja Di Sektor Pariwisata belum mempunyai Sertifikasi Profesi.
- Sebagian besar pelaku usaha pariwisata belum memahami apa yang harus dilakukan dalam menghadapi MEA.
- Belum adanya standarisasi Sertifikasi tarif Profesi .
- Belum optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Kawasan Agropolitan Selingkar Wilis.
- Belum adanya komitmen dari daerah dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- Daerah Belum mempunyai RIPPDA.

Solusi :

1. Fasilitas Peningkatan Kualitas Guru Madin
 - Mendorong dan memotivasi perguruan tinggi agama agar segera mengurus akreditasi.
 - Perlu dibuatkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan PTKI untuk menyelenggarakan program peningkatan kualitas Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur.
 - pelatihan dengan diselenggarakan workshop Guru Madrasah Diniyah.
1. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan
 - Sinkronisasi dan sinergi program pengelolaan zakat di Jawa Timur dengan melakukan sosialisasi UU pengelolaan zakat secara intensif ke BAZ dan LAZ di Jawa Timur
 - Mengintensifkan dialog Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta pihak Pemerintah.
1. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan
 - Masih terbatasnya jumlah lembaga Pendidikan Inklusi di Kab/Kota di Jawa Timur.
 - Masih kurangnya tenaga pengajar pada lembaga pendidikan PAUD dan sebagian besar belum memperoleh pelatihan sesuai dengan peraturan dan kurikulum pendidikan PAUD.
 - Belum semua lembaga pendidikan menerapkan/memberikan kurikulum/mata pelajaran tentang Pendidikan Karakter.
1. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga
 - Menghimpun berbagai input pemikiran konstruktif dan konsep-konsep kreatif dari para pakar dan praktisi dalam rangka mengembangkan kebijakan pembangunan kepemudaan di Jawa Timur.
 - Melakukan sinkronisasi dan mensinergikan pelaksanaan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga di Jawa Timur.

1. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Melakukan koordinasi dengan SKPD PPPA Kab/Kota dan SKPD Provinsi tentang percepatan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.
- Melakukan sosialisasi tentang kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Anak melalui para Tokoh Agama di Jawa Timur.

1. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kebudayaan

- Perlu pembinaan pada kalangan remaja utk lebih menguasai seni tradisional dan budaya daerah melalui sarasehan
- Memberikan perhatian kepada Dewan Kesenian Daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum seni budaya dalam pengembangan dan pelestarian seni tradisional
- Mengefektifkan koordinasi seni budaya dengan pemangku kepentingan sbagi jati diri bangsa.
- Perlu pembinaan kepada komunitas film Kab/Kota guna lebih meningkatkan kualitas perfilman melalui Workshop atau Sarasehan
- Mengefektifkan koordinasi dan sinkronisasi dengan para insan film pemangku kepentingan guna mensinergikan pengembangan perfilman sebagai jati diri bangsa.
- Untuk menghindari terjadinya overlapping penyelenggaraan Festival Film antara Dinas Kebudayaan Prov. Jatim dengan Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT), perlu adanya sinergitas terkait dengan penyelenggaraan Festival Film Daerah, sehingga Festival tsb. Bisa lebih optimal dan efektif.
- Perlu Sosialisasi prosedur peminjaman mobil bioskop keliling guna memaksimalkan pemanfaatan dalam mempromosikan film di daerah.
- Mensinergikan upaya pengembangan bahasa dan sastra Jawa di Jawa Timur dengan menampung aspirasi peserta dan stakeholders yang dikemas dalam rekomendasi., mengingat Masalah kebahasaan dan kesastraan tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya dan jati diri bangsa ;

- Sinkronisasi pendapat dan pemikiran tentang Kongres Bahasa Jawa (KBJ) VI juga menginventarisir permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala yang akan dibahas pada kongres yang akan datang sehingga permasalahan-permasalahan maupun kendala-kendala dapat teratasi.

1. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata

- Daerah segera menyusun RIPPDA sebagaimana dimanatakan dalam UU 10/2009 ttg UU Kepariwisata sebagai dasar untuk menyusun rencana aksi pariwisata.
- Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah agar melakukan pendekatan/komunikasi kepada para Ulama bahwa Pariwisata bukan sesuatu hal yang tabu, namun pariwisata dapat meningkatkan PAD Daerah serta kesejahteraan masyarakat. Yaitu dengan membentuk Forum Komunikasi Perdaerah yang akan dimotori oleh Ponpok Pesantren yang Moderat atau Ketua PHRI Setempat.
- Sosialisasi Kepada Semua Stakeholder akan pentingnya Sertifikasi Tenaga Kerja .
- Daerah agar mengalokasikan dana untuk melakukan sertifikasi Tenaga Kerja khususnya di Sektor Pariwisata Di Daerahnya Masing.
- Fasilitasi Pengembangan Wisata Di Kawasan Agropolitan Selingkar Wilis.
- Adanya kerjasama antar daerah dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- Daerah segera menyusun RIPPDA.

20.9. BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROV JATIM

a. Tujuan

Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kehumasan dan Keprotokolan.

b. Sasaran dan Program

Tabel realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

No	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas layanan Informasi Gubernur, Wagub dan Sekda Provinsi Jawa Timur dan Masyarakat umum	Proses Monitoring Berita Media Cetak Tentang Isu Aktual Pemprov Jatim yang ditindaklanjuti	66,94	68,9	2,93
		Indeks Kepuasan Pengunjung Website Portal Berita Biro Humas dan Protokol	97,75	98,74	1,01
		Prosentase Berita Kebijakan dan Kegiatan Gubernur, Wagub, Sekda yang dimuat Media	95,63	97,58	2,04
		Indeks Kepuasan SKPD, Kab/Kota dan Provinsi Penerima Produk Informasi.	97,18	98,17	1,02
	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Prosentase tersebarluasnya informasi kehumasan dan keprotokolan	100	100	-
	Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi	Prosentase tersebar luasnya informasi ke masyarakat	100	100	-
2	Meningkatkan kualitas Keprotokolan dan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara.	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan SKPD Penerima Layanan Keprotokolan	87,12	89,81	3,09
	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Prosentase Cakupan Layanan Keprotokolan	100	100	-

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 dengan sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas layanan Informasi Gubernur, Wagub dan Sekda Provinsi Jawa Timur dan Masyarakat umum.

- Proses Monitoring Berita Media Cetak Tentang Isu Aktual Pemprov Jatim yang ditindaklanjuti, mengalami peningkatan sebesar 1,96 %.
- Indeks Kepuasan Pengunjung Website Portal Berita Biro Humas dan Protokol, mengalami peningkatan sebesar 0,99 %.
- Prosentase Berita Kebijakan dan Kegiatan Gubernur, Wagub, Sekda yang dimuat Media, mengalami peningkatan sebesar 1,95 %.
- Indeks Kepuasan SKPD, Kab/Kota dan Provinsi Penerima Produk Informasi mengalami peningkatan sebesar 0,99 %.

Sasaran 2: Meningkatkan kualitas Keprotokolan dan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Negara.

- Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan SKPD Penerima Layanan Keprotokolan, mengalami peningkatan sebesar 2,69 %.

c. Program

1. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi dengan anggaran Rp. 3.100.158.650,-, Realisasi sebesar Rp. 2.641.975.220 atau 85,22 % untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
2. Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi, dengan anggaran Rp. 9.398.050.600,-, Realisasi sebesar Rp. 9.176.338.940 atau 97,64 % untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

3. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan, dengan anggaran Rp. 4.600.158.650,- Realisasi sebesar Rp. 4.331.226.896,- atau 94,15 % untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yaitu :

- Informasi-informasi positif tentang Jawa Timur belum semuanya terpublikasi di media massa cetak baik harian maupun mingguan.
- Belum semua media massa khususnya media on line memuat siaran pers yang dikeluarkan Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim.
- Adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah daerah dengan insan pers terhadap esensi pemberitaan yang positif dan negative, terkait kebijakan redaksi.
- Kunjungan Kerja Pejabat negara, Pejabat pemerintah dan Tamu Negara di Jawa Timur frekwensinya sangat tinggi dan kurang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga terjadi miss komunikasi dalam rangka pelayanan keprotokolannya yang berdampak terhadap kualitas pelayanan dan terkesan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kurang tanggap dalam memberikan pelayanan.
- Personil Protokol yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas sehingga apabila ada kegiatan yang penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersamaan baik yang dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda atau Tamu Pemerintah tidak terpenuhi unsur keprotokolannya.
- Tingginya kegiatan Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan oleh SKPD yang mengundang Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekda waktunya hampir bersamaan, sehingga sangat kesulitan dalam pembuatan undangan resmi termasuk mengedarkan undangan resmi karena waktu dan petugas terbatas.

Selama ini sudah menerapkan “satu Pintu” dalam pembuatan undangan resmi terutama yang menghadirkan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekda.

Solusi :

- Mengirimkan siaran pers ke seluruh media massa dan memperluas jangkauan penyebaran informasi melalui media on line dan media sosial.
- Melakukan Up date informasi secara rutin melalui website.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jumpa pers dan memesan ruang pemberitaan di media massa berupa public ekspose serta menyediakan ruangan khusus berupa Press Room untuk aktivitas insan pers di lingkungan Kantor Gubernur dan Gedung Negara Grahadi.
- Komunikasi ditingkatkan baik secara formal dengan mengadakan rapat koordinasi bersama dan informal dengan cara komunikasi secara langsung dengan penyelenggara kegiatan kunjungan kerja sehingga dapat terkomunikasikan hal-hal yang dibutuhkan serta dalam rangka kelancaran kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tamu Negara.
- Penambahan staf Protokol dengan mengajukan penambahan pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekda Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh SKPD wajib berkoordinasi dengan Biro Humas dan Protokol terutama terkait dengan tanggal pelaksanaan acara sehingga dalam rangka pembuatan undangan resmi tidak terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam mengundang atau pengiriman undangannya.

20.10. BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran didukung dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur;
- Mewujudkan akuntabilitas pemerintahan melalui tatalaksana pemerintahan yang efektif, efisien dan terukur menuju pelayanan publik yang prima.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase kelembagaan Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran	79,31%	71,43 %	- 0.9 %
Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase kelembagaan Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran	79,31%	71,43 %	- 0.9 %
II. Meningkatnya kesesuaian kompetensi aparatur dengan jabatan disertai peningkatan mutu pelayanan kepegawaian di lingkungan Setda. Prov. Jatim	Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab./ Kota dan SKPD Provinsi	36%	47%	30.55 %
Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur	Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab./ Kota dan SKPD Provinsi	36%	47%	30.55 %
III. Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan	100%	100%	-
	Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP dan menerapkan pelayanan prima	49%	55%	12.24%
Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menerapkan ketatalaksanaan	100%	100%	-

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
	pemerintahan sesuai ketentuan 2. Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP dan menerapkan pelayanan prima	49%	55%	12.24%
IV. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja	Persentase SAKIP Kab./ Kota yang berpredikat B (Baik)	26,31%	50%	90.04 %
	Persentase SAKIP SKPD Provinsi yang berpredikat A (sangat baik)	42,37%	59%	39.24 %
	Persentase SKPD Provinsi dan SKPD Kab./ Kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)	18%	18%	-
Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Persentase SAKIP Kab./ Kota yang berpredikat B (Baik)	26,31%	50%	90.04 %
	2. Persentase SAKIP SKPD Provinsi yang berpredikat A (sangat baik)	42,37%	59%	39.24 %
	3. Persentase SKPD Provinsi dan SKPD Kab./ Kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)	18%	18%	-

Berikut adalah Evaluasi terhadap kinerja Tahun 2015 dan 2016 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur:

Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

- Persentase kelembagaan Kab/Kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
Kelembagaan Kab/Kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran pada Tahun 2015 adalah sebesar 79,31% dan pada Tahun 2016 sebesar 71,43%. Realisasi kinerja tersebut mengalami penurunan dikarenakan beberapa hal. Pada tahun 2016, terjadi penataan kelembagaan dengan menggunakan dasar perundangan yang baru yaitu PP 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah. PP 18 Tahun 2016 ini mengacu pada Undang-Undang pengganti UU 32 Tahun 2004 yaitu UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terjadi perubahan yang signifikan dalam penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2016 di antaranya pembagian kewenangan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab. /kota serta diberlakukannya penetapan tipologi pada perangkat daerah. Atas dasar itulah maka Provinsi Jawa Timur melakukan penataan terhadap kelembagaan perangkat daerah yang ada. Selama tahun 2016 telah dilakukan perombakan terhadap sebagian besar perangkat daerah yang telah ada dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru. Dari keseluruhan perangkat daerah tersebut, terdapat beberapa perangkat daerah yang belum selesai ditata karena masih menunggu petunjuk teknisnya. Karena itulah realisasi kinerja pada tahun 2016 hanya mencapai 71,43%. Realisasi kinerja tahun 2016 ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan terdapat perubahan mendasar yaitu perubahan dasar hukum yang menjadi landasan dilakukannya penataan kelembagaan.

Sasaran 2: Meningkatnya kesesuaian kompetensi aparatur dengan jabatan

- Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab./Kota dan SKPD Provinsi

Komposisi aparatur yang sesuai standar pada Kab./ Kota dan SKPD Provinsi pada Tahun 2015 adalah sebesar 36% dan pada Tahun 2016 sebesar 47%. Realisasi kinerja tersebut mengalami peningkatan dikarenakan telah dimanfaatkannya aplikasi dalam penyusunan Analisis Jabatan. Aplikasi tersebut bisa diakses melalui e-anjab.jatimprov.go.id.

Sasaran 3: Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan public

- Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan
Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan pada Tahun 2015 adalah sebesar 100% dan pada Tahun 2016 sebesar 100%. Realisasi kinerja tersebut tidak mengalami peningkatan/penurunan dikarenakan bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan ketatalaksanaan pemerintah diharapkan seluruh SKPD dan Kab./ Kota se- Jawa Timur telah melaksanakan dan menerapkan ketatalaksanaan Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

- Persentase Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP dan menerapkan pelayanan prima
Kab./ Kota dan SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP dan menerapkan pelayanan prima pada Tahun 2015 adalah sebesar 49% dan pada Tahun 2016 sebesar 55%. Realisasi kinerja tersebut mengalami peningkatan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - Telah dilakukan sosialisasi penyusunan SOP untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
 - Dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP.Dimana kedua hal tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya.

Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

- Persentase SAKIP Kab./ Kota yang berpredikat > B (Baik)
Hasil evaluasi SAKIP Kab./Kota di Jawa Timur yang berpredikat > Baik (B) pada Tahun 2015 adalah sebesar 26.31% dan pada

Tahun 2016 sebesar 50% atau mengalami peningkatan sebesar 23.69%. Realisasi Tahun 2016 tersebut merupakan hasil final setelah penyerahan penghargaan atas Implementasi SAKIP Kab./Kota oleh Kementerian PAN dan RB yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2017. Adapun rincian hasil dimaksud sebagai berikut:

- Predikat A sebanyak 1 Kab./Kota;
 - Predikat BB sebanyak 2 Kab./Kota;
 - Predikat B sebanyak 16 Kab./Kota;
 - Predikat CC sebanyak 16 Kab./Kota;
 - Predikat C sebanyak 3 Kab./Kota.
- Persentase SAKIP SKPD Provinsi yang berpredikat A (sangat baik) Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD Provinsi yang memiliki predikat A pada Tahun 2015 adalah sebesar 42,37% atau 25 SKPD. Pada **Tahun 2016 sebesar 59% atau 42 SKPD mengalami peningkatan sebesar 16.63% (17 SKPD)**. Kriteria pengkategorian yang dipakai adalah berdasarkan peraturan yang baru, yaitu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan sudah semakin banyaknya SKPD yang mampu mengimplementasikan SAKIP dengan baik. Bappeda dan Inspektorat juga telah sangat berperan terhadap kenaikan yang cukup signifikan tersebut. Adapun yang menjadi objek evaluasi SAKIP Tahun 2016 ini adalah sebanyak 71 entitas kerja yang terdiri atas 59 SKPD dan 12 UPT BLUD Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:
- Predikat A sebanyak 42 SKPD;
 - Predikat BB sebanyak 15 SKPD;
 - Predikat B sebanyak 14 SKPD.

- Persentase SKPD Provinsi dan SKPD Kab./ Kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)

SKPD Provinsi dan SKPD Kab./ Kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK) adalah sebesar 18%. Angka tersebut masih sama (tidak mengalami peningkatan/penurunan) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan prioritas pembangunan pada Biro Organisasi, yaitu meniadakan Gelar Budaya Kerja yang biasanya merupakan salah satu *event* yang diselenggarakan setiap tahun. Rencana Tahun 2017, akan dilakukan perubahan terhadap system penentuan KBK terbaik, yaitu dengan dilakukan seleksi terlebih dahulu.

c. Program

1. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, dengan anggaran Rp. 3.044.590.000 dan realisasi Rp. 2.916.682.741 atau 95,80% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matriks 16 kolom.
2. Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur, dengan anggaran Rp. 1.044.434.950 dan realisasi Rp. 1.037.355.110 atau 99,32% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matriks 16 kolom.
3. Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp. 1.200.000.000 dan realisasi Rp. 1.188.650.540 atau 99,05% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matriks 16 kolom.
4. Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan anggaran Rp. 2.602.036.400 dan realisasi Rp. 2.526.526.980 atau 97,10% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matriks 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- Implementasi SAKIP pada beberapa Kabupaten/Kota masih stagnan, belum ada perkembangan. Hal tersebut dikarenakan SAKIP tidak menjadi perhatian oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah dan SKPD di lingkungan pemerintah daerah tersebut belum menyadari pentingnya implementasi SAKIP dan masih banyak Kepala Daerah yang belum memahami sepenuhnya bagaimana cara melakukan sinkronisasi antara janji politik dengan dokumen RPJMD.

Solusi:

- Perlu asistensi dan fasilitasi yang lebih intens kepada Kabupaten/ Kota.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Berikut ini adalah daftar penghargaan nasional yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas peran dari Biro Organisasi:

- Anugrah Predikat Kepatuhan Tertinggi terhadap Standar Pelayanan Publik Menurut UU No. 25/2009 dengan nilai 99.76. Penghargaan diberikan oleh Ketua Ombudsman RI di Jakarta.
- TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik.

20.11 BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pengurusan surat yang lebih cepat dan mudah, meningkatkan kualitas pelayanan di bidang berita sandi serta penertiban administrasi aset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

NO.	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
1.	Meningkatnya layanan surat online system, operasional sarana sanditel dan tertib administrasi pengelolaan barang setda	Nilai IKM dibidang arsip ekspedisi dan Sanditel	79,35 IKM	80,40 IKM	1,32%
2.	Program dukungan pelayanan umum	Persentase kesesuaian aset antara pencatatan dan kondisi aktual	100 %	100 %	-

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Biro Umum yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya layanan surat online system, operasional sarana sanditel dan tertib administrasi pengelolaan barang Setda.

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan di Bidang Ekspedisi dan Sanditel;
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan di Bidang Ekspedisi dan Sanditel Tahun 2015 adalah sebesar 79,35 dan pada Tahun 2016 sebesar 80,40. Dapat dilihat dari data IKM pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan sebesar 1.32 hal ini dikarenakan sistem E-SMS berbasis Web belum maksimal dalam hal penggunaannya.

c. Program

1. **Program Dukungan Pelayanan Umum**, dengan anggaran sebesar Rp. 369.500.000,00 dan Realisasi sebesar Rp. 340.503.990,00 atau 92,15% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Sistem E-SMS berbasis web ini masih belum maksimal penggunaannya
- Ada beberapa operator E-SMS/Sekpri di setiap ruangan pimpinan dan staf Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang belum membiasakan diri dengan keberadaan program ini
- Ketepatan dan kecepatan waktu distribusi surat
- Kenyamanan fasilitas yang perlu diperbaiki (kebersihan ruang kerja atau kamar mandi/toilet, atap ruangan yang bocor, dan lift sering macet)

Solusi :

- Dilakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Manajemen Surat Berbasis Web yang rutin terhadap para operator E-SMS di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Diadakan pelatihan untuk pengoperasian untuk E-SMS berbasis web bagi operator baru.
- Peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku baik pemberi layanan maupun penerima layanan.
- Perlu adanya petugas khusus bagi telepon pengaduan Biro Umum kode 1499, sehingga apabila ada pengaduan bisa segera di atasi.

20.12 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATO R	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	71,23	75,89	6,54
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD	71,23	75,89	6,54

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 :

Pada Tahun 2015 - 2016 kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015 adalah sebesar 71,23 dan pada tahun 2016 sebesar 75,89 (mengalami peningkatan sebesar 6,54 %). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2014 terdapat 13 unsur pelayanan yang digunakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur beberapa

indikator pengukuran yang digunakan dalam penilaian tersebut didapatkan dari akumulatif penilaian kepuasan DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Bagian. Kenaikan nilai IKM sebesar 6,54 % tersebut didukung oleh peningkatan kinerja dan pelayanan dari staf Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil IKM yang lalu (tahun 2015). Upaya peningkatan kualitas layanan dilaksanakan pada semua unsur di semua lini Bagian.

c. Program

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan anggaran setelah perubahan APBD Rp. 90.665.034.025,00. Realisasi Rp. 82.128.690.111,00 atau 90,56%. Yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum sepenuhnya optimal
- Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- Struktur organisasi sekretariat DPRD yang belum sesuai dengan fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja DPRD
- Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan target kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur karena hanya berfungsi memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur sehingga bertambah atau menurunnya target kinerja DPRD dalam hal ini Peraturan Daerah sebagaimana RPJMD tahun 2014-2019 yang dihasilkan tiap tahunnya bukan menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.

Solusi:

- Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan bimbingan teknis.
- Meningkatkan komitmen dalam penyelesaian tugas personal dan lainnya, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan kinerja dewan secara optimal.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
- Optimalisasikan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

e. Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

- Piagam Penghargaan sebagai Stand dengan predikat Memuaskan dalam mengikuti Gelar Pameran Pelayanan Publik dan Gelar Budaya Kerja Jawa Timur Tahun 2011 di Kota Madiun;
- Sertifikat ISO 9001:2008 tahun 2012 dari Lembaga VNZ atas pelayanan administrasi dan sekretariat di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur;
- Piagam Penghargaan Khusus dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai Lembaga Pendorong Implementasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Timur tahun 2013;
- Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dengan predikat nilai "B Plus";
- Piagam Penghargaan sebagai Stand Terbaik Kategori SKPD Provinsi Jawa Timur dalam mengikuti Gelar Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur Tahun 2013 di Surabaya;
- Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dengan predikat nilai "A".

20.13. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Tujuan

- Meningkatkan hasil litbang serta kajian yang implementatif dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders;
- Meningkatkan pelaksanaan diseminasi hasil litbang serta kajian;
- Meningkatkan pelaksanaan pendampingan SIDA Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya hasil litbang serta kajian yang implementatif dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders	1. Jumlah dokumen/buku laporan hasil litbang serta kajian (dokumen)	98	72	-27
	2. Prosentase hasil litbang serta kajian yang dimanfaatkan stakeholders (%)	26	67	158
1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Jumlah dokumen/buku laporan hasil litbang serta kajian (dokumen)	98	72	-27
	2. Prosentase hasil litbang serta kajian yang dimanfaatkan stakeholders (%)	26	67	158
II. Meningkatnya pelaksanaan diseminasi hasil litbang serta kajian	Prosentase hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan langsung ke masyarakat dan melalui media (%)	44,33	76	72
1. Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Kajian	Prosentase hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan langsung ke masyarakat dan melalui media (%)	44,33	76	72
III. Meningkatnya pelaksanaan pendampingan SIDA Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Prosentase Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah melakukan inisiasi dan pengembangan SIDA (%)	24	18	-25

SASARAN	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Program Pendampingan SIDA Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Prosentase Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah melakukan inisiasi dan pengembangan SIDA (%)	24	18	-25

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya hasil litbang serta kajian yang implementatif dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders

- Jumlah dokumen/buku laporan hasil litbang serta kajian (dokumen);

Jumlah dokumen/buku laporan hasil litbang serta kajian pada tahun 2015 adalah sebanyak 98 dokumen dan pada tahun 2016 sebanyak 72 dokumen. Jumlah dokumen hasil litbang mengalami penurunan sebesar 27% karena disebabkan adanya pengurangan anggaran yang signifikan untuk melakukan kegiatan kelitbangan.

- Prosentase hasil litbang serta kajian yang dimanfaatkan stakeholders;

Prosentase hasil litbang serta kajian yang dimanfaatkan stakeholders pada tahun 2015 adalah sebesar 26% dan pada tahun 2016 sebesar 67%. Prosentase hasil litbang serta kajian yang dimanfaatkan stakeholders mengalami peningkatan sebesar 158% karena Balitbang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program yang lebih intensif dengan stakeholder terkait.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelaksanaan diseminasi hasil litbang serta kajian didukung oleh 1 program yaitu:

- Prosentase hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan langsung ke masyarakat dan melalui media (buletin, jurnal, dan website)

Prosentase hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan langsung ke masyarakat dan melalui media pada tahun 2015 sebesar 44,33% dan pada tahun 2016 sebesar 76%. Terdapat peningkatan hasil litbang serta kajian yang didiseminasikan langsung ke masyarakat dan melalui media sebesar 72% yang disebabkan oleh peningkatan kesadaran peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya kedalam jurnal ilmiah. Selain itu juga disebabkan oleh semakin banyaknya kesempatan yang diberikan oleh Balitbang untuk mempublikasikan hasil litbang melalui media bulletin dan website Balitbang.

Sasaran 3 : Meningkatnya pelaksanaan pendampingan SIDA Kabupaten/Kota di Jawa Timur

- Prosentase Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah melakukan inisiasi dan pengembangan SIDA

Prosentase Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah melakukan inisiasi dan pengembangan SIDA pada tahun 2015 sebanyak 24 % dan pada tahun 2016 sebanyak 18%. Terdapat penurunan Prosentase Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang telah melakukan inisiasi dan pengembangan SIDA pada tahun 2016 disebabkan oleh adanya pengurangan anggaran untuk melakukan pendampingan SIDA Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

c. Program

1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan anggaran Rp.13.484.682.135 Realisasi sebesar Rp. 13.429.546.616 atau 99,59% untuk mendukung 13 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran Rp. 930.322.650 Realisasi sebesar Rp. 929.490.350 atau 99,91% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

3. Program Pendampingan SIDA Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan anggaran Rp. 223.209.356 Realisasi sebesar Rp. 222.114.550 atau 99,51% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program antar stakeholder;
2. Belum banyak hasil-hasil penelitian yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh stakeholder maupun sebagai perencanaan dan kebijakan;
3. Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara lembaga riset dengan kebutuhan pengguna;
4. Kurang adanya rasa percaya masyarakat maupun stakeholder terhadap hasil litbang.

Solusi:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait baik dalam menentukan tema kegiatan litbang maupun dalam pemanfaatan hasil litbang;
2. Meningkatkan diseminasi & sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian kepada stakeholder dalam rangka mempublikasikan kepada masyarakat luas baik melalui website, jurnal dan buletin;
3. Mempertajam/meningkatkan kualitas hasil penelitian melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi atau dengan para pakar;
4. Menciptakan inovasi-inovasi IPTEK secara profesional dan menjaga citra hubungan yang konsisten dengan kebutuhan pengguna;
5. Meningkatkan sinergi antar lembaga litbang dan instansi terkait melalui Rapat Koordinasi litbang, kerjasama litbang, Forum Komunikasi kelitbangan, Seminar, Diskusi, Lokakarya atau Workshop;
6. Membangun image kepada masyarakat bahwa pengembangan Hasil Litbang/IPTEK adalah suatu kebutuhan.

20.14 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	75%	75%	-
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	75%	75%	-
II. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/PKS	100 orang	110 orang	10%
	Jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan	2 buah	2 buah	-
	Penilaian WBK/WBBM	3 OPD	0 OPD	-100%
1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/PKS	100 orang	110 orang	10%
2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan	2 buah	2 buah	-
3. Program Pencegahan Korupsi	Penilaian WBK/WBBM	3 OPD	0 OPD	-100%
III. Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur	WTP	WTP	-

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur	WTP	WTP	-

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Pada tahun 2105-2016 kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur.

- Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada tahun 2015 sebesar 75% dan pada tahun 2016 sebesar 75%. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2016 dapat mencapai target, hal ini didukung dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan OPD terperiksa, karena telah tuntasnya tindaklanjut rekomendasi temuan APIP, dan OPD telah memperbaiki kekurangannya sehingga kedepan tidak terulang lagi.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah

- Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/PKS
Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/PKS pada tahun 2015 sebanyak 100 orang dan pada tahun 2016 sebesar 110 orang, mengalami peningkatan sebanyak 10%. Hal ni sangat dipengaruhi oleh aparatur sekretariat yang selalu memfasilitasi APIP dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pengawasan maupun bidang teknologi informasi.

- Jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan

Jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan pada tahun 2015 sebanyak 2 dokumen dan pada tahun 2016 sebesar 2 dokumen, sesuai dengan target pada Renstra. Dengan hasil ini berarti Inspektorat Provinsi Jawa Timur berhasil mempertahankan jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan dengan nilai maksimal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh aparatur yang memahami pentingnya dalam pembuatan prosedur dan kebijakan pengawasan dalam menjalankan tupoksinya sebagai APIP, sehingga dokumen kebijakan pengawasan perlu diperbarui setiap tahunnya.

- Penilaian WBK/WBBM

Jumlah OPD/Unit Kerja yang dicanangkan menjadi WBK/WBBM pada tahun 2015 sebanyak 3 OPD sedangkan pada tahun 2016 tidak ada pencanangan karena Inspektorat Provinsi Jawa Timur lebih berkonsentrasi pada proses membangun OPD/Unit kerja yang sudah dicanangkan untuk diajukan mendapatkan predikat WBK/WBBM. Pada Tahun 2017 Inspektorat Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan Penilaian Mandiri terhadap proses pembangunan Zona Integritas pada tiga instansi yang sudah dicanangkan, selanjutnya hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) dilaporkan kepada Pimpinan Instansi untuk diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB guna dilakukan Reviu oleh Tim Penilai Nasional (TPN) sehingga bila nilainya mencukupi bisa segera ditetapkan sebagai instansi dengan predikat WBK/WBBM.

Sasaran 3 : Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur

Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh BPK-RI. Perolehan opini tidak mutlak bahwa pelaksanaan pengelolaan sudah baik, namun masih banyaknya kelemahan yang harus diperbaiki sehingga tidak ada lagi temuan yang masih berulang pada temuan Sistem Pengendalian Intern atau Kepatuhan Perundang – Undangan dalam pengelolaan keuangan di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur

c. Program

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan anggaran Rp1.591.490.000,00. Realisasi sebesar Rp1.504.981.905,00 atau 94,56% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom;
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran Rp557.763.000,00. Realisasi sebesar Rp553.270.400,00 atau 99,19% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom;
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan anggaran Rp100.890.000,00. Realisasi sebesar Rp96.095.450,00 atau 95,25% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom;

4. Program Pencegahan Korupsi dengan anggaran Rp346.980.000,00. Realisasi sebesar Rp315.169.600,00 atau 90,83% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom;
5. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dengan anggaran Rp13.541.861.025,00. Realisasi sebesar Rp.13.398.339.617,00 atau 98,94% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom;

d. Permasalahan dan Solusi :

Permasalahan :

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Timur masih terdapat beberapa permasalahan yaitu :

- Kompetensi Sumber Daya Aparat Pengawasan terbatas dan belum ada peningkatan yang signifikan. Di sisi lain PNS yang memiliki keahlian pemeriksaan bidang keuangan memasuki masa purna tugas sedangkan SDM yang ada lebih banyak merupakan tenaga administratif yang masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi auditor yang kompeten dibidangnya.
- Proses penyelesaian LHP yang lamban. Telah dilakukan pengarahan sebelum pemeriksaan serta paparan hasil pemeriksaan oleh tim yaitu anggota, ketua, pengendali teknis dan penanggungjawab. Namun dalam penulisan laporan termasuk tahap revisi belum tepat waktu. Hal ini sangat berpengaruh pada proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Auditor dituntut untuk menguasai berbagai bidang pemeriksaan seperti Bansos/hibah terkait bangunan, dan pemeriksaan keuangan, sedangkan Jumlah Auditor yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan dan teknik sipil tidak banyak, sedangkan jumlah obyek pemeriksaan dari OPD dan UPT mencapai kurang lebih 250. Diperlukan banyak tenaga auditor yang menguasai di bidang keuangan dan teknik sipil.

- Penyusunan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kelambatan dalam penyusunan kebijakan pengawasan karena menyesuaikan pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan pada awal tahun anggaran, sehingga penyusunan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kelambatan.

Solusi:

- Dilakukan Pelatihan Sendiri dengan mendatangkan Narasumber dari BPKP maupun tenaga ahli dari OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tema pada hal-hal yang sering dijumpai para auditor, dan dengan mengikutsertakan Bimtek yang diselenggarakan oleh Bandiklat BPK di Jogjakarta.
- Penulisan laporan diupayakan bersifat ringkas, jelas, dan dapat dipahami oleh Obyek Pemeriksa dalam rangka kecepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Perlu dilakukan pemerataan pengetahuan di bidang sipil dan keuangan dengan melakukan sharing ilmu antar auditor dan juga sering dilakukan bimtek terkait bidang sipil dan keuangan.
- Penyusunan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibuat dengan mendasarkan pada draf Jakwas Kementerian.

20.15. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	32,29%	35,21%	3,77
	2. Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor	45,56%	78,94%	73,27
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,99	87,28	-1,96
	4. Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang Menerapkan SMM ISO 9001 :2008	2	3	150
	5. Jumlah Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	51,93%	53,89%*)	3,77

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Selama kurun waktu 2015-2016 kinerja Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pengolaan Pendapatan Asli daerah yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik

➤ Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan PAD

Tingkat Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2015 tercapai sebesar 32,29%, sedangkan pada tahun 2016 tercapai sebesar 35,21%, mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kenaikan penerimaan PAD

periode 2014-2015, hal ini disebabkan karena kinerja penerimaan Pajak Daerah yang cukup baik khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan penerimaan dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lebih kecil apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2015, hal ini disebabkan karena harga jual BBM tahun 2016 lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga jual BBM tahun 2015.

➤ **Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor**

Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor, pada tahun 2015 kinerja pencairan piutang tahun tetap 2013 adalah sebesar 45,56% sedangkan pencairan piutang sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 78,94%, kinerja tersebut merupakan kinerja kumulatif, artinya pada tahun 2016 persentase piutang pajak kendaraan bermotor tahun tetap 2013 yang telah dicairkan adalah sebesar 33,38%. Kinerja positif pencairan piutang pajak kendaraan bermotor salah satunya disumbang oleh upaya penagihan secara *door to door* oleh petugas pajak dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan secara gencar kepada masyarakat melalui berbagai media. Sebagai catatan data pencairan piutang tersebut adalah data *unaudited* dengan periode sampai dengan bulan November 2016.

➤ **Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2015 perolehan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat hasil survey pada 48 KB samsat di Jawa Timur adalah sebesar 88,99. Sedangkan pada tahun 2016 perolehan nilai Survey

Kepuasan Masyarakat hanya mencapai 87,28 atau turun 1,71. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 dilakukan perubahan metode penilaian kepuasan masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga berpengaruh kepada besaran skor maksimal yang dapat dicapai.

- Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang Menerapkan SMM ISO 9001 :2008

Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang Menerapkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008, pada tahun 2015 diperoleh dua sertifikasi ISO untuk ruang lingkup layanan baru dan pada tahun 2016 diperoleh tiga sertifikasi ISO untuk ruang lingkup layanan baru. Pengajuan sertifikasi ISO tersebut akan dilakukan pada setiap ruang lingkup layanan baru untuk menjamin kesamaan prosedur dalam pemberian layanan pada seluruh KB Samsat di Jawa Timur.

- Jumlah Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan

Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan, pada tahun 2015 diperoleh data pengguna layanan samsat unggulan sebesar 51,93% dan kemudian meningkat menjadi 53,89% pada tahun 2016. Peningkatan jumlah pengguna layanan samsat unggulan disebabkan karena adanya penambahan jenis dan jumlah layanan samsat unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur, untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengembangan layanan samsat unggulan tersebut direspon dengan baik oleh masyarakat karena layanan tersebut semakin dekat kepada masyarakat.

c. Program

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, pagu anggaran Rp 41.276.251.300,00 sampai dengan triwulan IV tahun 2016 dapat direalisasikan sebesar Rp 38.651.403.661,84 atau 93,64% untuk mendukung 49 kegiatan yang secara rinci masing-masing realiasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Penghitungan dan penetapan target Pendapatan Asli Daerah, khususnya sektor Pajak Daerah, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal diantaranya adalah dinamika kondisi perekonomian nasional, kebijakan regulasi dan anggaran Pemerintah. Setiap perubahan asumsi direspon sangat cepat oleh pasar dan masyarakat, sehingga kebijakan penetapan target Pendapatan Asli Daerah lebih mengedepankan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, ketimbang mengejar tingkat pertumbuhan secara progresif;
- Fluktuasi harga jual Bahan Bakar Minyak yang ditentukan oleh Pemerintah, sepanjang tahun 2016 sebanyak 6 (enam) kali, membuat harga jual BBM tahun 2016 secara akumulatif lebih rendah 3,33% apabila dibandingkan dengan harga jual BBM pada tahun 2015. Turunnya harga jual BBM sangat berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2015, meskipun volume penjualannya meningkat;
- Pergeseran minat masyarakat kelas menengah terhadap varian kendaraan bermotor baru baik roda dua maupun roda empat, berpengaruh kepada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dapat terealisasi sebesar 112,44%, meskipun secara kumulatif volume penjualan kendaraan bermotor baru R2 & R4 di Jawa Timur lebih kecil 4,29% apabila dibandingkan dengan tahun 2015;

- Rencana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang menaikkan tarif pengurusan surat-surat kendaraan, mendorong masyarakat untuk melakukan penul 5 tahunan lebih awal (sebelum 7 Januari 2017), untuk menghindari kenaikan tarif PNBP. Kedepan pada saat peraturan tersebut berlaku akan berpotensi untuk mempengaruhi penerimaan PKB dan BBN II;
- Realisasi belanja langsung tidak dapat dilakukan secara maksimal, hal ini disebabkan antara lain karena pembatalan beberapa kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, serta sisa hasil lelang pengadaan barang/jasa yang nilainya cukup besar.

Solusi :

- Melakukan pembaharuan penghitungan target Pendapatan Asli Daerah tahun berikutnya, dengan memperhatikan kondisi yang mempengaruhi penerimaan penerimaan Pajak Daerah pada triwulan IV tahun 2016;
- Mengembangkan kerjasama dengan pihak Swasta/BUMN untuk menyelenggarakan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran tambahan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya;
- Melakukan tinjauan ulang secara cermat atas pelaksanaan belanja kegiatan yang tidak optimal, untuk dijadikan dasar dalam rencana penganggaran kebutuhan belanja kegiatan tahun berikutnya.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Penghargaan Nasional Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nomor 32 kategori Provinsi, Untuk Layanan Samsat On The Spot (SMS) Kantor Bersama Samsat Karangploso.

20.16. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

a. Tujuan

- Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Optimalisasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur	1. Jumlah rumusan kebijakan kuantansi	1 rumusan	1 rumusan	-
	2. Jumlah perda dan pergub tentang APBD	1 perda dan pergub	1 perda dan pergub	-
	3. Jumlah perda dan pergub tentang Perubahan APBD	1 perda dan pergub	1 perda dan pergub	-
	4. Jumlah perda dan pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 perda dan pergub	1 perda dan pergub	-
	5. Data BMD yang akurat untuk penyusunan neraca	72 SKPD	72 SKPD	-
	6. SPP gaji SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi	63 SKPD	63 SKPD	-
	7. Jumlah SKPD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan aset daerah	74 SKPD	74 SKPD	-
	8. Konsistensi pembebanan belanja SKPD sesuai dengan pagu anggaran dan kas belanja	74 SKPD	74 SKPD	-
	9. Jumlah dokumen perikatan sewa menyewa dan proses penghapusan barang milik daerah	50 dokumen	66 dokumen	32
	10. Jumlah sertifikat aset tetap tanah	72 sertifikat	77 sertifikat	6,9

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
	11. Jumlah sumber daya aparatur pada SKPD yang memahami pengelolaan keuangan daerah	655 orang	1292 orang	97.25
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota se Jawa Timur	1. Evaluasi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jawa Timur	38 kab/kota	38 kab/kota	-
	2. Evaluasi raperda dan raper KDH Kab/Kota se Jawa Timur	38 kab/kota	38 kab/kota	-

Evaluasi Terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 Dan Tahun 2016 :

Pada tahun 2015-2016 kinerja bidang akuntansi yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur

➤ Jumlah rumusan kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi ditargetkan sebanyak 1 (satu) rumusan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) rumusan yaitu kebijakan akuntansi pemerintah daerah provinsi Jawa Timur dan kebijakan akuntansi terkait dengan pedoman teknis menjurnal dan memposting.

- Menjurnal adalah proses mencatat transaksi-transaksi ke dalam buku jurnal. Memposting adalah proses merekapitulasi transaksi-transaksi untuk tiap rekening dari buku jurnal ke buku besar;
- Setiap satu transaksi keuangan diberi satu nomor jurnal. Jika satu transaksi keuangan terdiri dari sepasang jurnal (jurnal LO dan jurnal LRA), maka sepasang jurnal tersebut dinyatakan dalam satu nomor;
- Nama bukti dan nomor bukti transaksi sesuai dengan dokumen sumber yang digunakan untuk transaksi tunggal dan catatan sumber yang digunakan untuk kumpulan transaksi yang sama dan terjadi pada

hari yang sama (antara lain berbentuk rekapitulasi penerimaan harian dan BAP *stock opname*).

➤ Jumlah perda dan pergub tentang APBD

Pada Tahun 2016 telah disusun 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 1 (satu) Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD, dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

- Ringkasan penjabaran APBD;
- Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rancangan peraturan gubernur tentang APBD memuat penjelasan sebagai berikut :

- Dasar hukum, target atau volume yang direncanakan, tarif pungutan untuk pendapatan;
- Satuan volume, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan untuk belanja;
- Sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk jenis pembiayaan.

Rancangan perda tentang APBD dan rancangan pergub tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD kepada Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

➤ Jumlah perda dan pergub tentang Perubahan APBD

Pada Tahun 2016 telah disusun 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) dan 1 (satu) Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Perubahan APBD. Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

- Ringkasan perubahan APBD;
- Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rancangan peraturan gubernur tentang perubahan APBD memuat penjelasan sebagai berikut :

- Ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
- Penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan pergub tentang penjabaran perubahan APBD yang telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD dilakukan paling lambat minggu kedua bulan september tahun anggaran berjalan. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD kepada Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

➤ Jumlah perda dan pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pada Tahun 2016 telah disusun 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Belanja Daerah (PAPBD) dan 1

(satu) Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan perda tersebut memuat laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa oleh BPK. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui oleh DPRD, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk di evaluasi dan kemudian ditetapkan oleh Gubernur.

➤ Data BMD yang akurat untuk penyusunan neraca

Pada tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan rapat koordinasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan pengelolaan barang daerah per triwulan dengan pencocokan data barang milik daerah untuk penyusunan neraca pada 72 SKPD. Neraca tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Selain koordinasi dan rekonsiliasi, juga dilakukan penyusunan rencana dan daftar pemeliharaan, penghapusan serta pemanfaat barang milik daerah.

➤ SPP gaji SKPD dilingkungan pemerintah provinsi

Pada tahun 2015 dan 2016 BPKAD telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji untuk 63 SKPD dilingkungan pemerintah provinsi Jawa timur. Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pemahaman bendahara gaji, BPKAD mengadakan bimbingan teknis update gaji untuk 63 SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur

➤ Jumlah SKPD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan aset daerah

Pada tahun 2015 dan 2016 BPKAD melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada pengelola keuangan dan operator Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) baik untuk perencanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada 74 SKPD.

- Konsistensi pembebanan belanja SKPD sesuai pagu anggaran dan kas belanja

Pada tahun 2015 dan 2016 BPKAD memverifikasi dan meneliti konsistensi pembebanan belanja agar sesuai dengan pagu anggaran dan kas belanja untuk 74 SKPD. Penelitian itu dilakukan ketika pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penggunaan dana LS maupun ketika pengesahan surat pertanggungjawaban dana GU/TU yang diajukan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD.

- Jumlah dokumen perikatan sewa menyewa dan proses penghapusan barang milik daerah

Dokumen perikatan sewa menyewa dan penghapusan barang milik daerah pada tahun 2015 adalah sebanyak 50 dokumen dan pada tahun 2016 sebanyak 66 dokumen. Meningkatnya jumlah dokumen perikatan sewa menyewa dan penghapusan dikarenakan banyaknya usulan penghapusan dari SKPD terhadap bangunan gedung, barang inventaris kantor yang tidak dapat dipakai untuk operasional kantor dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 4 (empat). Penerbitan surat perjanjian sewa menyewa barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 16 dokumen merupakan perpanjangan dari perjanjian tahun sebelumnya dan sebagian merupakan surat perjanjian baru dengan pihak lain, surat perjanjian pinjam pakai sebanyak 36 dokumen sedangkan dokumen penghapusan berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur sebanyak 14 dokumen yang terdiri atas penghapusan bangunan gedung, barang inventaris kantor yang rusak berat dan kendaraan bermotor;

- Jumlah sertifikat aset tetap tanah

Jumlah sertifikat aset tetap tanah pada tahun 2015 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) sertifikat dan pada tahun 2016 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) sertifikat. Adanya peningkatan sebanyak 7% disebabkan adanya Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai Tahun 2011-2014 yang telah dilengkapi persyaratan dan data pendukung status kepemilikan aset, monitoring dan evaluasi terhadap kendala dan permasalahan pelaksanaan percepatan

sertifikasi serta melakukan pendampingan kepada para pengelola barang SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- Jumlah sumber daya aparatur pada SKPD yang memahami pengelolaan keuangan daerah

Sumber daya aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2015 sebanyak 655 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 1292 orang. Hal ini disebabkan karena antusiasme SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota mengajukan usulan permintaan pelatihan bagi para pengelola keuangan agar lebih paham terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Meskipun telah melampaui target, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menyelenggarakan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, diantaranya :

- Beberapa SKPD kurang tertib, disiplin dan responsif dalam menyampaikan usulan peserta pelatihan, seringkali baru disampaikan ketika pelaksanaan pelatihan sedang berlangsung, sehingga penggantian peserta tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh SKPD pengirim;
- Beberapa kali jadwal pelaksanaan kegiatan di UPT LPKD bersamaan dengan bidang-bidang dan bahkan dengan peserta yang sama.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota se Jawa Timur

- Evaluasi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jawa Timur

Evaluasi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tahun 2015 dilakukan terhadap 38 Kab/Kota dan pada tahun 2016 juga dilakukan evaluasi terhadap APBD 38 kab/kota.

Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan penyampaian Raperda/Raperkada Kab/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah dilakukan beberapa upaya antara lain:

- Menerbitkan Surat Gubernur tentang percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ;
 - Menerbitkan Surat Gubernur Jawa Timur tentang percepatan penyusunan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD agar dilakukan tepat waktu;
 - Melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan;
 - Melakukan pemantauan kepada Bupati/Walikota dan DPRD agar penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan tepat waktu.
- Evaluasi raperda dan raper KDH Kab/Kab se Jawa Timur

Evaluasi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tahun 2015 dilakukan terhadap 38 Kab/Kota dan pada tahun 2016 juga dilakukan evaluasi terhadap APBD 38 kab/kota.

Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan penyampaian Raperda/Raperkada Kab/Kota tentang APBD telah dilakukan beberapa upaya antara lain:

- Menerbitkan Surat Gubernur tentang percepatan dan teguran kepada Bupati/Walikota serta Ketua DPRD agar penyusunan APBD dilakukan tepat waktu dan agar Kepala Daerah dan/atau DPRD dikenakan sanksi administrasi yaitu tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 (enam) bulan ;
- Melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi penyusunan APBD dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan;
- Melakukan pemantauan kepada Bupati/Walikota dan DPRD agar penyusunan APBD dilakukan tepat waktu.

c. Program

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangandaerah, dengan anggaran Rp.37.461.663.000,00. Realisasi sebesar Rp.32.723.089.400,00, atau 87,35%. Untuk mendukung 11 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi

anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 4.183.909.300,00. Realisasi sebesar Rp.3.681.078.626,00 atau 87,98%. Untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Sertifikasi aset tetap tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat dipastikan jangka waktu penyelesaiannya (satu tahun anggaran), karena proses pengajuan sertifikasi harus clean dan clear sehingga memerlukan waktu dan beberapa tahapan, antara lain harus melakukan klarifikasi dengan tetangga kiri, kanan, depan serta belakang untuk memastikan tapal batas dan mengetahui proses perolehan;
2. Proses pengukuran aset tetap tanah yang akan disertifikatkan dapat dihentikan oleh BPN, apabila masih terdapat permasalahan dan/atau ada pihak-pihak yang tidak setuju dan akan dilanjutkan kembali setelah permasalahan telah diselesaikan, dengan jadwal waktu pengukuran mengacu dari BPN;
3. Terkait dengan kegiatan rapat, bimbingan teknis maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh BPKAD, seringkali antara jumlah peserta yang diusulkan SKPD berbeda dengan jumlah yang hadir pada waktu pelaksanaan pelatihan, sehingga menyulitkan dalam penyediaan akomodasi, konsumsi dan pengadministrasiannya;

4. Beberapa SKPD kurang tertib, disiplin dan responsif dalam menyampaikan usulan peserta pelatihan, seringkali baru disampaikan ketika pelaksanaan pelatihan sedang berlangsung, sehingga penggantian peserta tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh SKPD pengirim;
5. Pelaksanaan kegiatan belum optimal hal tersebut dikarenakan volume kegiatan di Internal BPKAD, sehingga beberapa kali jadwal pelaksanaan kegiatan di UPT LPKD bersamaan dengan bidang-bidang dan bahkan dengan peserta yang sama.

Solusi :

1. Upaya aktif dari SKPD, BPKAD maupun BPN untuk terus berkoordinasi dengan Notaris, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan warga sekitar objek sertifikasi;
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait status aset tanah dan Kab/Kota serta melakukan identifikasi dan penyempurnaan tata kelola aset;
3. Mengeluarkan surat kepada SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, bahwa nama-nama yang diusulkan oleh SKPD yang bersangkutan wajib mengikuti pelatihan di UPT LPKD sesuai yang telah diusulkan;
4. Jika Usulan peserta pelatihan akan dirubah oleh SKPD yang mengirimkan nama-nama peserta, akan ditekankan untuk mengirim perubahan nama peserta pelatihan sebelum pelaksanaan pelatihan minimal H-3 pelaksanaan pelatihan;
5. Menyusun jadwal kegiatan (silabus pelatihan) terkait pelatihan teknis selama 1 tahun anggaran.

20.17. KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada unsur Pemerintah dari Provinsi Jawa Timur;
- Meningkatkan fasilitasi promosi di bidang UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur Pemerintah eksekutif/legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah pusat (Departemen, Non Departemen dan Perwakilan Negara Asing)	1. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan (%)	99,91%	95,08%	(4,83%)
1. Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan	99,91%	95,08%	(4,83%)
II. Meningkatnya Fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.	1. Terpenuhinya kebutuhan kegiatan pameran Jatim di Jakarta	17 kali	51 kali	200%
	48 kali	78 kali	62,5%	
	2. Terpenuhinya kebutuhan kegiatan pentas seni budaya Jatim di Jakarta	3 kali	1 kali	(66,67%)
1. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	3. Jumlah pelatihan keterampilan			
	Prosentase pelaksanaan promosi potensi daerah	99,87%	98,53%	(1,34%)

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Urusan Pemerintahan (Kantor Perwakilan) yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur Pemerintah eksekutif/legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah pusat (Departemen, Non Departemen dan Perwakilan Negara Asing).

- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan keprotokolan pada Tahun 2015 adalah sebesar 99,91% dan pada tahun 2016 sebesar 95,08%. Terjadinya penurunan jumlah prosentase pelayanan keprotokolan sebesar 4,83% dikarenakan :
 1. Keterbatasan personil Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak bisa melayani secara optimal pada Pejabat Eksekutif dan Legislatif Provinsi Jawa Timur manakala terjadi jadwal pelayanan yang bersamaan.
 2. Kurangnya koordinasi antar Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas terkait di Jawa Timur.

Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya kegiatan pameran Jawa Timur di Jakarta pada Tahun 2015 adalah sebesar 17 kali dan pada tahun 2016 sebesar 51 kali. Terjadinya kenaikan jumlah kegiatan pameran promosi produk Jawa Timur (UKM) sebanyak 34 kali atau 200%, dikarenakan :
 1. Bertambahnya minat UKM untuk difasilitasi promosi oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur di JABODETABEK.
 2. JABODETABEK sangat bagus dan potensial sebagai tempat untuk memasarkan produk UKM.
- Terpenuhinya kebutuhan pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta pada tahun 2015 sebanyak 48 kali pentas seni budaya Jawa Timur sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 78 kali pentas seni budaya Jawa Timur. Terjadi kenaikan jumlah pentas seni Jawa Timur sebanyak 30 kali atau 62,5%, hal ini dikarenakan :

1. Bisa tercapai tingkat kemajuannya dikarenakan jadwal kegiatan tersusun pada perencanaan dan dapat terealisasi tanpa hambatan waktu dan kesiapan Tim Kesenian yang pentas
 2. Semakin tingginya minat masyarakat JABODETABEK terhadap seni budaya Jawa Timur.
- Jumlah Pelatihan Ketrampilan kepada Paguyuban Warga Jakarta Asal Jawa Timur (PAWARTA JATIM) pada tahun 2015 sebanyak 3 kali sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 1 kali pelatihan. Terjadinya penurunan sebesar 66,67%, dikarenakan :
1. Lokasi sekretariat Paguyuban Kedaerahan tersebar diwilayah Jabodetabek, sehingga terdapat sedikit kesulitan untuk menyamakan waktu dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) anggota PAWARTA JATIM.
 2. Pelaksanaan pelatihan ketrampilan sudah sering dilaksanakan sehingga banyak anggota PAWARTA JATIM tidak fokus bidang ketrampilan yang mana yang mestinya ditekuni, hal tersebut mengurangi minat peserta pelatihan.

c. Program

1. Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan pada tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 1.437.855.000,00, terealisasi sebesar Rp. 1.367.168.935,00 atau 95,08% untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang terdiri dari sub kegiatan yaitu pelayanan keprotokolan dan pengamanan VIP (PATWAL). Secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matriks 16 kolom.
2. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah pada tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 16.187.192.500,00, terealisasi sebesar Rp. 15.949.465.436,00 atau 98,53%, untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 3 kegiatan yaitu :
 - 1) Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di Jakarta

- 2) Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jakarta
- 3) Pelatihan keterampilan bagi anggota Pawarta Jatim.

Secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matriks 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Pada aspek pelayanan pada saat saat tertentu keterbatasan personil, transportasi, akomodasi seringkali tidak mampu dalam menghadapi pekerjaan secara bersamaan;
2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait sehingga terjadi kesulitan dalam hal-hal tertentu;
3. Kurangnya sinergi dengan pihak-pihak terkait di Jawa Timur, menjadikan tumpang tindih dengan instansi yang lain.
4. Lokasi sekretariat Paguyuban Kedaerahan tersebar di wilayah Jabodetabek, sehingga terdapat sedikit kesulitan untuk menyamakan waktu dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) anggota PAWARTA JATIM.
5. Jadwal yang telah ditetapkan bisa berubah/terjadi pembatalan dikarenakan faktor internal daerah Kabupaten/Kota.

Solusi :

1. Pembenahan standar pelayanan kepada pejabat eksekutif dan legislatif dengan mengacu pada prinsip standar pelayanan publik.
2. Peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif fasilitas koordinasi antara daerah pusat dan sebaliknya.
3. Lebih meningkatkan koordinasi antara Kantor Perwakilan dengan unsur-unsur terkait sehingga terjadi sinergi antara UMKM dengan instansi terkait untuk promosi informasi potensi produk unggulan Jawa Timur.
4. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Anggota Paguyuban Kedaerahan yang tergabung dalam PAWARTA JATIM yang ada di Jabodetabek, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia anggota PAWARTA JATIM.

5. Lebih meningkatkan pagelaran seni budaya kabupaten/kota se Jawa Timur di Anjungan Jawa Timur TMII dengan menggali potensi kesenian tradisional rakyat dengan terus berupaya melestarikan budaya daerah Jawa Timur.

20.18. BAKORWIL I MADIUN

a. Tujuan

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	59.17%	78.00%	31.82%
1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	59.17%	78.00%	31.82%
2. Program Pengembangan Data dan Infomasi	Persentase jumlah keterisian data dan informasi	58.81%	57.00%	-3.08%

Pada Tahun 2015-2016 Bakorwil Madiun kinerja Bakorwil Madiun yang telah dicapai berdasarkan sasaran “Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun” adalah meningkatnya persentase (%) rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti yaitu dari Tahun 2015 sebesar 59.17% menjadi 78.00% pada Tahun 2016 atau terjadi peningkatan sebesar 31.82%. Peningkatan tersebut sebagai tindak lanjut dari evaluasi LAKIP dari Tim Kemenpan RB mengenai target kinerja SKPD dimana SKPD harus optimis dalam menentukan persentase targetnya lebih tinggi.

Sedangkan penurunan tingkat kemajuan pada Program Pengembangan Data Informasi di Tahun 2016 dikarenakan adanya sub kegiatan dari kegiatan

Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi data Administrasi Wilayah yang tidak dapat direalisasikan.

c. Program

1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan anggaran Rp. 1.003.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 991.531.542,- atau 98.86% untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
2. Program Pengembangan Data Informasi dengan anggaran Rp. 186.365.844,- dan realisasi sebesar Rp. 185.575.993,- atau 99,58% untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Belum optimalnya sinkronisasi usulan program dan kegiatan perencanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBN, APBD I Provinsi Jawa Timur dan APBN;
2. Kurang efektif dan belum terpadunya penanganan atas masalah bencana alam, kemiskinan, pengangguran serta penanganan PMKS;
3. Belum optimalnya penanganan masalah usaha pertambangan, ijin penggunaan lahan dan kegiatan reklamasi pasca penambangan yang illegal.

Solusi :

1. Perlunya diadakan koordinasi dan sinkronisasi atas usulan program dan kegiatan perencanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBN, APBD I Provinsi Jawa Timur dan APBN agar sesuai dengan skala prioritas;
2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi secara terpadu terkait dengan program-program penanganan bencana alam, kemiskinan, pengangguran maupun PMKS;
3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanganan masalah usaha pertambangan dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan serta kegiatan reklamasi pasca penambangan.

20.19. BAKORWIL II BOJONEGORO

a. Tujuan

- Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Di Bojonegoro;
- Meningkatkan dukungan penyediaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan di Bojonegoro.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya Hasil Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah kerja BAKORWIL Pemerintahan dan Pembangunan Di Bojonegoro	Persentase Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev yang ditindaklanjuti	100%	100%	-
1 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev yang ditindaklanjuti	100%	100%	-
2 Program pengembangan Data Informasi	Presentase Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan	100%	100%	-

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016, sebagai berikut :

Rencana Kerja (RENJA) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu Kebijakan / Program / Kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Pada Tahun 2015-2016 Kinerja BAKORWIL Bojonegoro yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Hasil Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah kerja BAKORWIL Pemerintahan dan Pembangunan Di Bojonegoro. Sasaran ini pada Tahun Anggaran 2015 capaian kinerjanya sebesar 100% dan pada Tahun Anggaran 2016 capaian kinerjanya sebesar 100%, program tidak mengalami tingkat kemajuan dikarenakan masih tetap maksimal pada tingkat capaian dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah kerja BAKORWIL Pemerintahan dan Pembangunan Di Bojonegoro.

c. Program

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat dicapai melalui berbagai program berikut :

1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 840.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 828.586.597,- atau (98,64 %). Dengan target kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang Kemasyarakatan, dan Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti. Program ini untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom;

2. Program pengembangan Data Informasi, dengan anggaran Rp. 43.950.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 43.324.300,- atau 98,58 %, Dengan target kinerja Persentase Keterisian data dan informasi Pembangunan Kabupaten/ Kota di Wilker Bakorwil Bojonegoro. Program ini untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci dapat dilihat pada lampiran Format matrik 16 kolom;

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Monitoring Dan Rapat Sinkronisasi Persiapan Pelaksanaan Kebersihan Kota Dan Pemberian Penghargaan Adipura Di Kabupaten/Kota Se Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro :
 - Belum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan TPA dikelola minimal dengan sistem *controlled landfill* ;
 - Belum seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota memanfaatkan sarana dan prasara secara maksimal, antara lain:
 - a. Jembatan Timbang;
 - b. Komposer;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah;
 - d. IPAL (Instalasi Pengelolaan air limbah);
 - e. IPLT (Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja);
 - f. Alat BBM Solar Alternatif Berbahan Sampah Plastik;
 - Masih rendahnya perhatian Pemerintah Kabupaten / Kota terkait biaya operasional pengelolaan sampah serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah, hal ini terbukti :
 - a. Pemilahan sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis dengan sampah yang bisa dijadikan kompos belum dikelola secara maksimal;
 - b. Limbah cair berupa lindi belum dikelola secara maksimal serta belum dilakukan uji baku mutu air yang dipersyaratkan sebelumm dibuang ke media lingkungan;
 - c. Gas Metan yang dihasilkan belum dimanfaatkan secara maksimal.

2. Monitoring Dan Rapat Sinkronisasi Lomba Hippy Dan Ghippa Kabupaten/Kota Se Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro :
 - Masih kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kewenangan dan kepemilikan sarana dan prasarana jaringan irigasi yang berupa saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi;
 - Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki Rencana tata tanam golongan (RTTG) dan Rencana tata tanam detail (RTTD) yang merupakan rencana tata tanam yang memperhatikan kemampuan suatu daerah irigasi dan terperinci per petak tersier;
 - Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota belum memenuhi ketersediaan benih berlabel/tersertifikasibagi petani pada saat benih dibutuhkan;
 - Seluruh kelompok petani pemakai air mandiri belum membiayai biaya operasional dan pemeliharaan saluran jaringan irigasi.
3. Monitoring Dan Rapat Koordinasi Sinkronisasi, Evaluasi Pembangunan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten/Kota Se Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro :
 - PERDA tentang BUMDesa yang belum terbentuk;
 - Kurangnya SDM di tiap desa;
 - Kesulitan BUMDesa dalam mewadahi LKM-LKM yang sudah terlebih dahulu ada, karena ada ketakutan dari masing-masing pengurus LKM karena ada pandangan bahwa pengurus LKM akan diganti dengan pengurus BUMDesa;
 - Masih ada unsur politik di tiap pengurusan yang baru dengan yang lama.
4. Rapat Sinkronisasi Dalam Peningkatan Produksi Perikanan Dan Dalam Rangka Untuk Mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Kabupaten/Kota Se Wilker Bakorwil Bojonegoro :
 - Masih belum ada yang mengerti arti penancangan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di lapisan masyarakat terutama orang dewasa;

- Kurangnya kesadaran dalam penancangan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) serta masih kurangnya SDM;
 - Masih kurangnya konsumsi makan ikan terutama pada anak sekolah dasar sehingga masih dipandang perlu untuk pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan produksi perikanan dan dalam rangka mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).
5. Rapat Sinkronisasi Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam (Kekeringan, Banjir, Angin Puyuh / Puting Beliung Dan Tanah Longsor) Di Wilker Bakorwil Bojonegoro :
- Penyempitan saluran air/sungai;
 - Belum adanya pompa air untuk mengatur banjir;
 - Masih banyak penambang Galian C Liar/tanpa ijin sehingga merusak tanggul dan infrasturktur sungai lainnya;
 - Penebangan pohon secara liar, pembuangan sampah sembarangan.
6. Rapat Sinkronisasi Dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Kabupaten / Kota Se Wilker Bakorwil Bojonegoro :
- Keberadaan KIM belum dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting, sehingga penanganannya juga tidak optimal;
 - Terlalu sering terjadi mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota, sehingga program kerja tidak sempat untuk dilaksanakan sudah dimutasi;
 - Keterbatasan anggaran dari masing-masing Kabupaten / Kota sehingga pembinaan terhadap KIM juga kurang optimal.
7. Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Alih Kelola Kewenangan Pendidikan Pada Uu Nomor 23 Tahun 2014 Se Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Bojonegoro Tahun 2016 :
- Pengalihan tanggung jawab dan kewenangan pendidikan di Pemerintahan Daerah. Untuk pendidikan tingkat SD dan SMP masih berada dalam lingkup

Pemerintah Kabupaten / Kota sedangkan untuk tingkat SMA / SMK dialihkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

8. Rapat Sinkronisasi Dan Evaluasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Tahun 2016 Se Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Bojonegoro :

- Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum mampu mengakses pelayanan sosial dasar;
- Masih tingginya angka penanganan korban pasung;
- Masih banyaknya desa yang mengalami bencana kekeringan, longsor, banjir dan banjir lahar dingin;
- Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan data kemiskinan kurang akurat;
- Masih tingginya angka penyebaran HIV dan AIDS dan jumlah korban bahaya penggunaan NAPZA.

Solusi :

1. Monitoring Dan Rapat Sinkronisasi Persiapan Pelaksanaan Kebersihan Kota Dan Pemberian Penghargaan Adipura Di Kabupaten/Kota Se Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro :

- Segera memperbaharui sistem open dumping menjadi minimal sistem controlled landfill dengan membuka lahan baru;
- Segera menginventarisir permasalahan dan hambatan kurang dimanfaatkannya sarana dan prasarana serta menganalisisnya;
- Segera diadakannya inovasi Kebijakan Daerah, terkait pengelolaan sampah memerlukan biaya yang sangat besar, diperlukan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

2. Monitoring Dan Rapat Sinkronisasi Lomba Hipa Dan Ghippa Kabupaten/Kota Se Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro :

- Kewenangan dan kepemilikan untuk mengelola, mengatur, memanfaatkan sarana dan prasarana jaringan irigasi dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan atau badan-badan hukum tertentu;
- Melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan rencana tata tanam antara SKPD yang membidangi, perwakilan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan perwakilan pengguna jaringan irigasi;
- Agar Pemerintah Kabupaten / Kota memfasilitasi ketersediaan benih untuk para petani, sehingga tidak akan lagi ada masalah terkait kurangnya benih di kalangan para petani;
- Diharapkan agar HIPPA dan GHIPPA dapat mandiri membiayai semua biaya operasional dalam HIPPA dan GHIPPA.

3. Monitoring Dan Rapat Koordinasi Sinkronisasi, Evaluasi Pembangunan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten/Kota Se Wilayah Kerja Bakorwil Bojonegoro :

- Mengharap adanya pelatihan dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi kepada pengurus BUMDesa baik pelatihan manajemen maupun pelatihan pembukuan;
- Untuk kedepannya perlu adanya regulasi yang jelas sehingga dapat digunakan acuan pembinaan dan pengembangan BUMDesa;
- Perlu dukungan dari pihak swasta atau pihak ketiga dalam bentuk penambahan modal.

4. Rapat Sinkronisasi Dalam Peningkatan Produksi Perikanan Dan Dalam Rangka Untuk Mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Kabupaten/Kota Se Wilker Bakorwil Bojonegoro :

- Mengharap adanya pembinaan dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi kepada masyarakat untuk mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN);

- Mengingat peningkatan produksi perikanan dalam rangka untuk mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) merupakan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota maka masih diperlukan sosialisasi, pembinaan serta sinkronisasi secara berkesinambungan.
5. Rapat Sinkronisasi Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam (Kekeringan, Banjir, Angin Puyuh / Puting Beliung Dan Tanah Longsor) Di Wilker Bakorwil Bojonegoro :
- Perbaikan saluran air dengan mengganti gorong-gorong yang lebih besar terutama di daerah rawan banjir dan memasang pompa untuk pembuangan air;
 - Penanaman 1.000 (seribu) pohon untuk peresapan air;
 - Sosialisasi / antisipasi dini terhadap daerah-daerah rawan bencana kepada masyarakat agar tidak ada korban.
6. Rapat Sinkronisasi Dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (Kim) Kabupaten / Kota Se Wilker Bakorwil Bojonegoro :
- Anggota KIM perlu diberikan pembinaan secara intensif agar mereka mampu mengikuti semua informasi yang ada untuk kepentingan masyarakat;
 - Anggaran untuk pembinaan KIM hendaknya juga ditambah, agar anggota KIM bisa lebih berdaya guna;
 - Seharusnya ketika terjadi mutasi pegawai atau pergantian Kepada Daerah program kerja tidak perlu dilakukan perubahan karena program kerja yang dianggap bagus dan dibutuhkan oleh masyarakat hendaknya tetap diteruskan seperti kegiatan KIM.
7. Rapat Koordinasi Dan Sinkronisasi Alih Kelola Kewenangan Pendidikan Pada Uu Nomor 23 Tahun 2014 Se Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Bojonegoro Tahun 2016 :
- Memperhatikan petunjuk pelaksanaan perubahan kewenangan dari Kementrian Teknis.

8. Rapat Sinkronisasi Dan Evaluasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Tahun 2016 Se Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Bojonegoro :

- Agar diberikan kemudahan dalam mengakses terhadap pelayanan sosial dasar kepala 5 (lima) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pengemis, anak jalanan, WTS, gelandangan dan penderita psikotik;
- Perlu koordinasi secara intensif antara SKPD di Provinsi / Kabupaten / Kota dalam menangani korban pasung;
- Perlu koordinasi dengan lintas sektor dalam penanggulangan bencana akibat kekeringan, longsor, banjir dan banjir lahar dingin;
- Perlu koordinasi antara SKPD Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota dalam melakukan pendataan penerima bantuan dan jumlah sasaran;
- Melakukan pemantauan mobilitas terhadap penderita HIV dan AIDS sekaligus peran serta dari komisi penanggulangan AIDS di Kabupaten / Kota.

20.20. BAKORWIL III MALANG

a. Tujuan

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Badan Koordinasi wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	Realisasi		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	61,76%	83,33%	34,93%
1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, dan monev yang ditindaklanjuti	61,76%	83,33%	34,93%
2. Program pengembangan Data Informasi	Prosentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi yang dilaksanakan	42,03%	63,03%	49,96%

Pada Tahun 2015-2016 Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.

Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti pada Tahun 2015 adalah sebesar 61,76% dan pada Tahun 2016 sebesar 83,33% mengalami peningkatan sebesar 34,93%.

Pada tahun 2015 target kinerja 60% telah diimplementasikan berupa koordinasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebanyak 34 kegiatan yang menghasilkan rekomendasi atau hasil koordinasi yang ditindaklanjuti baik oleh Bakorwil Malang maupun SKPD terkait sebanyak 21 kegiatan/sub kegiatan realisasi sebesar 61,76% dengan capaian kinerja 102,94%, sedangkan tahun 2016 target kinerja 80% telah diimplementasikan berupa koordinasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebanyak 24 kegiatan yang menghasilkan rekomendasi atau hasil koordinasi yang ditindaklanjuti baik oleh Bakorwil Malang maupun SKPD terkait sebanyak 20 kegiatan/sub kegiatan realisasi sebesar 83,33% dengan capaian kinerja 104,17%.

Peningkatan Realisasi dan Capaian Kinerja tersebut dikarenakan kesiapan tenaga/SDM pelaksana program kegiatan, sasaran dan indikator kinerjanya sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Renstra Bakorwil Malang (sesuai dengan tupoksi), Program dan kegiatan yang dilaksanakan hasilnya dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, koordinasi yang dilaksanakan lebih fokus dan terarah serta bersinergi dengan program kegiatan kabupaten/kota.

c. Program

1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dengan anggaran Rp. 899.392.000,- dan realisasi sebesar Rp. 874.844.765,- atau 97,27% untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
2. Program Pengembangan Data Informasi, dengan anggaran Rp. 147.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 143.445.950,- atau 97,38% untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Kegiatan Bidang Pemerintahan antara lain :
 - Regulasi yang mengatur tentang rusaknya jalan akibat kendaraan berat belum ada perkembangan
 - Belum ada tindak lanjut perkembangan rencana pembangunan jalan alternatif.
 - Pemahaman dan tanggungjawab individu, kelompok, dan masyarakat belum maksimal.
 - Penanganan bencana masih bersifat lokal (kedaerahan), kurang koordinasi antar Kabupaten/Kota.
 - Pelaksanaan pameran produk-produk unggulan dalam rangka HUT Provinsi Jawa Timur kurang optimal.
 - Penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran untuk kegiatan HUT Provinsi Jawa Timur kurang memadai.
 - Pelaksanaan pameran produk-produk unggulan kurang strategis.

2) Kegiatan Bidang Pembangunan Ekonomi antara lain :

- Keterampilan teknis yang dimiliki petani dalam mengolah produk hasil pertanian masih minim, karena kurangnya pembinaan oleh dinas terkait.
- Komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan belum terlaksana.
- Meningkatnya persaingan produk perikanan, namun masih belum didukung informasi akses pemasaran produk perikanan.
- Kawasan agropolitan tersebar di beberapa daerah wilayah kerja Bakorwil Malang (agropolitan Jember, Bromo, Tengger Semeru belum didukung kerjasama antar daerah dalam pengelolaan potensi.
- Pemasaran produk industri kerajinan masih berupa barang setengah jadi sehingga keuntungan pengrajin sangat kecil.
- Minimnya kelompok tani yang aktif dalam mengelola koperasi, dari jumlah kelompok tani 1.420 yang aktif hanya 347 kelompok tani.
- Pemberian bantuan hibah untuk kelompok tani hanya untuk kelompok tani yang sudah mandiri.

3) Kegiatan Bidang Kemasyarakatan antara lain :

- Kualitas beras raskin yang diberikan kepada penerima kurang baik.
- Data RTSM penerima beras raskin kurang valid.
- Tidak ada dana sharing dari Kabupaten/Kota untuk biaya angkut beras dari titik distribusi ke titik bagi.
- Pelayanan di Rumah Sakit dengan menggunakan BPJS kurang mendapat perhatian.
- Program JKN belum dilaksanakan di setiap rumah sakit.
- Belum ada Tim Lintas Sektor Percepatan Penanganan Pasien Bebas Pasung.
- Belum terbentuknya Kader Pengawasan Orang Masalah Dengan Kejiwaan (OMDK) tingkat kecamatan dan Desa/kelurahan.
- Lemahnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan daerahnya bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- Belum sinerginya kalender kegiatan Bakorwil Malang.

- Pariwisata dan budaya antar Kabupaten/Kota se wilayah kerja
- 4) Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana antara lain :
- Beberapa program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota masih belum sinergis dengan program kegiatan SKPD Provinsi.
 - Banyaknya usulan program kegiatan dari kabupaten/kota pada Musrenbang belum diverifikasi ditingkat Bakorwil.
 - Belum tersusunnya dokumen strategis terkait perubahan iklim, tindaklanjut issue global warning.
 - Beberapa daerah masih belum melakukan kajian kawasan strategis terkait kerentanan dan analisis dampak perubahan iklim.
 - Masih terdapat aset Provinsi di wilayah kerja Bakorwil Malang yang belum jelas penggunaannya dan perikatannya.
 - Pembinaan HIPPA/GHIPPA belum dilakukan terstruktur dari desa, kecamatan.
 - Pemerintah Kabupaten/Kota belum menyediakan anggaran untuk pembinaan HIPPA/GHIPPA yang terpadu antara Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan.

Solusi :

- 1) Kegiatan Bidang Pemerintahan antara lain :
- Memantau perkembangan proses rekomendasi usulan peraturan daerah tentang rusaknya jalan akibat kendaraan berat.
 - Mendorong percepatan jalan alternative dari Purwosari Pasuruan, Malang ke Batu.
 - Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi sosialisasi kegiatan yang terkait.
 - Menyiapkan sarana prasarana antisipasi bencana dan penanganan bencana secara terpadu.
 - Menambah alokasi anggaran penanganan bencana.

- Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan HUT Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan masyarakat dan promosi produk unggulan daerah untuk menstimulasikan UKM.

2) Kegiatan Bidang Pembangunan Ekonomi antara lain :

- Mendorong SKPD terkait untuk meningkatkan pembinaan kepada petani dalam pengolahan produk pertanian dan diversifikasi tanaman.
- Memfasilitasi dan mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan hutan bagi masyarakat.
- Bersama SKPD terkait mendorong peningkatan akses pemasaran produk perikanan, dan bantuan modal pengembangan
- Mendorong peningkatan kerjasama pengelolaan potensi daerah di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan kelautan.
- Memperluas jangkauan sasaran sosialisasi ke masyarakat terkait pengembangan usaha koperasi, revitalisasi kelembagaan dan memfasilitasi bantuan hibah bersama Dinas Koperasi dan UMKM.
- Bersama SKPD terkait memberikan pembinaan kepada Kopontren terkait manajemen modern koperasi yang maju.

3) Kegiatan Bidang Kemasyarakatan antara lain :

- Meningkatkan monitoring layanan kesehatan melalui program JKN dan menyebarluaskan informasi program JKN.
- Memantau penyaluran beras raskin secara berkelanjutan baik kualitas beras raskin maupun penerima beras raskin.
- Memantau pembentukan Tim Lintas Sektor Percepatan Penanganan Pasien Bebas Pasung dan Kader Pengawasan Orang Masalah Dengan Kejiwaan (OMDK) tingkat kecamatan dan Desa/kelurahan.
- Mengkoordinasikan dan menyusun kesepakatan bersama dengan Kabupaten/Kota terkait penggunaan data kependudukan adalah data hasil registrasi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.
- Memantau Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten/Kota.

4) Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana antara lain :

- Meningkatkan sinergitas program kegiatan provinsi dengan Kabupaten/Kota melalui musrenbang di tingkat Bakorwil.
- Mendorong kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen strategis terkait perubahan iklim di daerah.
- Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan kajian kawasan strategis dampak perubahan iklim.
- Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan asset provinsi yang ada di daerah.
- Bersama SKPD terkait melakukan pembinaan dalam bentuk lomba pengelolaan HIPPA/GHIPPA di daerah.
- Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dan memberikan pembinaan secara berkala kepada HIPPA/GHIPPA.

20.20. BAKORWIL IV PAMEKASAN

a. Tujuan

- Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan.
- Meningkatkan dukungan penyediaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bakorwil Pamekasan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan	Prosentase koordinasi, fasilitasi dan monitoring yang ditindaklanjuti	54,17%	70%	15,83
1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monitoring yang ditindaklanjuti (%)	87,25%	96,07%	8,82%
2. Program Pengembangan data Informasi	Persentase Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan (%)	90,67%	89,75%	(-0,92%)

Evaluasi Terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan.

- 1) Program Koordinasi, Fasilitasi Dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Program ini pada tahun 2015 adalah sebesar 87,25% dan pada tahun 2016 adalah sebesar 96,07%. Prosentase realisasi mengalami peningkatan disebabkan adanya pelaksanaan administrasi kegiatan yang lebih baik serta pelaksanaan rapat koordinasi internal dengan Kepala Badan secara rutin yang membahas kinerja dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;

Program ini terdiri dari 5 kegiatan, yaitu :

- a. Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pemerintahan pada Tahun 2015 adalah sebesar 91,25% dan Tahun 2016 sebesar 93,13% (mengalami peningkatan), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi kewaspadaan dini diwilayah Bakorwil Pamekasan;
 - Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) diwilayah Bakorwil Pamekasan;
 - Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan KIM di wilayah Bakorwil Pamekasan;
 - Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka menciptakan Keamanan, ketertiban dan ketentraman umum masyarakat di wilayah kerja Bakorwil Pamekasan;
 - Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar daerah di Kabupaten/Kota se Bakorwil Pamekasan;
- b. Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi pada Tahun 2015 adalah sebesar 83,75% dan Tahun 2016 sebesar 91,11% (mengalami peningkatan), dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi perikanan (Garam);
 - Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi perkebunan (Tebu);

- Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi dan UMKM (Koperasi dan UMKM Bidang Perhubungan);
 - Sinkronisasi, evaluasi dan fasilitasi Perluasan areal Tanaman Tebu di Madura;
 - Sinkronisasi, evaluasi dan fasilitasi Forum CSR Bakorwil Pamekasan;
- c. Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Kemasyarakatan pada Tahun 2015 adalah sebesar 83,75% dan Tahun 2016 sebesar 97,45% (mengalami peningkatan), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi penanganan anjal dan gepeng (PMKS);
 - Lokakarya dalam rangka menyongsong pelaksanaan Kerapan Sapi tradisional se Madura;
 - Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendistribusian Raskin;
 - Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi intergrasi kurikulum Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran responsif gender;
- d. Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Sarana Dan Prasarana Tahun 2015 adalah sebesar 81,88% dan Tahun 2016 sebesar 99,16% (mengalami peningkatan), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup (pencemaran pantai dan reboisasi mangrove se wilker Bakorwil Pamekasan);
 - Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Hippra/Ghippra tingkat Bakorwil (memilih dan mancalonkan duta nominator yang akan maju ke tingkat Provinsi);

- Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi peningkatan prasarana transportasi darat dan jembatan untuk kelancaran jalan (transportasi) / arus lalu lintas jalan di sekitar pasar di Madura;
- Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi fungsi dan kualitas embung untuk ketersediaan air;
- e. Penguatan kebudayaan antar daerah Tahun 2015 adalah sebesar 95,63% dan Tahun 2016 sebesar 99,5% (mengalami peningkatan), dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Grand Final Kerapan Sapi se Madura memperebutkan Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia;
 - Festival Sapi Sono'.

2) Program Pengembangan data Informasi

Program ini pada tahun 2015 adalah sebesar 90,67% dan pada tahun 2016 adalah sebesar 89,75%. Persentase realisasi mengalami penurunan disebabkan adanya pengurangan anggaran saat perubahan APBD sehingga kegiatan rapat koordinasi untuk meningkatkan persentase keterisian data dan informasi pembangunan Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil Pamekasan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan;

Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

- Koordinasi penyusunan data hasil pembangunan se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan.

c. Program

1. Program Koordinasi, Fasilitasi Dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 1.343.483.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.304.786.008,00 atau sebesar atau (97,12%) untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom;
2. Program Pengembangan data Informasi dilaksanakan melalui peningkatan penyediaan data dan sarana prasarana informasi, dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 19.235.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.233.060,00

atau (99,99%) untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Penyelenggaraan budaya Kerapan Sapi masih menggunakan kekerasan sehingga belum sesuai harapan untuk mengembalikan fitrah kerapan sapi tradisional sebagaimana awal mulanya yakni tanpa menggunakan kekerasan;
2. Program perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota masih belum sinkron dan terintegrasi khususnya dalam menunjang kinerja utama pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat;
3. Pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan, yang ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia), khususnya di 4 Kabupaten di Madura;
4. Lahan pertanian produktif semakin berkurang karena dijadikan lahan perumahan, serta pengelolaan Sumber Daya Alam yang kurang memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan hidup.
5. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya alam dan potensi pasar khususnya di wilayah Madura, diakibatkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam upaya pemanfaatan SDA yang melimpah;
6. Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana masih belum ditangani secara optimal, sehingga dijumpai beberapa permasalahan pengembangan wilayah.

Solusi :

1. Mengupayakan peningkatan kualitas hasil monitoring, sinkronisasi dan evaluasi ke Kabupaten / Kota se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan;
2. Mengintensifkan koordinasi dengan SKPD Provinsi Jawa Timur terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota;
3. Meningkatkan hasil rapat koordinasi/ sinkronisasi se wilayah kerja Bakorwil Pamekasan untuk mempertemukan Badan/Dinas Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota agar terjadi penyelarasan dukungan dalam meminimalisasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dengan mendorong tercapainya optimalisasi potensi yang dimiliki.

20.22. BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Mewujudkan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dengan kebutuhan;
- Mewujudkan sistem informasi database kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi;
- Mewujudkan pegawai ASN yang disiplin, integritas, dan berkinerja tinggi.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensinya	1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	96,2	98,8	2,7
	2. Persentase pengisian jabatan dan jenis jabatan	75	80	6,67
	3. Persentase SKPD dan UPT yang telah menyusun standart kompetensi jabatan	75	80	6,67
	4. Persentase SKPD dan UPT yang telah menyusun pola karier	75	80	6,67
	5. Persentase tingkat pengembangan kompetensi SDM Aparatur	65	75	13,3
1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur	Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan	96,2	98,8	2,7
II. Meningkatnya kualitas database kepegawaian pegawai ASN yang akurat	Persentase tingkat akurasi database kepegawaian	78	85	8,97
1. Program Pengembangan Data Informasi	Prosentase database kepegawai-an yang berkualitas relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.	78	85	8,97
III. Meningkatnya disiplin dan penilaian kinerja pegawai ASN	1. Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN	84,16	91	8,12
	2. Persentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja pegawai ASN	85.14	86	1.01

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif,transparan dan akuntabel	80	86	7,5

Evaluasi Terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran I. Meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensinya, dengan indikator kinerja:

- Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi

Pencapaian kinerja pada indikator persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi didukung oleh data mutasi pegawai antar SKPD, mutasi pegawai masuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pengalihfungsian JFU ke JFT, pendistribusian pejabat struktural hasil tim baperjakat, serta data pegawai yang sudah sesuai kebutuhan dan kompetensinya dengan indikator “Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi” pada tahun 2016 dari target 100 tercapai 98,8. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 sebesar 96,2, maka di Tahun 2016 mengalami persentase peningkatan sebesar 2,7. Hal ini disebabkan penataan pegawai sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan Baperjakat, Perpindahan Pegawai, Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Impassing Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional.

- Persentase Pengisian Jabatan dan Jenis Jabatan

Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan lelang jabatan secara terbuka untuk jenis jabatan tinggi pratama (eselon II) jumlah jabatan lowong sebanyak 12 jabatan lowong

dengan target persentase 80 adapun realisasi persentasenya sebesar 80. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2015 sebesar 75, hal ini berarti capaian indikator ini mengalami peningkatan persentase sebesar 6.67 dikarenakan semua jenis jabatan lowong telah terisi melalui mekanisme talent pool dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

- Persentase SKPD dan UPT yang Telah Menyusun Standart Kompetensi Jabatan dan Persentase SKPD dan UPT yang telah menyusun Pola Karir
Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menargetkan dari seluruh SKPD dan UPT atau sebanyak 39 SKPD atau kalau dipersentasekan 80 dengan persentase ralisasi 80. Hal ini berarti BKD Provinsi telah berupaya meningkatkan kualitas SDM khususnya untuk pejabat struktural eselon II, dengan menyusun standar kompetensi mulai dari kemampuan atau kompetensi dasar (akademik), kompetensi teknis, kompetensi sosio kultur, kompetensi pemerintahan, maupun dengan melihat rekam jejak seorang pegawai ASN mulai dari CPNS sampai dengan akan dinilai dan diangkatnya pegawai ASN pada jabatan struktural tertentu.

Pada tahun 2015, capaian persentase kinerja indikator ini sebesar 75. Hal ini berarti pada tahun 2016 mengalami peningkatan persentase sebesar 6.67 dikarenakan telah ditetapkannya tentang Pergub 76 Tahun 2015 Tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Persentase Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur
Untuk tingkat pengembangan kompetensi SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur dan juga pengembangan karir diantaranya kegiatan ujian dinas, penyesuaian ijazah dan pengembangan kompetensi, tugas belajar, assessment dan lain sebagainya.

Sampai dengan tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menargetkan sejumlah 14.739 pegawai untuk dikembangkan kompetensinya dan terealisasi sebesar 14.739 pegawai atau persentasenya 75 artinya BKD telah berupaya meningkatkan kualitas kompetensi SDM Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2015, persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 65 sehingga di tahun 2016 mengalami persentase peningkatan sebesar 13,3 Hal ini disebabkan telah dilaksanakannya Assement bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khusus untuk Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator serta fasilitasi Assesment pada ASN di Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas database kepegawaian pegawai ASN yang akurat, dengan Indikatoar Kinerja:

- Persentase tingkat akurasi database kepegawaian

Indikator kinerja persentase tingkat akurasi database kepegawaian ditargetkan 100 terealisasi 85 Hal ini berarti dari data base pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 54.836 pegawai (termasuk pelimpahan pegawai yang masuk Pemprov Jatim) teralisasi sebanyak 46.610 pegawai atau dipersentasekan 85. Apabila dibandingkan dengan persentase realisasi pada tahun 2015 sebesar 78, maka mengalami persentase peningkatan sebesar 8,97 dikarenakan telah dilaksanakannya updating data pelimpahan pegawai masuk pemprov Jatim pegawai melalui aplikasi Personil Peralatan Pembiayaan dan Dokumen (P3D).

Sasaran 4 : Meningkatnya disiplin dan penilaian kinerja pegawai ASN. dengan Indikatoar Kinerja:

- Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN

Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100 dengan persentase realisasi sebesar 91, Pada tahun 2015, persentase tingkat kehadiran pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 84,16 sehingga pada tahun 2016

mengalami persentase peningkatan sebesar 8,12. Hal ini dikarenakan telah diberlakukannya absensi elektronik di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai dasar dalam pemberian Tunjangan Daerah Prestasi (TDP), serta peningkatan kedisiplinan pegawai masuk jam kerja.

- Persentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN.

Untuk indikator persentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN dengan target Baik atau rentang nilai 76-90 dengan realisasi sebesar 86 termasuk kategori “Baik”. Apabila dibandingkan dengan persentase pencapaian tahun 2015 sebesar 85,1 maka pada tahun 2016 mengalami persentase peningkatan sebesar 1,01. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2016 nilai SKP pegawai Pemprov Jatim tidak ada yang termasuk kategori cukup yang artinya nilai rata akumulatif capaian SKP Pegawai di lingkungan pemprov Jatim dengan nilai rata-rata “BAIK”.

c. Program

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur capaian program dengan indikator persentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang objektif, transparan dan akuntabel adalah 98,5 adapun Pagu program ini dianggarkan Rp. 2.049.453.805,00 terealisasi Rp. 2.018.637.601,00 atau persentase realisasi anggaran sebesar 98,5 untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur dengan indikator kinerja persentase penataan SDM Aparatur sesuai formasi dan kebutuhan adalah 98,8, adapun pagu Program ini dianggarkan Rp. 3.576.566.195,00 terealisasi Rp.3.495.134.142,00 atau persentase realisasi anggaran sebesar 97,72, untuk mendukung 5 (lima) kegiatan yang secara rinci masing – masing realisasi per

kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

3. Program Pengembangan data informasi dengan indikator kinerja persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, capaian kinerjanya adalah 85, adapun pagu program ini dianggarkan Rp. 1.410.000.000,00 terealisasi Rp. 1.408.952.400,00 atau persentase realisasi anggaran sebesar 99,93 untuk mendukung 1 (satu) kegiatan yang secara rinci masing – masing per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Permasalahan secara umum didalam pengelolaan majemen ASN antara lain:

- ASN masih banyak yang tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya terkait dengan pelayanan publik
- Pendistribusian ASN masih belum merata sesuai dengan formasi dan kebutuhan
- Kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki dan tidak terdayagunakan secara optimal
- Belum terbangunnya sistem perencanaan dan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya.
- Sistem informasi kepegawaian masih belum optimal terutama dalam pengintegrasian data pegawai seluruh Jawa Timur
- Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis merit sistem.

Solusi:

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 perlu melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan dan pengembangan karir jabatan yang didasarkan pada standar kompetensi jabatan dengan dikalt teknis dan fungsional tertentu lainnya.
- Melakukan pemetaan kebutuhan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun kedepan.

- Melakukan Assesment untuk mengukur standar kompetensi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Melakukan perencanaan akan kebutuhan formasi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Melakukan pengembangan sistem informasi kepegawaian berupa E-PAKET (Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu) dengan tujuan untuk pengintegrasian seluruh layanan kepegawaian di Jawa Timur.
- Melakukan penyusunan pedoman diberlakukannya remunerasi, tunjangan daerah prestasi, tunjangan daerah, maupun pemberian penghargaan lainnya, sehingga akan dijadikan pedoman untuk penilaian kinerja berbasis merit system dengan berbasis IT (Informacy technology).

e. Penghargaan Nasional yang diterima.

Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan **BKN Award** untuk 5 (lima) kategori Pelayanan Kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 4.30
Penghargaan BKN Award untuk 5 (lima) kategori Pelayanan Kepegawaian

NO	CAPAIAN	KATEGORI	KRITERIA PENILAIAN
1.	Juara 1	Pelayanan Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan waktu - Kelengkapan berkas - Akurasi data
2.	Juara 2	Implementasi penilaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat penerapan PP 46 Tahun 2011 dan Perka BKN 01 tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai - Pembangunan dan penerapan system aplikasi penilaian kinerja - Terhimpunnya database penilaian kinerja PNS secara elektronik - Penerapan e-Kinerja - Penilaian kinerja dengan acuan dasar standar teknis kegiatan SKP (Perka BKN No.3 tahun 2016)

NO	CAPAIAN	KATEGORI	KRITERIA PENILAIAN
3.	Juara 2	Implementasi Assessment Center	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas kegiatan penilaian kompetensi - Konsistensi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi
4.	Juara 2	Pengelola Kepegawaian Terbaik	- Pengelolaan Kepegawaian terbaik dengan ketentuan mendapatkan BKN Award terbanyak dari 8 kategori yang diperebutkan.
5.	Juara 3	BKD inovatif	- Kuantitas dan kualitas Implementasi e-master Kepegawaian

Untuk mempertahankan prestasi tersebut bahkan akan selalu berupaya meningkatkan perolehan prestasi menjadi 8 (delapan) kriteria sehingga BKD Provinsi Jawa Timur akan menjadi Instansi **“Pengelola Kepegawaian Terbaik”**.

20.23. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Mengembangkan sistem perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat aparatur yang efektif dan efisien.
- Mengembangkan kelembagaan diklat sebagai pusat keunggulan (*Center of excellence*).

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan	1. % Alumni Diklat Kepemimpinan	97,05 %	98,30 %	1,29%
		95,82%	93,31 %	-2,62%
	2. % Alumni Diklat Teknis	98,02%	97,68 %	-0,35%
	3. % Alumni Diklat Fungsional	98,07 %	94,76 %	-3,38%
	4. % Alumni Diklat Prajabatan	91 %	96,2 %	5,72%
	5. % Alumni yang menindaklanjuti hasil diklat	55,10%	61,30 %	11,25%
	6. % Perkembangan hasil belajar peserta diklat			
1. Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Alumni Diklat Pra Jabatan, Kepemimpinan, Teknis dan fungsional (orang)	21.369	11.273	-47.25
2. Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur	Pemenuhan standart kompetensi aparatur (orang)	1.513	1.766	16,72
II. Meningkatnya sumberdaya kediklatan yang modern dan professional	1. % peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur.	95,30%	96 %	0,73
	2. Penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara	87,03%	89,6 %	2,95
	3. % Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100 %	-
1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	89,36%	91,53%	2,43

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
2. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya (Jumlah) dokumen Pengendalian dan Evaluasi Badan Diklat (jumlah dokumen)	4 dokumen	4 dokumen	-
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	95,30%	96 %	0,73
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	96,95 %	98,20 %	1,29

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kompetensi aparatur melalui diklat sesuai dengan kebutuhan, dengan 6 indikator sebagai berikut :

➤ % Alumni Diklat Kepemimpinan

Persentase Alumni Diklat Kepemimpinan pada tahun 2015 adalah sebesar 97,05% dan pada tahun 2016 sebesar 98,30% mengalami peningkatan sebesar 1,29% disebabkan banyaknya animo dari instansi pengirim dari luar Provinsi Jawa Timur yang memilih Badan Diklat Provinsi Jawa Timur sebagai tempat untuk mendidik aparaturnya

➤ % Alumni Diklat Teknis

Persentase Alumni Diklat Teknis pada tahun 2015 adalah sebesar 95,82% dan pada tahun 2016 sebesar 93,31% mengalami penurunan sebesar -2,62% disebabkan terbatasnya anggaran untuk diklat teknis dan beberapa peserta ada yang mengundurkan diri/tidak hadir pada saat pelaksanaan karena ditugaskan oleh

instansinya untuk urusan tugas lain, atau saat ditugaskan mengikuti diklat yang bersangkutan jatuh sakit.

➤ % Alumni Diklat Fungsional

Persentase Alumni Diklat Fungsional pada tahun 2015 adalah sebesar 98,02% dan pada tahun 2016 sebesar 97,68% mengalami penurunan sebesar -0,35% disebabkan terbatasnya anggaran hanya untuk diklat fungsional prioritas dan beberapa peserta ada yang mengundurkan diri/ tidak hadir pada saat pelaksanaan.

➤ % Alumni Diklat Pra Jabatan

Persentase Alumni Diklat Pra Jabatan pada tahun 2015 adalah sebesar 98,07% dan pada tahun 2016 sebesar 94,76% mengalami penurunan sebesar -3,38% disebabkan disebabkan adanya moratorium rekrutmen PNS, sedangkan CPNS yang ada sebagian besar sudah mengikuti diklat Prajabatan.

➤ % alumni yang menindaklanjuti hasil diklat

Persentase alumni yang menindaklanjuti hasil diklat pada tahun 2015 adalah sebesar 91% dan pada tahun 2016 sebesar 96,2% mengalami peningkatan sebesar 5,72% disebabkan dalam kurikulum dan silabi diklat khususnya untuk diklat kepemimpinan mewajibkan peserta untuk membuat proyek perubahan dan diimplementasikan di instansinya dan alumni diklat secara sadar menindaklanjuti hasil diklat tersebut.

➤ % perkembangan hasil belajar

Persentase perkembangan hasil belajar pada tahun 2015 adalah sebesar 55,10% dan pada tahun 2016 sebesar 61,30% mengalami peningkatan sebesar 11,25% disebabkan adanya pemahaman dari instansi pengirim bahwa kebutuhan organisasi terkait pengembangan SDM aparatur dipandang penting dengan mengirim peserta yang ditugaskan untuk mengikuti diklat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara

serta penyampaian materi diklat oleh narasumber dapat dipahami oleh peserta diklat.

Sasaran 2 : Meningkatnya Sumberdaya Kediklatan Yang Modern dan Profesional dengan 3 indikator sebagai berikut :

- % peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur

Persentase peserta diklat yang menyatakan puas terhadap pelayanan diklat aparatur pada tahun 2015 adalah sebesar 95,30 % dan pada tahun 2016 sebesar 96 % mengalami peningkatan sebesar 0,73% hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas pelayanan peserta diklat, sarana prasarana, dan kualitas program diklat yang hasilnya diukur melalui *feedback* yang diberikan oleh peserta, alumni maupun *user*.

- Penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara

Penilaian rata-rata minimum terhadap penguasaan materi dan performance widyaiswara pada tahun 2015 adalah sebesar 87,03% dan pada tahun 2016 sebesar 89,6% mengalami peningkatan sebesar 2,95% disebabkan adanya kegiatan pengembangan widyaiswara berupa workshop, seminar maupun pelatihan yang berdampak pada meningkatnya kompetensi dan performance widyaiswara.

- % Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti

Persentase Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 adalah sebesar 100 % dan pada tahun 2016 sebesar 100% hal ini menunjukkan bahwa hasil audit internal dan eksternal dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 semua temuan dari hasil audit telah ditindaklanjuti untuk diperbaiki.

c. Program

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.69.939.515.140,-. Realisasi sebesar Rp.64.760.356.444,- atau 92,59%. untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi perkegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom
2. Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 7.080.000.000,- Realisasi sebesar 6.598.654.830,- atau 93,20%. Untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi perkegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- Belum terstandarnya pelaksanaan diklat aparatur yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga terjadi kesenjangan kualitas penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota;
- Belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur menyelenggarakan semua tahapan dalam siklus diklat secara konsisten, terutama tahapan pra diklat, pelaksanaan dan evaluasi diklat;
- Terbatasnya tenaga pengajar untuk diklat teknis dan fungsional;
- Belum seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam menyelenggarakan diklat utamanya dalam penyediaan sarana prasarana belum memadai.

Solusi :

- Melakukan evaluasi diklat dan peningkatan kapasitas SDM pengelola diklat Kab/kota melalui Management of Training (MOT) untuk pejabat struktural pengelola diklat kab/kota dan Training Officer Course (TOC) untuk petugas diklat serta pembinaan dalam pengelolaan diklat aparatur;

- Melakukan koordinasi dan pembinaan yang lebih intensif kepada kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan program pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dan berdampak nyata terhadap kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, maka seluruh tahapan dalam pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perlu dilakukan secara konsisten dan terintegrasi;
- Memantapkan penyelenggaraan diklat dengan bekerjasama dengan instansi teknis untuk menyediakan tenaga pengajar/widyaiswara diklat dan melakukan pelatihan bagi aparatur kab/kota khususnya Training Of Trainer (TOT) untuk diklat teknis dan diklat fungsional;
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat di kab/kota se Jawa Timur serta hanya memberikan izin penyelenggaraan diklat yang memenuhi kriteria.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) nomor :38/K.1/PDP.09/2016, tanggal 1 Februari 2016 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi “A”. Adapun rincian jenis diklat dengan kategorinya sebagai berikut :

- Diklat Prajabatan Golongan I dan II dengan kategori Akreditasi “A”;
- Diklat Prajabatan Golongan III dengan kategori Akreditasi “A”;
- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan kategori Akreditasi “A”;
- Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan kategori Akreditasi “A”;
- Diklat Kepemimpinan Tingkat II dengan kategori Akreditasi “A”

20.24 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

Meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk memperlancar pelaksanaan kinerja tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur	1. Indeks Kepuasan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur;	70%	75%	0,05
	2. Indeks kepuasan Anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	70%	75%	0,05
Program Pembinaan Anggota KORPRI dan Kelembagaan Unit KORPRI	Meningkatnya peran dan fungsi anggota KORPRI dan organisasi dalam masyarakat (%)	70 %	70%	-

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 dengan contoh sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan KORPRI dalam upaya peningkatan pelayanan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur.

- Prosentase pemahaman Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pembinaan;
Prosentase pemahaman Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pembinaan pada tahun 2015 adalah sebesar 70% dan tetap 70% pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan program pembinaan anggota KORPRI dilaksanakan secara kontinyu dan tidak mengalami perubahan pada setiap kegiatan.

c. Program

Program Pembinaan anggota KORPRI dan Kelembagaan unit KORPRI, dengan anggaran Rp. 6.152.094.250,- realisasi sebesar Rp. 6.143.131.750,- atau 99,85 % untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi**Permasalahan:**

- Belum seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur membentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sehingga Program dan Kegiatan KORPRI belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di lingkup Kabupaten/Kota sangat tergantung pada kemampuan Anggaran masing-masing daerah termasuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
- Faktor SDM merupakan hambatan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah.

Solusi:

- Perlu adanya penekanan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI agar masing-masing Kabupaten/Kota dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- Perlu adanya koordinasi yang intens antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- Perlu adanya peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.

21. BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN

21.1. BADAN KETAHANAN PANGAN

a. Tujuan

1. Meningkatkan ketahanan pangan melalui ketersediaan dan distribusi pangan;
2. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal dan;
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan penyuluh bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PPROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya Ketersediaan Pangan (Food Avalailability) dan Aksesibilitas Pangan (Food Acces)				
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Ketersediaan Pangan Masyarakat (Ton)			
	a. Beras	7.637.107	7.497.526	100.77
	b. Jagung	5.495.348	5.425.180	101.54
	c. Kedele	317.086	316.390	98.55
	d. Daging	184.284	377.220	82.99
	e. Telur	323.221	367.174	67.36
	f. Susu	396.995	449.661	66.98
	g. Ikan	1.321.928	1.453.398	195.76
	h. Gula	1.232.090	1.195.501	100.00
	2. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	203,78	203,78	100.00
	3. Stabilisasi Harga Pangan ditingkat Produsen (Rp./Kg)			
	- Gabah Kering Panen (GKP)	4.508,75	4.051	89.85
	- Gabah Kering Giling (GKG)	5.116,25	4.948	96.71
	4. Stabilisasi Harga Pangan (Beras) ditingkat Konsumen (CV < 10%)	3,40	2.98	87.65
	5. Persentase (%) Wilayah Bebas Rawan Pangan	99,00	99,00	100.00

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PPROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
II. Peningkatan kualitas konsumsi Pangan (Food Utilization) dan Keamanan Pangan (Food Security)				
1. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	1. Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,7	83,36	100.08
	2. Persentase (%) pangan yang aman dikonsumsi	88,0	88,0	100.00
III. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.				
1. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.	1. Persentase (%) Penyuluh yang bersertifikat	20,20 325.00	20,20 549.00	100.00 168.92
	2. Jumlah Penyuluh	428.00	450.00	105.14
	3. Jumlah Kelompok Tani			

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Ketahanan Pangan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Ketersediaan Pangan (Food Availability) dan Aksesibilitas Pangan (Food Acces)

a) Ketersediaan Pangan.

Berdasarkan Angka Tetap (ATAP), realisasi Ketersediaan bahan pangan Jawa Timur Tahun 2016, untuk beras tercapai 7.497.051 ton dari sasaran 7.780.579ton atau 96,36% dan konsumsi mencapai 3.474.526 tondari sasaran 3.471.810ton atau 100,07%, sedangkan capaian surplus untuk beras mencapai 4.022.526ton. Jagung ketersediaan mencapai 5.495.348 ton dan konsumsi mencapai 168.598ton. Untuk kedele ketersediaan mencapai 317.086 ton dari sasaran 439.137 ton atau 72,21 %, dan konsumsi mencapai 439.754ton sehingga untuk kedele mengalami defisit sebesar 123.364ton. Apabila dilihat Rincian ketersediaan dan konsumsi pangan strategis disajikan pada tabel 2.

Tabel 4.31
Perkembangan Ketersediaan dan konsumsi pangan strategis
di Jawa Timur Tahun 2015-2016.

NO.	KOMODITAS/PANGAN		2015	2016	%
1.	Beras	- Ketersediaan	7.637.107	7.497.526	98.17
		- Konsumsi	3.472.975	3.474.526	100.04
		- Surplus	4.164.132	4.022.526	96.60
2.	Jagung	- Ketersediaan	5.495.348	5.425.180	98.72
		- Konsumsi	163.160	168.598	103.33
		- Surplus	5.332.188	5.256.582	98.58
3.	Kedelai	- Ketersediaan	317.086	316.390	99.78
		- Konsumsi	435.093	439.754	101.07
		- Surplus	-114.007	-123.364	108.21
4.	Daging	- Ketersediaan	184.284	377.220	204.69
		- Konsumsi	192.296	276.206	143.64
		- Surplus	172.301	101.014	58.63
5.	Telur	- Ketersediaan	323.221	367.174	113.60
		- Konsumsi	229.913	261.056	113.55
		- Surplus	93.308	106.119	113.73
6.	Susu	- Ketersediaan	396.995	449.661	113.27
		- Konsumsi	72.806	73.422	100.85
		- Surplus	324.190	376.239	116.06
7.	Ikan	- Ketersediaan	1.321.928	1.453.398	109.95
		- Konsumsi	674.411	242.991	36.03
		- Surplus	647.517	1.210.407	186.93
8.	Gula	- Ketersediaan	1.232.090	1.195.501	97.03
		- Konsumsi	392.384	401.295	102.27
		- Surplus	839.706	794.206	94.58
	Jumlah Penduduk		37.812.200	38.610.200	

Sumber data BKP diolah

Ketersediaan total energi untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 3.085 kkal/kap/hr atau 129% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/kap/hr (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan energi tahun 2016 didominasi oleh pangan nabati 97,06% sedangkan pangan hewani 10,56%. Apabila dibandingkan dengan AKE tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar 1.189,25 kkal/kap/hr (49,54%).

Demikian juga total ketersediaan protein untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur sebesar 99,40 gram/kap/hari atau 148,36% dari Angka Kecukupan Protein (AKP) 63 gram/kap/hr

(Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan protein tahun 2016 masih didominasi oleh pangan nabati 99,40% sedangkan pangan hewani 10,56%. Apabila dibandingkan dengan AKP tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 0,69 gr/kap/hr (6,1%).

Ketersediaan pangan penduduk untuk proporsi Nabati dan Hewani Jawa Timur tahun 2015–2016 seperti pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 4.32
Ketersediaan Energi, Protein Penduduk Jawa Timur
Tahun 2015-2016.

No.	Uraian	2015				2016			
		Energi		Protein		Energi		Protein	
		Kkal/kap/hr	%	Gr/kap/hr	%	Kkal/kap/hr	%	Gr/kap/hr	%
1	Proporsi Nabati	3.198	95,3	80,51	83,4	3.334	93,1	82.39	87,81
2	Proporsi Hewani	158	4,7	16,54	16,6	248	6,9	11.44	12.19
	Total	3.356	100	96,58	100	3.582	100	93.83	100

Sumber data BKP diolah

Sedangkan untuk Konsumsi energi penduduk Jawa Timur Tahun 2016 sebesar 1.847 Kka/Kap/hari atau mencapai 92% dari anjuran AKE berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi (WKNPG) X Tahun 2012 sebesar 2.000 Kkal/kap/hr. Perhitungan secara perwilayahan menunjukkan bahwa wilayah perkotaan konsumsi energi sebesar 1832 Kkal/kap/hr, sedangkan untuk pedesaan konsumsi energi mencapai 1.858 Kkal/kap/hr, ini artinya bahwa konsumsi energi masih terarah ke karbohidrat. Berbeda dengan konsumsi protein, tahun 2016 mencapai 52,9 Gram/kap/hr atau 102% dari Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan sebesar 52 Gram/kap/hr. Perhitungan secara perwilayahan menunjukkan bahwa perkotaan konsumsi protein mencapai 53,7 gram/kap/hr atau 103% sedangkan pedesaan

mencapai 52,2 gram/kap/hr atau 100,4% dari Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan.

b) Tersedianya cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 13 tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, maka CPP Provinsi dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan beras dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat. CPP Provinsi bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien serta untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Sasaran CPP Provinsi adalah rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang mengalami : (1) Kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat; (2) Gejolak harga pokok (beras); (3) Rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; (4) Rawan pangan kronis karena kemiskinan.

CPP Provinsi sebanyak 200 ton beras dari alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2014 pengadaan beras sebanyak 186.375 kg, untuk memenuhi CPP Provinsi 200 ton maka pada tahun 2015 ditambah pengadaan beras sebanyak 17.400 kg,

sehingga total terdapat 203.775 kg. Pengelolaan CPP Provinsi dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Perum BULOG.

Mekanisme penyaluran CPP Provinsi dilakukan dengan 2 cara, yaitu berdasarkan Perintah Gubernur (Top Down) dan usulan Kabupaten/Kota (Bottom Up).

Sampai pada tahun 2016, CPP disalurkan ke Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Sampang yang terkena bencana banjir dan longsor, sebesar 29.649 ton.

c) Stabilitasnya harga pangan (gabah/beras).

Kondisi harga beras tahun 2016 tingkat konsumen di Jawa Timur cukup stabil hal ini ditunjukkan dengan koefisien variasi (CV) kurang dari 5% yaitu : beras premium 2,98%, beras medium 3,49%, dan beras termurah 3,50% hal ini disebabkan selain sentra produksi, kondisi pasokan ke daerah-daerah di Jatim cukup stabil.

Sedangkan harga bawang merah dan cabai merah keriting sangat fluktuatif dengan CV masing-masing 25,98% dan 23,71% hal ini disebabkan permintaan cabai merah dan bawang merah segar cukup banyak sedangkan produksinya tergantung cuaca dan iklim daerah, seperti pada tabel dibawah.

Tabel 4.33
Tingkat Kestabilan Harga Pangan Strategis Di Jatim

No.	Komoditas	Max	Min	Rata2	Stdev	CV
1	Beras Premium	10.850	9.937	10.420	310,33	2,98
2	Beras Medium	9.792	8.706	9.179	319,99	3,49
3	Beras Termurah	8.810	7.923	8.318	290,89	3,50
4	Jagung pipilan kering	5.625	3.764	4.432	668,75	15,09
5	Biji Kedelai Kering	11.000	7.121	8.538	1.077,25	12,62
6	Bawang Merah	24.942	12.200	17.663	4.588,42	25,98
7	Cabe merah keriting	27.092	12.200	17.838	4.229,39	23,71
8	Daging sapi	102.500	87.500	96.195	4.709,64	4,90
9	Daging ayam ras	29.600	24.331	27.343	1.654,97	6,05
10	Telur ayam ras	21.824	16.311	18.388	1.686,67	9,17
11	Gula Pasir Lokal	11.112	9.400	10.461	688,68	6,58
13	Minyak goreng	10.939	9.204	10.264	473,11	4,61

Sumber data BKP diolah

d) Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Kerawanan pangan dibagi menjadi dua yaitu kerawanan pangan transien dan kerawanan pangan kronis.

Alat analisis yang dipakai untuk mendeteksi persoalan kerawanan pangan adalah sebagai berikut :

- Kerawanan pangan transien dideteksi menggunakan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- Kerawanan pangan kronis ditunjukkan oleh gambaran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).

Penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2016, dari hasil pemetaan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Jawa Timur sebanyak 605 kecamatan berada dalam kondisi tahan pangan, sebagaimana pada gambar dibawah. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari konsistensi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dalam perencanaan, pengawalan dan pelaksanaan program kegiatan yang secara langsung mempengaruhi pencapaian penurunan wilayah rawan pangan.



Gambar 4.9 Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan

Sasaran 2 : Peningkatan kualitas konsumsi Pangan (Food Utilization) dan Keamanan Pangan (Food Security)

Tingkat konsumsi dan kualitas pangan ditunjukkan oleh keragaman konsumsi pangan penduduk yang dianalisis melalui pendekatan perhitungan Pola Pangan Harapan (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dicerminkan dengan nilai skor PPH ideal 100 yang diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2025.

Skor PPH Jawa Timur mencapai 83,36 pada tahun 2016, mencapai 98,76% dari target 2016 sebesar 84,4. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat, namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk mengoptimalkan dan mengumandangkan Panganku Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk Percepatan Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan.

Tabel 4.34 Rata-Rata Konsumsi Pangan Tingkat RumahTangga Penduduk Jawa TimurTahun 2016

No.	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk					
		Berat Pangan/g/kap/hr	Energi (KKal)	% AKE *)	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH

No.	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk					
		Berat Pangan/g/kap/hr	Energi (KKal)	% AKE *).	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	291,7	1,144,0	57.2	28,6	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	33.7	44,6	2.2	1,1	2,5	1,1
3.	Pangan Hewani	73.9	140.7	7.0	14,1	24	14,16
4.	Lemak & Minyak	24.3	217.8	10.9	5,4	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Minyak	7.8	43.9	2.2	1,1	1,0	1,3
6.	Kacang-kacangan	33.0	85.2	4.3	8,5	10,0	8,6
7.	Gula	32.3	117.0	5.9	2,9	2,5	2,7
8.	Sayur & Buah	248.2	101.9	5.1	25,5	30,0	25,5
9.	Lainnya	57,6	46.1	2.3	0	0	0,0
	Jumlah	2.000	1,941.2	97.1	-	100	83,36

Ket : *). Angka Kecukupan Energi.

Sumber data BKP diolah

Keragaman ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Jawa Timur berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2016 skor Pola Pangan Harapan yang dicapai sebesar 83,36. Dari kelompok pangan yang sudah mencapai target pada kelompok padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, buah dan biji berminyak, gula sayur dan buah – buahan sudah berlebih, sedang yang belum mencapai target adalah pada kelompok pangan hewani sehingga perlu ada peningkatan.

Permasalahan pangan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan kompleks, perkembangan lingkungan yang global, seperti global climate change, meningkatnya harga minyak dunia, telah mendorong kompetisi penggunaan hasil pertanian untuk pangan (food), bahan energy (fuel) dan pakan ternak (feed) yang semakin tajam, disamping itu terjadi pengabaian terhadap good agricultural practices dan sumber pangan lokal (biodiversitif) dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan regional maupun nasional.

Salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor dapat dilakukan dengan pengembangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu. Sumber karbohidrat non beras dan non terigu ini mempunyai potensi dikembangkan, untuk mengurangi

ketergantungan terhadap import dengan memanfaatkan umbi-umbian.

Mengingat tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur (0,76%), menyebabkan kompleksnya permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sementara kapasitas produksi pangan pertumbuhannya masih lambat dan stagnan yang disebabkan adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya lahan dan air serta stagnannya pertumbuhan produktifitas lahan dan tenaga kerja pertanian.

Program Percepatan Penganekaragaman Pangan kegiatan Pengembangan pangan lokal dan tradisional merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan alternatif masyarakat Jawa Timur, mengingat konsumsi pangan penduduk Jawa Timur masih didominasi oleh kelompok pangan serealisa terutama beras yang diharapkan dapat menurunkan konsumsi beras masyarakat Jawa Timur dan beralih ke umbi-umbian, mengingat potensi umbi-umbian di Jawa Timur cukup banyak dan tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Sedangkan konsumsi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan umbi lainnya cenderung mengalami fluktuasi. Upaya untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian dengan penggunaan teknologi tepat guna dan mensosialisasikan program diversifikasi pangan dan gizi guna masyarakat tidak bergantung pada beras dan terigu, serta untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk pangan olahan guna menumbuhkan minat dan kecintaan untuk mengkonsumsi pangan lokal.

Capaian persentase keamanan pangan untuk pangan segar pada tahun 2016 sebesar 87,76% lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pangan aman target tahun 2015 yakni sebesar 84,91%.

Sasaran 3 : Meningkatnya pengetahuan, keterampilan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Evaluasi capaian kinerja tahun 2016 untuk Program adalah sebagai berikut :

- Jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sejumlah 2.742 orang terdiri dari penyuluh pertanian 2.118 orang, penyuluh perikanan 219 orang dan penyuluh kehutanan 405 orang.
- Pada Tahun 2016 jumlah penyuluh bersertifikat sejumlah 549 orang atau 20,02% dari jumlah penyuluh yang terdiri dari penyuluh pertanian 266 orang, penyuluh perikanan 23 orang dan penyuluh kehutanan 260 orang.
- Sedangkan Peningkatan Kelas Kelompok Tani terealisasi 376 kelompok dari target 396 atau 94,4%
- Tercapainya jumlah Penyuluh Bersertifikasi sebanyak 549 orang atau 168.9% dari target sejumlah 325 orang.
- Tercapainya Peningkatan Kelas kelompok Tani terealisasi 450 kelompok dari target 428 atau 105,14%.

c. Program

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Pagu anggaran Program sebesar Rp. 35.825.155.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 35.553.595.569,00 atau 99,24% untuk mendukung terdiri 10 kegiatan secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dengan Pagu anggaran Program sebesar Rp. 31.483.025.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 31.108.003.675,00 atau 98,80% untuk mendukung terdiri 9 kegiatan secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikan dan Kehutanan. Pagu anggaran kegiatan dengan anggaran Rp. 13.879.520.441,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.381.147.475,00 atau 96,13% secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Masih ditemui daerah rawan pangan di beberapa daerah di Jawa Timur.
- 2) Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur, terutama di daerah rawan pangan.
- 3) Banyak bantuan hibah yang tidak terealisasi karena adanya kesalahan nama dan alamat kelompok yang tertera di DPA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan apabila di PAPBD juga tidak bisa direalisasikan karena adanya persyaratan kelompok harus berbadan hukum Indonesia (BHI).
- 4) Keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama, pelaku usaha dan petugas tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dilingkungannya.
- 5) Menu B2SA yang tercipta tidak diterapkan dalam menu sehari-hari.
- 6) Walaupun ketersediaan pangan di Jawa Timur berlebih namun masih dijumpai beberapa daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan.
- 7) Konsumsi penduduk Jawa Timur terhadap : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dll masih kurang berimbang, hal ini ditunjukkan dengan skor PPH pada tahun 2016 sebesar 83,36 masih belum tercapai dari target skor PPH th. 2016 sebesar 84,4.
- 8) Belum stabilnya harga bahan pangan strategis terutama beras pada saat panen raya. Pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional harga beberapa komoditi pangan strategis mengalami kenaikan karena meningkatnya permintaan.
- 9) Kondisi Otonomi Daerah saat ini , menyebabkan kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota di Jawa Timur sangat bervariasi, yang berakibat permasalahan antara lain sebagai berikut :
 - Kelambagaan Penyuluhan masih beragam,
 - Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian kurang berjalan dengan baik.
 - Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian kurang efektif, karena fungsi penyuluhan bercampur dengan fungsi pengaturan dan pelayanan.
 - Belum semua kecamatan mempunyai BP3K/lembaga yang menangani penyuluhan.

- Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

Solusi:

- 1) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka menangani daerah rawan pangan.
- 2) Peningkatan jumlah penanganan daerah rawan pangan dengan memperluas cakupan desa rawan pangan dan perluasan program kegiatan.
- 3) Mengoptimalkan peranan Dewan Ketahanan Pangan sampai dengan tingkat daerah.
- 4) Mengoptimalkan peranan kelembagaan pangan dan gizi di daerah dalam rangka mengurangi jumlah masyarakat rawan pangan.
- 5) Peningkatan pemantapan pangan dengan optimalisasi pemanfaatan lumbung pangan dan pekarangan, sehingga ketersediaan pangan dan gizi keluarga dibisa terpenuhi.
- 6) Penyusunan buku kumpulan resep hasil Lomba Cipta Menu Dengan demikian, meski tidak diterapkan oleh penyusun menu tetapi dapat diterapkan oleh pembaca yang berminat untuk mengaplikasikan dalam menyusun menu B2SA.
- 7) Mengatasi meningkatkannya harga bahan pangan pada saat-saat tertentu dan pada saat menjelang HBKN, maka perlu dilaksanakan pasar murah dan operasi pasar.
- 8) Dalam rangka meningkatkan keragaman konsumsi pangan dilakukan upaya melalui : lomba cipta menu, beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dilingkungannya., Lomba cipta kreasi resep, Sosialisasi melalui media televisi, pelatihan konsumsi pangan berbasis PPH, bantuan alat pengolahan pangan dll.
- 9) Meningkatkan peranan tim SKPG sebagai antisipasi dan penanganan sejak dini terhadap terjadinya kerawanan pangan.
- 10) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok lahan kering dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- 11) Mensosialisasikan ke kabupaten/kota akan pentingnya legalitas kelompok.
- 12) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Provinsi Jawa Timur.

22. BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

22.1. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Tujuan

- Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan desa serta pemberdayaan masyarakat miskin;
- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan sarpras dasar dan pengembangan TTG;
- Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya lokal.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI (%)		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
1	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa/kel. dan pemberdayaan masyarakat miskin.	1. Prosentase peningkatan jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat di desa/kel. Yang aktif	3,7	1,8	-51,35
		2. Persentase RTM Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang memiliki usaha	19	15,51	-18,3
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	3. Prosentase Lembaga Ekonomi Desa yang terfasilitasi pengembangannya	58	70	20,6
2	Meningkatnya pusat layanan informasi TTG, dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar.	4. Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi (Posyantek) yang berfungsi.	24,6	25,4	0,03
		5. Prosentase kelompok masyarakat yang menerapkan TTG di Desa/Kelurahan	-	5	100

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI (%)		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
		6. Prosentase peningkatan jumlah komunitas masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan SDA	17,1	15,7	-8,18
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA	7. Jumlah Komunitas masyarakat yang mampu mendayagunaan dan memanfaatkan SDA dan TTG	70	60	-14,2
3	Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa/kel.	8. Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang aktif.	88	71,5	-18,75
		9. Prosentase peningkatan jumlah KPM yang bersertifikasi (sesuai standart pelatihan Permendagri 7 Tahun 2007)	23,3	15,0	-35,62
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel.	10 Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang aktif	88	71,5	-18,75
4	Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat.	11 Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	9,36	11,98	27,9
		12 Persentase Desa/Kel. Yang telah menerapkan Sistem Manajemen Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif	78	78,73	0,93
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	13 Prosentase Desa/Kel. Yang menerapkan Sistim Manajemen Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif (SMPP)	78	78,73	0,93

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat, desa/kel. dan pemberdayaan masyarakat miskin, ditetapkan 2 Indikator Kinerja:

- Prosentase peningkatan jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat di desa/kel. Yang aktif, realisasi target kinerja pada Tahun 2015 adalah sebesar 3,7 % dan pada tahun 2016 sebesar 1,8 %, tingkat kemajuan realisasi berkurang dikarenakan rasionalisasi anggaran, walaupun demikian pencapaian target dapat terpenuhi pada tahun 2016 yaitu dari target 1,3 % terealisasi sebesar 1,8 % atau tingkat pencapaian sebesar 147,1%, sedangkan Pada tahun 2015 pada indikator sasaran ini dari target 1,2 % terealisasi sebesar 3,7 % atau tingkat pencapaian sebesar 320 %.
- Persentase RTM Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) yang memiliki usaha, realisasi target kinerja pada Tahun 2015 adalah sebesar 19% dan pada tahun 2016 sebesar 15,51%, tingkat kemajuan realisasi berkurang dikarenakan rasionalisasi anggaran SKPD, walaupun demikian target capaian kinerja dapat tercapai lebih tinggi daripada tahun yang lalu. Pada Tahun 2015 pada indikator sasaran sasaran ini dari target kinerja 27 % dan teralisasi 19 % dengan capaiannya sebesar 72%, sedangkan pada Tahun 2016 dari target 16 % terealisasi sebesar 15,51 % atau tingkat pencapaiannya sebesar 99,81 %.

Sasaran 2 : Meningkatnya pusat layanan informasi TTG, dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar, ditetapkan 3 Indikator Kinerja, yaitu :

- Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi (Posyantek) yang berfungsi.pada Tahun 2015 sebesar 24,6% pada

tahun 2016 sebesar 25,4%, tingkat kemajuan realisasi lebih baik, dikarenakan adanya optimalisasi upaya fasilitasi kepada pengelola posyantek. Pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2015 dari target sebesar 24,6 %, terealisasi sebesar 24,6 % atau tingkat pencapaian sebesar 100 %, dan tingkat pencapaian 100 % juga dicapai pada tahun 2016, yaitu dari target 25,4 % terealisasi sebesar 25,4 %.

- Prosentase kelompok masyarakat yang menerapkan TTG di Desa/Kelurahan merupakan indikator yang ditambahkan pada tahun 2016, sehingga tingkat kemajuan realisasinya belum dapat dibandingkan dengan tahun yang lalu, walaupun demikian, pencapaian target kinerja ini pada tahun 2016 telah mencapai 100 % yaitu dari target 5 % telah terealisasi 5 %.
- Prosentase peningkatan jumlah komunitas masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan SDA pada tahun 2015 realisasi sebesar 17,1 % dan pada tahun 2016 sebesar 15,7 %, hal tersebut terkait dengan rasionalisasi anggaran, walaupun demikian pencapaian target tahun 2016 dari target 14,6 % terealisasi sebesar 15,67 % atau tingkat pencapaian sebesar 107 %.

Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, ditetapkan 2 Indikator Kinerja, yaitu :

- Prosentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang aktif pada Tahun 2015 realisasi sebesar 88% pada tahun 2016 sebesar 71,5% tingkat kemajuan tahun 2015 lebih baik dari tahun 2016, hal ini dikarenakan rasionalisasi APBD pada tahun 2016, walaupun demikian realisasi target pencapaian kinerja tahun 2016 telah tercapai sebesar 102,2 % yaitu dari target semula 70 % telah terealisasi 71,5%.

- Prosentase peningkatan jumlah KPM yang bersertifikasi (sesuai standart pelatihan Permendagri 7 Tahun 2007) pada Tahun 2015 realisasi kinerja sebesar 23,3% lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 15,04% dikarenakan rasionalisasi APBD pada tahun 2016, walaupun demikian pencapaian target kinerja pada tahun 2016 telah tercapai sebesar 118,8 % yaitu dari target target 12,7 %, terealisasi sebesar 15,04 % atau tingkat pencapaian sebesar 118,5 %.

Sasaran 4: Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat, ditetapkan 2 Indikator Kinerja, yaitu :

- Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada Tahun 2015 sebesar 9,36 % pada tahun 2016 sebesar 11,98 %, tingkat kemajuan sebesar 27,9 %. Pencapaian target kinerja pada Tahun 2015 untuk Indikator ini dari target 10 % terealisasi 9,36 % atau tingkat pencapaian sebesar 104,6 %, sedangkan pada tahun 2016 tingkat pencapaian sebesar 80 %, dari target 15 % dapat terealisasi sebesar 11,98 %, hal ini disebabkan karena faktor teknis materi swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat belum terukur secara optimal, antara bantuan yang diterima dengan upaya yang dilakukan masyarakat dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat belum terdata secara akurat.
- Prosentase ds/kel yang telah menerapkan Sistim Manajemen Pengelolaan Pembangunan Partisipatif (SMPP), realisasi pada Tahun 2015 sebesar 78% dan pada Tahun 2016 sebesar 78,73 %, tingkat kemajuan lebih baik pada tahun 2016, walaupun tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2015 masih lebih baik dari pada tahun 2016, dari target 75 % di tahun 2015, telah terealisasi sebesar 78 % atau tingkat pencapaian sebesar 104,6 %, sedangkan pada Tahun 2016 dari target 80 %, telah terealisasi sebesar 78,73 % atau tingkat pencapaian sebesar 98,41 %.

c. Program

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.427.117.100,- telah terealisasi sebesar Rp. 14.588.226.743,- (94,56 %). Program ini didukung oleh pelaksanaan 7 kegiatan yang secara terinci realisasi anggaran dan capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Formaat Matriks 16 kolom.
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.865.070.897,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.767.842.990,- (97,48 %). Program ini didukung oleh pelaksanaan 5 kegiatan yang secara terinci realisasi anggaran dan capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Formaat Matriks 16 kolom.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.889.398.121,- telah terealisasi sebesar Rp. 8.768.500.299,- (98,64 %). Program ini didukung oleh pelaksanaan 6 kegiatan yang secara terinci realisasi anggaran dan capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Formaat Matriks 16 kolom.
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.630.134.070,-, telah terealisasi sebesar Rp. 3.392.705.818,- (93,46 %). Program ini didukung oleh pelaksanaan 6 kegiatan yang secara terinci realisasi anggaran dan capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Saat ini persentase Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur berdasarkan data BPS per September 2016 adalah sebesar 11,85 %, masih berada diatas nasional,

persentase penduduk miskin terus menurun walaupun kecil, hal tersebut sulit dihindari pada saat persentase penduduk miskin mulai mendekati angka 10%, karena berhadapan dengan *hardcore poverty*, atau ada pula yang menyebutnya, *ultra-poor*, atau *extreme poor*, yakni kelompok paling miskin di antara orang miskin (*The poorest of the poor*), paling tidak berdaya, dan sulit dijangkau, kebijakan - kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin, akan dapat semakin berdampak antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak, yang dapat memicu inflasi yang cukup tinggi, akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Solusi :

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengatasi dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar hidupnya saja, tetapi perlu didukung antara lain dengan kebijakan yang *pro poor*, sinkronisasi program yang terpadu, penguatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan di desa/kel., pengambilan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin menjadi hal yang penting dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin menuju keberdayaan dan kemandirian. Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

e. Penghargaan Nasional Yang Diterima

1. Pemenang II Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan Regional II Tingkat Nasional diraih oleh Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.
2. Pemenang BUMDesa Tingkat Nasional Kategori Eco Agroeconomic Tahun 2016, diraih oleh BUMDesa Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
3. Penghargaan Nasional TP PKK Provinsi Jawa Timur :

4. Prakarti Utama III Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK Kategori Kabupaten (Kabupaten Jember, Kecamatan Panti, Desa Suci);
5. Prakarti Utama I, Pelaksana Terbaik Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Kategori Kabupaten (Kabupaten Ngawi, Kecamatan Grambe, Desa Ngrambe);
6. Prakarti Utama I Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kategori Kabupaten (Kabupaten Pacitan, Kecamatan Ngadirojo, Desa Nogosari);
7. Prakarti Utama I Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Hasil Toga, Kategori Kota (Kota Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Sukun);
8. Prakarti Utama I Pelaksana Terbaik Pelaksanaan Posyandu (Posyandu Melati) Kategori Kabupaten (Kabupaten Pacitan, Kecamatan Tegalombo, Desa Gemaharjo);
9. Prakarti Utama I Pelaksana Terbaik Pelaksanaan Posyandu (Posyandu Sentul B) Kategori Kota (Kota Madiun, Kecamatan Taman, Kelurahan Banjarejo);
10. Juara I Pentas Kreativitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menunjang Terwujudnya Ketahanan Keluarga (TP PKK Kota Malang).

25. BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Tujuan

- Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.
- Meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika	1. Jumlah lembaga komunikasi dan informasi yang diberdayakan	150 kelompok	175 kelompok	16,67%
2. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik	1. Jumlah SKPD yang terlayani Datacenter	56 SKPD	61 SKPD	8,93%
	2. Jumlah pemeliharaan jaringan TIK SKPD Prov Jatim	4 SKPD	46 SKPD	1.050%
3. Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi	1. Jumlah izin penyelenggaraan pos	5 izin	10 izin	100%
4. Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	1. Jumlah layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat	12 jenis	13 jenis	8,33%
	2. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap sengketa informasi	100%	100%	-

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 dengan sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika

➤ Jumlah Lembaga Komunikasi dan Informasi Yang Diberdayakan

Indikator kinerja jumlah lembaga komunikasi dan informasi yang diberdayakan pada tahun 2015 sebesar 150 kelompok, pada tahun 2016 sebesar 175 kelompok

Mengalami peningkatan target capaian kinerja dalam program ini dengan peningkatan anggota kelompok sosial yang diberdayakan antara lain kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pertura.

Sasaran 2 : Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta layanan publik

➤ Jumlah SKPD yang terlayani Datacenter

Indikator kinerja jumlah SKPD yang terlayani Datacenter pada tahun 2015 sebesar 56 SKPD, pada tahun 2016 sebesar 61 SKPD

Mengalami peningkatan target capaian kinerja dengan adanya Datacenter yang telah terbangun pada tahun 2015, sehingga pada tahun 2016 sarana prasarana telematika terintegrasi di Datacenter Provinsi Jawa Timur dan hosting-colocation SKPD Provinsi Jawa Timur.

➤ Jumlah pemeliharaan jaringan TIK SKPD Provinsi Jawa Timur

Indikator jumlah pemeliharaan jaringan TIK SKPD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 4 SKPD, pada tahun 2016 sebesar 46 SKPD. Mengalami peningkatan target capaian kinerja dengan SKPD yang terkoneksi dan terintegrasinya dalam intranet Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain optimalnya jumlah bandwidth yang ada

beserta pengelolaannya sehingga benar-benar dapat mendukung kinerja SKPD.

Sasaran 3 : Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi

- Jumlah izin penyelenggaraan pos

Indikator kinerja jumlah izin penyelenggaraan pos pada tahun 2015 sebanyak 5 izin, pada tahun 2016 sebanyak 10 izin.

Mengalami peningkatan target capaian kinerja karena adanya pengawasan dan penertiban, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos kantor cabang di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya hal di atas diharapkan adanya penurunan pelanggaran penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di Jawa Timur. Dalam rangka tertib administrasi dan persaingan yang sehat diantara penyelenggara pos di Jawa Timur.

Sasaran 4 : Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik

- Jumlah layanan Informasi yang Diberikan Kepada Masyarakat

Indikator kinerja jumlah layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat pada tahun 2015 sebesar 12 jenis, pada tahun 2016 sebesar 13 jenis.

Mengalami peningkatan target capaian kinerja layanan informasi berupa penyebarluasan informasi melalui kegiatan media elektronik, media luar ruang dan media layanan informasi. Diharapkan pemahaman masyarakat terhadap program kegiatan Pemprov Jatim melalui penyebarluasan informasi akan meningkat dan masyarakat semakin melek informasi.

- Persentase Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Terhadap Sengketa Informasi

Indikator kinerja persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat terhadap sengketa informasi pada tahun 2015 sebesar 100%, pada tahun 2016 sebesar 100%.

Mengalami peningkatan target capaian kinerja permohonan sengketa informasi publik mengalami kenaikan permohonan

sengketa karena keterbukaan informasi publik yang mendorong masyarakat sebagai pemohon informasi publik sadar menggunakan haknya sebagai pemohon informasi, sehingga Badan Publik sebagai termohon berupaya melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik.

c. Program

1. Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan anggaran Rp. 1.115.136.234,-. Realisasi sebesar Rp1.095.217.412,- atau 98.21% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program Pengembangan Teknologi Informasi, dengan anggaran Rp. 1.053.910.300,-. Realisasi sebesar Rp1.043.055.190,- atau 98.97% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK), dengan anggaran Rp. 6.522.480.000,-. Realisasi sebesar Rp6.474.382.932,- atau 99.26% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
4. Program Pos dan Telekomunikasi, dengan anggaran Rp. 732.833.000,-. Realisasi sebesar Rp721.950.950,- atau 98.52% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
5. Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi, dengan anggaran Rp. 3.261.691.000,-. Realisasi sebesar Rp3.228.417.430,- atau 98.98% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

6. Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi, dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,-. Realisasi sebesar Rp1.482.592.930,- atau 98.84% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
7. Program Pengelolaan jaringan Komunikasi, dengan anggaran Rp. 1.169.393.150,-. Realisasi sebesar Rp1.153.137.233,- atau 98.61% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Terbatasnya SDM Pengelola website SKPD, kab/ kota (belum ada staf khusus yang menangani atau bertanggung jawab khusus yang menangani website)
- Website SKPD Pemprov Jatim masih kurang memanfaatkan fitur-fitur interaktif, fasilitasi pencarian, hypelink dan multi media
- Dalam hal fitur website kab/ kota sebagian besar sudah memanfaatkan fitur interaktif, fasilitasi pencarian, hypelink dan multi media
- Lemahnya aspek perencanaan dan pengendalian penggunaan TIK untuk lembaga pemerintahan dan berbagai tantangan ke depan di bidang e-Government
- Lemahnya keseragaman pemahaman dan keterampilan penanggung jawab TIK untuk lembaga pemerintahan agar dapat bergerak secara serentak dan selaras sesuai dengan tujuan pembangunan.

Solusi:

- Mengadakan Rakor dengan pengelola website SKPD, kab/ kota untuk meningkatkan kompetensi pengelola website dan untuk meningkatkan kualitas website
- Melakukan redesain website
- Melaksanakan FGD
- Menyelenggarakan bimtek/ asistensi website

- Bekerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan di bidang TIK untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan kesadaran aparatur terhadap teknologi, sekaligus menyerap aspirasi untuk memperkuat kebijakan
- Berkolaborasi dengan komunikasi TIK antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, guna menciptakan sinergi dalam mencari solusi permasalahan di bidang TIK yang dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah terhadap permasalahan, strategi dan solusi dalam mengatasi problematika TIK di Jawa Timur
- Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang CIO (Chief Information Officer)

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- 2ndIndonesia Smartnation Award 2016 Gold Champion : Predikat B+ Kategori Provinsi Peringkat 2 diberikan Kepada Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Nopember 2016 di Hotel Bidakara Jakarta (Pemerintah Provinsi Jawa Timur).
- Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 “MI-GiLA” sembilan kategori Baik dari Gubernur Jawa Timur, diberikan pada tanggal 29 Nopember 2016 di Gedung Negara Graha-Surabaya (Dinas Kominfo Prov. Jatim).
- Penghargaan diberikan kepada Dinas Kominfo Prov. Jatim atas Prestasi dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2016 dengan predikat nilai kategori : “A” Memuaskan, diberikan pada tanggal 6Desember 2016 di Gedung Negara Graha-Surabaya (Dinas Kominfo Prov. Jatim).
- Penghargaan PPID Pembantu Dinas Kominfo Prov. Jatim sebagai Pendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Timur diberikan oleh komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Desember 2016 di Hotel Shantika Gubeng Surabaya (Dinas Kominfo Prov. Jatim).
- Penganugerahan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 Peringkat I Kategori Pemerintah Provinsi dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, diberikan pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta (Pemerintah Provinsi Jawa Timur).

25.2. KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

a. Tujuan

Meningkatkan peran KPID Jawa Timur dalam mewujudkan penyiaran di Jawa Timur yang berkualitas.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya kualitas penyiaran di Jawa Timur	1. Persentase peningkatan jumlah surat Rekomendasi Kelayakan (RK) yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	49,03%	46,15%	-5,87
	2. Persentase tindak lanjut lembaga penyiaran terhadap pelanggaran isi siaran yang disiarkan	96,55%	100%	3,57
	3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	-
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Media Penyiaran	1. Persentase tindak lanjut pengaduan terhadap materi penyiaran	100%	100%	-
2. Program Fasilitasi KPID Jawa Timur	2. Persentase cakupan fasilitasi KPID Jatim	100%	100%	-

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyiaran di Jawa Timur

- Persentase peningkatan jumlah surat Rekomendasi Kelayakan (RK) yang dikeluarkan tepat waktu;

Persentase peningkatan jumlah surat Rekomendasi Kelayakan (RK) yang dikeluarkan tepat waktu pada Tahun 2015

adalah sebesar 49,03% dan pada tahun 2016 sebesar 46,15% (mengalami penurunan). Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2016 anggaran untuk Evaluasi Dengar Pendapat mengalami pengurangan sehingga dengan demikian proses perijinan mengalami keterlambatan dan penundaan. Untuk mendapatkan surat Rekomendasi Kelayakan (RK), lembaga penyiaran harus mengikuti proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dilakukan oleh komisioner KPID, apabila dalam EDP tersebut dinyatakan layak, maka lembaga penyiaran bersangkutan berhak untuk mendapatkan surat rekomendasi kelayakan.

- Persentase tindak lanjut lembaga penyiaran terhadap pelanggaran isi siaran yang disiarkan;

Indikator kinerja Persentase tindak lanjut lembaga penyiaran terhadap pelanggaran isi siaran yang disiarkan pada Tahun 2015 sebesar 96,55% pada tahun 2016 sebesar 100% (mengalami peningkatan). Pada tahun 2016, pelanggaran isi siaran pada tayangan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran di Jawa Timur secara keseluruhan telah ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh KPID Jawa Timur.

- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti capaian kinerja pada Tahun 2015 sebesar 100% pada tahun 2016 sebesar 100% (tidak mengalami perubahan). Pengaduan masyarakat terhadap isi siaran pada konten siaran televisi dan radio di Jawa Timur yang disampaikan kepada KPID Jawa Timur telah diterima dan ditindaklanjuti semua oleh komisioner KPID Jawa Timur dengan melakukan pemanggilan secara tertulis kepada lembaga penyiaran yang diadukan oleh masyarakat untuk dilakukan klarifikasi terhadap aduan tersebut.

c. Program

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Media Penyiaran, dengan anggaran Rp.221.998.750,- Realisasi sebesar Rp. 221.808.250,- atau 99,91% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Fasilitasi KPID Jawa Timur, dengan anggaran Rp.1.309.356.450,- Realisasi sebesar Rp. 1.308.694.231,- atau 99,95% untuk mendukung 6 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi**Permasalahan:**

- Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan utama (Monitoring isi siaran) masih sangat terbatas dan sangat sederhana;
- Kegiatan pengawasan isi siaran yang dilakukan masih pada lembaga penyiaran televisi dan radio di Kota Surabaya;
- Pelaksanaan kegiatan belum sesuai perencanaan;
- Kualitas SDM pegawai Sekretariat KPID Provinsi Jawa Timur belum merata terutama bidang IT;
- Kurang tertibnya administrasi dan belum optimalnya pengelolaan data.

Solusi:

- Melakukan pengadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan utama penyiaran (alat monitoring) secara bertahap baik untuk televisi dan radio
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat di luar kota Surabaya untuk ikut serta dalam pengawasan isi siaran televisi dan radio lokal;
- Melakukan real time schedule;
- Memberikan pembinaan dan pelatihan pada pegawai;
- Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data secara bertahap.

26. BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

26.1. BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR

BIDANG URUSAN KEARSIPAN

a. Tujuan

- Meningkatkan SDM pengelola kearsipan dan sistem administrasi kearsipan yang berkualitas di Jawa Timur;
- Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan arsip yang bernilai guna.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya sistem tertib administrasi dan pengembangan SDM kearsipan	Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	20,41	20,41 %	-
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di SKPD	243	115	(52,67)
	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	10	10	-
II. Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip	Jumlah daftar inventaris	78	82	5,13
1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip yang menjadi bahan informasi	6	4	(33,33)
III. Meningkatnya masyarakat sadar arsip	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan	78,02 %	80,13 %	2,70
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan	78,02 %	80,13 %	2,70

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pada Tahun 2015 – 2016 kinerja Bidang Urusan Kearsipan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan sistem tertib administrasi dan pengembangan SDM kearsipan

- Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku;
Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku capaian kinerja pada tahun 2015 adalah sebesar 20,41 % dan pada tahun 2016 tetap sebesar 20,41 %. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode dalam pembinaan dan sosialisasi kearsipan di SKPD yaitu dengan membina dan mendampingi 10 SKPD yang sudah masuk kategori “BAIK” dalam pengelolaan kearsipan untuk dijadikan pilot project bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sasaran 2 : Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip;

- Jumlah daftar inventaris
Indikator jumlah daftar inventaris yang dimiliki pada tahun 2015 sebanyak 78 daftar inventaris. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 82 daftar inventaris. Kenaikan sebanyak 4 daftar inventaris dikarenakan hasil dari akuisisi arsip statis dari SKPD sebanyak 5.076 berkas.

Sasaran 3 : Meningkatkan masyarakat sadar arsip

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Kearsipan pada tahun 2015 sebesar 78,02 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 80,13 %. Inovasi Layanan Wisata Arsip merupakan salah satu faktor peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan.

c. Program

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan anggaran Rp. 531.741.600,-. Realisasi sebesar Rp. 531.123.300,- atau 99,88 % untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format

Matriks 16 kolom. Capaian Kinerja Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan diukur dengan indikator yaitu :

- Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di SKPD

Capaian SDM Pengelola Kearsipan di SKPD pada tahun 2015 sebesar 243 orang, sedangkan pada tahun 2016 hanya bertambah sebanyak 115 orang. Penurunan capaian program ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran.

- Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

Capaian SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku pada tahun 2015 sebesar 10 SKPD dan di tahun 2016 capaiannya tetap. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode dalam pembinaan dan sosialisasi kearsipan di SKPD yaitu dengan membina dan mendampingi 10 SKPD yang sudah masuk kategori “BAIK” dalam pengelolaan kearsipan untuk dijadikan pilot project bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah terdiri dari 6 kegiatan, dengan anggaran Rp. 1.944.535.000,-. Realisasi sebesar Rp. 1.931.279.158,- atau 99,32 % untuk mendukung 6 (enam) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom. Capaian Kinerja Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan, yang pada tahun 2015 bertambah 6 (enam) daftar inventaris dan di tahun 2016 bertambah 4 (empat) daftar inventaris menjadi 82 daftar inventaris.
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan) dengan anggaran Rp. 559.258.400,-. Realisasi sebesar Rp. 556.571.740,- atau 99,57 % untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom. Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Kearsipan) diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Kearsipan pada tahun 2015 sebesar 78,02 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 80,13 %.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Bidang Kearsipan masih dianggap tidak penting oleh banyak SKPD, sehingga banyak arsip SKPD yang tidak diperhatikan penanganannya karena tidak ada tenaga pengelola kearsipan maupun ruang untuk menyimpan arsip;
- Kurangnya jumlah fungsional arsiparis yang sehingga banyak SKPD yang belum pernah mendapatkan bimbingan secara intensif yang dilakukan oleh fungsional arsiparis;
- Sarana dan prasarana penyimpanan arsip (depo arsip) yang dimiliki tidak memenuhi standar.

Solusi :

- Memberikan sosialisasi dan bimbingan yang berkelanjutan serta penilaian bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Jawa Timur;
- Meminta kepada SKPD untuk lebih berkomitmen dalam pengelolaan arsip di masing-masing SKPD;
- Mewajibkan SKPD membentuk tim pengelola kearsipan dalam rangka mewujudkan good governance dan clear goverment;
- Menambah jumlah SDM fungsional arsiparis baik melalui diklat fungsional arsiparis bagi pegawai maupun melalui penambahan pegawai untuk formasi arsiparis;
- Membangun depo yang sesuai dengan standar dari ANRI.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Piagam Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia Atas Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2016 bagi Provinsi dengan nilai 82 (delapan puluh dua) dengan kategori “BAIK”.

BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN

a. Tujuan

Meningkatkan Gemar dan Budaya Baca Masyarakat di Jawa Timur

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur	Indeks Minat dan Budaya Baca	65,25	69,75	6,90
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	80,33	82,73	2,99
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Indeks Minat dan Budaya Baca	65,25	69,75	6,90
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	80,33	82,73	2,99

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pada Tahun 2015 – 2016 kinerja Bidang Urusan Perpustakaan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya gemar dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur,

ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

➤ **Indeks Minat dan Budaya Baca**

Indeks Minat dan Budaya Baca sejak pertama kali dilakukan penelitian pada tahun 2006 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 penelitian dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dengan hasil sebesar 42 %. Tahun 2013, 2015 dan 2016 dilaksanakan penelitian kembali bekerjasama dengan Universitas Airlangga dengan hasil Indeks Minat Budaya Baca sebesar 56,05 %, 65,25 % dan terakhir 69,75 %. Peningkatan Indeks Minat Budaya Baca dikarenakan adanya upaya mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan melalui program

perpustakaan PKK desa/kelurahan dan bekerjasama dengan PKK sebagai tenaga penyuluh gemar membaca.

➤ Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Perpustakaan juga cenderung mengalami peningkatan dari 80,33 % di tahun 2015 menjadi 82,73 % pada tahun 2016. Salah satu faktor peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dikarenakan adanya penambahan jam buka layanan perpustakaan sampai dengan jam 19.00, meskipun masih ada masyarakat yang belum puas dan menginginkan jam buka layanan perpustakaan sampai dengan jam 21.00.

c. Program

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan anggaran Rp. 15.512.931.700,-. Realisasi sebesar Rp. 15.322.547.146,- atau 98,77 % mendukung 10 (sepuluh) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matriks 16 kolom. Capaian Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan diukur dengan indikator yang sama dengan pengukuran indikator kinerja sasaran.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Kapasitas Gedung Layanan Perpustakaan kurang memadai dengan semakin banyaknya jumlah pengunjung yang datang;
- Koleksi yang dimiliki masih jauh dari standar perpustakaan umum;
- Jumlah perpustakaan desa / kelurahan masih 36 % dari jumlah desa / kelurahan Jawa Timur;
- Kurangnya SDM Fungsional Pustakawan sehingga menghambat pembinaan ke Kabupaten/Kota;

Solusi :

- Membangun pojok-pojok baca, rumah-rumah baca untuk mendekatkan bahan pustaka/bacaan ke masyarakat;
- Menambah koleksi perpustakaan;
- Mempercepat pertumbuhan perpustakaan desa/kelurahan melalui kerjasama kabupaten/kota dan swasta melalui dana CSR
- Menambah jumlah SDM Fungsional Pustakawan baik melalui diklat fungsional pustakawan bagi pegawai maupun melalui penambahan pegawai untuk formasi pustakawan.

URUSAN PILIHAN

1. BIDANG URUSAN PERTANIAN

1.1. DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri pengolahan;
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

No.	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
1.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan	Produktivitas Padi (ku/ha)	61,13	60,10	(1,69)
		Jagung (ku/ha)	50,52	50,82	0,60
		Kedelai (ku/ha)	16,58	15,79	(4,75)
		Sayuran (ku/ha)	98,23	111,30	13,30
		Buah-buahan (kg/phn)	37,66	38,69	2,74
		Tan. Hias (tangcai/m ²)	31,82	49,63	55,97
		Tan. Biofarmaka (kg/m ²)	1,51	4,53	200,29
		Produksi Padi (ton)	13.154.967	13.540.950	2,93
		Jagung (ton)	6.131.163	6.266.878	2,21
		Kedelai (ton)	344.998	298.121	(13,59)
		Sayuran (ton)	1.701.651	1.442.102	(15,25)
		Buah-buahan (ton)	4.579.642	1.988.689	(56,58)
	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Tan. Hias (tangcai)	331.485.623	166.643.348	(49,73)
		Tan. Biofarmaka (kg)	159.578.751	57.785.504	(63,79)
		Luas Panen Padi (ha)	2.152.070	2.253.204	4,70
		Jagung (ha)	1.213.654	1.233.090	1,60
		Kedelai (ha)	208.067	188.756	(9,28)
		Sayuran (ha)	173.233	129.572	(25,20)
		Cabe Besar (ha)	14.454	9.315	(35,55)
		Cabe rawit (ha)	53.777	34.327	(36,17)
		Bawang Merah (ha)	30.784	28.605	(7,08)
		Buah-buahan (phn, rmp)	121.612.789	51.402.141	(57,73)
		Mangga (phn)	8.333.569	1.060.183	(87,28)

No.	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT
			2015	2016	KEMAJUAN (%)
		<i>Pisang (rmp)</i>	21.186.844	19.131.090	(9,70)
		<i>Jeruk Keprok/Siam (phn)</i>	6.046.442	5.506.846	(8,92)
		Tan. Hias (m ²)	10.417.372	3.357.766	(67,77)
		<i>Anggrek (m²)</i>	228.813	84.922	(62,89)
		<i>Krisan (m²)</i>	5.741.853	3.086.177	(46,25)
		Tan. Biofarmaka (m ²)	105.688.447	12.744.851	(87,94)
		<i>Temulawak (m²)</i>	8.180.133	467.828	(94,28)
		<i>Jahe (m²)</i>	52.922.910	8.067.995	(84,76)
		Produktivitas			
		Padi (ku/ha)	61,13	60,10	(1,69)
		Jagung (ku/ha)	50,52	50,82	0,60
		Kedelai (ku/ha)	16,58	15,79	(4,75)
		Sayuran (ku/ha)	98,23	111,30	13,30
		<i>Cabe Besar (ku/ha)</i>	63,25	86,25	36,35
		<i>Cabe rawit (ku/ha)</i>	46,55	61,77	32,71
		<i>Bawang Merah (ku/ha)</i>	90,32	82,68	(8,46)
		Buah-buahan (kg/phn)	37,66	38,69	2,74
		<i>Mangga (kg/phn)</i>	105,64	71,26	(32,54)
		<i>Pisang (kg/phn)</i>	74,79	45,84	(38,70)
		<i>Jeruk Keprok/Siam (kg/phn)</i>	79,64	57,51	(27,79)
		Tan. Hias (tangcai/m ²)	31,82	49,63	55,97
		<i>Anggrek (tangcai/m²)</i>	16,96	23,29	37,37
		<i>Krisan (tangcai/m²)</i>	19,88	21,85	9,92
		Tan. Biofarmaka (kg/m ²)	1,51	4,53	200,29
		<i>Temulawak (kg/m²)</i>	1,68	1,60	(4,82)
		<i>Jahe (kg/m²)</i>	1,46	6,30	331,21
		Produksi			
		Padi (ton)	13.154.967	13.540.950	2,93
		Jagung (ton)	6.131.163	6.266.878	2,21
		Kedelai (ton)	344.998	298.121	(13,59)
		Sayuran (ton)	1.701.651	1.442.102	(15,25)
		<i>Cabe Besar (ton)</i>	91.427	80.339	(12,13)
		<i>Cabe rawit (ton)</i>	250.305	212.034	(15,29)
		<i>Bawang Merah (ton)</i>	278.034	236.500	(14,94)
		Buah-buahan (ton)	4.579.642	1.988.689	(56,58)
		<i>Mangga (ton)</i>	880.350	75.553	(91,42)
		<i>Pisang (ton)</i>	1.584.572	877.022	(44,65)
		<i>Jeruk Keprok/Siam (ton)</i>	481.568	316.710	(34,23)
		Tan. Hias (tangcai)	331.485.623	166.643.348	(49,73)
		<i>Anggrek (tangcai)</i>	3.879.651	1.978.029	(49,02)
		<i>Krisan (tangcai)</i>	114.135.230	67.429.096	(40,92)
		Tan. Biofarmaka (kg)	159.578.751	57.785.504	(63,79)
		<i>Temulawak (kg)</i>	13.709.171	746.259	(94,56)
		<i>Jahe (kg)</i>	77.329.483	50.834.676	(34,26)

No.	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
		Index Pertanaman Sawah (%)	1,87	2,02	8,20
		Prosentase Peningkatan Terkendalnya Serangan OPT dan DPI pada Areal Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	95,68	98,43	2,88
2.	Peningkatan Efisiensi, Kualitas dan Jumlah Olahan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur	Prosentase pertumbuhan nilai tambah usahatani tanaman pangan :			
		- Padi	0,45	2,40	435,53
		- Jagung	0,43	15,41	3.516,17
		Prosentase pertumbuhan jumlah kebun/lahan usaha yang terregistrasi melalui penerapan GAP (sayuran, buah-buahan, tan. Hias dan Biofarmaka)	-9,04	20,76	123,12
		Prosentase pertumbuhan jumlah produk hasil pertanian(tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) bersertifikat	(61,54)	2.610,00	(4.341,25)
	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian	Prosentase pertumbuhan nilai tambah usahatani tanaman pangan :			
		- Padi	65,01	66,57	2,40
		- Jagung	44,77	51,67	15,41
		Jumlah kebun/lahan usaha yang terregistrasi melalui penerapan GAP pada sayuran, buah-buahan, tan. Hias dan Biofarmaka (unit kebun/lahan usaha)	342	413	20,76
		Jumlah produk hasil pertanian bersertifikat komoditas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan (unit)	10	271	2.610,00

No.	SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
3.	Peningkatan Kapasitas Petani	Prosentase Peningkatan Kapasitas Petani	0,037	0,039	4,84
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian	Prosentase Pertumbuhan Kelompok yang menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	28,30	13,60	-51,93
		Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kelompok yang menerapkan Good Agriculture Practices	53,07	43,95	-17,20

Evaluasi terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Pertanian yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan

➤ **Luas panen sesuai Angka Ramalan II**

Luas panen Padi telah terealisasi 2.253.204 hektar dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 2.152.070 hektar mengalami pertumbuhan 4,70 persen. Luas panen Jagung telah terealisasi 1.233.090 hektar, dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 1.213.654 hektar mengalami pertumbuhan 1,60 persen. Luas panen Kedelai telah terealisasi 188.756 hektar dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 208.067 hektar mengalami pertumbuhan negatif 9,28 persen. Luas panen Sayuran telah terealisasi 129.572 hektar, jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 173.233 hektar mengalami pertumbuhan negatif 25,20 persen. Luas panen Cabe Besar telah terealisasi 9.315 hektar dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 14.454 hektar mengalami pertumbuhan negatif 35,55 persen. Luas panen Cabe rawit telah terealisasi 34.327 hektar dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 53.777 hektar mengalami pertumbuhan negatif 36,17 persen.

Luas panen Bawang Merah telah terealisasi 28.605 hektar dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 30.784 hektar mengalami pertumbuhan negatif 7,08 persen. Luas panen Buah-buahan telah terealisasi 51.402.141 pohon/rumpun, dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 121.612.789 pohon/rumpun mengalami pertumbuhan negatif 57,73 persen. Luas panen Mangga dengan target seluas 1.060.183 pohon, dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 8.333.569 pohon mengalami pertumbuhan negatif 87,28 persen. Luas panen Pisang terealisasi 19.131.090 rumpun, dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 21.186.844 rumpun mengalami pertumbuhan negatif 9,70 persen. Luas panen Jeruk Keprok / Siam telah terealisasi 5.506.846 pohon, dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 6.046.442 pohon mengalami pertumbuhan negatif 8,92 persen. Luas panen Tanaman Hias telah terealisasi 3.357.766 m², dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 10.417.372 m² mengalami pertumbuhan negatif 67,77 persen. Luas panen Anggrek terealisasi 84.922 m², dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 228.813 m² mengalami pertumbuhan negatif 62,89 persen. Luas panen Krisan terealisasi 3.086.177 m², dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 5.741.853 m² mengalami pertumbuhan negatif 46,25 persen. Luas panen Tanaman Bio farmaka terealisasi 12.744.851 m², dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 105.688.447 m² mengalami pertumbuhan negatif 87,94 persen. Luas panen Temu lawak terealisasi 467.828 hektar, dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 8.180.133 m² mengalami pertumbuhan negatif 94,28 persen. Luas panen Jahe terealisasi 8.067.995 m² dan jika dibandingkan luas panen tahun 2015 seluas 52.922.910 m² mengalami pertumbuhan negatif 84,76 persen.

➤ **Produktivitas sesuai Angka Ramalan II :**

Capaian produktivitas Padi tahun 2016 sebesar 60,10 ku/ha jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 61,13 ku/ha, menunjukkan pertumbuhan (1,69) persen. Capaian produktivitas Jagung tahun 2016 sebesar 50,82 ku/ha, jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 50,52 ku/ha, menunjukkan pertumbuhan 0,60 persen. Capaian produktivitas Kedelai tahun 2016 sebesar 15,79 ku/ha, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 16,58 ku/ha, menunjukkan pertumbuhan (4,75) persen. Capaian produktivitas Sayuran tahun 2016 sebesar 111,30 ku/ha, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 98,23 ku/ha, menunjukkan pertumbuhan 13,30 persen. Capaian produktivitas Cabe besar tahun 2016 sebesar 86,25 ku/ha, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 63,25 ku/ha, menunjukkan pertumbuhan 36,35 persen. Capaian produktivitas Cabe rawit tahun 2016 61,77 ku/ha, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 46,55 ku/ha, menunjukkan pertumbuhan 32,71 persen. Capaian produktivitas Bawang merah tahun 2016 sebesar 82,68 ku/ha atau 68,95 persen, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 90,32 ku/ha, menunjukkan pertumbuhan (8,46) persen. Capaian produktivitas Buah – buahan tahun 2016 sebesar 38,69 kg/pohon, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 37,66 kg/pohon, menunjukkan pertumbuhan 2,74 persen. Capaian produktivitas Mangga tahun 2016 sebesar 71,26 kg/pohon, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 105,64 kg/pohon, menunjukkan pertumbuhan (32,54) persen. Capaian produktivitas Pisang tahun 2016 sebesar 45,84 kg/rumpun, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 74,79 kg/rumpun, menunjukkan pertumbuhan (38,70) persen. Capaian produktivitas Jeruk keprok / siam tahun 2016 sebesar 57,51 kg/pohon, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 79,64 kg/pohon, menunjukkan pertumbuhan (27,79) persen. Capaian produktivitas Tanaman hias tahun 2016 sebesar 49,63 tangkai/m², dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 31,82 tangkai/m², menunjukkan pertumbuhan 55,97 persen. Capaian produktivitas Anggrek tahun 2016 sebesar 23,29 tangkai/m², dan jika dibandingkan tahun 2015

sebesar 16,96 tangkai/m², menunjukkan pertumbuhan 37,37 persen. Capaian produktivitas Krisan tahun 2016 sebesar 21,85 tangkai/m², dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 19,88 tangkai/m², menunjukkan pertumbuhan 9,92 persen. Capaian produktivitas Tanaman Bio farmaka tahun 2016 sebesar 4,53 kg/m², dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,51 kg/m², menunjukkan pertumbuhan 200,29 persen. Capaian produktivitas Temu lawak tahun 2016 sebesar 1,60 kg/m², dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,68 kg/m², menunjukkan pertumbuhan (4,82) persen. Capaian produktivitas Jahe tahun 2016 sebesar 6,30 kg/m², dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,46 kg/m², menunjukkan pertumbuhan 331,21 persen.

➤ **Produksi sesuai Angka Ramalan II:**

Capaian produksi Padi tahun 2016 sebesar 13.540.950 ton dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 13.154.967 ton, menunjukkan pertumbuhan 2,93 persen. Capaian produksi Jagung tahun 2016 sebesar 6.266.878 ton dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 6.131.163 ton, menunjukkan pertumbuhan 2,21 persen. Capaian produksi Kedelai tahun 2016 sebesar 298.121 ton dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 344.998 ton, menunjukkan pertumbuhan (13,59) persen. Capaian produksi Sayuran tahun 2016 sebesar 1.442.102 ton dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 1.701.651 ton menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu (15,25) persen. Capaian produksi Cabe Besar tahun 2016 sebesar 80.339 ton, dan jika dibandingkan tahun 2015 tercapai 91.427 ton, menunjukkan pertumbuhan negatif 12,13 persen. Capaian produksi Cabe rawit tahun 2016 sebesar 212.034 ton jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 250.305 ton, menunjukkan pertumbuhan negatif (15,29) persen. Capaian produksi Bawang Merah tahun 2016 sebesar 236.500 ton, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 278.034 ton, menunjukkan pertumbuhan (14,94) persen. Capaian Produksi Buah –buahan tahun 2016 sebesar 1.988.689 ton, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 4.579.642 ton, menunjukkan pertumbuhan (56,58) persen. Capaian produksi Mangga

tahun 2016 sebesar 75.553 ton, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 880.350 ton, menunjukkan pertumbuhan (91,42) persen. Capaian produksi Pisang tahun 2016 sebesar 877.022 ton, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 1.584.572 ton, menunjukkan pertumbuhan (44,65) persen. Capaian produksi Jeruk Keprok / Siam tahun 2016 sebesar 316.710 ton tercapai, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 481.568 ton, menunjukkan pertumbuhan (34,23) persen. Capaian produksi Tanaman hias tahun 2016 sebesar 166.643.643 tangkai, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 331.485.623 tangkai, menunjukkan pertumbuhan (49,73) persen. Capaian produksi Anggrek tahun 2016 sebesar 1.978.029 dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 3.879.651 tangkai, menunjukkan pertumbuhan negatif (49,02) persen. Capaian produksi Krisan tahun 2016 sebesar 67.429.096 tangkai, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 114.135.230 tangkai, menunjukkan pertumbuhan (40,92) persen. Capaian produksi tanaman Bio farmaka tahun 2016 sebesar 57.785.504 kg dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 159.578.751 kg, menunjukkan pertumbuhan (63,79) persen. Capaian produksi Temu lawak tahun 2016 sebesar 746.259, dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 13.709.171 kg, menunjukkan pertumbuhan (94,56) persen. Capaian produksi Jahe tahun 2016 sebesar 50.834.676 kg dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 77.329.483 kg, menunjukkan pertumbuhan negatif 34,26 persen.

- Index Pertanaman Lahan Sawah tahun 2016 tercapai 2.02 jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1,87 mengalami peningkatan 8,02 persen;
- Prosentase terkendalinya Serangan OPT dan DPI pada areal tanam tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2016 tercapai 98,43 persen dan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 95,68 menunjukkan pertumbuhan 2,88 persen.

Sasaran 2 : Peningkatan Efisiensi, Kualitas dan Jumlah Olahan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur

- Presentase Nilai tambah usahatani tanaman pangan padi dengan asumsi HET pupuk dan HPP gabah tetap pada tahun 2016 tercapai 66,57 persen peningkatan jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 65,01 persen menunjukkan peningkatan 2,40 persen. Sedangkan pada komoditas Jagung pada tahun 2016 tercapai 51,67 menunjukkan pertumbuhan 15,41 jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 44,77. Peningkatan persentase nilai tambah terjadi karena petani mulai menjual produknya tidak lagi berupa hasil panen padi dalam bentuk GKP demikian pula dengan jagung tetapi melakukan pengolahan hasil panen dengan fasilitasi bantuan alat dan mesin pertanian panen dan pasca panen;
- Jumlah kebun/lahan usaha yang terregistrasi melalui penerapan GAP (sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Biofarmaka) dengan target sesuai review renstra sebesar 385 kebun/lahan usaha tercapai 413 kebun / lahan usaha dan jika dibandingkan tahun 2015 sebanyak 342 kebun / lahan usaha menunjukkan peningkatan sebesar 28 register atau 20,76 persen karena petani mulai tertarik menerapkan GAP secara mandiri;
- Jumlah produk hasil pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) bersertifikat tercapai 271 produk bersertifikat atau mencapai. Apabila dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 10 produk terlihat peningkatan sebesar 2.610 persen. Capaian tersebut disebabkan pelaku usaha agribisnis telah menerapkan uji sertifikasi untuk produk pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) secara mandiri.

Sasaran 3 : Peningkatan Kapasitas Petani

- Prosentase Kelompok yang menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) tercapai 13,60 persen pada tahun 2016, akan tetapi menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 28,30 persen dengan pertumbuhan negatif sebesar 51,93 persen. Hal tersebut disebabkan petani belum memiliki kesadaran menerapkan

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara mandiri dan masih tergantung pada fasilitasi pemerintah;

- Prosentase Kelompok yang menerapkan *Good Agriculture Practices* tercapai 43,95 persen pada tahun 2016, akan tetapi menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 53,07 persen dengan pertumbuhan negatif sebesar 17,20 persen. Hal ini disebabkan petani belum banyak tertarik menerapkan *GAP* secara mandiri dan masih tergantung pada fasilitasi pemerintah;

c. Program

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 60.851.699.875,00 dengan realisasi sebesar Rp. 58.183.798.947,00 atau 95,62 persen. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional, serta meningkatkan ekspor non migas dengan 15 pelaksanaan kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

2. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian

Upaya peningkatan efisiensi, kualitas dan jumlah olahan produk tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan melalui Program Pengembangan Agribisnis dengan tujuan memfasilitasi pengembangan usaha agrobisnis yang mencakup usaha di bidang pertanian hulu, on farm (budi daya), hilir (agroindustri), dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu.

Program Pengembangan Agribisnis Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 34.319.450.980,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.709.565.261,00 atau 98,22 persen. Program ini diarahkan untuk memfasilitasi pengembangan usaha agrobisnis yang mencakup usaha di bidang pertanian hulu, on farm (budidaya), hilir (agroindustri), dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu.

Agrobisnis lebih ditekankan pada kegiatan perdagangan, sedangkan agroindustri merupakan kegiatan pengolahan hasil pertanian dengan pelaksanaan melalui 7 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian.

Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 4.236.062.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.042.292.213,00 atau 95,43 persen. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian dengan pelaksanaan 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- a) Pada tahun anggaran 2016 terdapat beberapa kegiatan dari Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan :
- Produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan belum seluruhnya dapat dilaporkan karena masih merupakan Angka Ramalan dan Rekapitulasi Provinsi Statistik Pertanian tahun 2016;
 - Masih terjadi mutasi lahan sawah irigasi;
 - Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu. dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK;

- Ketersediaan benih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, dan harga;
 - Kebutuhan alsintan terutama untuk proses pengolahan tanah. dan tanam masih tinggi terutama dengan semakin terbatasnya tenaga kerja di pedesaan;
 - Kondisi jaringan irigasi (JITUT / JIDES) banyak mengalami kerusakan dan sekitar 30 persen memerlukan rehabilitasi.
- b) Implementasi kegiatan - kegiatan dari Program Pengembangan Agribisnis yang menunjukkan bahwa produktivitas dan mutu produksi tanaman pangan belum optimal dengan masih lemahnya daya saing komoditas karena lemahnya posisi tawar (*bargaining-position*) Petani / Kelompok Tani;
- c) Implementasi kegiatan – kegiatan dari Program Peningkatan Kapasitas Petani :
- Terselenggaranya Gebyar Hari Krida Pertanian sebagai bhakti krida dan bhakti sosial yang merupakan perwujudan keberpihakan terhadap pertanian. juga merupakan promosi kepada masyarakat agar lebih mencintai produk dalam negeri masih belum sepenuhnya mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota hanya diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota;
 - Masih lemahnya kemampuan berwirausaha pada pelaku agribisnis.

Solusi:

- a) Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui :
- Meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian alih fungsi lahan sesuai RTRW kabupaten / kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur tahun 2011-2031 telah ditetapkan Rancangan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031;
 - Penyediaan benih padi dan jagung di Jawa Timur sudah terpenuhi di tingkat usaha tani. Permasalahan hanya pada benih kedelai yang ketersediaannya

terbatas dan telah diupayakan peningkatan produksi benih kedelai bersertifikat melalui industri perbenihan (swasta/ penangkar) sehingga ketersediaan benih kedelai di tingkat petani memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu jenis, mutu, waktu, jumlah, tempat, dan harga;

- Meningkatkan koordinasi dan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida / KP3 Provinsi Jawa Timur terhadap distribusi pupuk di Jawa Timur serta melakukan evaluasi dan pelaporan perencanaan penyaluran dan persempunaan pupuk sekaligus mengintensifkan pembinaan penggunaan pupuk organik dan anorganik ditingkat petani;
- Meningkatkan fasilitasi sarana prasarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian dikawasan sentra produksi pangan sesuai komitmen pemerintah pusat dan provinsi;
- Perbaikan jaringan irigasi sesuai komitmen pemerintah pusat dan provinsi dan melakukan optimalisasi pemanfaatan air irigasi.

b) Meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan dan hortikultura :

- Meningkatkan fasilitasi sarana prasarana pertanian berupa alat dan mesin panen dan pasca panen dikawasan sentra produksi;
- Pelatihan agribisnis bagi petani tentang daya saing produk pertanian yang meliputi mutu produk, keamanan pangan dan tingkat efisiensi usaha tani karena biaya produksi yang relatif tinggi berdampak harga produk menjadi kurang kompetitif;

c) Upaya pemecahan permasalahan Program Peningkatan Kapasitas Petani :

- Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota supaya berpartisipasi pada penyelenggaraan Gebyar Hari Krida Pertanian di tahun-tahun mendatang;
- Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi petani sebagai pelaku agribisnis dan kemitraan usaha;

e. Penghargaan Nasional yang Diterima

1. Kelompok tani Komoditas Jagung Berprestasi

Kelompok Tani Jagung "Rukun Makmur" Kab. Pasuruan, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia Nomor 83/HK.310/C/10/2016 Tanggal 3 Oktober 2016, Tentang Penerimaan

Penghargaan Kelompok Tani, Mantri Tani, Petugas Perbenihan, Produsen/Penangkar Benih, Petugas POPT, Petugas POPT-PHP, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati (PAH) dan Petani Pengembangan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Berprestasi Tahun 2016

2. Kelompoktani Komoditas Kedelai Berprestasi

Kelompok Tani Tani Mulyo, Kabupaten Jember, sesuai Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 709/Kpts/KP.590/10/2016, Tanggal 25 Oktober 2016, Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Penggerak/Pemrakarsa/Pelopor di Bidang Pembangunan Pertanian Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016

3. Mantri Tani Berprestasi

RR. Endang Sri Supriyatiningsih, SP., Kabupaten Ngawi, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia Nomor 83/HK.310/C/10/2016 Tanggal 3 Oktober 2016, Tentang Penerimaan Penghargaan Kelompok Tani, Mantri Tani, Petugas Perbenihan, Produsen/Penangkar Benih, Petugas POPT, Petugas POPT-PHP, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Kelompok Tani Pengembang Agens Hayati (PAH) dan Petani Pengembangan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Berprestasi Tahun 2016

4. Apresiasi atas Inovasi “Bravo Pala Indonesia Bermutu, Solusi Menghilangkan Notifikasi Pala Indonesia” sebagai TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 pada tanggal 21 Maret 2016 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BIDANG URUSAN PERKEBUNAN

1.2 DINAS PERKEBUNAN

a. Tujuan

Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Meningkatnya produksi perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	1.749.707	1.802.302	3,01
	(Ton capaian produksi tanaman semusim perkebunan per tahun)	1.380.528	1.423.890	3,14
	Tebu	1.212.133	1.035.156	-14,6
	Tembakau	99.743	65.702	-34,12
	Lain-Lain	116.620	323.032	176,99
	(Ton capaian produksi tanaman tahunan perkebunan per tahun)	369.179	378.412	2,5
	Kopi	60.791	61.829	1,7
	Kakao	30.617	31.965	1,7
	Cengkeh	9.878	10.685	8,1
	Jambu Mete	13.555	13.777	4,4
	Kelapa	254.338	260.156	1,64
	Lain-Lain	74.788	74.391	2,29
1. Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah luas pengembangan (Ha)	6.461	6.172..	-4,47
	Jumlah luas Intensifikasi (Ha)	8.025	7.275	-9,35
	Jumlah luas Rehabilitasi (Ha)	960	160	-83,34
Meningkatnya nilai tambah hasil produk perkebunan	prosentase (%) capaian peningkatan nilai tambah komoditi perkebunan			
	Kopi Arabika	4,5	4,55	1,11
	Kakao	3,7	3,78	2,16
1. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Jumlah bantuan sarana off farm	2.639	2.040	-22,7
	Jumlah MoU kemitraan petani dan pedagang	1	2	100
Meningkatnya pemberdayaan petani perkebunan	prosentase (%) peningkatan pemberdayaan petani perkebunan per tahun	5	10,25	105
1. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan	Jumlah peningkatan kapasitas kelompok tani (Kelompok)	72	80	5,07

Pada Tahun 2015-2016 kinerja bidang perkebunan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan produksi perkebunan

Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2015 adalah sebesar 1.749.707 ton dan pada tahun 2016 sebesar 1.802.302. secara total produksi tanaman perkebunan mengalami peningkatan sebesar 3,01 %, namun untuk tanaman semusim khususnya tebu dan tembakau mengalami penurunan sebagian akibat bahwa tahun 2016 merupakan tahun kemarau basah.

Sasaran 2 : Meningkatkan nilai tambah hasil produk perkebunan

Nilai tambah untuk produksi tanaman perkebunan pada tahun 2015 untuk komoditi kopi sebesar 4,5 % dan kakao sebesar 3,7 % dibandingkan dengan capaian nilai tambah pada tahun 2016 mengalami kenaikan, untuk komoditi kopi sebesar 4,55 % dan kakao sebesar 3,78 %. Kenaikan tersebut tidak lepas dari kegiatan provinsi yang secara langsung memberikan bantuan alat-alat penanganan pasca panen dan pelatihan penanganannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan pemberdayaan petani perkebunan

Untuk peningkatan sumberdaya petani perkebunan melalui pelatihan pemberdayaan petani perkebunan pada tahun 2015 telah dilaksanakan untuk pemberdayaan terealisasi sebanyak 72 Kelompok petani perkebunan dan pada tahun 2016 dilaksanakan pemberdayaan kelompok petani perkebunan naik sebesar 5,07 % atau terealisasi sebanyak 80 kelompok petani perkebunan. Adapun pemberdayaan yang dilaksanakan mulai dari sekolah lapang pengendalian hama terpadu, sekolah lapang agribisnis dan pemberdayaan kelembagaan kelompok tani perkebunan

c. Program

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan anggaran Rp. 62.933.035.500,00 Realisasi sebesar Rp. 59.759.398.604,00 atau 94,96 % untuk mendukung 28 kegiatan yang secara rinci masing-masing per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan dengan anggaran Rp. 11.988.050.000,00 Realisasi sebesar Rp. 10.906.024.399,00 atau 90,97 % untuk mendukung 28 kegiatan yang secara rinci masing-masing per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan dengan anggaran Rp. 4.550.000.000,00 Realisasi sebesar Rp. 4.327.747.873,00 atau 95,12 % untuk mendukung 28 kegiatan yang secara rinci masing-masing per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Komoditi perkebunan merupakan komoditi yang produksinya sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Khususnya komoditi tanaman semusim tembakau dan tebu. Di tahun 2016 merupakan tahun kemarau basah, sehingga selama tahun 2016 tidak ada bulan kering. Untuk tanaman tembakau petani mulai tanam bulan Mei – Juni banyak yang tidak tumbuh optimal bahkan mati, banyak upaya yang telah dilakukan petani sampai dengan penyulaman/ penggantian tanaman baru sampai tiga kali, hal tersebut sangat mempengaruhi luasan tembakau tertanam di Jawa Timur tahun 2016.

2. Untuk komoditi tebu, dengan kemarau basah tahun 2016 mempengaruhi terhadap rendemen. Dibandingkan dengan tahun 2015 dengan musim yang tegas, rendemen tebu yang dihasilkan rata-rata mencapai 8 %, bahkan ada beberapa kebun petani yang memperoleh rendemen harian 10 %, namun demikian untuk bobot tebu tahun 2016 secara total lebih besar jika dibandingkan tahun 2015.

Solusi:

Upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dengan keadaan tersebut untuk budidaya khususnya tanaman semusim menerapkan penggunaan varietas tembakau yang tahan air dan melakukan kerjasama dengan BMKG terkait prakiraan musim untuk penetapan estimasi bulan tanam. Sedangkan untuk tebu lebih dioptimalkan dalam budidaya on farm dan penanganan pasca panen.

BIDANG URUSAN PETERNAKAN

1.3. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Meningkatkan produksi peternakan;
- Meningkatkan nilai tambah produk peternakan;
- Meningkatkan kemampuan kelompok peternak.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016*	
I. Meningkatnya produksi peternakan	1. Jumlah Produksi Daging (ton)	391.972	403.199	2,86
	2. Jumlah Produksi Telur (ton)	442.312	489.339	10,63
	3. Jumlah Produksi Susu (ton)	453.577	490.647	8,17
Program Peningkatan Produksi Peternakan	1. Jumlah Produksi Daging (ton)	391.972	403.199	2,86
	2. Jumlah Produksi Telur (ton)	442.312	489.339	10,63
	3. Jumlah Produksi Susu (ton)	453.577	490.647	8,17
II. Nilai tambah yang diperoleh peternak dari mengolah produk peternakan	Persentase nilai tambah produk peternakan (daging sapi) (%)	27	30	11,11
Program Pengembangan Agribisnis	Persentase nilai tambah produk peternakan (daging sapi) (%)	22	30	11,11
III. Meningkatnya kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok)	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok (kelompok)	57	65	14,04
Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan	Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok (kelompok)	57	65	14,04

Keterangan : *= angka sementara

Pada tahun 2015-2016 kinerja Bidang Peternakan yang telah dicapai berdasarkan masing – masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi peternakan, ditetapkan 3 Indikator Kinerja yaitu :

➤ Jumlah Produksi Daging (ton)

Jumlah Produksi Daging pada tahun 2015 adalah sebesar 391.972 ton dan pada tahun 2016 sebesar 403.199 ton (mengalami peningkatan sebesar 2,86%). Peningkatan jumlah produksi daging pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 merupakan hasil kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 yaitu :

- Meningkatkan angka kelahiran sapi potong menjadi 1,1 juta ekor pada awal tahun 2017 diutamakan melalui optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), mengembangkan perwilayah sumber bibit ternak galur murni Jawa Timur, meningkatkan kualitas bibit ternak dengan pemberlakuan SKLB, sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi;
- Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Pengawasan mutu pakan yang beredar dan Pengembangan lahan hijauan pakan ternak;
- Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan mengembangkan sistem peringatan dini (ISIKHNAS), peningkatan pelayanan lembaga kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak dengan menerbitkan SKKH;
- Pengendalian pemotongan ruminansia betina produktif, revitalisasi RPH, pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.

➤ Jumlah Produksi Telur (ton)

Jumlah Produksi Telur pada tahun 2015 adalah sebesar 442.312 ton dan pada tahun 2016 sebesar 489.339 ton (mengalami peningkatan sebesar 10,63%). Peningkatan jumlah produksi telur

pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 merupakan hasil kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 yaitu :

- Mengembangkan perwilayah sumber bibit ternak galur murni Jawa Timur (ayam buras dan bebek mojosari), meningkatkan kualitas bibit ternak dengan pemberlakuan SKLB dan sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi;
- Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan Pengawasan mutu pakan yang beredar;
- Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan mengembangkan sistem peringatan dini (SIKHNAS), peningkatan pelayanan lembaga kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas ternak dengan menerbitkan SKKH;
- Pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.

➤ Jumlah Produksi Susu (ton)

Jumlah Produksi Susu pada tahun 2015 adalah sebesar 453.577 ton dan pada tahun 2016 sebesar 490.647 ton (mengalami peningkatan sebesar 8,17%). Peningkatan jumlah produksi susu pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 merupakan hasil kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 yaitu :

- Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), meningkatkan kualitas bibit ternak dengan pemberlakuan SKLB dan sertifikasi lembaga perbibitan ternak milik Provinsi;
- Penggunaan teknologi tepat guna pengolahan pakan (mini feedmill) dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Pengawasan mutu pakan yang beredar dan Pengembangan lahan hijauan pakan ternak;

- Pengendalian penyakit hewan menular yang berdampak ekonomis dengan mengembangkan sistem peringatan dini (ISIKHNAS), peningkatan pelayanan lembaga kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak dengan menerbitkan SKKH;
- Pengendalian pemotongan ruminansia betina produktif dan pengawasan terhadap produk hewan yang beredar.

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah produk peternakan, ditetapkan 1

Indikator Kinerja yaitu :

- Persentase nilai tambah produk peternakan (daging sapi) (%)
Indikator kinerja Persentase nilai tambah produk peternakan pada tahun 2015 sebesar 27% pada tahun 2016 sebesar 30% (mengalami peningkatan sebesar 11,11%). Peningkatan Persentase nilai tambah produk peternakan pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 merupakan hasil kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 - Pembinaan pasca panen kepada kelompok;
 - Pemberian bantuan alat pasca panen;
 - Fasilitasi Promosi produk peternakan;
 - Penyediaan informasi harga komoditas peternakan secara berkala melalui website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

Sasaran 3 : Meningkatnya kelas kemampuan kelompok peternak, ditetapkan 1

Indikator Kinerja yaitu :

- Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok (kelompok)
Indikator kinerja Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok pada Tahun 2015 sebesar 57 kelompok pada tahun 2016 sebesar 65 kelompok (mengalami peningkatan sebesar 14,04%). Peningkatan kelompok peternak yang mengalami peningkatan

kelas kemampuan kelompok pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 merupakan hasil kebijakan dan langkah strategis yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 yaitu :

- Melakukan pembinaan manajemen kelompok agar dapat memenuhi syarat penerima kredit perbankan serta memfasilitasi aksesibilitas pembiayaan oleh perbankan dengan bunga rendah kepada kelompok peternak;
- Penyediaan informasi harga komoditas peternakan secara berkala melalui website Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- Fasilitasi Promosi produk peternakan;
- Pembinaan terhadap kelompok untuk mencapai prestasi tingkat regional maupun nasional.

c. Program

1. Program Peningkatan Produksi Peternakan, dengan anggaran Rp. 71.936.191.200,- Realisasi sebesar Rp. 69.566.289.113,- atau 96,71% untuk mendukung 33 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
2. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan, dengan anggaran Rp. 855.120.000,- Realisasi sebesar Rp. 806.214.225,- atau 94,28% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan, dengan anggaran Rp. 2.525.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 2.393.323.340,- atau 94,79% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Masih terbatasnya sumber daya peternak baik secara kuantitas maupun kualitas;
- Masih tingginya prevalensi gangguan reproduksi pada ternak betina produktif sehingga memperlama waktu hewan ternak betina untuk bereproduksi;
- Masih adanya pengeluaran hewan ternak secara ilegal.

Solusi :

- Melakukan pembinaan dan pemberian fasilitas dalam upaya meningkatkan kualitas bibit, permodalan, diversifikasi produk dan pemasaran hasil peternakan sehingga diharapkan adanya perubahan pola pikir dan gairah masyarakat untuk menjadi petani ternak yang berdaya saing;
- Melakukan penanganan gangguan reproduksi dan pembinaan kepada peternak tentang pencegahan gangguan reproduksi pada ternak betina produktif.
- Melakukan penguatan di kawasan check point melalui kerjasama dan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota dan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya ternak melalui jalur-jalur ilegal.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 785.1/Kpts/TI.130/11/2016 tentang Penetapan Pemenang Lomba Web Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menetapkan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai **Peringkat III** Kategori SKPD Provinsi Lingkup Pertanian;
2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor : 3548/PK.240/F/07/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan

Petugas Teknis Berprestasi Tahun 2016 menetapkan Kelompok Peternak dan Petugas Berprestasi sebagai berikut :

- Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak
 - Kategori penilaian manajemen kelompok peternak ayam lokal Kelompok “Sejati” Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur sebagai **Peringkat I**;
 - Kategori penilaian manajemen kelompok peternak kambing Kelompok “Ngudi Rahayu II” Desa Ngromo Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan sebagai **Peringkat II**;
 - Kategori penilaian manajemen kelompok peternak itik Kelompok “Itik Meri Rejeki” Desa Rejosopinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang sebagai **Peringkat III**;
 - Kategori Penilaian manajemen kelompok peternak sapi potong Kelompok “Agritama Mandiri” Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagai **Peringkat IV**.
- Penilaian Pelayanan Petugas Teknis Berprestasi
 - Inseminasi Berprestasi Sdr. Maria Agus Beni Al furqon, SP, Msi alamat SPIB Wuluhan, Kabupaten Jember sebagai **Peringkat I**.

2. BIDANG URUSAN KEHUTANAN

2.1 DINAS KEHUTANAN

a. Tujuan

- Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan;
- Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan hutan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan	– Prosentase peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berizin (%)	19,79 % (896 IPHHK)	7,25 % (961 IPHHK)	-63,37
	– Luas pengembangan hutan rakyat (Ha)	8.656,4 (Ha)	7.177 (Ha)	-17,09
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	– Produksi kayu hutan negara (m3)	415.192	311.371	-25,00
	– Produksi gerah pinus (ton)	33.529	29.270	-12,70
	– Produksi getah damar (ton)	203	176	-13,30
	– Produksi daun kayu putih (ton)	18.831	19.245	2,20
	– Produksi porang (ton)	3.201	96	-97
2. Meningkatnya perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan hutan	– Prosentase penurunan luas kebakaran hutan (%)	82,07 % (1.950 Ha)	89,02 % (214 Ha)	8,47
	– Prosentase penurunan pencurian hasil hutan (%)	44,97 % (667 kasus)	17,99 % (547 kasus)	-60
	– Luas Tahura R Soerjo yang dikonservasi (Ha)	650 (Ha)	400 (Ha)	-38,46
	– Luas kawasan hutan yang dikonservasi (Ha)	24.660,40 (Ha)	10.326 (Ha)	-58,13
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)	650 (Ha)	400 (Ha)	-38,46

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi kawasan hutan (ha)	24.660,40 (Ha)	10.326 (Ha)	-58,13

Evaluasi Terhadap Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 Sebagai Berikut :

Pada Tahun 2015-2016 kinerja Bidang Kehutanan yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan

- Prosentase peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berizin.

Realisasi indikator prosentase peningkatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang berizin Tahun 2016 sebesar 7,25 % melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 6 %. Prosentase peningkatan IPHHK yang berizin pada Tahun 2015 sebesar 19,79% dan pada Tahun 2016 sebesar 7,25 % (mengalami penurunan). Pada Tahun 2014 IPHHK yang berizin sebanyak 748 unit, Tahun 2015 sebanyak 896 unit dan pada Tahun 2016 sebanyak 961 unit. Dari data tersebut dapat dicermati bahwa jumlah IPHHK yang berizin dari Tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan. Namun demikian jika penghitungannya berdasarkan prosentase peningkatan IPHHK yang berizin, Tahun 2015 sampai Tahun 2016 mengalami penurunan karena dipengaruhi faktor bilangan pembagi. Jumlah IPHHK yang berizin Tahun 2016 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya berkat kesadaran para pelaku industri untuk mengurus ijin usaha industri kayu. Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan bimbingan teknis kebijakan peraturan industri hasil hutan.

- Luas pengembangan hutan rakyat

Realisasi indikator luas pengembangan hutan rakyat Tahun 2016 sebesar 7.177 Ha melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra seluas 7.000 Ha. Luas pengembangan hutan rakyat pada Tahun 2015 sebesar 8.656,4 Ha dan pada

Tahun 2016 sebesar 7.177 Ha (mengalami penurunan). Namun demikian secara keseluruhan luas hutan rakyat di Jawa Timur Tahun 2016 terus mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2015 hutan rakyat di Jawa Timur seluas 747.928.14 Ha dan pada Tahun 2016 mengalami peningkatan seluas 7.177 Ha sehingga secara keseluruhan luas hutan rakyat Tahun 2016 sebesar 755.105,14 Ha. Luas hutan rakyat yang terus meningkat tidak terlepas dari kebutuhan kayu bulat sebagai bahan baku IPHHK. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan bahan baku IPHHK sebelumnya dipenuhi dari kayu hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani dan dari kayu luar Jawa. Namun dalam kegiatan operasionalnya, IPHHK masih membutuhkan bahan baku kayu bulat dan kondisi tersebut ditangkap oleh masyarakat sebagai suatu peluang untuk mengembangkan hutan rakyat. Masyarakat pada umumnya memilih jenis pohon yang memiliki daur pendek seperti sengon.

Sasaran 2: Meningkatnya perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan hutan

➤ Prosentase penurunan luas kebakaran hutan

Realisasi indikator prosentase penurunan luas kebakaran hutan Tahun 2016 sebesar 89,02 % melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 80 %. Prosentase penurunan luas kebakaran hutan pada Tahun 2015 sebesar 82,07% dan pada Tahun 2016 sebesar 89,02% (mengalami kenaikan). Pada Tahun 2014 terjadi kebakaran hutan di Jawa Timur seluas 10.876,7 Ha dan pada Tahun 2015 kebakaran hutan seluas 1.950 Ha dan Tahun 2016 luas kebakaran hutan seluas 214 Ha. *Dari data tersebut dapat dicermati bahwa luas kebakaran hutan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 mengalami penurunan. Namun demikian jika penghitungannya berdasarkan prosentase penurunan luas kebakaran hutan, Tahun 2015 sampai Tahun 2016 mengalami kenaikan karena dipengaruhi faktor bilangan pembagi.* Luas kebakaran hutan Tahun 2016 mengalami penurunan dibanding Tahun 2015 berkat kesadaran masyarakat yang peduli terhadap kelestarian hutan dan meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang kehutanan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur seperti: pembekalan masyarakat peduli api, koordinasi Brigade Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla), peningkatan peran masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran hutan

➤ Prosentase penurunan pencurian hasil hutan

Realisasi indikator prosentase penurunan pencurian hasil hutan Tahun 2016 sebesar 17,99 % melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 15 %. Prosentase penurunan pencurian hasil hutan pada Tahun 2015 sebesar 44,97 % dan pada Tahun 2016 sebesar 17,99 % (mengalami penurunan). Pencurian hutan Tahun 2014 sebanyak 1.212 kasus sedangkan Tahun 2015 sebanyak 667 kasus sehingga persentase penurunan pencurian hasil hutan Tahun 2015 sebesar 44,97%. Pencurian hutan Tahun 2016 sebesar 547 kasus dan dibandingkan Tahun 2015 persentase penurunan pencurian hasil hutan Tahun 2016 sebesar 17,99%. Keberhasilan dalam menurunkan angka pencurian hasil hutan berkat kesadaran masyarakat yang peduli terhadap kelestarian hutan dan meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang kehutanan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur seperti : operasi gabungan dan operasi rutin, peningkatan kapasitas petugas pengamanan hutan, apel siaga penegakan hukum kehutanan, dan penyuluhan kepada masyarakat penyangga kawasan konservasi.

➤ Luas Tahura R Soerjo yang dikonservasi

Realisasi indikator luas Tahura R. Soerjo yang dikonservasi Tahun 2016 seluas 400 Ha sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra seluas 400 Ha. Luas Tahura R. Soerjo yang dikonservasi pada Tahun 2015 sebesar 650 Ha dan pada Tahun 2016 sebesar 400 Ha (mengalami penurunan). Penurunan luas konservasi kawasan Tahura R. Soerjo Tahun 2016 dibanding Tahun 2015 karena adanya efisiensi anggaran yang dikelola oleh UPTD Tahura R. Soerjo. Tahun 2015 UPTD Tahura R. Soerjo mengelola anggaran sebesar Rp. 6.452.510.000,00 sedangkan Tahun 2016 anggaran yang dikelola sebesar Rp. 6.156.743.710,00. Disamping itu juga ada pembangunan shelter dan menara pengawas untuk memantau kawasan hutan.

➤ Luas kawasan hutan yang dikonservasi

Realisasi indikator luas kawasan hutan yang dikonservasi Tahun 2016 seluas 10.326 Ha melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra seluas 10.000 Ha. Luas kawasan hutan yang dikonservasi pada Tahun 2015 sebesar 24.660,40 Ha dan pada Tahun 2016 sebesar 10.326 Ha (mengalami penurunan). Konservasi kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan luas lahan hutan yang mengalami penurunan fungsi/terdegradasi yang umumnya disebabkan oleh kebakaran hutan, pencurian kayu dll. Pada Tahun 2014 terjadi kebakaran hutan yang cukup besar seluas 10.876,7 Ha di kawasan hutan Jawa Timur sehingga pada Tahun 2015 dibutuhkan konservasi lahan hutan seluas 24.660,40 Ha untuk meningkatkan fungsi lahan hutan akibat kebakaran, pencurian kayu dll. Kebakaran hutan pada Tahun 2015 seluas 1.950 Ha mengalami penurunan dibanding angka kebakaran hutan Tahun 2014, sehingga luas lahan hutan yang dikonservasi pada Tahun 2016 seluas 10.326 Ha mengalami penurunan dibanding angka konservasi lahan hutan Tahun 2015.

c. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.357.488.000,00. Realisasi sebesar Rp 1.287.240.545,00 atau 94,83 % untuk mendukung 1 kegiatan dengan realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 3.752.933.650,00. Realisasi sebesar Rp. 3.542.494.408,00 atau 94,39% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.122.215.000,00. Realisasi sebesar Rp 1.053.072.950,00 atau 93,84 % untuk mendukung 1 kegiatan dengan realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 772.068.665,00. Realisasi sebesar Rp. 755.174.275,00 atau 97,81% untuk mendukung 2 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 9.382.668.605,00. Realisasi sebesar Rp. 8.984.593.971,00 atau 95,76% untuk mendukung 16 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 8.411.940.560,00. Realisasi sebesar Rp. 8.208.358.262,00 atau 97,58% untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.
7. Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 531.743.520,00. Realisasi sebesar Rp. 489.421.100,00 atau 92,04% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada lampiran format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Koordinasi dengan kabupaten/kota dalam proses penghimpunan data dan informasi pembangunan kehutanan Jawa Timur belum optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : komitmen petugas pengolah data dan informasi dalam meng-*up date* data masih belum optimal serta adanya kebijakan dari Kementerian yang berdampak pada kemunduran dalam proses penghimpunan data dan informasi.
- Pemahaman masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya menjaga keberadaan hutan khususnya kawasan konservasi cukup baik namun kondisi

tersebut berbenturan dengan kebutuhan hidup masyarakat untuk memenuhi hidupnya sehingga mendorong mereka melakukan pencurian hasil hutan

- Jumlah petugas pelayanan pada obyek wisata alam Tahura R. Soerjo kurang memadai dibanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut sehingga berimplikasi pada layanan yang kurang optimal.
- Kegiatan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh musim hujan sehingga proses pengadaan benih/bibit untuk kegiatan tersebut dijadwalkan pada Triwulan III dan IV.
- Lokasi reboisasi yang cukup jauh dengan kondisi medan yang sulit khususnya di Tahura R. Soerjo menyebabkan reboisasi berjalan tidak optimal.
- Masih banyak pengolah kayu bulat yang belum memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).
- Banyak pemegang IUIPHHK dengan kapasitas ijin di bawah 6.000 m³/th yang belum memiliki SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).
- Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m³/tahun belum seluruhnya tertib administrasi pelaporan.
- Sulitnya memberikan pemahaman kepada petani hutan rakyat terkait kewajiban mendapatkan SVLK/ PHBML bagi hutan rakyat yang akan menjual bahan baku ke Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah memiliki SVLK.
- Kelembagaan Forest Managemen Unit (FMU) belum kuat.
- Bagi pengelola hutan rakyat yang sudah mendapatkan SVLK/ PHBML masih belum merasakan manfaat langsung atas produk kayu tersebut (kayu yang bersertifikat seharusnya memiliki nilai lebih namun pada kenyataannya sama dengan kayu yang belum bersertifikat).
- Kebijakan penilikan setiap 2 (dua) tahun bagi pengelola hutan rakyat yang mendapatkan SVLK sangat memberatkan dalam hal pembiayaan.
- Harga kayu di tingkat petani masih rendah, harga optimal masih dikuasai tengkulak/ pedagang lokal.
- Kelompok pengelola hutan rakyat belum seluruhnya memiliki jejaring usaha dalam memasarkan produk kayu.

- Harga patokan sebagai dasar pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan belum menggambarkan kondisi riil harga kayu di petak hutan.
- Jumlah Satuan Pengamanan Hutan dirasa masih minim untuk melakukan pengamanan kawasan Tahura R. Soerjo yang mencakup 44 desa penyangga yang tersebar di 6 kabupaten/kota.

Solusi:

- Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait proses penghimpunan data dan informasi perlu ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan teguran kepada petugas yang lalai menjalankan kewajibannya dalam meng-up date data pembangunan kehutanan dan sebaliknya memberikan reward kepada petugas yang telah menjalankan kewajibannya.
- Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan secara rutin pada masing-masing desa penyangga dan sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya keberadaan kawasan konservasi. Khusus kepada masyarakat desa penyangga, perlu diberikan stimulan dalam bentuk hibah dan pendampingan untuk meningkatkan taraf hidup.
- Meningkatkan kapasitas SDM petugas pelayanan obyek wisata alam yang dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik terhadap para pengunjung.
- Kegiatan reboisasi yang dipengaruhi oleh faktor alam sulit untuk dialihkan ke waktu lainnya sehingga pelaksanaan reboisasi tetap seperti semula
- Untuk medan yang cukup jauh dan sulit dijangkau menggunakan teknik reboisasi yang berbeda dengan medan yang mudah dijangkau, seperti menabur benih secara manual.
- Menyelenggarakan sosialisasi perizinan secara simultan bagi IPHHK yang belum berizin.
- Melakukan pendampingan SVLK industri secara berkelompok.
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara lebih intensif terhadap industri pemegang IUIPHHK yang belum tertib melaporkan kemajuan kegiatannya secara berkala.

- Bekerjasama dengan Penyuluh Kehutanan lapangan, Dinas terkait dan tokoh masyarakat untuk membantu memberikan pemahaman pentingnya SVLK/ PHBML bagi pengelola hutan rakyat.
- Pentingnya dilakukan kegiatan yang mampu menguatkan kelembagaan FMU seperti pelatihan keterampilan manajerial bagi pengurus FMU agar mampu menjalankan organisasi dan bisnis kelompok. Oleh karena itu, perlu dibentuk koperasi yang bertujuan menyejahterakan anggotanya.
- Mengusulkan di setiap diskusi/FGD/seminar/rapat tingkat pusat/ daerah terkait SVLK, kepada instansi yang membidangi untuk membuat kebijakan penggunaan kayu yang bersertifikat dalam pengadaan barang konstruksi untuk pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah; meningkatkan keterampilan bagi pengelola hutan rakyat yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) maupun PHBML agar bisa menciptakan produk yang berdaya saing, unik, memiliki kekhasan lokal untuk kebutuhan ekspor; memberikan modal bergulir berupa hibah sesuai kebutuhan masyarakat diantaranya pengolahan lahan di bawah tegakan dengan sistem Agroforestry dan proses pengolahannya, alat penggergajian kayu dll.
- Pemerintah Pusat (Kementerian LHK) seyogyanya menyederhanakan peraturan terkait penilikan/ survilient bagi pengelola hutan rakyat ber-SLK; Mengusulkan biaya ke Kementerian LHK untuk biaya penilikan/ survilient. Mengalokasikan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk biaya penilikan/ survilient bagi kelompok yang kelembagaan usahanya belum terbentuk/ belum kuat.
- Memberikan keterampilan bagi FMU terkait tata cara penaksiran volume, pembacaan tabel volume lokal, tata cara pembagian batang yang benar dan taksiran harga kayu.
- Setiap tahun melakukan temu usaha antara kelompok yang memiliki SLK dengan pelaku usaha baik pelaku usaha hasil hutan kayu maupun non kayu (empon-empon, getah pinus, dsb); membentuk forum komunikasi FMU untuk jejaring usaha.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya setiap semester melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan wajib bayar dalam penyusunan harga patokan sebagai dasar pengenaan PSDH/ DR (Provisi Sumber Daya Hutan/ Dana Reboisasi) sebagaimana diamanatkan dalam PP No 12 Tahun 2014.
- Minimnya jumlah Satuan Pengamanan Hutan dapat diselesaikan salah satunya dengan membentuk/ merekrut Satuan Pengamanan Hutan Swakarsa pada Desa Penyangga yang belum mempunyai Satuan Pengamanan Hutan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Lomba penanaman pohon Tahun 2015 Tingkat Nasional pada puncak acara peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) Tahun 2016 di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.



Penyerahan penghargaan lomba penanaman pohon Tahun 2015 Tingkat Nasional oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo



Gubernur Jawa Timur Soekarwo memperlihatkan piagam lomba penanaman pohon Tahun 2015 Tingkat Nasional kepada masyarakat Jawa Timur didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jatim dan Kabid RLPS Dinas Kehutanan Prov. Jatim

Gambar 4.10 Penghargaan lomba penanaman pohon

BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.1. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a. Tujuan

- Meningkatnya Rumahtangga Berlistrik
- Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan untuk masyarakat
- Meningkatnya Izin Usaha Pertambangan dan Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat
- Meningkatnya Pemanfaatan air tanah yang berorientasi pada aspek konservasi dan masyarakat daerah sulit air yang menggunakan air bersih dari air tanah.
- Meningkatnya penyediaan data dan informasi kegeologian dan mitigasi bencana geologi.

b. Sasarandan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
I. Meningkatnya ketersediaan pasokan listrik	• Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	99,70 %	99,87 %	0,17
	• Rasio Ketersediaan Listrik	86,68 %	88,79 %	2,43
1. Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan	• Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	99,70 %	99,87 %	0,17
	• Rasio Ketersediaan Listrik	86,68 %	88,79 %	2,43
II. Meningkatkan pemanfaatan air tanah yang berorientasi pada aspek konservasi	• Prosentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah	81,56 %	92,56 %	13,49
1. Program Pengelolaan Air Tanah	• Jumlah sumur bor di daerah sulit air	2 Sumur Bor	4 Sumur Bor	100
III. Meningkatkan penyediaan data dan informasi geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi	Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasikan	100 %	100 %	0,00
1. Program	Jumlah rekomendasi hasil	1 rekom	1 Rekom	0,00

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	kajian geologi			
IV. Peningkatan pemanfaatan komoditas tambang dan aspek konservasi	• Prosentase Penyelesaian pelayanan rekomendasi izin pertambangan	82,15 %	76,46 %	-6,92
	• Presentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB	3,79 %	3,77 %	-0,02
1. Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas	• Jumlah rekomendasi Pertambangan	732 rekom	786 rekom	7,38

Pada tahun 2015-2016 kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan pasokan listrik yaitu :

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik;
Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan listrik pada tahun 2015 adalah sebesar 99,70 % dan pada tahun 2016 sebesar 99,87 % mengalami peningkatan sebesar 0,17 % dari tahun 2015 dikarenakan adanya program bantuan pemasangan sambungan Rumah dan Instalasi Rumah dari Pemerintah provinsi Jawa Timur serta adanya program Lisdes yang dilakukan oleh PLN.
- Rasio Ketersediaan Listrik
Dengan Indikator Kinerja Rasio ketersediaan listrik pada tahun 2015 sebesar 86,68 % dan pada tahun 2016 sebesar 88,79 %, mengalami peningkatan sebesar 2,43 % dari tahun 2015 dikarenakan adanya program bantuan pemasangan sambungan Rumah dan Instalasi Rumah dari Pemerintah provinsi Jawa Timur serta adanya program Lisdes yang dilakukan oleh PLN.

Sasaran 2 : Meningkatkan pemanfaatan air tanah yang berorientasi pada aspek konservasi, yaitu :

- Prosentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah

Indikator prosentase mutu pelayanan rekomendasi izin pengambilan air tanah pada tahun 2015 sebesar 81,56 % dan pada tahun 2016 sebesar 92,56 %, mengalami peningkatan sebesar 13,49 % dari tahun 2015 dikarenakan adanya peningkatan pemahaman pemohon izin pengambilan air tanah terhadap prosedur perizinan.

Sasaran 3 : Meningkatkan penyediaan data dan informasi geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi, yaitu :

- Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasikan

Indikator Persentase hasil kajian geologi yang terpublikasikan pada tahun 2015 sebesar 100 % dan pada tahun 2016 sebesar 100 %, tidak mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun 2015 dan 2016 hanya ada satu kajian geologi yang dilaksanakan.

Sasaran 4 : Peningkatan pemanfaatan komoditas tambang dan aspek konservasi yaitu :

- Prosentase penyelesaian pelayanan rekomendasi izin pertambangan

Indikator Prosentase penyelesaian pelayanan rekomendasi izin pertambangan pada tahun 2015 sebesar 82,15 % dan pada tahun 2016 sebesar 76,46 %, mengalami penurunan dikarenakan ketergantungan terhadap rekomendasi penggunaan tata ruang dari kabupaten kota.

- Presentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB

Indikator Presentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB pada tahun 2015 sebesar 3,79 % dan pada tahun 2016 sebesar 3,77 %, namun jika dilihat dari perekonomian Jawa

Timur Tahun 2016 sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 5,55 persen. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,18 persen. Peran Kategori Pertambangan dan Penggalian semakin meningkat sejak memasuki tahun 2016. Hal ini terutama didorong oleh kinerja Subkategori Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang meningkat cukup signifikan.

c. Program

1. Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan dengan anggaran sebesar Rp. 2.881.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.650.784.354,00 atau 91,99 % didukung oleh 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program Pengelolaan Air Tanah dengan anggaran Rp. 4.210.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.035.644.638,00 atau 95,86 % didukung oleh 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.421.109.891,00 atau 94,74 % didukung oleh 3 kegiatan yang secara rincimasing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
4. Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas dengan anggaran Rp 3.593.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.090.905.153,00 atau 86,01 %. didukung oleh 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- 1) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan
 - Masih terdapat sebagian masyarakat di Jawa Timur yang belum terjangkau listrik terutama di daerah terpencil dan kurang mampu.
 - Masih banyak masyarakat Jawa Timur yang tergolong dalam Rumah tidak layak huni yang belum tersambung listrik
 - Terdapat 15 kabupaten/kota yang nilai RE masih dibawah rata-rata Jawa Timur 86,67 %
- 2) Program Pengelolaan Air Tanah
 - Meningkatnya intensitas pengambilan air tanah yang tidak diimbangi dengan kegiatan konservasi secara memadai, serta kesadaran masyarakat terhadap pelestarian air tanah masih sangat rendah.
 - Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka semakin bertambah pula konsumsi air, Pengambilan air yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan kegiatan pengendalian yang memadai dapat berdampak negatif pada lingkungan dan penurunan muka air tanah.
 - Terjadinya alih fungsi lahan daerah imbuhan air tanah, sehingga mengurangi daerah resapan air tanah.
 - Masih terdapat masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih.
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - Di Jawa Timur, sering terjadi bencana alam kegeologian seperti gunung meletus, longsor dan banjir bandang yang banyak menimbulkan kerugian Jiwa maupun harta benda.
 - Pemanfaatan lahan belum memperhatikan kondisi geologi wilayahnya.
- 4) Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas
 - Peralihan kewenangan pengelolaan perizinan pertambangan dari Kabupaten/Kota se Jawa Timur ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur

setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 belum berjalan dengan lancar.

- Mekanisme penetapan WPR pada Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara belum dirubah dan persyaratan luasan pertambangan besar dan kecil diperlakukan sama
- Pelaksanaan kegiatan usaha tambang sering menyebabkan kerusakan lingkungan karena para pelaksana usaha tambang kurang peduli terhadap teknik dan tata cara penambangan yang benar sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungannya.

Solusi:

1) Program Pengembangan Pemanfaatan Energi, dan Ketenagalistrikan.

- Meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) di kabupaten kota yang memiliki RE di bawah rata-rata Jawa Timur dengan memberikan bantuan pemasangan SR/IR bagi masyarakat kurang mampu dan menyediakan infrastruktur listrik di daerah yang belum terjangkau listrik.
- Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan sesuai dengan potensi yang ada.

2) Program Pengelolaan Air Tanah

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi teknis dan pengambilan air tanah bersama-sama instansi terkait di kabupaten/kota yang pengambilan airtanahnya intensif;
- Melaksanakan pemantauan muka air tanah dengan membangun sumur pantau di daerah padat pengambilan air tanah terutama kawasan industri yang banyak sumur bor, dan menetapkan daerah resapan air tanah di Jawa Timur.
- Meningkatkan penelitian potensi air tanah pada setiap Cekungan Air Tanah di Jawa Timur sebagai dasar acuan pemberian rekomendasi teknik dalam penerbitan SIPA.

3) Program Pengembangan Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

- Melaksanakan sosialisasi tentang Penanggulangan bencana kegeologian untuk aparat dan masyarakat di daerah yang rawan bencana agar dapat mengetahui secara dini gejala-gejala bencana kegeologian.
- Penyebaran poster-poster, booklet dan *leaflet* bahaya longsor di kabupaten/ kota sebagai upaya antisipasi penyelamatan bila terjadi bencana alam tanah longsor dibawah koordinasi satkorlak Penanggulangan Bencana Jawa Timur.
- Melaksanakan *workshop* dan *Focus Discussion Group* tentang geologi tata lingkungan di Jatim.
- Dalam penyusunan RTRW untuk pengembangan perkotaan, industri dan permukiman diminta agar memperhatikan kondisi geologi setempat.

4) Program Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi teknis perizinan pertambangan.
- Melakukan pembinaan terhadap pelaku pertambangan.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

Pada tahun 2016 Provinsi Jawa Timur mendapat penghargaan Efisiensi Energi Nasional ke 5 sebagai Juara 2.



Gambar 4.11 Penghargaan Efisiensi Energi Nasional ke 5 tahun 2016

4. BIDANG URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

4.1. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

a. Tujuan

- Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan;
- Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan;
- Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan;
- Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan berkelanjutan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja tahun 2015 - 2016

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
1. Meningkatnya kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan	1. Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas (%)	5 %	5,5 %	10 %
Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah kelompok yang terakses (kelompok)	6.230 Kelompok	6.778 kelompok	8,80 %
2. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	1,63 %	2,27 % *	39,36 %*
	3. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	4,72 %	4,70 %*	- 0,42 %*
	4. Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%)	13,67 %	- 91 %*	- 765,69 %*
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	1.093.121,3 Ton	1.144.520,3 Ton*	4,70 %*
b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	405.867,7 Ton	415.081,42 Ton*	2,27 %*
c. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	Jumlah produksi garam rakyat (Ton)	1.089.000 Ton	98.000 Ton*	- 91 %*
3. Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan	5. Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan (Rp.)	Rp. 10 Triliun	Rp. 10,2 Triliun	2 %*

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR SASARAN / INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
		2015	2016	
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase nilai tambah produk perikanan (%)	10 %	10 %	0 %*
4. Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir	6. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%)	0,05 %	0,02 %	- 60 %
	7. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%)	0,001 %	0,002%	100 %
Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan	a. Jumlah rehabilitasi mangrove (Ha)	45 Ha	100 Ha	122,2 %
	b. Jumlah rehabilitasi terumbu karang (Ha)	8 Ha	10 Ha	25 %

*Ket : *) Angka sementara*

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 - 2016. Adapun penjelasan mengenai capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan. Indikator persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas merupakan penghitungan banyaknya kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas yaitu dari kelas pemula menjadi kelas madya dan kelas madya menjadi kelas utama dalam satu tahun.

Pada tahun 2016 kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas adalah sebanyak 548 kelompok atau sebesar 5,5 % dari target 9.918 kelompok sehingga tingkat kemajuan dibandingkan dengan tahun 2015 adalah 10 %.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja didukung dengan Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan dimana

program tersebut berisikan kegiatan pelatihan/bimtek kepada Pokdakan, KUB nelayan, Poklahsar, Pokmaswas dan Kugar.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain sifat usaha kelompok perikanan dan kelautan sebagian besar masih tradisional sehingga manajemen usaha belum tertata dengan baik, kemampuan bersaing yang masih lemah, keterbatasan bahan baku, keterbatasan modal dan sulit menambah aset.

Sasaran 2 : Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dan persentase peningkatan produksi garam rakyat di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat. Indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan tangkap Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya, indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidaya merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan budidaya Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya dan indikator persentase peningkatan produksi garam rakyat merupakan penghitungan besarnya peningkatan produksi garam rakyat Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya.

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 adalah 2,27 %. Produksi perikanan tangkap tahun 2016 sebesar 415.081,42 ton telah meningkat 2,27 % dari produksi perikanan tangkap tahun 2015 yakni 405.867,7 ton.

Berdasarkan estimasi potensi sumberdaya ikan diketahui bahwa di wilayah perairan Laut Jawa (WPP-712) pemanfaatannya dikategorikan sudah penuh yakni ± 95 persen atau sebesar 836.600 ton/tahun dan

wilayah perairan Samudera Hindia (WPP-573) pemanfaatannya telah mencapai ± 65 persen atau sebesar 491.700 ton/tahun. Jumlah nelayan di pesisir Laut Jawa lebih banyak jika dibandingkan dengan di pesisir laut selatan. Selain beberapa hal tersebut di atas, produksi perikanan tangkap tiap tahunnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena juga dipengaruhi oleh faktor cuaca. Kondisi ini menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan upaya strategis secara berkelanjutan untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada nelayan, pemulihan sumber daya ikan di laut dengan underwater restocking dan penebaran benih ikan di perairan umum daratan (PUD), perbaikan sumberdaya habitat ikan di laut melalui pembangunan rumah ikan (Fish apartment) guna mendukung reproduksi ikan sehingga dapat meningkatkan potensi sumber daya ikan di laut serta memberikan bantuan pelayanan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan agar nelayan dapat beroperasi secara maksimal terkait sarana yang digunakan layak secara teknis dan lengkap administrasinya sehingga dapat mengurangi tindak illegal fishing.

Upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 adalah melakukan upaya pemulihan SDI dengan membangun rumah ikan dan pengkayaan stok dengan under water restocking dan penebaran benih ikan di Perairan Umum Darat (PUD), merestrukturisasi alat penangkap ikan dengan memberikan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan untuk mendukung kesejahteraan nelayan, tidak hanya berorientasi terhadap peningkatan kuantitas namun juga terhadap peningkatan mutu/kualitas hasil tangkapan agar mendapatkan nilai jual yang tinggi di pasaran. Selain itu upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan adalah dengan menerapkan sistem

rantai dingin (Cold Chain System/CCS) yaitu melengkapi palka yang berinsulasi di kapal nelayan dan penggunaan es batu pada hasil tangkapan.

Sebagai upaya untuk lebih mengembangkan sektor perikanan tangkap telah dilakukan kegiatan antara lain pemberlakuan sertifikasi hasil tangkapan ikan (catch certificate), pembangunan dan penyempurnaan fasilitas di Pelabuhan Perikanan, restrukturisasi armada kapal 30 GT, pemberdayaan kelompok nelayan melalui kegiatan pelatihan, bimtek, penyediaan mata pencaharian alternatif bagi wanita/istri nelayan serta pemberian paket hibah alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan (Jaring, GPS, mesin tempel, fish finder, pancing).

Kendala yang dihadapi adalah dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sangat mempengaruhi nelayan sehingga banyak nelayan yang tidak dapat melaut.

Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 adalah sebesar 4,70 %. Produksi perikanan budidaya tahun 2016 sebesar 1.144.520,3 ton telah meningkat 4,70 % dari produksi perikanan budidaya tahun 2015 yakni 1.093.121,3 ton.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah intensifikasi produksi perikanan budidaya melalui kegiatan pengembangan kawasan budidaya dengan melalui pemberian paket-paket budidaya (benih, pakan, peralatan budidaya, obat-obatan), pengembangan klaster komoditas perikanan unggulan berpotensi ekspor, fasilitasi program anti kemiskinan dengan pemberian paket-paket bantuan berupa sarana budidaya perikanan, pengembangan induk dan benih unggul, fasilitasi program pakan mandiri, monitoring HPI, sosialisasi dan pelatihan/bimtek.

Persentase peningkatan produksi garam rakyat pada tahun 2016 adalah sebesar -91 %. Produksi garam rakyat pada tahun 2016 sebesar 98.000 ton menurun 91 % dari produksi garam rakyat tahun 2015 yakni 1.089.000 ton. Penurunan produksi ini disebabkan oleh faktor cuaca yakni tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir di seluruh wilayah produksi garam di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2016 terjadi kemarau basah/lembab yaitu suatu kondisi yang disebabkan oleh badai lanina yang berdampak hujan di sepanjang tahun 2016. Dengan kondisi tersebut dapat dikatakan pada tahun 2016 hampir tidak ada musim kemarau.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah memberikan bantuan teknologi berupa geomembran TUF (Teknologi Ulir Filter) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil produksi garam rakyat, pelatihan teknologi usaha garam rakyat bagi petambak garam rakyat, sosialisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir khususnya bagi wanita pesisir dalam akses permodalan program Grameen Bank, bantuan paket sarana usaha garam rakyat bagi petambak garam rakyat, monitoring dan evaluasi serta pengawasan garam impor yang masuk Jawa Timur ditingkat perusahaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan stock garam di tingkat produsen, menjalin kemitraan antara petani produsen garam rakyat dengan Bank UMKM serta lembaga pendamping dalam fasilitasi dukungan permodalan, mempercepat pembentukan koperasi garam serta memfasilitasi lembaga koperasi garam yang sudah ada dapat difasilitasi permodalannya dalam rangka membeli dan membantu pemasaran hasil produksi garam rakyat, mengembangkan sistem resi gudang garam seperti halnya resi gudang untuk tebu dan lain-lain, meningkatkan sistem pendataan garam di lapangan menyangkut produksi, penyerapan dan stok garam.

Karena hujan terjadi sepanjang tahun 2016 maka paket bantuan teknologi berupa geomembran TUF yang diberikan pada kelompok usaha garam rakyat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain kondisi cuaca, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain 80% luasan tambak garam masih bersifat tradisional yaitu menggunakan cara produksi tradisional karena sarana produksi yang terbatas. Selain itu terdapat kendala pada kelembagaan petambak garam yang belum terbentuk seluruhnya di setiap daerah dan belum berjalan dengan baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Indikator nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan merupakan penghitungan selisih nilai produk perikanan dan kelautan yang telah melalui proses pengolahan dengan produk perikanan dan kelautan segar.

Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 10 Triliun dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 10,2 Triliun dengan tingkat kemajuan 2 %. Peningkatan nilai tambah produk sangat dipengaruhi oleh mutu, kemasan dan variasi ragam produk dengan demikian diharapkan harga produk olahan hasil perikanan dan kelautan menjadi lebih tinggi dan secara langsung akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dan kelautan baik skala kecil, menengah dan besar melalui bimtek pengembangan produk nilai tambah, inovasi teknologi pengolahan dan peningkatan kualitas kemasan, memberikan legalitas penerapan sistem jaminan mutu dengan sertifikasi kelayakan

pengolahan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Disamping itu juga memberi paket bantuan hibah berupa peralatan pengolahan kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan skala UKM.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah keterbatasan bahan baku ikan, kapasitas kelembagaan usaha skala kecil kurang memadai sehingga upaya peningkatan daya saing produknya masih rendah, keterbatasan penguasaan teknologi pada pelaku usaha skala kecil.

Sasaran 4 : Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan. Indikator persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove merupakan penghitungan besarnya penurunan persentase lahan mangrove yang rusak terhadap total lahan mangrove Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya. Indikator persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang merupakan penghitungan besarnya penurunan persentase luasan terumbu karang yang rusak terhadap total luasan terumbu karang Jawa Timur pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya.

Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove pada tahun 2016 sebesar 0,02 %. Persentase luas lahan mangrove yang rusak terhadap total luas lahan mangrove di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 41,578 % dan menurun menjadi 41,558 % pada tahun 2016 sehingga terjadi penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove sebesar 0,02 %.

Tercapainya target penurunan tingkat kerusakan hingga mencapai 0,02 % pada tahun 2016 diperoleh dari kegiatan rehabilitasi

mangrove di 22 (dua puluh dua) lokasi yaitu di Kabupaten Tuban, Kota Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Probolinggo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar dan Kota Surabaya. Keberhasilan dalam pencapaian target juga didukung dengan pelaksanaan yang dikerjakan tepat waktu sesuai dengan musim tanam serta kesesuaian bibit mangrove dengan tekstur kondisi lahan tanam. Selanjutnya juga karena adanya kesadaran masyarakat untuk ikut membantu menjaga dan memelihara hasil rehabilitasi mangrove dari kegiatan yang merusak yaitu tindakan merusak ekosistem mangrove (pertambahan, penebangan pohon, reklamasi serta pencemaran lingkungan) .

Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang pada tahun 2016 sebesar 0,002 %. Persentase luas lahan terumbu karang yang rusak terhadap total luas lahan terumbu karang di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 37,176 % dan menurun menjadi 37,174 % pada tahun 2016 sehingga terjadi penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove sebesar 0,002 %.

Upaya yang dilakukan antara lain kegiatan rehabilitasi terumbu karang di 8 (delapan) lokasi yaitu di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pamekasan, Kota Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember. Selain itu juga didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk pencapaian target, adanya partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi terumbu karang dalam memelihara hasil rehabilitasi serta mengelola kawasan perairan yang direhabilitasi dan adanya penerapan teknologi transplantasi yang tepat

lokasi sesuai dengan persyaratan teknis. Kegiatan ini sangat terbantu oleh masyarakat sekitar yang sebelumnya telah menerima sosialisasi dan pelatihan tentang upaya rehabilitasi terumbu karang sehingga pemeliharaan hasil rehabilitasi terumbu karang didukung oleh masyarakat pesisir yang terampil dan terlatih.

Kendala yang dihadapi adalah dampak dari pembangunan fisik daerah pesisir; polusi laut, sedimentasi dan masih maraknya tindakan pencemaran dari darat, overfishing (penangkapan sumberdaya berlebih), destruktif fishing (penangkapan ikan dengan cara merusak), dan pemutihan karang (coral bleaching) akibat pemanasan global.

c. Program

1. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan dengan anggaran Rp.12.517.422.300,00 dan realisasi sebesar Rp.10.754.053.203,00 atau 85,91% untuk mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan anggaran Rp.223.307.999.674,00 dan realisasi sebesar Rp.218.521.227.994,00 atau 97,86% untuk mendukung 10 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan anggaran Rp.105.504.174.000,00 realisasi sebesar Rp.103.866.008.297,00 atau 98,45% untuk mendukung 12 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
4. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dengan anggaran Rp.11.186.156.000,00 realisasi sebesar Rp.10.876.941.850,00 atau 97,24 % untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

5. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran Rp.29.752.825.250,00 realisasi sebesar Rp.27.527.215.721,00 atau 92,52 % untuk mendukung 5 kegiatan yang secara rinci realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.
6. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan dengan anggaran Rp.36.823.204.856,00 realisasi sebesar Rp.35.594.308.558,00 atau 96,66% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci realisasi kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format Matrik 16 Kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Ketersediaan stok sumber daya ikan (SDI) yang semakin menurun.
- Biaya pakan yang tinggi masih menjadi kendala bagi pembudidaya, pemberian paket hibah berupa mesin pelet masih belum menjangkau ke semua pembudidaya ikan air tawar.
- Alih fungsi lahan perikanan budidaya untuk kegiatan non - perikanan.
- Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Demikian juga pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang dan bahan peledak yang merusak lingkungan.
- Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilakukan masih belum berimbang dengan tingkat kerusakan yang ada di Jawa Timur karena dana yang dibutuhkan untuk merehabilitasi relatif besar.
- Produktivitas garam belum optimal.
- Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan ikan di Jawa Timur

Solusi :

- Melakukan perbaikan sumberdaya habitat dan stok sumberdaya ikan melalui pembangunan rumah ikan serta pengkayaan ikan di laut dan perairan umum darat (PUD) yang telah padat tangkap. Kinerja perikanan tangkap masih sangat mungkin untuk ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi Pantai Selatan Jawa Timur yang masih relatif rendah tingkat eksploitasinya.
- Pemberian bantuan/hibah sarana penangkapan ikan berupa alat tangkap jaring dan pancing serta alat bantu penangkapan ikan berupa GPS untuk mempermudah mencari lokasi penangkapan (fishing ground), penyediaan modal usaha melalui pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan.
- Intensifikasi produksi perikanan budidaya melalui kegiatan pemberian paket hibah perikanan budidaya, pakan mandiri dan obat ikan; pelatihan teknis perbenihan dan budidaya ikan; apresiasi kepada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan); perbaikan mutu induk dan benih, alih teknologi (adopsi teknologi hasil penelitian); Intensifikasi, pemanfaatan lahan terbatas budidaya ikan dengan memanfaatkan lahan di pekarangan, sekolah pondok pesantren/panti asuhan, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Bioflok, pemanfaatan tambak porous dengan pemplastikan HDPE.
- Sosialisasi dan alih teknologi baru kepada pembudidaya ikan yang dilakukan oleh UPT maupun instalasi budidaya lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan juga dengan pemberian paket hibah untuk teknologi baru yang akan diterapkan sebagai contoh budidaya lele sistem bioflok.
- Meningkatkan kerjasama antara pengawas perikanan dan kelautan provinsi, kabupaten/kota dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi penyelesaian konflik nelayan.
- Selain melaksanakan kegiatan rehabilitasi juga dilakukan upaya konservasi dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan bimtek dan sosialisasi konservasi mangrove dan terumbu karang berkelanjutan.

- Peningkatan kuantitas, kualitas dan produktivitas usaha garam melalui pembuatan unit pengolah garam, pelatihan teknis dan manajemen bagi kelompok PUGAR serta pengembangan teknologi Geomembran.
- Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan dan sosialisasi terkait pengendalian mutu, keamanan hasil olahan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia.

e. Penghargaan Nasional yang diterima

- Top 35 Lomba Inovasi Pelayanan Publik
- Juara I Pameran Pesona Lombok Sumbawa Expo 2016 Nusa Tenggara Barat, 2 - 5 Juni 2016
- Terbaik Bidang Informasi Kelautan dan Perikanan, Pameran Skala Nasional Bidang Pariwisata, Investasi, Industri dan Perdagangan, Batam
- Juara II Stand Terbaik Industri Bahari Expo 2016 Surabaya, 22-25 September 2016
- Juara I Stand Terbaik Pameran Produk Unggulan Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Medan, 14-17 April 2016
- Juara I Stand Terbaik Gelar Inovasi UMKM Koperasi dan PKBL Expo 2016, 24-27 Maret 2016
- Penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atas Kinerja Baik II dalam Pencapaian Sertifikasi CPIB Tahun 2015, 26 - 29 April 2016, Surabaya

5. BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

5.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN

a. Tujuan

Meningkatkan daya saing industri manufaktur.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Standardisasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	1. Prosentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	5,3%	4,51%	-14,91%
		2. Prosentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim	29,28%	28,92%	-1,20%
		3. Prosentase kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Jawa Timur	87,67%	91,62%	4,50%
		4. Prosentase IKM yang telah menerapkan standardisasi dan HKI	11,9%	10,3%	-13,44%
	1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi untuk peningkatan daya saing.	1.593	1.400	-0,12%
	2. Program Penataan Struktur Industri.	Luas Kawasan Industri yang terpakai (Ha).	1.900	2.035	7,10%
	3. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri.	Jumlah IKM yang Mendapatkan Pelayanan Teknis.	2.974	4.992	40,42%
	4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah IKM yang mendapatkan Pembinaan dan pelatihan.	1.724	1.209	-29,87%
	5. Program Peningkatan Standardisasi Industri.	Jumlah IKM yang mendapatkan Standardisasi Industri.	380	1.875	393,42%
	6. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam.	Nilai Produksi Industri Agro.	405,94	337,126	-16,95%

Evaluasi terhadap Target dan Realiasi Indikator Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor industri, standardisasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- **Prosentase pertumbuhan sektor industri pengolahan**
Realisasi pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2014 dibanding tahun 2015 adalah sebesar 5,3% sedangkan pada tahun 2015 dibanding tahun 2016 adalah sebesar 4,51%. Pertumbuhan secara kumulatif mengalami perlambatan sebesar 14,91% namun secara kuantitas mengalami kenaikan pada harga konstan dari Rp.393,27 trilyun pada tahun 2015 menjadi Rp.411,02 trilyun pada tahun 2016.
- **Prosentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Jawa Timur**
Berdasarkan data BPS tahun dasar 2010, secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jawa Timur pada tahun 2016 mencapai Rp. 536,47 trilyun atau memberikan kontribusi sebesar 28,92% terhadap PDRB ADHB Jawa Timur yang mencapai nilai sebesar Rp. 1.855,04 trilyun rupiah pada tahun 2016. Lebih tinggi jika dibanding pada tahun 2015 yang mencapai Rp. 495,69 trilyun atau 29,28% dari total capaian sebesar Rp. 1.692,90 trilyun.
- **Prosentase kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Jawa Timur**
Peranan produk industri pengolahan sangat mendominasi kinerja ekspor non migas di Jawa Timur dengan mencatatkan nilai pada sektor industri selama tahun 2016 sebesar USD 16.441.258,04 ribu atau berkontribusi sebesar 91,62% terhadap nilai ekspor non-migas yang mencapai USD 17.943.367,91 ribu pada tahun 2016. Sedang pada tahun 2015 tercatat nilai pada

sektor industri sebesar USD 15.009,37 ribu atau mengalami perubahan sebesar 9,54% dibanding tahun 2016.

- Prosentase IKM yang telah menerapkan standadisasi dan HKI
Prosentase industri yang telah menerapkan Standarisasi dan HKI mengalami penurunan, pada tahun 2016 ini tercatat sebanyak 2.103 unit atau sebesar 10,3%, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang menerapkan standardisasi dan HKI sebanyak 2.414 unit atau mencapai 11,9%. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan namun target tahun 2016 sebesar 7,5% sudah tercapai dari jumlah total industri formal sebanyak 20.467 unit pada tahun 2016.

c. Program

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan anggaran Rp.9.908.745.350,- Realisasi sebesar Rp.9.516.375.682,- atau 96,04% untuk mendukung 8 (delapan) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program Penataan Struktur Industri, dengan anggaran Rp.1.843.414.800,- Realisasi sebesar Rp.1.535.635.361,- atau 83,30% untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri, dengan anggaran Rp.24.626.350.199,- Realisasi sebesar Rp.23.362.868.345,- atau 94,87% untuk mendukung 6 (enam) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan anggaran Rp.2.542.881.350,- Realisasi sebesar Rp.2.415.164.464,- atau 91% untuk mendukung 3 (tiga) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per

kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

5. Program Peningkatan Standardisasi Industri, dengan anggaran Rp.8.449.326.500,- Realisasi sebesar Rp.7.868.891.368,- atau 93,13% untuk mendukung 2 (dua) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
6. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam, dengan anggaran Rp.7.525.090.300,- Realisasi sebesar Rp.6.617.454.392,- atau 87,94% untuk mendukung 8 (delapan) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- Program pengembangan IKM yang dilakukan oleh Provinsi terkadang kurang selaras dengan program pengembangan di kabupaten/kota karena program pengembangan IKM mengacu kepada Pusat dan Provinsi sementara kabupaten/kota memiliki agenda tersendiri dalam pengembangan IKM.
- Data yang dihimpun oleh Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Pemerintah Kab./Kota selalu mengalami perubahan, belum valid dan belum up to date sehingga berpengaruh terhadap dalam proses perencanaan program pembangunan di bidang pengembangan IKM.
- Kerjasama yang dilaksanakan melalui Program Mitra Praja Utama (MPU) belum cukup mampu menciptakan kemitraan antara dunia usaha pada kesepuluh Provinsi anggota MPU dalam pengembangan industri khususnya IKM.
- Kurang dan belum adanya sinkronisasi antara program/kegiatan pembangunan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pelatihan ataupun pembinaan yang

dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota tidak dapat didukung oleh dana kabupaten/kota.

- Program Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki, Industri Perhiasan, Industri Berbasis Gula, Industri Perkapalan, Industri Kimia dan Kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi belum sepenuhnya berjalan optimal.
- Peta Panduan atau Roadmap untuk Klaster Industri Perhiasan, Industri Berbasis Gula, Industri Kimia dan Kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi belum tersusun.
- Pengembangan industri melalui pendekatan Klaster, OVOP, Komoditi Potensial/Kompetensi Inti Daerah dan Industri Kreatif belum sepenuhnya didukung oleh kabupaten/ kota.
- Kebijakan/Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang tidak selaras dengan kondisi di lapangan, dimana jumlah anggaran yang kecil untuk penyewaan tempat dan peralatan/mesin tetapi dengan administrasi legalitas yang lengkap terkadang sulit ditemui di lapangan.
- Adanya mutasi pejabat baik ditingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan program pengembangan IKM dikarenakan adanya masa transisi bagi pejabat baru untuk memahami pelaksanaan program tersebut.
- Lemahnya komunikasi dan koordinasi baik internal di provinsi maupun eksternal dengan Kabupaten/Kota mengakibatkan pelaksanaan program tidak maksimal.
- Kompetensi sumber daya manusia yang menangani program kurang memadai.
- Belum optimalnya akurasi data IKM Aneka Industri dan Kerajinan yang ada di daerah kabupaten/ kota.
- Belum optimalnya kesesuaian program antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap prioritas pengembangan IKM Aneka Industri dan Kerajinan.

- Belum optimalnya tindak lanjut hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan IKM Aneka Industri dan Kerajinan pasca kegiatan secara menyeluruh.
- Masih kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM yang berhubungan dengan pelayanan teknis dan pengembangan IKM Aneka Industri dan Kerajinan.
- Masih terbatasnya IKM yang dapat menggunakan program komputer untuk transfer teknologi seperti pembuatan gambar teknik / desain produk logam (Autocad dan Cadcam), sehingga produk yang dihasilkan tidak seluruhnya sesuai dengan permintaan/pesanan.
- Terbatasnya kemampuan IKM dalam pengembangan/rekayasa teknologi dan desain produk terutama pembuatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- Masih terbatasnya pengetahuan IKM dalam pengenalan bahan/material logam, sehingga mutu produk yang dihasilkan masih relatif rendah.
- Masih terbatasnya kegiatan pembinaan dan pengembangan kepada IKM, disebabkan terbatasnya anggaran UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo.
- Masih banyak IKM yang melakukan produksi dengan tanpa memperhatikan lingkungan terutama pengrajin batik dan penyamakan kulit maupun pengrajin alas kaki.
- Kurangnya pengembangan desain yang dikembangkan oleh IKM terhadap produk yang dihasilkan.
- Kurang optimalnya pemanfaatan sisa buangan produksi industri yang mengakibatkan tingginya pemakaian bahan baku.
- SDM yang diikuti dalam pelatihan tidak memiliki kompetensi di bidangnya sehingga sulit memahami materi yang diberikan.
- Terbatasnya jumlah pegawai yang menguasai bidang – bidang teknis sehingga pendampingan kurang optimal.
- Kebijakan / Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang tidak selaras dengan kondisi di lapangan, dimana jumlah anggaran yang kecil untuk penyewaan tempat dan mesin tetapi dengan administrasi legalitas yang lengkap yang sulit ditemui di lapangan.

- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dengan kabupaten / kota menjadi suatu hambatan karena tidak tersedianya anggaran untuk panitia kabupaten / kota.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku ikm makanan dan minuman dalam menggunakan bahan tambahan makanan.
- IKM makanan dan minuman masih banyak yang belum menerapkan cara produksi pangan olahan yang higienis dan berstandar.
- Kebijakan Pemerintah tentang Pemberian Hibah Barang/Uang dan Bantuan Sosial kepada Masyarakat , melalui UU Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 298 Ayat (5) dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tanggal 18 Agustus 2016, menjadi permasalahan karena KUB yang sudah terseleksi untuk mendapatkan bantuan hibah mesin dan peralatan industri belum siap secara legalitas.
- Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki IKM untuk mendapatkan SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industri
- Masih kurangnya informasi, persepsi dan sosialisasi yang diterima oleh masyarakat tentang produk SNI, sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan produk yang tidak memiliki SNI.
- Masih kurangnya kesadaran pelaku industri untuk menerapkan Gugus Kendali Mutu, Produktivitas, HACCP, 5S, GMP dan sejenisnya dalam proses produksi.
- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan IKM pangan dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditi hasil pertanian, perkebunan maupun kehutanan baik dalam rasa, jenis, bentuk maupun kemasan.
- Masih banyaknya sumberdaya pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan yang belum diolah.

Solusi :

- Melakukan koordinasi dengan kabupaten/ kota sebelum ataupun pada tahun pembangunan yang sedang berjalan, agar pada saat tahun pembangunan berjalan sudah ada kesepakatan dalam pengembangan komoditi industri.
- Proses pendataan tahun 2016 dilakukan melalui beberapa cara yaitu melalui pendataan industri oleh kabupaten/ kota, kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan melalui pemanfaatan Tenaga Penyuluh Lapangan Kementerian Perindustrian, Kerjasama melalui Program Mitra Praja Utama (MPU) akan ditingkatkan melalui optimalisasi potensi industri Jawa Timur.
- Sinkronisasi antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota masih akan terus dilakukan dan diikuti dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/ Kota untuk memberikan motivasi pada pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mendukung program pengembangan industri yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Atau sebaliknya Pemerintah Provinsi dapat mendukung kegiatan pengembangan industri yang diprioritaskan oleh kabupaten / kota.
- Temu bisnis masih harus terus dilaksanakan agar terjadi kesamaan visi dan pandangan dalam pengembangan Klaster Industri Alas Kaki, Industri Perhiasan, Industri Berbasis Gula, Industri Perkapalan, Industri Kimia dan Kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi.
- Peta panduan/ Roadmap untuk Klaster Industri Perhiasan, Industri Berbasis Gula, Industri Kimia dan Kondensat serta Industri Lampu Hemat Energi perlu disusun agar setiap Pihak yang terkait dapat mengetahui dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengembangan klaster.
- Komitmen dalam pengembangan industri melalui pendekatan klaster OVOP, komoditi potensial/ kompetensi inti daerah dan industri kreatif perlu diperkuat lagi baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga masing – masing pihak dapat menjalankan perannya dengan baik.

- Saat kondisi ideal yaitu ketersediaan dana tidak sesuai dengan administrasi legalitas yang lengkap maka kegiatan dilaksanakan dengan minim sarana dan prasarana.
- Melakukan koordinasi dengan kabupaten / kota akan adanya efesiensi belanja pegawai pada Anggaran Pemerintah Provinsi, dengan tetap meminta fasilitasi kabupaten / kota dalam pelaksanaan kegiatan.
- Lebih mengintensifkan kegiatan identifikasi potensi IKM Aneka Industri dan Kerajinan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.
- Melakukan kegiatan koordinasi teknis antar lembaga Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pengembangan IKM Aneka Industri dan Kerajinan.
- Mengoptimalkan peran dan fungsi UPT. Aneka Industri dan Kerajinan sebagai bagian dari pelaksana Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri.
- Mengoptimalkan SDM aparatur yang ada baik PNS maupun PTT melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas SDM UPT. Aneka Industri dan Kerajinan.
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada IKM untuk pembuatan gambar teknik/desain produk (auto cad/Cad cam);
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi IKM Logam dalam rekayasa /pembuatan Teknologi tepat guna (TTG);
- Melaksanakan bimbingan teknis bagi IKM dalam pengenalan bahan material logam;
- Meningkatkan pembinaan dan pengembangan IKM di Kabupaten / Kota agar target dalam renstra tercapai dengan adanya anggaran yang memadai;
- Melaksanakan bimbingan teknis produksi pemanfaatan sisa buangan produksi industri, sehingga biaya produksi dapat ditekan
- Melakukan sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan pendampingan yang berkonsep clean and green production supaya IKM nantinya mampu merubah kebiasaan lamanya yang kurang peduli terhadap lingkungan.

- Setiap Unit Pelaksana Teknis diarahkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap desain produk industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia IKM, revitalisasi alat dan mesin produksi maupun pembuatan prototype produk guna meningkatkan mutu dan daya saing industri.
- Melakukan pelatihan teknik produksi yang memanfaatkan hasil sisa buangan industri.
- Pada waktu rekrutmen peserta dipersyaratkan syarat minimal peserta yang boleh mengikuti pelatihan.
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Disperindag guna meningkatkan kemampuan dibidang teknis.
- Melakukan outsourcing dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga pendampingan bagi IKM
- Saat kondisi ideal yaitu ketersediaan dana tidak sesuai dengan administrasi legalitas yang lengkap maka kegiatan dilaksanakan dengan minim sarana dan prasarana.
- Melakukan koordinasi dengan kabupaten / kota akan adanya efesiensi belanja pegawai pada Anggaran Pemerintah Provinsi, dengan tetap meminta fasilitasi kabupaten / kota dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota sehingga memiliki persepsi yang sama dalam pembinaan IKM
- Mensosialisasikan pelayanan PPSH dan Klinik Desain sebagai tempat konsultasi di bidang standardisasi & desain yang dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, baik oleh IKM maupun disperindag kabupaten/kota.
- Perlu terus dilakukan peningkatan pemahaman tentang penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang dilakukan pada setiap pelaksanaan Pelatihan pengolahan produk industri makanan dan minuman
- Pelatihan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan akan terus dilakukan, terutama di sentra sentra hasil pertanian.
- Dilakukannya pelatihan teknik produksi industri kepada masyarakat di daerah – daerah yang kaya dengan hasil pertanian, perikanan, perkebunan

maupun kehutanan untuk menciptakan wira usaha baru dan meningkatkan nilai tambah produksi.

- Perlunya kerjasama dengan instansi pendidikan yang membantu IKM dalam pengembangan industri.
- Perlunya dikembangkan bahan baku industri yang dapat menggantikan bahan baku impor terutama pengembangan industri porang untuk mengganti bahan baku terigu.
- Melakukan sosialisasi tentang UU Nomor 23 Tahun 2015 Pasal 298 Ayat (5) dan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tanggal 18 Agustus 2016 kepada para KUB penerima bantuan hibah mesin dan peralatan industri serta memfasilitasi mereka untuk mendapatkan legalitas.
- Sosialisasi dan pendampingan ISO dan SNI kepada IKM masih perlu selalu dilakukan. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak – pihak lain yang dapat memberikan fasilitasi SNI dan ISO kepada IKM.
- Sosialisasi SNI juga perlu dilakukan kepada masyarakat beserta dengan komoditi – komoditi yang sudah memiliki SNI, agar masyarakat dapat mengkonsumsi produk ber-SNI yang sudah jelas keamanannya.
- Sosialisasi dan fasilitasi HKI akan terus dilakukan, dengan melibatkan pihak – pihak lain yang terkait.
- Pembinaan dan pendampingan kepada Industri Kecil Rokok akan terus dilakukan. Selain itu, kerjasama dengan Pihak – Pihak terkait akan ditingkatkan.
- Untuk meningkatkan desain produk industri maka pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan desain akan dilakukan. Dalam upaya peningkatan desain ini, akan melibatkan Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil Menengah (TPL-IKM) karena mereka ini merupakan agent di lapangan. Selain itu, untuk memberikan penghargaan kepada IKM yang telah melakukan peningkatan desain, maka lomba desain produk industri akan tetap dilaksanakan.
- Pelatihan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan akan terus dilakukan, terutama di sentra sentra hasil pertanian.

- Dilakukannya pelatihan teknik produksi industri kepada masyarakat di daerah – daerah yang kaya dengan hasil pertanian, perikanan, perkebunan maupun kehutanan untuk menciptakan wira usaha baru dan meningkatkan nilai tambah produksi.
- Perlunya kerjasama dengan instansi pendidikan yang membantu IKM dalam pengembangan industri.
- Perlunya dikembangkan bahan baku industri yang dapat menggantikan bahan baku impor terutama pengembangan industri porang untuk mengganti bahan baku terigu.
- Perlu adanya dorongan investasi untuk membangun industri intermetiade di Indonesia yang memproduksi bahan baku industry untuk menekan impor bahan baku industry serta adanya pemberian insentif terhadap ongkos angkut antar pulau yang dapat menekan cost produksi.
- Melakukan koordinasi antar provinsi dalam rangka mensubstitusi bahan baku impor dengan komoditi agro yang tersedia di nusantara.
- Mendorong daya saing industry nasional melalui deregulasi, debirokratisasi serta penegakkan hukum dan kepastian usaha.

BIDANG URUSAN PERDAGANGAN

a. Tujuan

- Meningkatkan kinerja ekspor non migas;
- Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- Meningkatkan tertib perdagangan.

b. Sasaran dan Program

Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

NO	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ INDIKATOR PROGRAM	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2015	2016	
1.	Meningkatnya net Ekspor non-migas Perdagangan Luar Negeri.	1. Nilai Net Ekspor non-Migas (Milyar US\$).	0,85	2,26	203,60%
		2. Persentase Pertumbuhan Ekspor non-Migas.	-8,27%	8,77%	206,04%
	Program peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor.	Net Ekspor non-Migas.	0,85	2,26	203,60%
2.	Meningkatnya net-Ekspor Perdagangan Dalam Negeri.	1. Persentase Pertumbuhan sub sektor perdagangan.	6%	5,81%	-3,16%
		2. Persentase kontribusi sub-sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Jatim.	17,64%	18%	2,04%
		3. Nilai net-ekspor perdagangan dalam negeri (Rp Triliun)	94,48	100,56	6,43%
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	Net Ekspor Perdagangan Dalam Negeri.	94,48	100,56	6,43%
3.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat.	79,15	78,76	-0,49%
		2. Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk.	3,12%	2,42%	0,22%
		3. Persentase pengaduan konsumen terkait jasa kemetrollogian yang ditindaklanjuti.	100	100	-
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.	Jumlah Standardisasi Mutu Barang dan Alat Ukur.	975.314	701.953	-28,02%

Evaluasi terhadap Target dan Realiasi Indikator Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya net ekspor non migas perdagangan luar negeri:

➤ Nilai Net Ekspor Non-Migas.

Pada tahun 2016 ekspor non migas Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi sebesar USD 17.943.367,91 ribu sedangkan impor non migasnya sebesar USD 15.680.523,37 ribu sehingga nilai ekspor bersih perdagangan pada tahun 2016 masih surplus sebesar USD 2.262.884,54 ribu yang melebihi targetnya sebesar USD 1.110.000,00 ribu, meskipun persentase ekspor non migas naik 8,77% namun target pertumbuhan ekspor non migas sebesar 15,5% tidak tercapai. Sedangkan Tahun 2015 Nilai ekspor non migas Jawa Timur selama Bulan Januari – Desember 2015 mencapai USD 16.495.994,42 ribu sedangkan nilai impor non migas pada periode yang sama tahun 2015 mencapai USD 15.655.897,61 ribu maka nilai ekspor bersih perdagangan pada tahun 2015 mengalami surplus sebesar USD 840.096,81 ribu. Sehingga net ekspor non migas mengalami kenaikan dari USD 840.096,81 ribu di tahun 2015 menjadi USD 2.262.884,54 ribu di tahun 2016 atau naik sebesar 14.22%.

➤ Persentase Pertumbuhan Ekspor non-Migas.

Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,77% dibanding tahun 2015, yakni dari USD 16.495.994,42 ribu di tahun 2015 naik menjadi USD 17.943.367,91 ribu. Kinerja perdagangan luar negeri merupakan akumulasi hasil kerja dari seluruh *stake holder*, mulai dari hulu hingga hilir. Timbulnya masalah atau hambatan pada salah satu tahapan atau bagian akan berpengaruh terhadap keseluruhan hasil kinerja perdagangan luar negeri.

Meskipun kenaikan ekspor non migas sebesar 8,77% dari tahun sebelumnya namun masih saja tidak bisa mencapai target

prosentase pertumbuhan ekspor non migas Jawa Timur tahun 2016 sebesar 15,5%. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh faktor di atas. Beberapa regulasi yang terkait dengan ketentuan ekspor beberapa produk yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah, seperti untuk ekspor produk industri kehutanan dan pertambangan implementasinya masih memberatkan eksportir tingkat IKM.

Sasaran 2 : Meningkatnya net-Ekspor Perdagangan Dalam Negeri :

- Persentase Pertumbuhan sub sektor perdagangan.
Realisasi Pertumbuhan sub sektor perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2014 dibanding tahun 2015 adalah sebesar 6% atau menjadi sebesar Rp.243.014,66 milyar. Sedang pertumbuhan pada tahun 2015 dibanding tahun 2016 sebesar 5,81% atau menjadi sebesar Rp.257.126,66 milyar. Pertumbuhan sub sektor perdagangan meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
- Persentase Kontribusi sub-sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Jatim.
Prosentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Jawa Timur di pada tahun 2010-2015 berkisar pada angka 17-18 persen dan berada pada titik tertinggi pada tahun 2011 sebesar 17,97%. Sedang pada tahun 2015 mencapai 17,58%. Pada tahun 2016 ini tercatat lebih tinggi lagi yakni pada titik 18%. Sub Sektor Perdagangan merupakan salah satu dari aspek di PDRB Jatim yang berkontribusi besar bagi perekonomian Jawa Timur. Berdasarkan Data BPS, perekonomian Jawa Timur tahun 2016 dari sisi laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 pada triwulan IV 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,55%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri yaitu sebesar 12,83% dengan capaian nilai ekspor luar negeri sebesar Rp.272.783,01 milyar.

- Nilai net-Ekspor Perdagangan dalam negeri.

Nilai net ekspor perdagangan dalam negeri tahun 2016 sebesar Rp. 100,56 trilyun naik sebesar 6,43% jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2015 yang mencaai Rp. 94,48 trilyun.

Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan.

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan kemetrologian, diukur melalui kuisisioner yang diberikan kepada masyarakat di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kuisisioner tersebut berisi tentang umpan balik dari masyarakat mengenai pelayanan kemetrologian yang telah dilakukan. Pelayanan kemetrologian yang dilakukan tersebut meliputi : Tera sah, Tera ulang sah, Tera/tera ulang dikantor, Tera/tera ulang di tempat pakai (loko), Pelayanan sidang tera ulang di kecamatan, Pelayanan kalibrasi dan pengujian.

- Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Komoditi/Produk.

Pada Indikator jumlah sertifikat mutu komoditi/produk yang terdapat pada RENSTRA 2014-2019 sebanyak 40.873 sertifikat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur yang memegang peran dalam penerbitan sertifikat mutu hal ini adalah UPT PSMB-LT Surabaya dan UPT PSMB-LT Jember dimana pertumbuhan sertifikasi mutu sampai dengan tahun 2015 sebanyak 5.242 sertifikat sedang pada tahun 2016 sudah mencapai 10.380 sertifikat atau pelayanan sertifikasi meningkat sebesar 98,01% dari tahun 2015. Dari jumlah tersebut diterbitkan oleh UPT PSMB LT Surabaya sebanyak 5.563 sertifikat dan UPT PSMB-LT Jember sebanyak 4.817 sertifikat. Sehingga total capaian pada tahun 2016 pada Renstra 2014-2019 sudah

tercapai sebanyak 15.622 sertifikat atau sudah mencapai 38,22% dari target tahun 2019.

- Persentase Pengaduan Konsumen terkait Jasa Kemetrolagian yang ditindaklanjuti.

Untuk data Laporan Pengaduan Kemetrolagian dan Tindak Lanjutnya pada tahun 2016 yang diperoleh dari Bidang Kemetrolagian, jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2016 adalah sebanyak 131 pengaduan dan yang ditindaklanjuti sebanyak 131 pengaduan, jadi pengaduan konsumen terkait jasa kemetrolagian yang ditindaklanjuti tahun 2016 adalah sebesar 100% sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2016. Sedang pada tahun 2015 jumlah pengaduan mencapai 177 dan yang ditindaklanjuti sebanyak 177.

c. Program

1. Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor, dengan anggaran Rp.15.581.169.000,- Realisasi sebesar Rp.14.862.538.363,- atau 95,39% untuk mendukung 6 (enam) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan anggaran Rp.23.023.951.000,- Realisasi sebesar Rp.21.598.556.129,- atau 93,77% untuk mendukung 7 (tujuh) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan anggaran Rp.28.223.251.500,- Realisasi sebesar Rp.25.422.077.851,- atau 90,07% untuk mendukung 19 (Sembilan belas) kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Lampiran Format matrik 16 kolom.

d. Permasalahan dan Solusi**Permasalahan:**

- Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan kabupaten/kota menjadi suatu hambatan karena tidak tersedianya anggaran untuk panitia kabupaten/kota.
- Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui lelang umum juga menjadi suatu hambatan dalam penyerapan anggaran tahun 2016.
- Belum adanya diversifikasi bahan baku agro untuk mengganti bahan baku impor.
- Impor masih didominasi oleh impor bahan baku, dimana hal ini dikarenakan kualitas yang dibutuhkan oleh industri belum tersedia di dalam negeri, jikapun tersedia harga pada umumnya tidak bersaing dan secara kuantitas belum bisa kontinyu.
- Kebutuhan akan hasil-hasil pertanian belum sepenuhnya tercukupi oleh produksi dalam negeri, seperti kedelai, bawang putih dan lainnya.
- Saat ini terdapat masih didominasi oleh impor bahan baku, dimana hal ini dikarenakan kualitas yang dibutuhkan oleh industri belum tersedia di dalam negeri, jikapun tersedia harga pada umumnya tidak bersaing dan secara kuantitas belum bisa kontinyu.
- Kurangnya daya saing produk dalam negeri menyebabkan semakin meningkatnya permintaan barang luar negeri yang mempunyai kualitas lebih baik, mengingat semakin membaiknya ekonomi masyarakat Jawa Timur.
- Sumber Daya Manusia (SDM) belum mampu melaksanakan penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi di tingkat perusahaan sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing.
- Mahalnya biaya angkut antar pulau dibandingkan dengan biaya angkut luar negeri ikut mempengaruhi harga produksi dalam negeri sehingga masyarakat cenderung mengkonsumsi produk-produk luar negeri.
- Sulitnya mengendalikan laju impor, dimana impor masih dominan pada bahan baku, bahan penolong, komponen industri, dan komoditi pertanian.
- Meskipun koordinasi dalam rangka pengendalian telah dilakukan tetapi inflasi masih mengalami fluktuasi yang elastis dikarenakan adanya beberapa faktor

penyumbang inflasi diluar kendali Disperindag Prov. Jatim seperti tarif angkutan, tarif dasar listrik, dan harga bahan bakar minyak.

- Pelaksanaan temu usaha dagang dengan provinsi mitra dirasa belum optimal dikarenakan kurang siapnya provinsi mitra dalam melaksanakan temu usaha dengan kita.
- Data bongkar dan muat di pelabuhan – pelabuhan laut di Jawa Timur belum dapat diketahui secara detail dikarenakan tidak adanya kerjasama informasi dengan pihak – pihak yang berwenang.
- Sistem Resi Gudang belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh para petani Jawa Timur, dan komoditi yang dapat disimpan juga masih terbatas.
- Perusahaan besar dan menengah sudah memiliki kesadaran untuk menjaga standardisasi alat ukurnya. Namun perusahaan kecil yang langsung berinteraksi dengan konsumen belum memiliki kesadaran untuk menera alat ukurnya.
- Masyarakat belum menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga belum ada suatu kemauan untuk memberi pelaporan bila terjadi kecurangan takaran dan dimana harus melaporankan.
- Belum adanya partisipasi dari dinas Perindustrian Kabupaten/Kota karena keterbatasan dana, sarana dan SDM. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap barang – barang beredar menjadi terbatas.
- Masih banyaknya masyarakat yang membeli rokok tanpa cukai, karena harganya murah.
- Penerapan standardisasi mutu produk masih terkendali oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang informasi standardisasi produk.
- Masih banyaknya barang produksi China yang beredar.
- Masih banyaknya komoditi lokal maupun impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Banyaknya barang tiruan/ palsu yang beredar di Pasar.

Solusi :

- Pengajuan lelang dipersiapkan lebih lengkap dan lebih awal.
- Melakukan sinergisitas program kegiatan dengan pemerintah kabupaten/kota lebih intensif dan dilakukan pada awal – awal tahun anggaran, bila perlu dilakukan dalam periode waktu tahun sebelumnya;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya yang dimiliki melalui kegiatan pelatihan atau magang pada institusi yang lain.
- Perlu upaya strategis untuk meningkatkan nilai ekspor, berupa pembukaan pasar ekspor baru di daerah Afrika dan Amerika Selatan, maupun peningkatan daya saing komoditi industri potensial untuk diekspor.
- Memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasokan.
- Sebaiknya kewenangan melakukan validasi data dokumen untuk akses ke INATRADE , diserahkan ke Provinsi, karena keberadaan suatu perusahaan eksportir maupun importer, yang lebih mengetahui adalah aparat di provinsi, dengan demikian para pelaku usaha tidak perlu ke Jakarta, cukup validasi dilakukan oleh dinas Perindag di provinsi saja, hal ini akan mengurangi biaya operasional maupun mempercepat waktu proses validasi sendiri.
- Melakukan temu bisnis dengan provinsi lain guna menekan impor bahan baku, bahan penolong, dan komoditi agro yang tersedia di nusantara.
- Mengembangkan industri intermediate guna menekan impor bahan baku industri yang permintaannya masih cukup tinggi.
- Tim Pengendali Inflasi Jawa Timur perlu melibatkan berbagai pihak yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap inflasi.
- Guna menjamin tingkat keberhasilan pelaksanaan temu usaha dengan provinsi mitra, diharapkan pelaksanaannya dilakukan setelah data mitra usaha dikedua provinsi tersedia.
- Perlu adanya koordinasi yang sifatnya vertikal antar pemangku kepentingan guna mendapatkan data yang detail dan akurat seperti BPS, Bank Indonesia, Bea Cukai, PT. Pelindo, Dinas Perhubungan, dan Disperindag.

- Agar resi gudang benar-benar bermanfaat bagi petani dalam menyimpan barang dan bermanfaat dalam menjaga keseimbangan stock barang, maka selain sosialisasi, kemauan petani dalam pemanfaatan Sistim Resi Gudang perlu ditumbuhkan.
- Sosialisasi terhadap standardisasi masih akan dilakukan sampai timbul kesadaran bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang maupun jasa sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan maupun standar ukur dan masyarakat mendapatkan informasi tentang hak-haknya dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.
- Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan penertiban alat takar dan ukur sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang takar dan ukur serta dapat melaporkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan jika terjadi kecurangan pengukuran.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota perlu berpartisipasi dalam pelaksanaan pengawasan barang beredar melalui penyediaan dana pengawasan maupun peningkatan SDM pengawasan.
- Perlunya dilakukan pembatasan dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran rokok tanpa cukai.
- Perlunya sosialisasi tentang standardisasi mutu produk sesuai Standar Nasional Indonesia bagi beberapa produk terutama produk-produk elektronik, sehingga konsumen tetap terjaga.
- Sosialisasi Aku Cinta Indonesia (ACI), perlu terus dilakukan kepada para pelajar. Selain itu Pengawasan terhadap peredaran komoditi impor China akan terus dilakukan untuk menjamin bahwa barang yang beredar sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

e. Penghargaan Nasional Yang Diterima

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan di tingkat nasional berupa Primanity Award pada Pameran Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan di Trade Expo Indonesia (TEI) pada Oktober 2016 lalu.

Primaniyarta Award ini diberikan kepada eksportir yang mengalami peningkatan ekspor selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Berikut penerima award dalam bidang Perdagangan dengan kategorinya :

- PT. Karunia Catur Perkasa dengan jenis produk softy nappa leather, nubuck leather, crust.
- PT. Sekar Bumi dengan jenis produk krupuk udang, kerupuk sayur, bumbu masak, sambal terasi dan granul.
- PT. Zenith Allmart Precisindo, jenis produk casing pump, filter air, sparepart, mesin dan kapal valve.

Selain penghargaan tersebut, Kementrian Perdagangan memberikan penganugerahan berupa UKM Pangan Award tahun 2016. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pembina UKM di Jawa Timur melakukan seleksi untuk mengikutsertakan UKM dalam penganugerahan UKM Pangan Award tahun 2016. Adapun pemenang UKM Pangan Award yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Pemenang II Kategori Produk Makanan Siap Saji, CV. Syafa Indonesia (Spaghetti Kelor) Probolinggo, Jawa Timur.
- Pemenang II Kategori Produk Bumbu Skala Mikro Kecil, Sambel Bu Rahayu, Kedung Kandang Malang, Jawa Timur.
- Pemenang I Kategori Produk Bumbu Skala Menengah, Sambel CUK (Cabe Uleg Kemasan) Waru, Sidoarjo, Jawa Timur.

B. KINERJA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2014 sebesar Rp. 1.539,79 triliun dan meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 1.692,90 triliun. Selanjutnya pada tahun 2016, PDRB ADHB Jawa Timur mencapai Rp. 1.855,04 triliun. Sedangkan bila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2014 sebesar Rp. 1.262,70 triliun meningkat menjadi Rp. 1.331,31 triliun pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.405,23 triliun.

Tabel 4.1
Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Dan Nasional

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
PDRB ADHB – Jawa Timur (Triliun Rupiah)	1.539,79	1.692,90	1.855,04
PDRB ADHK 2010 – Jawa Timur (Triliun Rupiah)	1.262,70	1.331,39	1.405,23
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur (%)	5,86	5,44	5,55
Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	5,02	4,79	5,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat dari besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2014 perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,86 persen, kemudian pada tahun 2015 menjadi 5,44 persen dan pada tahun 2016 mencapai 5,55 persen. Kondisi tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu berturut-turut 5,02 persen (2014); 4,79 persen (2015) dan 5,02 persen (2016).

Perekonomian Jawa Timur tahun 2014 tumbuh sebesar 5,86 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,88 persen, diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 8,52 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,17 persen. Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (28,90 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,73 persen) dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (17,24 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2014, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,22 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,85 persen; dan Konstruksi sebesar 0,50.

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2015 tumbuh sebesar 5,44 persen. Dari sisi produksi, semua kategori mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi sebesar 3,00 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalan sebesar 7,92 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,91 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,19 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,56 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhannya, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,57 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,09 persen;

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,43 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,39 persen.

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2016 tumbuh sebesar 5,55 persen. Dari sisi produksi, semua kategori mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,18 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,49 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,57 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,99 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 5,97 persen.

Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 28,92 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,31 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 18,00 persen.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jawa Timur tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,55 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri yaitu sebesar 12,83 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah komponen net ekspor antar daerah sebesar 9,58 persen. Kemudian komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB), pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan impor luar negeri yang masing-masing tumbuh sebesar 6,02 persen; 5,87 persen; 4,55 persen dan 0,02 persen. Sementara komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,01 persen.

1.2. Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Peningkatan ini juga akan sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Ini menandakan bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian, karena pemerataan

pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Tabel 4.2
Gini Rasio Jawa Timur

Gini Rasio	Tahun		
	2014	2015	2016
Jawa Timur	0,37	0,40	0,40

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket : $G < 0,3$ = ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang, dan

$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Bila mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per kapita di Jawa Timur 2014-2016 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3 – 0,5). Pada tahun 2014, gini rasio Jawa Timur mencapai 0,37, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 0,40 dan kondisi tahun 2016 tidak mengalami perubahan yaitu mencapai 0,40. Sebenarnya dengan meningkatnya gini ratio ini tidak berarti kelompok ekonomi rendah tidak mengalami peningkatan pendapatan, sebenarnya mereka juga mengalami peningkatan pendapatan, namun peningkatannya masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dari kelompok ekonomi menengah ke atas.

1.3. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Seperti halnya gini ratio, pemerataan pendapat versi bank dunia juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan masyarakat guna

mengetahui ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas.

Ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokkannya adalah sebagai berikut :

- jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Tabel 4.3
Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur

Tahun	40 % bawah	40 % menengah	20 % atas
2014	18,63	35,22	46,15
2015	16,61	34,52	48,87
2016	17,03	35,60	47,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2014 sampai 2015 penduduk yang masuk dalam kelompok 40 persen bawah persentasenya berfluktuatif, mulai sebesar 18,63 persen di tahun 2014 menjadi 16,61 persen pada tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi 17,03. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok 20 persen atas persentasenya mulai 46,15 persen di tahun 2014 menjadi 48,87 persen pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 menjadi 47,37 persen. Berdasarkan pengelompokan distribusi bank dunia,

pada tahun 2016 Jawa Timur masuk dalam kategori ketimpangan rendah karena jumlah pendapatan dari penduduk pada kategori 40 persen terbawah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

1.4. PDRB Per Kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRBnya setiap tahun meningkat. Peningkatan ini akan lebih berarti jika angka per kapita yang diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun juga mengalami peningkatan. Dari hasil perkembangan PDRB per kapita tiga tahun terakhir, menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dari tahun ke tahun cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRBnya setiap tahun meningkat.

Tabel 4.4
PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1.539.794,70	1.692.903,00	1.855.042,70
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	38.610.202	38.847.600	39.075.152
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	39.880,51	43.578,05	47.473,71

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Apabila diikuti perkembangannya selama tiga tahun terakhir, PDRB perkapita penduduk Jawa Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 39,88 juta, kemudian meningkat menjadi Rp. 43,57 juta pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 PDRB per kapita Jawa Timur meningkat kembali menjadi Rp. 47,47 juta. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan karena perekonomian Jawa Timur tumbuh cukup baik, bahkan lebih tinggi daripada Nasional. Dengan meningkatnya PDRB per kapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur semakin membaik.

1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tertentu tetapi secara holistik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dimaksud tidak hanya terfokus pada pembangunan gedung sarana dan prasarana, tetapi berimplikasi pada perubahan kualitas manusia. Bisa dianalogkan, pembangunan yang pro kepada kualitas manusia itu bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan pembangunan yang hakiki, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan upaya serius dengan program peningkatan kualitas manusia baik dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat akan merasa sejahtera, jika pembangunan yang terjadi memberikan implikasi pada tercapainya umur panjang dan sehat, masyarakat semakin berpengetahuan dan dapat hidup layak secara ekonomi. Potret implikasi pembangunan terhadap kualitas manusia dapat dilihat dari hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 4.5
Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Indeks Pembangunan Manusia	68,14	68,95	69,75*

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan ketentuan UNDP (*United Nation Development Programme*), penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Hal ini dikarenakan IPM metode lama mempunyai kelemahan dan perlu diperbaharui. Pada metode baru ini, angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan lama sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan *geometric mean*. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan capaian angka IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama. Tetapi perlu diingat bahwa hasil penghitungan metode baru tidak bisa

dibandingkan lagi dengan metode lama, karena sudah berbeda metodologi. Selama tiga tahun terakhir, pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2014 sebesar 68,14, kemudian meningkat menjadi 68,95 pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 menjadi 69,75 (angka sangat sementara). Meningkatnya IPM ini mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat di Jawa Timur.

1.6. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Tabel 4.6
Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Persentase Penduduk Miskin	12,28	12,28	11,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka kemiskinan di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir secara gradual (2014-2016) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2014 angka kemiskinan sebesar 12,28 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.748,12 ribu jiwa, selanjutnya pada tahun 2015 persentasenya tidak mengalami perubahan, yaitu 12,28 persen dengan penduduk miskin sebesar 4.775,97 ribu jiwa dan pada tahun 2016 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 11,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.638,53 ribu jiwa.

Berbagai upaya yang telah ditempuh pemerintah daerah untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya adalah meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan.

1.7. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Tabel 4.7
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	87,72	87,72	88,15

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dalam tiga tahun terakhir pencapaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi kemiskinan perlahan terus membaik. Kondisi ini ditunjukkan dengan jumlah rakyat miskin yang semakin berkurang sehingga persentase penduduk di atas garis kemiskinan mengalami peningkatan. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan di tahun 2014 sebesar 87,72 persen, kemudian pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan yaitu 87,72 persen, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 88,15 persen.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

1.1. Angka Melek Huruf

Melek huruf adalah kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis baik dalam bentuk huruf latin maupun huruf lainnya (huruf arab,

jawa, cina dll). Membaca merupakan proses pemahaman untuk memperoleh informasi dari berbagai pengetahuan. Sedangkan kemampuan menulis dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan mengatualisasikan pemikiran melalui tulisan. Melek huruf menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan. Dalam dunia pendidikan membaca dan menulis merupakan ilmu yang pertama kali diperkenalkan, disamping itu melek huruf juga menjadi dasar bagi setiap manusia, agar dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Tabel 4.8
Angka Melek Huruf Usia 15-59 Tahun Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Angka Melek Huruf	95,49	96,06	96,06*

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka melek huruf penduduk berusia 15-59 tahun di Jawa Timur, selama kurun waktu 2014-2016 terjadi peningkatan dari 95,49 persen di tahun 2014 menjadi 96,06 persen di tahun 2015 dan 96,06 (angka sementara) pada tahun 2016. Perlu diketahui bahwa sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15-59 tahun ini menjadi sasaran global dan nasional. Angka melek huruf penduduk Jawa Timur usia 15-59 tahun sebesar 96,06 persen ini berarti masih terdapat sekitar 3,94 persen penduduk yang buta huruf.

1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir.

Angka rata-rata lama sekolah (*mean years school/MYS*) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang

sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

Tabel 4.9
Angka Rata-rata Lama Sekolah Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,05	7,14	7,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2015-2016 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 7,14 pada tahun 2015 menjadi 7,23 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Timur pada tahun 2016 untuk mengenyam pendidikan formal adalah 7,23 tahun. Setara dengan kelas 2 di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Apabila dihubungkan dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka hal ini sejalan dengan banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur yang menamatkan pendidikannya hanya sebatas SD sederajat. Dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana prasarana maupun mutu pendidikan di Jawa Timur.

1.3. Angka Partisipasi Murni

APM adalah perbandingan jumlah siswa usia tertentu pada jenjang tertentu dengan jumlah penduduk usia tertentu pada jenjang tertentu. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalaninya. Misalnya APM SD, adalah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang sekolah di SD. Angka ini menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan

membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014).

Tabel 4.10
Angka Partisipasi Murni Jawa Timur

Angka Partisipasi Murni	Tahun		
	2014	2015	2016
SD/MI	98,00	98,35	98,56
SMP/MTs	87,60	87,64	88,14
SMA/MA/SMK	65,78	65,83	68,21

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Secara umum dalam tiga tahun terakhir 2014-2016, terjadi peningkatan APM di Jawa Timur untuk semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, angka APM berkisar pada angka 98,00 hingga 98,56 persen, Sementara APM SMP sebesar 87,60 hingga 88,14 persen dan APM SMA sebesar 65,78 hingga 68,21. Peningkatan APM di semua jenjang pendidikan ini memberikan gambaran akan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah sesuai dengan umur yang ditentukan.

1.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (7-12 tahun untuk SD sederajat, 13-15 tahun untuk SLTP sederajat dan 16-18 tahun untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang penting sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang

paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 4.11
Angka Partisipasi Kasar Jawa Timur

Angka Partisipasi Kasar	Tahun		
	2014	2015	2016
SD/MI	112,72	112,79	112,84
SMP/MTs	102,85	102,90	103,42
SMA/MA/SMK	78,23	79,14	81,42

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan secara umum. APK dapat digunakan sebagai indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, untuk tingkat pendidikan SD dan SMP selalu diatas seratus persen. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA berkisar diangka 70 hingga 81 persen.

2. Kesehatan

2.1. Angka Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Tabel 4.12
Angka Harapan Hidup Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup	70,45	70,68	70,74

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata angka harapan hidup di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir (2014-2016) menunjukkan peningkatan yaitu 70,45 (thn. 2014); 70,68 (thn. 2015); dan 70,74 (thn. 2016). Meningkatnya angka harapan hidup ini merupakan representasi keberhasilan pemerintah melalui program pembangunan kesehatan, program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan serta peningkatan daya beli masyarakat.

2.2. AKB (/1.000 Kelahiran Hidup)

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas).

Tabel 4.13
Angka Kematian Bayi/AKB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Angka Kematian Bayi/AKB	24,50	24,00	23,60

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan angka kematian bayi selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2014 angkanya mencapai 24,50, selanjutnya terus menurun hingga tahun 2016 menjadi 23,60 Per 1000 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi.

Terjadinya penurunan AKB merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan secara umum, khususnya para ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, keberhasilan program KB, serta semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Secara perlahan namun pasti AKB mengalami penurunan, artinya kesehatan bayi menjadi prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan.

2.3. Angka Kematian Ibu/AKI (1/100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Tabel 4.14
Angka Kematian Ibu di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Angka Kematian Ibu	93,52	89,60	91,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Secara umum angka kematian ibu (AKI) di Jawa Timur selama tahun 2014-2016 berfluktuatif, yaitu masing-masing 93,52 (tahun 2014); 89,60 (tahun 2015) dan tahun 2016 sebesar 91,00. Faktor penyebab terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena pendarahan. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan diantaranya pendampingan dan sosialisasi kepada ibu hamil serta kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan, gerakan senam ibu hamil, dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat. Pemberian tablet penambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan diharapkan akan mengurangi angka kematian ibu.

2.4. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi adalah elemen yang terdapat dalam makanan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh seperti halnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Gizi yang seimbang dibutuhkan oleh tubuh, terlebih pada balita yang masih dalam masa pertumbuhan. Dimasa tumbuh kembang balita yang berlangsung secara cepat dibutuhkan makanan dengan kualitas dan kuantitas yang tepat dan seimbang.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah balita. Kondisi ini dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur

maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- rendah = jika gizi kurang di bawah 10 %
- sedang = jika gizi kurang 10-19 %
- tinggi = jika gizi kurang 20-29 %
- sangat tinggi = jika gizi kurang 30 % atau lebih

Tabel 4.15
Persentase Balita Gizi Buruk di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Persentase Balita Gizi Buruk	2,0	1,8	0,8

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Jumlah balita status gizi buruk di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 2,0 persen, kemudian menurun pada tahun 2015-2016 yaitu masing-masing 1,8 persen (thn.2015) dan 0,8 persen (thn. 2016). Penurunan ini terjadi karena kabupaten/kota di Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan intervensi gizi secara optimal, diantaranya pemberian PMT Penyuluhan & PMT Pemulihan, serta peningkatan pengetahuan masyarakat melalui KIE, antara lain: peningkatan penggunaan ASI Eksklusif, pemberian makanan bayi & anak yang tepat, pemantauan pertumbuhan yang teratur di posyandu dan PHBS. Sedangkan yang sudah mengalami gizi buruk dilakukan perawatan intensif sesuai standar perawatan balita gizi buruk secara komprehensif dan lintas sektor, baik rawat jalan maupun inap. Disamping kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut, juga dilakukan penyediaan anggaran oleh masing-masing kabupaten / kota, tidak hanya di tingkat provinsi maupun pusat.

2.5. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan (%)

Penanggulangan kasus balita gizi buruk dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu bagi balita gizi buruk yang disertai dengan tanda-tanda komplikasi medis dilakukan penanganan rawat inap di Puskesmas Perawatan, *Theurapeutic Feeding Centre* (TFC) maupun Rumah Sakit. Sedangkan bagi balita gizi buruk tanpa komplikasi dilakukan melalui rawat jalan dengan pembinaan oleh petugas kesehatan dan kader Posyandu. Perkembangan Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan, yaitu 100 %. Hal ini menggambarkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan gizi buruk.

Tabel 4.16
Cakupan Balita Gizi Buruk Yang mendapat Perawatan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Cakupan Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

3. Ketenagakerjaan

3.1. Rasio Penduduk Yang Berkerja

Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (100 - angka pengangguran).

Tabel 4.17
Rasio Penduduk Yang Berkerja di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Rasio Penduduk Yang Berkerja	95,81	95,53	95,79

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Rasio penduduk yang bekerja di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (2014-2016) mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2014 Rasio penduduk yang bekerja mencapai 95,81 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 95,53 persen, dan tahun 2016 meningkat kembali menjadi 95,79 persen yang berarti bahwa dari 100 orang jumlah angkatan kerja, terdapat 95 sampai 96 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Dalam meningkatkan penduduk yang berkerja, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan strategi, diantaranya melalui bursa tenaga terbuka dan online serta menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pendidikan kejuruan dan lembaga pelatihan kerja.

II. ASPEK PELAYANAN UMUM

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tertentu. Artinya, APS dapat digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah mengakses fasilitas pendidikan. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS setiap kelompok umur. Secara umum, kondisi APS di Jawa Timur mulai tahun 2014 hingga tahun 2015 menunjukkan tren peningkatan. Meningkatnya

APS ini terjadi pada semua kelompok usia sekolah yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP) dan 16-18 tahun (SLTA).

Tabel 4.18
Angka Partisipasi Sekolah Jawa Timur

Angka Partisipasi Sekolah	Tahun		
	2014	2015	2016
SD/MI	99,93	99,94	99,95
SMP/MTs	98,39	98,45	98,57
SMA/MA/SMK	71,23	72,14	72,76

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 menunjukkan peningkatan dari 99,93 persen pada tahun 2014 menjadi 99,95 persen tahun 2016, Artinya masih ada sebesar 0,05 persen Anak Usia 7-12 yang belum/tidak berada di bangku pendidikan sekolah formal. Sedangkan untuk Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 sedikit mengalami peningkatan dari 98,39 persen pada tahun 2014 menjadi 98,57 persen tahun 2016. Kemudian Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 juga menunjukkan peningkatan dari 71,23 persen tahun 2014 menjadi 72,76 persen pada tahun 2016. Peningkatan tersebut merupakan pengaruh dari program wajar 12 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur .

2. Pekerjaan Umum

2.1. Jalan dan Jembatan

a) Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap (Km)

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Jawa Timur adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Panjang jalan yang terus bertambah diikuti dengan panjang jalan dalam kondisi baik, keduanya bisa memberikan peran terhadap percepatan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Kriterianya adalah jalan provinsi memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI)

atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Tabel 4.19
Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap (Km)

JALAN PROVINSI	Tahun		
	2014	2015	2016
Mantap:	1.543,93	1.574,82	1.262,83
a. Baik	1.185,38	727,14	699,27
b. Sedang	358,55	847,68	563,57
Tidak Mantap	216,99	186,09	158,17
a. Rusak Ringan	199,59	135,99	141,85
b. Rusak Berat	17,40	50,10	16,33
TOTAL	1.760,91	1.760,91	1.421,00*)

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Ket : *) Sesuai SK Gubernur Jawa Timur No. 188/128/KPTS/013/2016, tanggal 12 Pebruari 2016 total panjang jalan Provinsi Jawa Timur : 1.421 Km

Total panjang jalan di Jawa Timur mengalami penurunan dari 1.760,91 Km pada tahun 2014 menjadi 1.421,00 Km pada tahun 2016 (SK Gubernur Jawa Timur No. 188/128/KPTS/013/2016). Sedangkan panjang jalan dalam kondisi mantap menunjukkan peningkatan, yaitu 1.543,93 Km (2014); 1.574,82 Km (2015); dan tahun 2016 menjadi 1.262,83 Km. Penurunan kemantapan ini dikarenakan adanya perubahan panjang jalan provinsi yang mengalami perubahan fungsi dan status jalannya. Semakin meningkat panjang jalan dalam kondisi mantab, maka arus transportasi menjadi lancar dan perekonomian di daerah dapat berjalan lebih baik.

b) Panjang Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik (M)

Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga

merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (*traffic flows*). Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut.

Tabel 4.20
Panjang Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap (M)

JEMBATAN PROVINSI	Tahun		
	2014	2015	2016
Kondisi:			
a. Baik (M)	13.747,08	13.708,28	10.018,94
b. Rusak (M)	894,74	894,74	851,08
c. Rusak Berat (M)	41,00	79,80	0,00
TOTAL	14.952,90	14.952,90	10.870,02

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Kriteria jembatan Provinsi, terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu kondisi baik; rusak; dan rusak berat. Panjang jembatan di Jawa Timur pada tahun 2014 mencapai 14.952,90 m dan pada tahun 2016 menjadi 10.870,02 m. Sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2016 mencapai 10.018,94 m. Dengan meningkatnya kondisi jembatan dalam kondisi baik, tentunya akan meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang maupun belum berkembang di Jawa Timur.

c) Panjang Jalan Yang Terbangun (Km)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, merencanakan pembangunan jalan baru sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Jawa Timur. Rencana pembangunan tersebut meliputi :

- Jalan Tembus Sukorejo Batu sepanjang 33,907 Km
- Jalan Akses PIMPA sepanjang 3,300 Km
- Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sepanjang 64,00 Km

Tabel 4.21
Panjang Jalan Yang Terbangun (Km)

JALAN	Tahun		
	2014	2015	2016
Panjang Jalan Terbangun (Km)	0	0	0

JALAN	Tahun		
	2014	2015	2016
TOTAL	0	0	0

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Sampai dengan tahun 2016 rencana pembangunan jalan tersebut masih dalam tahap pra-konstruksi, yaitu :

- Jalan Tembus Sukorejo Batu, sampai saat ini masih pada tahap penyusunan FS , AMDAL dan DED.
- Jalan Akses PIMPA, sampai saat ini pada tahap pembuatan dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).
- Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun, sampai saat ini masih pada tahapan Kajian.

d) Panjang jembatan yang terbangun (M)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur merencanakan pembangunan jembatan baru sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat Jawa Timur. Rencana pembangunan tersebut meliputi :

- Jembatan Tembus Lawang Batu sepanjang 385,00 Meter.
- Jembatan pada Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun sepanjang 45,00 Meter.

Tabel 4.22
Panjang Jembatan Yang Terbangun (M)

JALAN	Tahun		
	2014	2015	2016
Panjang Jembatan Terbangun (Km)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

e) Panjang Jalan Lintas Selatan/JLS Yang Terbangun (Km)

Panjang Jalan Lintas Selatan (JLS) yang direncanakan 676,815 Km, saat ini sudah terbangun jalan baru sepanjang 109,565 Km, jalan lama eksisting sepanjang 253,455 Km dengan total panjang yang sudah

terbangun 363,020 Km. Selanjutnya pada tahun 2016, pembangunannya meningkat menjadi 368,481.

Tabel 4.23
Panjang Jalan JLS Yang Terbangun (Km)

JALAN JLS	Tahun		
	2014	2015	2016
Jalan (Aspal + Rigid)	330,995	363,020	368,481
TOTAL	330,995	363,020	368,481

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

f) Panjang Jembatan JLS Yang Terbangun (M)

Panjang jembatan JLS yang terbangun pada tahun 2014 mencapai 4.113 m, selanjutnya pada tahun 2016 jembatan JLS yang terbangun mencapai 3.842 m. Permasalahan yang terjadi pada Pembangunan Jalan & Jembatan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur yaitu :

- Terjadi kelangkaan bahan baku material pasir mulai tanggal 29 September 2015 s/d 8 Desember 2015 (70 hari kalender).
- Paket terdampak pada Paket Jalan Kalimujur – Bts. Jember Kab. Lumajang dan Paket Jalan Glenmore – Kendenglembu Kab. Banyuwangi.

Tabel 4.24
Panjang Jembatan JLS Yang Terbangun (M)

JEMBATAN JLS	Tahun		
	2014	2015	2016
Jembatan (Bangunan Atas + Bawah)	4.113	4.373	3.842
TOTAL	4.113	4.373	3.842

Sumber : PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

2.2. Luas Layanan Irigasi (Ha)

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu

daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

Tabel 4.25
Luas Layanan Irigasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Luas Layanan Irigasi (Ha)	2.055.362	2.055.362	2.055.362

Sumber : Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

Luas layanan irigrasi di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan, yaitu mencapai 2.055.362 Ha, Dengan terpenuhinya pasokan air untuk lahan pertanian, maka masyarakat/petani akan menjadi semakin mudah dalam mengolah lahan pertanian karena ketersediaan air terpenuhi.

2.3. Rasio Kondisi Fisik saluran irigasi

Fungsi irigasi pada prinsipnya adalah menambah (*suplesi*) kekurangan air pada lahan pertanian yang diperoleh dari air hujan atau air tanah, karena jumlah air yang diberikan kepada tanaman tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Kinerja jaringan irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

Tabel 4.26
Rasio Kondisi Fisik Saluran Irigasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Rasio Kondisi Fisik Saluran Irigasi (%)	68,07	68,35	68,50

Sumber : Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

Perkembangan rasio kondisi fisik irigrasi di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan tiap tahun. Dengan semakin meningkatnya rasio kondisi fisik irigrasi maka ketersediaan air untuk mengalir sawah dapat

terjaga dengan baik sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian serta kesejahteraan petani.

2.4. Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih

Air adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Setiap hari kita membutuhkan air untuk aktifitas keseharian yang di lakukan mulai dari mandi, minum, memasak, mencuci baju, mencuci piring, dsb. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar, taraf/kualitas hidup masyarakat. Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Air Bersih di Perkotaan dan di Perdesaan ini didukung oleh kegiatan antara lain :

- Penyediaan dan Pengelolaan sarana dan prasarana air minum di perdesaan dan daerah rawan air;
- Fasilitasi sistem penyediaan air minum (SPAM) regional;
- Peningkatan daya dukung lingkungan sebagai pelestarian/peningkatan kawasan tangkap sumber air baku,

Tabel 4.27
Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih di Jawa Timur (%)

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	-	71,42	72,06

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Tingkat pelayanan air bersih pada tahun 2015 sebesar 71,42 persen, selanjutnya meningkat pada tahun 2016 menjadi 72,06 persen. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Mengingat pentingnya air bersih bagi kehidupan dan begitu banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia, maka pengelolaan dan penggunaan air bersih masih perlu ditingkatkan.

2.5. Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah

Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Batasan lain mengatakan bahwa air limbah adalah kombinasi cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran dan industri, yang bercampur dengan air tanah, air permukaan atau air hujan yang mungkin ada. Salah satu tujuan pengelolaan dan pengolahan air limbah adalah menekan berkembangnya penyakit yang ditularkan dan menyebar melalui air permukaan (sungai, waduk) dan air tanah (sumur gali/pompa). Semakin terkontaminasi air di suatu daerah, maka semakin besar kemungkinan terjangkitnya penyakit melalui air.

Tabel 4.28
Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah di Jawa Timur (%)

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	-	64,98	65,31

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Prioritas pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang salah satu indikatornya direpresentasikan dengan tingkat pelayanan sanitasi di perkotaan dan perdesaan yang membandingkan antara jumlah KK yang membutuhkan prasarana sanitasi di perkotaan dan di pedesaan. Pada tahun 2016, capaian persentase tingkat pelayanan air limbah di Jawa Timur sebesar 65,31 persen, kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 64,98 persen. Dengan meningkatnya pelayanan air limbah maka tingkat kesehatan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

2.6. Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan

komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari perasana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat.

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

Fungsi saluran drainase yaitu :

- Mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.
- Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
- Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan.
- Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

Tabel 4.29
Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan di Jawa Timur (%)

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan	79,96	79,96	80,07

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Cakupan pelayanan drainase di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,14 persen, dengan rincian pada tahun 2015 sebesar 79,96 persen menjadi 80,07 persen pada tahun 2016. Dengan adanya sistem drainase di perkotaan maka akan diperoleh banyak manfaat pada kawasan perkotaan yang bersangkutan, yaitu akan semakin meningkatnya kesehatan, kenyamanan dan keasrian daerah pemukiman khususnya dan daerah perkotaan pada umumnya, dan dengan tidak adanya genangan air, banjir dan pembuangan limbah yang tidak teratur, maka kualitas hidup

penduduk di wilayah bersangkutan akan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman seluruh masyarakat.

2.7. Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan

Sampah merupakan masalah yang tak ada habisnya, semakin hari semakin menumpuk. Perbandingan antara jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan sampah yang diolah. Bertambahnya aktifitas manusia dan pertambahan jumlah penduduk, berpengaruh terhadap produksi sampah, akan tetapi ketersediaan ruang hidup manusia relatif tetap.

Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut, memberikan dampak sangat besar bagi manusia dan lingkungan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai, pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu bau yang tidak sedap akan memberikan efek buruk bagi daerah di sekitarnya.

Pengelolaan sampah meliputi proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Sampah yang sudah dikumpulkan, diangkut ke tempat penampungan sampah sementara (TPS). Pengangkutan sampah dari TPS ke tempat penampungan akhir (TPA) dilakukan oleh dinas kebersihan dengan sistem pembagian lokasi, setiap truk pengangkut sampah mempunyai tugas di wilayah tertentu.

Tabel 4.30
Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	82,96	82,96	71,97

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Cakupan capaian layanan persampahan di perkotaan tahun 2014 sebesar 82,96, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 71,97 persen. Pertambahan penduduk dan perubahan gaya

hidup masyarakat yang menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari, akan menjadikan penanganan sampah terasa bertambah sulit karena keterbatasan lahan untuk TPA. Namun demikian pembenahan masalah sampah, bukan hanya menjadi tugas pemerintah, kesadaran masyarakatpun sangat diperlukan. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan akan mendorong terciptanya wilayah yang sehat dan nyaman.

3. Perumahan

3.1. Persentase Rusun Terbangun

Tujuan Khusus Pembangunan Rumah Susun adalah untuk mengendalikan lajunya pembangunan rumah-rumah biasa yang banyak memakan lahan. Menurut UU No. 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun, tujuan Pembangunan Rumah Susun (Rusun) adalah:

- Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya.
- Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah didaerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang.
- Dengan semakin mahalnya harga tanah untuk pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST), maka pemerintah membangun hunian secara vertikal yaitu pembangunan Rusunawa, dan target pembangunan Rusunawa sampai dengan tahun 2025 di Jawa Timur sebesar 100%.

Tabel 4.31
Jumlah Rusun Terbangun di Jawa Timur

Indikator	Tahun (%)		
	2014	2015	2016
Persentase Rusun Terbangun	23,78	36,71	39,76

Sumber : PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Persentase rusun terbangun pada Tahun 2015 adalah sebesar 36,71% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 39,76% hal ini dikarenakan terpenuhinya pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 1 TB yaitu Rusunawa Gunung Anyar.

4. Perhubungan

4.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan LLAJ Prov. Jawa Timur

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sektor transportasi oleh Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2014 menggunakan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NOMOR 38 TAHUN 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik yang didalamnya terdapat 14 (Empat belas) unsur variable sebagai dasar penilaian yaitu Prosedur pelayanan (U1), Persyaratan pelayanan (U2), Kejelasan petugas pelayanan (U3), Kedisiplinan petugas pelayanan (U4), Tanggung jawab petugas pelayanan (U5), Kemampuan petugas pelayanan (U6), Kecepatan pelayanan (U7), Keadilan mendapatkan pelayanan (U8), Kesopanan dan keramahan petugas (U9), Kewajaran biaya pelayanan (U10), Kepastian biaya pelayanan (U11), Kepastian jadwal pelayanan (U12), Kenyamanan lingkungan (U13), Keamanan pelayanan (U14)

Tabel 4.32
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov Jawa Timur	85,88	73,02	77,71

Dasar Penilaian SKM	Permenpan RB 38 TAHUN 2012 (14 VARIABEL)	Permenpan RB 16 Tahun 2014 (9 VARIABEL)
---------------------	--	---

Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

Pada pengukuran IKM di tahun 2015-2016 terjadi perubahan dasar variable dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan 9 (sembilan) unsur variabel penilaian terdiri dari Persyaratan pelayanan (U1), Prosedur pelayanan (U2), Waktu pelayanan (U3), Biaya/Tarif pelayanan (U4), Produk Spesifikasi Jenis pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Maklumat Pelayanan (U8), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9). Maklumat pelayanan terkait layanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang pada tahun 2016 belum dipublikasikan seluruhnya pada Jembatan Timbang di Provinsi Jawa Timur, sehingga berpengaruh terhadap variabel penilaian Indeks Kepuasan masyarakat. Maklumat pelayanan dimaksud merupakan bentuk komitmen yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, pengaduan dan melakukan pengawasan. Namun secara umum, penilaian indeks kepuasan masyarakat terus mengalami peningkatan sesuai dengan dasar penilaian Survey Kepuasan Masyarakat yang digunakan setiap tahunnya.

4.2. Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha/WTN dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota

Penghargaan WTN adalah penghargaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagai perwujudan pembinaan pemerintah dalam menata transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan.

Jawa Timur merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang menerima Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana, penghargaan ini diberikan kepada provinsi yang telah lima kali berturut – turut memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama.

Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. Disamping kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan.

Tabel 4.33
Prosentase Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota

NO	JENIS PENGHARGAAN	SATUAN	TAHUN		
			2014	2015	2016
1	Plakat Wahana Tata Nugraha	Kab/kota	1	8	2
2	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas	Kab/kota	21	18	17
3	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Angkutan	Kab/kota	2	-	1
4	Piala Wahana Tata Nugraha	Kab/kota	-	1	10
5	Piala Wahana Tata Nugraha Wira Karya	Kab/kota	-	-	-
JUMLAH KAB/KOTA BERPREDIKAT WTN		Kab/kota	24	27	30
JUMLAH KAB/KOTA DI JAWA TIMUR		Kab/kota	38	38	38
% KAB/KOTA BERPREDIKAT WTN DI JAWA TIMUR		Kab/kota	63%	71%	78%

Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah Kabupaten / Kota Jawa Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 71% dan pada tahun 2016 sebesar 78%, mengalami peningkatan sebesar 7,41%.

4.3. Jumlah Alarm Early Warning System terpasang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jawa Timur) melalui Dinas Perhubungan telah mengembangkan sistem peringatan dini EWS (*Early Warning System*) di perlintasan rel kereta api (KA) yang tidak berpalang pintu di seluruh perlintasan kerete api di Jawa Timur. Pemasangan sistem

peringatan dini ini merupakan solusi untuk menekan tingginya angka kecelakaan diperlintasan rel kereta api.

Tabel 4.34
Perkembangan Alarm Early Warning System Terpasang (Titik)

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
Daop 7 Madiun	73	92	104
Daop 8 Surabaya	55	68	80
Daop 9 Jember	60	76	86
Total	188	236	270

Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

Perkembangan *alarm early warning system* (AEWS) terpasang di perlintasan rel kereta api Jawa Timur selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 188 titik (2014); 236 titik (2015); dan 270 titik (2016). Sedangkan untuk jumlah pemasangan AEWS tertinggi ada di Daop 7 Madiun dan terendah di Daop 8 Surabaya.

5. Penataan Ruang

5.1. Rasio Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dari tahun 2014 hingga tahun 2015, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) yang telah disusun adalah 21 RTR KSP. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Tabel 4.35
Rasio Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Rasio jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi (%)	43,58	53,85	70,27

Sumber : PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2013, telah tersusun 12 RTR KSP dari 39 RTR KSP di Jawa Timur yang harus disusun dengan persentase 30,77 persen. Pada tahun 2014, telah tersusun 17 RTR KSP, bertambah 5 KSP sehingga persentase menjadi 43,58 persen. Dan tahun 2015 telah tersusun 21 RTR KSP bertambah 4 KSP sehingga persentase menjadi 53,85 persen dan pada tahun 2016 persentasenya meningkat menjadi 70,27 persen. Dengan meningkatnya jumlah RTR kawasan strategis diharapkan berkembangnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta pelestarian terhadap lingkungan dapat terjaga.

5.2. Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota

Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota merupakan tindak lanjut dari RTRW kabupaten/kota sebagai alat kendali dan operasionalisasi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari tahun 2014 hingga tahun 2015, terdapat 22 Raperda Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang telah mendapat Persetujuan Substansi Gubernur.

Tabel 4.36
Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	6	16	15

Sumber : PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Setiap tahun, target Persetujuan Substansi Raperda RRTR Kabupaten/Kota adalah 7 RRTR. Pada tahun 2014 terdapat 6 RRTR, dan tahun 2016 jumlah RRTR yang telah mendapat Persetujuan Substansi Gubernur meningkat lagi menjadi 15 RRTR Kabupaten/Kota.

5.3. Prosentase Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang

Petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan perencanaan tata ruangnya.

Tabel 4.37
Prosentase Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Prosentase Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang (%)	10	10	63,63

Sumber : PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Pada Tahun 2014 capaian prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang mencapai 10 persen. Dan pada tahun 2015 telah diselesaikan 2 Rapergub NSPK pemanfaatan ruang. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 Dinas PU Cipta Karya lebih fokus dalam proses penerbitan Persetujuan Substansi RTR Kawasan Strategis Provinsi sehingga capaian prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang tahun 2015 mencapai 10 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 persentasenya meningkat menjadi 63,63 persen.

5.4. Presentase Kasus Mediasi Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang perlu dilakukan mediasi agar terwujud pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruangnya.

Tabel 4.38
Presentase Kasus Mediasi Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Presentase Kasus Mediasi Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang (%)	100	100	100

Sumber : PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2014 dan tahun 2015 terdapat masing-masing 2 kasus pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yaitu Kegiatan Pembangunan Pabrik Baja di sekitar situs candi di Trowulan Kab. Mojokerto dan Kegiatan Pembangunan Pergudangan dan Toko Sempadan Sungai Brantas di Wringin Anom Kab. Gresik pada tahun 2014, sedangkan tahun 2015 adalah Kegiatan Pembangunan Ruko di sekitar Jembatan

Suramadu sisi Surabaya dan Kegiatan Pembangunan Gudang dan Workshop Kerajinan Kayu di Kabupaten Probolinggo. Masing-masing kasus tersebut telah dilakukan mediasi dan dapat terselesaikan.

6. Lingkungan Hidup

6.1. Penurunan beban pencemaran (BOD dan COD)

Semua makhluk hidup membutuhkan suatu zat, yang namanya air. Air merupakan sumber kehidupan dan akan sangat berbahaya jika air mendadak menghilang. Ada banyak fungsi yang kita butuhkan dari air seperti untuk minum, mandi, mencuci, irigasi dan lainnya. Air yang harus dikonsumsi oleh manusia dan makhluk hidup lainnya juga merupakan air yang bersih dengan warna jernih dan juga tidak menimbulkan bau. Namun ironisnya saat ini dimana pertumbuhan penduduk semakin pesat dan juga bersamaan tumbuhnya sektor perindustrian membuat air banyak tercemar oleh berbagai polutan.

Pencemaran air merupakan keadaan di mana adanya berbagai zat asing yang masuk ke dalam air dan itu bersifat merusak atau bahan tersebut lebih dikenal sebagai polutan. Sesuai perkembangan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan industri di DAS Brantas, pada saat ini potensi industri terdapat ± 1.004 buah dengan jumlah industri yang potensi pencemar ± 483 buah, di kali Surabaya 65 industri dan DAS Brantas 33 industri. Umumnya sumber pencemar berasal dari limbah domestik sebesar 50%, limbah industri sebesar 40 %, limbah pertanian dan lainnya sebesar 10%.

Tabel 4.39
Penurunan beban pencemaran (BOD dan COD) di Jawa Timur

Parameter (mg/l)	Tahun		
	2014	2015	2016
BOD (Biological Oxygen Demand)	4,27	4,14	4,52
COD (Chemical Oxygen Demand)	12,45	11,88	12,11

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

Selama periode 2014-2016, kualitas air sungai mengalami perbaikan di tahun 2015 dan kembali menurun kualitasnya di tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dari konsentrasi BOD yang menurun dari 4,27 mg/l menjadi 4,14 mg/l di tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 4,52 di tahun 2016. Demikian halnya dengan konsentrasi COD yang mengalami penurunan dari 12,45 mg/l menjadi 11,88 mg/l di tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 12,11 mg/l di tahun 2016. Namun jika dilihat dari konsentrasi BOD dan COD, dapat dicermati bahwa konsentrasi BOD dan COD pada tahun 2016 lebih tinggi dari pada tahun 2015, yang berarti bahwa terdapat penurunan kondisi kualitas air. Penurunan kualitas air sungai untuk parameter BOD disebabkan karena makin banyaknya limbah domestik yang dibuang ke sungai, sedangkan untuk parameter COD disebabkan karena meningkatnya jumlah industri yang belum tertangani.

6.2. Cakupan penghijauan (konservasi) sumber mata air (titik)

Mata air menjadi sumber utama masyarakat mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci dan juga irigasi. Namun akhir-akhir ini banyak daerah di Indonesia mengalami kekeringan pada musim kemarau karena sumber air yang mengering.

Berkurangnya daerah serapan air karena pembangunan dan juga kerusakan vegetasi di daerah tangkapan air menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya sumber air. Selain itu peningkatan jumlah penduduk meningkatkan konsumsi air bersih. Melihat permasalahan tersebut diperlukan adanya pemeliharaan terhadap sumber air untuk menjamin ketersediaannya bagi berbagai macam kebutuhan manusia.

Tabel 4.40
Cakupan penghijauan (konservasi) sumber mata air (titik)

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Cakupan penghijauan (konservasi) sumber mata air (titik)	5	5	6

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya merehabilitasi lingkungan yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam adalah melakukan konservasi terhadap mata air yang mengalami penurunan debit air atau mata air yang sudah mati. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Demplot Pelestarian Sumber Mata Air dengan Vegetasi. Pada tahun 2016 ditargetkan ada 5 (lima) daerah yang terkonsumsi dan terealisasi sebanyak 6 (enam) lokasi, yaitu:

- Ds. Giriharjo, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi;
- Ds. Ketandan, Kec. Dagangan, Kab. Madiun;
- Ds. Trosono, Kec. Parang, Kab. Magetan;
- Ds. Ngliman, Kec. Sawahan, Kab. Nganjuk;
- Ds. Tawangsari, Kec. Pujon, Kab. Malang;
- Ds. Balerejo, Kec. Wlingi, Kab. Blitar.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini di tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 1 (satu) titik (120%) apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2015. Selama periode 2014 – 2016, secara bertahap melakukan peningkatan jumlah lokasi kegiatan demplot dalam rangka perlindungan sumber mata air, terutama di sepanjang wilayah DAS Brantas. Hal ini didasarkan pada semakin kritisnya sumber mata air di wilayah tersebut.

6.3. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (Kewenangan Prov)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. Amdal bukan suatu proses yang berdiri sendiri melainkan bagian dari proses amdal yang lebih besar dan penting, menyeluruh dan utuh dari perusahaan dan lingkungannya, sehingga amdal dapat dipakai untuk mengelola dan memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang benar.

Tabel 4.41
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (kewenangan Prov) (%)	73	69.56	74,21

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan dokumen izin lingkungan/amdal. Pada tahun 2016 target jumlah industri dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang diawasi sebanyak 260 dan dapat terealisasi 159 perusahaan atau capaian sebesar 61,15 %. Dari hasil pengawasan yang dilakukan diperoleh hasil sebanyak 118 perusahaan yang tergolong taat dan 41 perusahaan belum taat atau sebesar 74,21% cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Apabila dibandingkan dengan capaian perusahaan yang taat tahun 2015, maka jumlah perusahaan yang taat mengalami peningkatan di tahun 2016.

Selama tahun 2014 hingga 2016 terus dilakukan peningkatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh industri dan/atau kegiatan. Tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan ketaatan industri terhadap pelaksanaan dokumen amdal.

6.4. Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup Dengan Sanksi Administrasi

Ekspansi ekonomi yang dilakukan sebagai upaya memacu pertumbuhan tidak menutup kemungkinan meningkatkan resiko pencemaran lingkungan. Akibat tersebut memberikan dampak pada menurunnya kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya mengatasinya dengan penyelesaian kasus Lingkungan hidup dengan sanksi administrasi.

Tabel 4.42
Persentase penyelesaian kasus LH dg sanksi administrasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Persentase penyelesaian kasus LH dg sanksi administrasi (%)	100	100	100

Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2016 persentase tidak lanjut pengaduan masyarakat yang masuk akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diterima sebesar 49 pengaduan dan sudah ditindaklanjuti secara keseluruhan atau sudah 100 (%). Dari 49 pengaduan yang masuk, 2 diantaranya merupakan kewenangan pemerintah pusat, 21 kewenangan provinsi dan 24 sisanya merupakan kewenangan kabupaten/kota. Apabila dibandingkan dengan capaian persentase penyelesaian kasus LH dengan sanksi administratif tahun 2015 (100%), maka tingkat kemajuan tahun 2016 adalah 100%. Dari hasil rekomendasi penyelesaian kasus pengaduan, terdapat 4 kasus pencemaran yang kurang mendapat respon pelaku usaha sehingga dilakukan koordinasi antar instansi terkait untuk ditetapkan sanksi administrasi. Penerapan sanksi ini diharapkan meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Keempat kasus lingkungan yang telah diselesaikan dengan sanksi administrasi diberikan kepada :

- PT. Seng fong Moulding Perkasa (Kabupaten Jombang) dan rekomendasinya disampaikan ke Bupati Jombang;
- CV. Logam Jaya Sakti (Kabupaten Mojokerto) dan rekomendasinya disampaikan ke Bupati Mojokerto;
- PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (Kabupaten Gresik) dan rekomendasinya disampaikan ke Bupati Gresik;
- UD. Varia Indo Prima (Kabupaten Jombang), rekomendasinya disampaikan ke Bupati Jombang.

7. Ketenagakerjaan

7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

Berdasarkan data BPS Agustus 2016 (hasil Sakernas 2016), jumlah Angkatan Kerja (penduduk 15 tahun ke atas) sebanyak 19,95 juta orang. Dari jumlah Penduduk Usia Kerja tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerjanya sebesar 66,14 persen.

Tabel 4.43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,12	67,84	66,14

Sumber: BPS Jawa Timur

Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 66,14 persen penduduk Jawa Timur yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 33,86 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia). Kondisi kesehatan di Jawa Timur yang relatif semakin baik membuat angka harapan hidup di Jawa Timur semakin meningkat dan membuat jumlah lansia semakin bertambah. Di sisi lain, peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

7.2. Indeks Pembangunan Gender/IPG

Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata.

Tabel 4.44
Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016*)
Indeks Pembangunan Gender	90,83	91,07	91,77

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : *) Angka Sementara

Pada tahun 2014, IPG mencapai 90,83, Kondisi ini semakin membaik pada tahun 2016, mencapai 91,77 (angka sementara). Semakin naiknya angka IPG Jawa Timur, mengindikasikan program pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Daerah Jawa cukup berhasil. Perempuan di Jawa Timur tampil percaya diri dalam perannya terhadap perekonomian Jawa Timur. Kenaikan IPG ini didukung meningkatnya AHH perempuan, angka harapan lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita per tahun perempuan. Dengan demikian, SDM perempuan di Jawa Timur dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, dan ini sangat menguntungkan Jawa Timur dalam menata perekonomiannya ke depan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki-lakinya, juga ditopang oleh peran perempuan di daerah tersebut.

7.3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Tabel 4.45
Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016*)
Indeks Pemberdayaan Gender	68,17	68,41	68,64

Sumber : BPPKB Provinsi Jawa Timur

Keterangan :*) Angka Sementara

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2015 sebesar 68,41 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 68,64. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender.

8. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

8.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum dan berlandaskan berdasarkan asas kekeluargaan dan juga asas demokrasi ekonomi serta terdiri dari beberapa anggota didalamnya. Koperasi merupakan salah satu kegiatan organisasi ekonomi yang bekerja dalam bidang gerakan potensi sumber daya yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Sedangkan Koperasi Aktif adalah koperasi dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 4.46
Persentase Koperasi Aktif di Jawa Timur

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
Jumlah Koperasi	30.866	31.182	31.200
Jumlah Koperasi Aktif	27.156	27.472	27.490
Persentase Koperasi Aktif	87,98	88,10	88,10

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan ekonomi karena kegiatan usaha koperasi lebih banyak berhubungan langsung dengan ekonomi kerakyatan. Persentase koperasi aktif di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (2014-2016) mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 persentase koperasi aktifnya sebesar 87,93 persen, meningkat pada tahun 2015 menjadi 88,10 persen dan pada tahun 2016 tidak mengalami perubahan dengan rincian dari jumlah total 31.200 unit koperasi terdapat 27.490 unit koperasi yang aktif.

8.2. Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dimaksudkan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Dengan semakin bertambahnya minat serta kemampuan untuk berwirausaha dan daya saing koperasi dan UMKM, maka diharapkan mampu menjadi penggerak roda perekonomian berbasis kemasyarakatan di Jawa Timur.

Tabel 4.47
Pertumbuhan Wirausaha Baru di Jawa Timur

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	4	10	9,25

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan program ini antara lain Fasilitasi pemberdayaan UMKM melalui Inkubator bisnis, pada Tahun 2014 diproksikan jumlah Wirausaha baru sekitar 635 UMKM dan pada Tahun 2013 diproksikan jumlah Wirausaha baru sekitar 610 UMKM. Sehingga pertumbuhan wirausaha baru pada Tahun 2014 adalah 4 persen didapat dari penambahan WUB di tahun 2014 sebesar 35 WUB dibagi jumlah WUB tahun 2013. Pada tahun 2015, jumlah wirausaha baru bertumbuh 10 persen dan tahun 2016 menjadi 9,25 persen

8.3. Rasio Perputaran Modal Kopwan

Program pembentukan Koperasi Wanita (Kopwan) dimulai sejak tahun 2009 dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan dan kredit usaha dengan memberikan modal awal sebesar Rp. 25 juta per kelompok wanita di setiap desa/kelurahan. Sampai dengan tahun 2010 sudah terbentuk 8.506 Kopwan di setiap Desa/Kelurahan. Selanjutnya tahun 2011-2014, diberikan bantuan perkuatan permodalan kembali untuk koperasi yang berkinerja baik.

Tabel 4.48
Rasio Perputaran Modal Kopwan

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
Rasio Perputaran Modal Kopwan	1,39	2,1	2,2

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2016 Kinerja Usaha Simpan Pinjam Koperasi Wanita penerima hibah sejumlah 8.506 Unit, jumlah Anggota 525.941 Orang, dengan total asset sebesar Rp.784.494.826.000,-, Sedangkan Volume pinjaman sebesar Rp.821.131.900.000,- atau mengalami perputaran 2,2 kali dari dana hibah dengan SHU sebesar Rp.56.571.220.000,-

9. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

9.1. Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumberdaya alam, kualitas sumber daya manusia, perubahan teknologi, kewirausahaan dan kecukupan modal. Sedangkan faktor eksternal diantaranya dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, tariff dasar listrik, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI Rate), kebijakan pemerintah pusat tentang penetapan besaran pajak dan perkembangan situasi perekonomian global.

Tabel 4.49
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Pertumbuhan Ekonomi	5,86	5,44	5,55

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tahun 2014-2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dasar tahun 2010 masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring dengan melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih bertahan pada level pertumbuhan 6,085,86 persen pad tahun 2014, melambat pada tahun 2015 menjadi 5,44 persen dan pada tahun 2016 menjadi 5,55 persen. Sedangkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.

9.2. Predikat Opini BPK

Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.50
Predikat Opini BPK

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Predikat Opini BPK	WDP	WTP	-

Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini dikarenakan masih ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki sehingga tidak ada lagi temuan yang masih berulang pada Temuan Sistem Pengendalian Intern serta Temuan Kepatuhan Perundangan – Undangan dalam pengelolaan keuangan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2015 Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan Untuk opini BPK Tahun 2016 belum dapat disampaikan karena masih dalam proses pemeriksaan sampai dengan bulan mei tahun 2017. Sebagaimana pada tahun sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK juga disampaikan di hadapan DPRD Provinsi Jawa Timur pada bulan Juni.

Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

1.1. Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB

Pertanian adalah sektor yang paling strategis, terutama sub sektor tanaman pangan, karena disamping paling banyak menyerap tenaga kerja juga merupakan sumber makanan pokok penduduk Indonesia. Dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pertanian memberikan sumbangan yang besar. Pemerintah cukup banyak membuat

kebijakan di sektor ini, dalam rangka mendukung kemajuan pembangunan sektor ini dalam hal peningkatan produksi, karena keberhasilan pembangunan sektor pertanian akan memberikan dampak yang sangat besar untuk seluruh masyarakat.

Tabel 4.51
Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan	2,98	3,13	1,66

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dari data PDRB tiga tahun terakhir, pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan (tanaman pangan) mengalami fluktuatif tiap tahun. Pada tahun 2014 tercatat mengalami pertumbuhan 2,98 persen, dan selanjutnya tumbuh sebesar 3,13 persen pada tahun 2015, dan mencapai 1,66 persen di tahun 2016. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selalu berupaya agar sub sektor tanaman bahan makanan ini bisa tumbuh semakin cepat tidak kalah dengan sub sektor lainnya.

1.2. Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB

Tanaman perkebunan terbagi menjadi tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat mencakup hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti jambu mete, kelapa, kopi, kapok, kapas, tebu, tembakau, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya. Sedangkan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seperti karet, teh, kopi, coklat, tebu, rami, serat manila dan tanaman lainnya. Pada tahun 2014 pertumbuhan sub sektor tanaman perkebunan tercatat sebesar 4,97 persen, kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 1,21 persen, dan kondisi pada tahun 2016 sebesar (-0,74) Persen.

Tabel 4.52
Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Sub Sektor Tanaman Perkebunan	4,97	1,21	-0,74

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

1.3. Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb. Pertumbuhan sub sektor peternakan selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 sub sektor peternakan hanya mampu tumbuh 1,15 persen dan kemudian meningkat menjadi 2,01 persen pada tahun 2015 serta pada tahun 2016 menjadi 3,11 persen.

Tabel 4.53
Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Sub Sektor Peternakan	1,15	2,01	3,11

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2. Kehutanan

2.1. Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan

berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan adalah jasa menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Tabel 4.54
Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Sub Sektor Kehutanan	0,12	4,43	-9,12

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2014 pertumbuhan sub sektor kehutanan sebesar 0,12 persen, selanjutnya pada tahun 2015 sub sektor kehutanan kembali tumbuh cukup baik sebesar 4,43 persen dan pada tahun 2016 menjadi (-9,12) persen

2.2. Rehabilitasi Kawasan Hutan (ha)

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Rehabilitasi hutan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Tabel 4.55
Rehabilitasi Kawasan Hutan Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Rehabilitasi Kawasan Hutan (Ha)	24.675,5	24.660,4	10.326

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2014 rehabilitasi kawasan hutan di Jawa Timur mencapai 24.675,5 ha, kemudian meningkat menjadi 24.660,4 ha pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 menjadi 10.326 Ha. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman, Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

2.3. Rehabilitasi lahan kritis (lokasi)

Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kemerosotan kesuburannya atau lahan yang dalam proses kemunduran kesuburan baik secara fisik maupun kimia dan biologi. Sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.

Tabel 4.56
Rehabilitasi Lahan Kritis Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Rehabilitasi Lahan Kritis (Lokasi)	5	5	6

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Lahan kritis memiliki kondisi lingkungan yang sangat beragam tergantung pada penyebab kerusakan lahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi lahan kritis menyebabkan tanaman tidak cukup mendapatkan air dan unsur hara, kondisi fisik tanah yang tidak memungkinkan akar berkembang dan proses infiltrasi air hujan, kandungan garam yang tinggi akibat akumulasi garam sekunder atau intrusi air laut yang menyebabkan plasmolisis, atau tanaman keracunan oleh unsur toksik yang tinggi. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia. Kegiatan Rehabilitasi Lahan dilaksanakan melalui kegiatan

Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman, atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis yang tidak produktif.

Upaya penanganan lahan kritis telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya pembinaan Menuju Provinsi Hijau (MPH) dan pelaksanaan demplot rehabilitasi lahan di 6 lokasi dengan total luas lahan yang terrehabilitasi sekitar 12 Ha. Jenis tanaman yang digunakan antara lain: durian montong, kelengkeng dan jambu merah. Lokasi/titik demplot rehabilitasi lahan berbasis masyarakat yang dilaksanakan tahun 2016 diantaranya:

- Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Desa Lembung, Kec. Galis, Kab. Pamekasan;
- Desa Selok Awar-Awar, Kec. Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Desa Penanggungan, Kec. Trawas, Kabupaten Mojokerto;
- Desa Ngampungan, Kec. Bareng, Kabupaten Jombang;
- Desa Gunungsari, Kec. Bourno, Kabupaten Bojonegoro.

2.4. Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (ha)

Reboisasi adalah penanaman kembali hutan atau kebun yang telah ditebang atau dalam kondisi tandus. Fungsi dari reboisasi sendiri adalah untuk mengembalikan kondisi alam dan ekosistem demi menjaga kualitas hidup manusia tetap baik. Dengan kondisi alam yang baik dan banyaknya pepohonan akan membantu penyerapan debu dan polusi, sehingga akan menangkal terjadinya pemanasan global dengan menangkap karbon dioksida di udara dan menjaga udara tetap segar dan bersih untuk manusia. Reboisasi hanya dilakukan di hutan atau lahan kosong atau gundul, sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundangan. Dengan demikian, membuat hutan baru pada area bekas tebang habis, tebang pilih, lahan gundul atau pada lahan kosong lainnya yang terdapat di dalam kawasan hutan itu termasuk ke dalam reboisasi.

Tabel 4.57
Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)	315	650	400

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

luas Tahura R. Soerjo yang dikonservasi Tahun 2016 seluas 400 Ha sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra seluas 400 Ha. Luas Tahura R. Soerjo yang dikonservasi pada Tahun 2015 sebesar 650 Ha dan pada Tahun 2016 sebesar 400 Ha (mengalami penurunan). Penurunan luas konservasi kawasan Tahura R. Soerjo Tahun 2016 dibanding Tahun 2015 karena adanya efisiensi anggaran yang dikelola oleh UPTD Tahura R. Soerjo.

2.5. Penurunan Luas kebakaran hutan (ha)

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki dampak negatif yang cukup dahsyat. Dampak kebakaran hutan diantaranya menimbulkan asap yang mengganggu aktifitas kehidupan manusia, antara lain mewabahnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut pada masyarakat, dan mengganggu sistem transportasi yang berdampak sampai ke negara tetangga. Dampak yang paling besar adalah musnahnya plasma nutfah yang berakibat pada kerusakan ekosistem lingkungan. Upaya pencegahan Kebakaran Hutan merupakan suatu usaha Perlindungan Hutan agar kebakaran hutan yang berdampak negatif tidak meluas. Kebakaran hutan yang terjadi adalah akibat ulah manusia maupun faktor alam.

Tabel 4.58
Penurunan Luas kebakaran hutan (ha)

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Penurunan Luas kebakaran hutan (ha)	10.876,7	1.950	214

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Gangguan hutan yang umumnya terjadi karena faktor alam adalah kebakaran hutan. Pada Tahun 2014 terjadi kebakaran hutan di Jawa

Timur seluas 10.876,7 Ha dan pada Tahun 2015 kebakaran hutan seluas 1.950 Ha dan Tahun 2016 luas kebakaran hutan seluas 214 Ha. Luas kebakaran hutan Tahun 2016 mengalami penurunan dibanding Tahun 2015 berkat kesadaran masyarakat yang peduli terhadap kelestarian hutan dan meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan bidang kehutanan

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1. Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu : pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

Tabel 4.59
Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB	3,11	7,92	14,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kinerja sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Tercatat pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 3,11 persen. Pada tahun 2015 sektor pertambangan dan penggalian kembali tumbuh cepat lebih dari dua kali tahun sebelumnya atau sebesar 7,92 persen dan terus meningkat pada tahun 2016 menjadi 14,18 persen.

3.2. Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI (ha)

Saat ini fenomena kerusakan lingkungan terjadi di seluruh sektor, salah satunya adalah sektor pertambangan. Pertambangan sebagai industri yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI.

Tabel 4.60
Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016*)
Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI (Ha)	985,65	974,15	-

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

Ket : *) Sesuai UU 23 tahun 2014, Kewenangan pengawasan berada pada Pemerintah Pusat

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan menjadikan adanya penurunan jumlah luas PETI dari tahun 2014 sebesar 985,65 Ha menjadi 974,15 Ha pada tahun 2015. Namun adanya pertumbuhan kegiatan pembangunan yang menuntut penyediaan bahan tambang (batuan) menyebabkan sulitnya untuk melakukan penertiban pertambangan tanpa izin di Jawa Timur. Selanjutnya untuk tahun 2016 capaian pertambangan tanpa ijin/Peti tidak ada (nihil) karena sesuai undang-undang 23 tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan di mana pengawasan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

3.3. Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI (Kab/Kota)

Pertambangan tanpa ijin atau yang dikenal dengan sebutan PETI merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini menimbulkan kerugian negara, terlebih permasalahan lingkungan yang ditimbulkan karena PETI karakteristiknya tidak mematuhi *good mining practice* sehingga menimbulkan eksekse seperti pencemaran lingkungan, pencemaran air dengan merkuri, tidak dilakukan reklamasi setelah pasca tambang dan sebagainya.

Tabel 4.61
Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI	245,28	474,97	-

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

Ket : *) Sesuai UU 23 tahun 2014, Kewenangan pengawasan berada pada Pemerintah Pusat

Pengurangan PETI dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertambah, yaitu dari 245,28 Ha pada tahun 2014 meningkat menjadi 474,97 Ha pada tahun 2015, hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan kesadaran masyarakat, penertiban yang dilakukan oleh kabupaten / kota dan adanya program percepatan perizinan pertambangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya untuk tahun 2016 capaian berkurangnya pertambangan tanpa ijin/Peti tidak ada (nihil) karena sesuai undang-undang 23 tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan di mana pengawasan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Pariwisata

4.1. Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB

Potensi wisata di Provinsi Jawa Timur masih mengundang daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara (wisman). Pertumbuhan berbagai sektor di Jawa Timur juga diikuti dengan pertumbuhan di sektor Jasa akomodasi, sektor ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Jawa Timur.

Yang dimaksud jasa akomodasi adalah hotel, dimana terbagi menjadi Hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya.

Tabel 4.62
Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Pertumbuhan Sub Sektor Hotel terhadap PDRB	15,18	6,99	7,74

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi dari sub sektor hotel atau pemberi akomodasi pada tahun 2014 mencapai 15,18 persen, kemudian tahun 2016 menurun menjadi 7,74 persen. Sub sektor hotel ini cukup menjanjikan. Beberapa tahun terakhir, pembangunan tempat-tempat akomodasi cukup marak di Jawa Timur. Selain itu diperlukan kebijakan para pelaku penyedia jasa pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta harus meningkatkan peranannya masing-masing, agar setiap wisman yang datang ke Jawa Timur semakin merasa nyaman. Saat ini juga semakin banyak muncul hotel-hotel berbintang baru dengan menawarkan harga yang menarik bagi konsumen.

4.2. Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB

Restoran adalah suatu jenis usaha bidang jasa pangan yang bertempat sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian, serta penjualan makanan dan minuman untuk umum. Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Tabel 4.63
Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Pertumbuhan Sub Sektor Restoran terhadap PDRB	8,12	7,81	8,58

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Seiring meningkatnya perkembangan ekonomi Jawa Timur, sub sektor restoran juga berkembang cukup baik. Pada tahun 2014 sub sektor restoran tumbuh 8,12 persen. Pada tahun 2016 sub sektor ini mengalami peningkatan menjadi 8,58 persen. Dari angka dua tahun terakhir ini, dapat disimpulkan bahwa sub sektor restoran ini perlu ditingkatkan mengikuti semakin berkembangnya kebutuhan makanan saji dalam masyarakat.

5. Kelautan dan Perikanan

5.1. Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

Potensi Perikanan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengelolaan serta pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan. Sub kategori perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah).

Tabel 4.64
Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	6,87	5,71	5,06

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan sub sektor perikanan pada tahun 2014 sebesar 6,87 persen, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 5,71 persen dan pada tahun 2016 menjadi 5,06 persen. Cuaca yang ekstrim dan tidak menentu, diduga menyebabkan perlambatan pertumbuhan pada sub sektor ini.

6. Perdagangan

6.1. Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Secara geografis Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis sebagai transit antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, sehingga tidak mengherankan jika lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur. Lapangan usaha kategori ini merupakan salah satu tulang punggung utama perekonomian Jawa Timur.

Tabel 4.65
Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB	5,01	5,55	5,84

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Sektor unggulan Jawa Timur salah satunya adalah perdagangan. Menurut PDRB tahun dasar baru atau 2010, Kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan seperti menguatnya mata uang dolar dan ketidak stabilan harga minyak dunia, berimbas pada pelemahan pertumbuhan pada tahun 2014 yang mencapai 5,01 persen. Beruntung pada tahun 2015 kinerja sektor ini kembali membaik dengan tumbuh 5,55 persen dan pada tahun 2016 menjadi 5,84 persen. Tingginya pertumbuhan sektor ini sangat dibutuhkan, karena terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhannya, semakin banyak tenaga kerja yang terserap.

7. Perindustrian

7.1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan.

Setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sektoral yang menjadi basis perekonomian dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Tak terkecuali Provinsi Jawa Timur yang menjadikan industri pengolahan sebagai basis pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pengembangan wilayah wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan kegiatan industri. Pengembangan wilayah wilayah tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (prime mover) juga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain.

Lapangan usaha kategori industri pengolahan memiliki peranan sangat strategis, disamping mampu menyerap tenaga kerja sangat besar, sektor ini dapat dilakukan ekspansi secara cepat. Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

Tabel 4.66
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	7,67	5,63	4,54

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Sektor ini merupakan loko perekonomian Jawa Timur dan mempunyai kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Jawa Timur. Pada tahun 2014 sektor ini mampu tumbuh sebesar 7,67 persen. Pada tahun 2015 sektor ini mengalami penurunan menjadi 5,63 persen dan tahun 2016 menjadi 4,54 persen. Pertumbuhan industri di Jawa Timur terutama didukung oleh wilayah-wilayah industri yang tersebar di kabupaten kota sekitar Surabaya seperti Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang.

III. ASPEK DAYA SAING DAERAH

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

1. Daya beli masyarakat/PPP (Rp. 000)

Daya beli masyarakat atau PPP (*Purchasing Power Parity*) merupakan salah satu indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). kemampuan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi terutama kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan). Kemampuan memenuhi kebutuhan secara ekonomi tercermin dari indeks PPP (*Purchasing Power Parity*) atau indeks daya beli. Semakin tinggi indeks ini, semakin baik daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Tabel 4.67
Daya beli masyarakat/PPP di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Daya beli masyarakat/ PPP	10.012,16	10.055,10	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Daya beli yang ditunjukkan dari angka pengeluaran per kapita pertahun yang disesuaikan menunjukkan mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2014 mencapai Rp. 10.012,16 kemudian tahun 2015 kembali naik menjadi Rp. 10.055,10. Dengan kondisi tersebut, mengindikasikan kesejahteraan penduduk Jawa Timur mengalami perbaikan.

2. Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan (Rp.)

Sebagai makhluk hidup, tentunya manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kebutuhan dasar manusia terhadap barang dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni kelompok makanan dan non makanan. Kebutuhan akan makanan pada batas tertentu bisa mencapai titik maksimal, namun untuk kebutuhan non makanan tidak ada batasnya. Tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan seseorang, salah satunya bisa diukur dari pola pengeluarannya. Seperti yang diuraikan dalam hukum Engel bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, sebaliknya proporsi untuk non makanan semakin meningkat.

Perkembangan kebutuhan/pengeluaran makanan penduduk Jawa Timur mulai tahun 2014-2015, dimana terlihat bahwa pengeluaran makanan penduduk Jawa Timur semakin meningkat, begitu juga pengeluaran untuk non makanan. Total Pengeluaran konsumsi per kapita per bulan pada tahun 2014 sebesar Rp. 374.580, selanjutnya meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 830.472. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adalah adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, yang pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 4.68
Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan (Rp.)	333.945	380.993	-
Pengeluaran konsumsi Non.pangan per kapita per bulan (Rp.)	340.635	449.479	-
Total Pengeluaran konsumsi per kapita per bulan (Rp.)	674.580	830.472	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

3. Pertumbuhan Investasi (Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB ADHK)

Salah satu indikator pertumbuhan investasi adalah PMTB. PMTB menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal yang dicatat dalam PMTB meliputi bangunan dan non bangunan. Pertumbuhan PMTB pada tahun 2014 sebesar 4,37 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 5,73 dan pada tahun 2016 PMTB tumbuh 6,02 persen, walaupun terjadi perlambatan pada realisasi PMA dan PMDN akan tetapi pertumbuhan PMTB cenderung didorong oleh pengadaan semen yang naik sebesar 13 persen dan impor barang modal naik 21 persen.

Tabel 4.69
Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB ADHK

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Pertumbuhan PMTB	4,37	5,73	6,02

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Lingkungan Hidup

1.1. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Keberhasilan pembangunan di Jawa Timur tentu tidak terlepas dari peran Ketersediaan pasokan daya listrik. Ketersediaan listrik bisa menjadi angin segar bagi pelaku bisnis dan industri untuk mengembangkan usahanya di Jawa Timur, karena dengan kondisi kelistrikan yang ada saat ini, bisa memberikan ruang gerak untuk para pelaku bisnis dan investor dalam memajukan usahanya tanpa rasa khawatir kekurangan atau defisit listrik.

Tabel 4.70
Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Rasio Ketersediaan Daya Listrik	83,60	86,68	88

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kebutuhan daya listrik dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan yang pesat, sehingga diperlukan perhitungan yang matang mengenai perencanaan untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya di Jawa Timur. Pengelolaan kelistrikan di Jawa Timur dilakukan oleh BUMN seperti Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Indonesia Power dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selanjutnya PLN yang mendistribusikannya kepada masyarakat/ instansi/ perusahaan/ lembaga swasta untuk berbagai keperluan. Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Pada tahun 2014 rasio elektrifikasi mencapai 83,60 persen, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 88 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 88 persen kebutuhan listrik sudah dikonsumsi/dinikmati oleh pelanggan, baik rumah tangga, swasta, industri, instansi, lembaga perusahaan lainnya. Selebihnya sebesar 12 persen adalah ketersediaan listrik yang diusahakan sendiri yang diusahakan untuk berbagai kepentingan baik swasta maupun masyarakat, termasuk yang masih dalam proses untuk bisa menikmati listrik bagi kehidupan sehari-hari.

1.2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

listrik pada saat ini merupakan kebutuhan pelengkap rumah tangga yang tidak bisa dielakkan, hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan tenaga listrik bahkan listrik dapat meningkatkan produktifitas penghuni rumah tersebut. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Disamping itu dengan tersedianya listrik dapat meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

Tabel 4.71
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	99,70	99,87	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pengguna listrik di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan, pada tahun 2014 rumah tangga pengguna listrik mencapai 99,70 persen dan tahun 2015 meningkat menjadi 99,87 persen. Ini memberikan gambaran bahwa pelayanan akan listrik di Jawa Timur semakin baik dan hampir bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun demikian masih menyisakan sekitar 0,13 persen rumah tangga di Jawa Timur yang belum bisa menikmati listrik, hal ini dikarenakan kondisi geografis Jawa Timur khususnya di Pulau Madura yang merupakan wilayah kepulauan memang kemungkinan secara sarana dan prasarana sulit untuk dialiri listrik.

1.3. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Air merupakan salah satu dari kebutuhan dasar makhluk hidup. Dalam kebutuhan sehari-hari air digunakan untuk minum, masak dan keperluan mandi dan cuci. Air yang dikonsumsi tentunya harus memenuhi standar kesehatan seperti tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau.

Tabel 4.72
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	95,52	95,21	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat urgent karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah

tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit cholera, typhus, disentri dan penyakit kulit. Rumah tangga yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 95,20. Jadi dalam hal ini pada tahun 2015 masih ada sekitar 5 persen rumah tangga yang masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1. Angka kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Tabel 4.73
Angka kriminalitas di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Angka kriminalitas	3,57	2,67	-

Sumber : Polda Jawa Timur

Berdasarkan data Polda Jawa Timur, angka kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000 penduduk. Pada tahun 2014, angka kriminalitas sebesar 3,57 persen dan pada tahun 2015 menurun menjadi 2,67 persen. Angka

kriminalitas sebesar 2,67 menunjukkan bahwa terjadi hampir 3 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya.

2. Pertanian

2.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan factor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Rata-rata NTP Jawa Timur tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,20 persen dibanding tahun 2015 yaitu dari 104,84 menjadi 104,62. Penurunan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (4,81 persen) lebih kecil dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (5,03 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2016, secara umum masih lebih rendah dibanding kondisi tahun 2015.

Tabel 4.74
Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
NTP Jawa Timur	104,75	104,84	104,62
NTP Tanaman Pangan	99,57	100,34	102,05
NTP Hortikultura	104,87	103,85	103,73
NTP Perkebunan	103,72	101,28	100,02
NTP Peternakan	111,17	111,35	106,09
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	106,68	105,63	106,09

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
NTN	106,54	106,68	111,83

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Rata-rata NTN Jawa Timur tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 4,82 persen dibanding tahun 2015 yaitu dari 106,68 menjadi 111,83. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan rata-rata indeks harga yang diterima nelayan (6,35 persen) lebih besar dari kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan (1,45 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2016 secara umum masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2015.

d. Fokus Sumber Daya manusia

1. Ketenagakerjaan

1.1. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk berusia 15-64 tahun, dan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Tabel 4.75
Rasio Ketergantungan di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Rasio Ketergantungan	44,50	44,22	43,97

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2016, angka *dependency ratio* untuk Jawa Timur sebesar 43,97 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka *dependency ratio* menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendah beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Angka *dependency ratio* laki-laki lebih rendah dibanding angka *dependency ratio* perempuan, artinya bahwa beban tanggungan penduduk perempuan usia produktif lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi)

Tabel 4.76
Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,64	0,61	0,59

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Tahun 2014 jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 38,61 juta jiwa, meningkat hingga mencapai 39,07 juta jiwa pada tahun 2016. Sedangkan pertumbuhan penduduknya cenderung melambat, yaitu dari 0,64 persen pada tahun 2014 menjadi 0,59 persen tahun 2016.

1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Sedangkan pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Tabel 4.77
Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19	4,47	4,21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2014 sebesar 4,19 persen, kemudian meningkat menjadi 4,47 persen tahun 2015 dan kondisi tahun 2016 kembali menurun menjadi 4,21 persen. Sedangkan untuk tingkat partisipasi angkatan kerjanya (TPAK) sebesar 66,14 persen dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 19,95 juta orang.

1.4. Indeks Pembangunan Gender

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Tabel 4.78
Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016*)
Indeks Pembangunan Gender	90,83	91,07	91,77

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : *) Angka Sementara

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Angka Indeks pembangunan gender (IPG) di Jawa Timur menunjukkan perbaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2016 (angka sementara) Indeks pembangunan gender (IPG) sebesar 91,77, kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar 90,83.

1.5. Indeks Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel 4.79
Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2014	2015	2016*)
Indeks Pemberdayaan Gender	68,17	68,41	68,64

Sumber : BPPKB Provinsi Jawa Timur

*Keterangan : *) Angka Sementara*

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi ketiga komponen tersebut. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 68,17, selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 68,64 pada tahun 2016.